



# RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

*“Meningkatkan Pertumbuhan  
Ekonomi Masyarakat dan Daya  
Saing Daerah yang Didukung  
Perbaikan Kualitas Infrastruktur  
dan Konektivitas berbasis  
Pemerataan Berkelanjutan”*

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
KABUPATEN LAHAT  
TAHUN 2021**





BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4);

## M E M U T U S K A

N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat
3. Bupati adalah Bupati Lahat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

### BAB II PENETAPAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

**BAB III  
SISTEMATIKA  
Pasal 3**

RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**Pasal 4**

Ketentuan mengenai rincian RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 07 Juli 2021

**BUPATI LAHAT,**



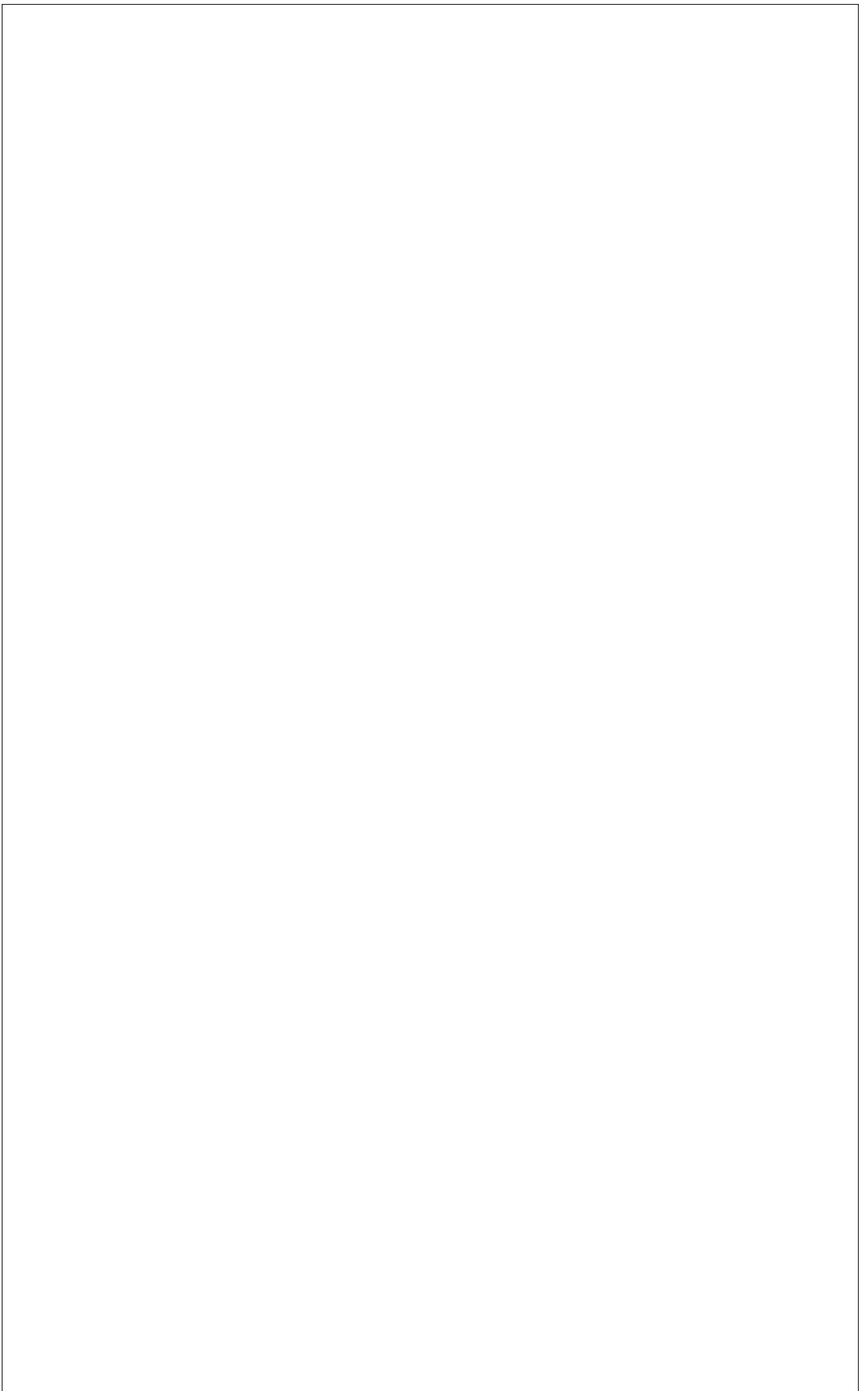
Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 07 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deswan Irsyad', written over a faint, illegible stamp or watermark.

H. DESWAN IRSYAD, M.Pdi

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR 24



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menguraikan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 berupa usulan program/kegiatan yang bersumber dari seluruh lapisan masyarakat/stakeholder, evaluasi dan capaian yang diraih pada tahun sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lahat. Pada RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 mengambil tema "***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing Daerah yang Didukung Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Berbasis Pemerataan Berkelanjutan***".

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan tahapan pembangunan selanjutnya sesuai aturan yang berlaku.

Lahat, Juli 2021

**Penyusun**

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I.4
1.3. Hubungan antar Dokumen.....	I.6
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I.12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I.14
1.6. Pendekatan Penyusunan RKPD.....	I.16
1.7. Rujukan Kebijakan.....	I.21
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II.1</b>
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II.1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II.148
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.157
<b>BAB III    KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III.1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.36
3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III.53
<b>BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV.2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 .....	IV.11



BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V.1
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	V.1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	V.30
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI.1
BAB VII	PENUTUP .....	VII.1
LAMPIRAN		

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Lahat.....	.....II.3
Grafik 2.2. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	.....II.33
Grafik 2.3. IPM Kabupaten Lahat Tahun 2017-2020.....	.....II.35
Grafik 2.4. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.....	.....II.48
Grafik 2.5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.....	.....II.49
Grafik 2.6. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.....	.....II.51
Grafik 2.7. Angka Harapan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016-2020.....	.....II.54
Grafik 2.8. Angka Kematian Bayi Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.....	.....II.55
Grafik 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.....	.....II.97
Grafik 2.10. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017.....	.....II.141

Grafik 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional Tahun 2014-2020.....	III.4
Grafik 3.2.	Struktur PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2019.....	III.5
Grafik 3.3.	Sumber Kontraksi PDRB Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 Menurut Pengeluaran (%).....	III.6
Grafik 3.4.	Struktur PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Sumatera Selatan Tahun 2019.....	III.7
Grafik 3.5.	Sumber Kontraksi Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 Menurut Lapangan Usaha (%).....	III.7
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (%).....	III.9
Grafik 3.7	Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah).....	III.16
Grafik 3.8	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global/Dunia 2021.....	III.31
Grafik 4.1.	Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (%).....	IV.65
Grafik 4.2.	Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi (%).....	IV.67
Grafik 4.3.	Luas Wilayah Kecamatan Kota Agung.....	IV.69

Grafik 4.4.	Luas Wilayah Kecamatan Mulak Ulu.....	IV.71
Grafik 4.4.	Luas Wilayah Tanjung Tebat.....	IV.74
Grafik 4.17.	Luas Wilayah Kecamatan Mulak Ulu.....	IV.73
Grafik 4.19.	Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Tebat .....	IV.75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD .....	I.4
Gambar 1.2.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	I.7
Gambar 1.3.	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran .....	I.7
Gambar 1.4.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.....	I.18
Gambar 1.5.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	I.18
Gambar 1.6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat .....	I.18
Gambar 1.7	Musrenbang RKPD Kabupaten Lahat.....	I.19
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Lahat .....	II.2
Gambar 2.2.	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat .....	II.3
Gambar 2.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2020.....	II.13
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW. I-2021 .....	III.3
Gambar 4.1.	Konsep Perencanaan Pembangunan Kab. Lahat.....	IV.1
Gambar 4.2.	Tahapan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 .....	IV.4
Gambar 4.3.	Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022.....	IV.10
Gambar 4.4	Gambaran Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024.....	IV.23
Gambar 4.5	Pencapaian Target Pembangunan Nasional .....	IV.24
Gambar 4.6	Prinsip Money Follow Program .....	IV.25

---

Gambar 4.7	Penyelarasan Target Pembangunan Nasional dan Daerah .....	IV.25
Gambar 4.8	Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah.....	IV.26
Gambar 4.9	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 Dengan Prioritas Dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	IV.29
Gambar 4.10	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 Dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022.....	IV.37
Gambar 4.11	Tata Ruang Kabupaten Lahat 2012-2032.....	IV.63
Gambar 4.12	Struktur Konektivitas antar Kecamatan di Kabupaten Lahat.....	IV. 64
Gambar 4.13	Peta Kecamatan Tanjung Sakti Pumu .....	IV.66
Gambar 4.14	Peta Kecamatan Tanjung Sakti Pumi .....	IV.66
Gambar 4.15	Peta Kecamatan Kota Agung.....	IV.69
Gambar 4.16	Peta Kecamatan Mulak Ulu.....	IV.71
Gambar 4.17.	Peta Kecamatan Tanjung Tebat .....	IV.72
Gambar 4.18.	Peta Kecamatan Pulau Pinang.....	IV.75
Gambar 4.19.	Peta Kecamatan Pagar Gunung .....	IV.77
Gambar 4.20.	Peta Kecamatan Gumay Ulu.....	IV.80
Gambar 4.21.	Peta Kecamatan Jarai .....	IV.81
Gambar 4.22.	Peta Kecamatan Pajar Bulan.....	IV.82

---



Gambar 4.23.	Peta Kecamatan Muara Payang.....	IV.84
Gambar 4.24.	Peta Kecamatan Suka Merindu.....	IV.86
Gambar 4.25.	Peta Kecamatan Kikim Barat.....	IV.87
Gambar 4.26	Peta Kecamatan Kikim Timur .....	IV.89
Gambar 4.27.	Peta Kecamatan Kikim Selatan.....	IV.91
Gambar 4.28.	Peta Kecamatan Kikim Tengah .....	IV.92
Gambar 4.29.	Peta Kecamatan Lahat.....	IV.94
Gambar 4.30.	Peta Kecamatan Gumay Talang.....	IV.97
Gambar 4.31.	Peta Kecamatan Pseksu.....	IV.99
Gambar 4.32	Peta Kecamatan Merapi Barat.....	IV.101
Gambar 4.33	Peta Kecamatan Merapi Timur.....	IV.102
Gambar 4.34	Peta Kecamatan Merapi Selatan.....	IV.105

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan semakin meningkatnya daya saing daerah serta semakin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Lahat mulai Tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat seperti yang dialami juga oleh semua daerah di Indonesia, bahkan dunia. Pandemi covid-19 yang mulai masuk dan terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lahat telah mempengaruhi beberapa aspek pembangunan, perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengendalikan pandemi covid-19 melalui berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara

bertahap. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin akan berlanjut hingga tahun 2022, karena itu sesuai arahan presiden, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi covid-19 juga dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 3 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam memenuhi amanat undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Lahat 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, Dokumen RPJMD Tahap I Tahun 2005-2009, dokumen RPJMD Tahap II Tahun 2009-2013, dokumen RPJMD Tahap III Tahun 2013-2018 dan dokumen RPJMD Tahap IV Tahun 2019-2023 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dijabarkan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, sedangkan RPJMD dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pembangunan Kabupaten Lahat berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 merupakan tahapan ke-IV pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lahat dengan tema "**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan**" yaitu :

- Pembangunan Manusia dan Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur
- Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- Penguatan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya
- Stabilitas Keamanan dan Tata Kelola Pemerintah

RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 dengan arah kebijakan di tahun 2022 yaitu *Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing Daerah, yang didukung perbaikan infrastruktur dan konektivitas berbasis pemerataan berkelanjutan*.

Pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dari level yang terbawah sebagai bentuk kepedulian dan cerminan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi semua tahapan perencanaan pembangunan, yang dimulai dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih bersifat penjangkaran usulan program kegiatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan. Selanjutnya hasil pembahasan yang telah disusun pada Musrenbang Kecamatan tersebut merupakan bahan masukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD) untuk disinkronkan dengan program kegiatan Perangkat Daerah sehingga menghasilkan usulan perencanaan yang sudah bersifat terpadu,

mencakup seluruh bidang kewenangan dan fungsi program kegiatan pembangunan dari Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 disusun melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* serta politik, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Adapun tahapan pelaksanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 yang telah dilaksanakan dapat dilihat gambar 1.1.



**Gambar 1.1**  
**Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD**

## I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

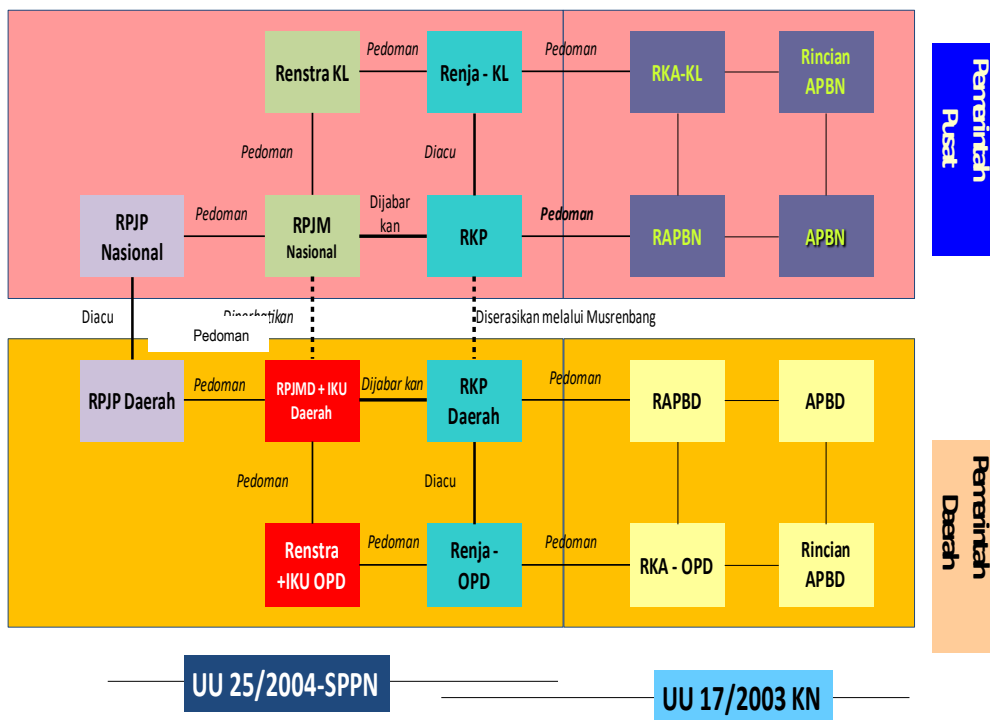


Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

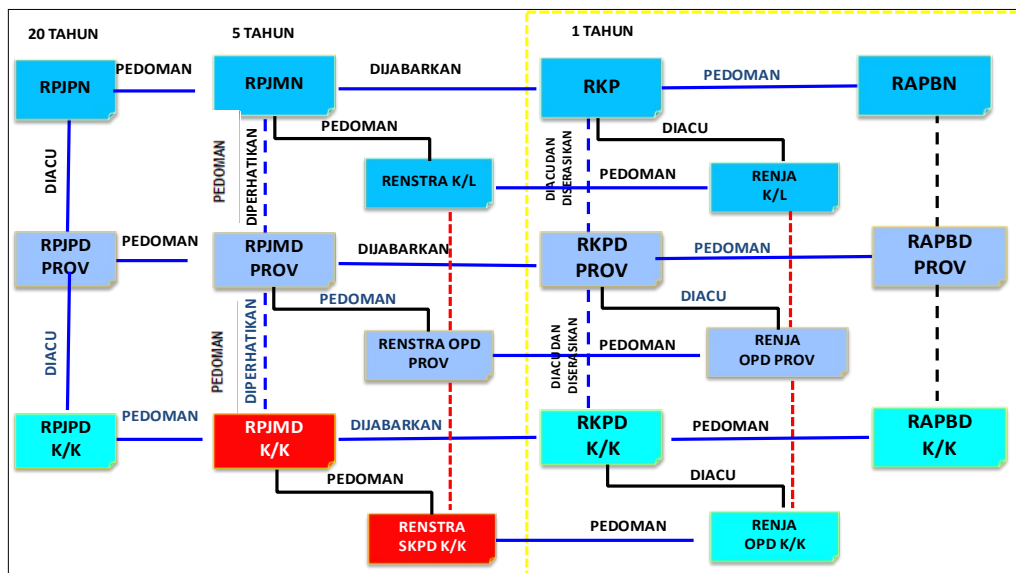
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 2).

### **I.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan serta sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu Kabupaten Lahat. Dokumen RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.



**Gambar 1.2**  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



**Gambar 1.3**  
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

**a. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**

Penyusun dokumen RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 mengacu pada dokumen RKP Tahun 2022 terutama menyangkut sasaran dan prioritas arah kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RKPD 2022 harus sinergi dan sinkron dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang pada RKP Tahun 2022 guna mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dengan tema RKP tahun 2022 **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan berkualitas “** yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat lebih integratif, dan sinergis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan begitu juga sebaliknya. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.

2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah.;

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan
- Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- Mempercepat transformasi struktural.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- Meningkatkan Produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air.
- Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan international.
- Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas..
- Meningkatkan keamanan siber.

**Tabel 1.1.**  
**Sinkronisasi Prioritas RKPD Kabupaten Lahat, RKPD Provinsi Sumsel  
dengan RKP Tahun 2022**

PRIORITAS RKP TAHUN 2022	PRIORITAS RKPD PROVINSI SUMSEL TAHUN 2022	PRIORITAS RKPD KAB. LAHAT TAHUN 2022
PN.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD.1 Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting	PD.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing dan mendukung Percepatan Penurunan Kemiskinan.
PN.2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata	PD.2 Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, Lingkungan Hidup serta Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berkelanjutan.
PN.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD.3 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi	PD.3 Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung Birokrasi Efektif dan Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
PN.4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD.4 Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	PD.4 Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.
PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD.5 Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan	
PN.6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
PN.7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		





**b. RKPD dan RPJMD Kabupaten Lahat**

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan sasaran, prioritas, dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lahat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

**c. RKPD dan Dokumen Renja Perangkat Daerah**

RKPD merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan Program Prioritas setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD Tahun 2022 dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022.

**d. RKPD dan Dokumen RAPBD**

RKPD merupakan dasar bagi Kepala Daerah dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) Tahun 2022.

**I.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan untuk memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022 dan Rencana Kerja

Anggaran Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022 sampai ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Penerapan pelaksanaan RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi pihak swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi DPRD Kabupaten Lahat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lahat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN dan Pihak Swasta;
- b. Menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun 2022;
- c. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat;
- d. Merupakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- e. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Lahat, pihak swasta dan masyarakat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok

- sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
  - c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
  - d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **I.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Peraturan Bupati Lahat

Daftar Isi

**Bab I      Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen RKPD, (6) Pendekatan Baru, dan (7) Rujukan Kebijakan.

**Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Gambaran Umum Kondisi Daerah terdiri dari (1) Kondisi Umum Daerah Kabupaten Lahat, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan (3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

**Bab III    Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri sub bab yang meliputi : (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

**Bab IV    Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah terdiri dari (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n).

**Bab V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### Bab VII Penutup

Bab ini berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Lahat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

### **I.6 Pendekatan Penyusunan RKPD**

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan *penganggaran berbasis program (money follow program)* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan memperhatikan pada:

- Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas;
- Holistik untuk mencapai prioritas daerah melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah nasional;
- Intergratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas daerah.
- Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas daerah.

a. Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dengan Pendekatan THIS adalah:

- Tematik : bahwa RKPD disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga didapat isu strategis yang kemudian juga ditentukan tema-tema pembangunan dalam bentuk konstelasi cascading: 1) Prioritas Daerah, 2) Program Prioritas, 3) Kegiatan Prioritas, 4) Proyek Prioritas Daerah, dan 5) Proyek Perangkat Daerah. Penetapan sasaran dan target pembangunan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Lahat 2005-2025, Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, dengan tema RKP Tahun 2022, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Holistik (Komprehensif): bahwa seluruh sektor yang terkait merupakan komponen pembentuk suatu tema, dengan tahapan holistik suatu tema dari hulu ke hilir.
- Integratif: sebagai konsekuensi dari pendekatan tematik, seluruh sektor dalam tema tersebut harus diidentifikasi dan direncanakan secara sinergii satu sama lain (terintegrasi dalam suatu perencanaan) sesuai dengan pembagian urusan atau kewenangan, termasuk juga aspek pendanaannya.
- Spasial: merupakan unit terkecil dari konstelasi tema pembangunan, yaitu Proyek Perangkat Daerah dari berbagai sektor yang berbeda namun harus terkait satu sama lain secara spasial dalam temanya masing-masing.

b. Pendekatan Partisipatif

Proses perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui beberapa kegiatan seperti : Forum Konsultasi Publik, Rapat Stakeholder, dan Musrenbang.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**



**Gambar 1.4**  
**Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**



**Gambar 1.5**  
**Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik**



**Gambar 1.6**  
**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat**





**Gambar 1.7**  
**Musrenbang RKPD Kabupaten Lahat**

c. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan perencanaan secara teknokratik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Lahat dengan mengikut sertakan unsur akademisi, praktisi, ahli, dan tenaga fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

d. Pendekatan Bottom Up dan Top Down

Pendekatan *bottom up* (bawah-atas) dan *top down* (atas-bawah) dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD Kabupaten Lahat tahun 2022 dan proses perencanaan Kabupaten Lahat maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat/Umum, dan Perangkat Daerah telah dapat menyampaikan usulan kegiatan tahun 2022

melalui mekanisme sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Usulan didistribusikan ke Perangkat Daerah oleh Bappeda untuk selanjutnya diverifikasikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

e. Pendekatan Politik

Pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik dapat diartikan sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang kemudian diuraikan menjadi rencana pembangunan tahunan daerah.

Selain itu, terdapat usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah dan hasil reses. Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini yaitu: Pemerintah Kabupaten Lahat telah berkoordinasi dengan baik bersama DPRD Kabupaten Lahat dalam melaksanakan proses perencanaan di Kabupaten Lahat mulai dari pelaksanaan konsultasi publik arah kebijakan daerah, musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, rapat koordinasi teknis (rakortek) Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang ditingkat kabupaten.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022, ada beberapa inovasi yang dilakukan antara lain pada proses pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dalam menjaring aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menyamakan persepsi dengan pihak DPRD melalui usulan reses, sehingga usulan program prioritas pembangunan kecamatan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat sinergi dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lahat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lahat juga menampung usulan masyarakat melalui hasil kunjungan kerja kepala daerah ke desa-desa/kecamatan.

### **1.7 Rujukan Kebijakan**

Arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 merujuk kepada beberapa hal yaitu :

- 1) Kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2018 s.d tahun berjalan tahun 2020;
- 2) Analisis masalah dan isu strategis tahun 2022;
- 3) Prioritas RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
- 4) Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.
- 5) Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024
- 6) Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 7) Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2022;
- 8) Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Tahun 2022;
- 9) Pencapaian *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2030;
- 10) Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Tahun 2014-2020.
- 11) Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024.
- 12) Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana.
- 13) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2015-2019.
- 14) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- 15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023.

**BAB II  
GAMBARAN UMUM  
KONDISI DAERAH**

**2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Lahat meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

**2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

**a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Secara geografis berdasarkan Peta Rupabumi skala 1 : 50.000 pada garis terluar Kabupaten Lahat adalah koordinat geografis antara **3° 29' 42,000"** - **4° 16' 1,200"** Lintang Selatan dan **102° 54' 54,000"** - **103° 46' 22,800"** Bujur Timur dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** : Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Kabupaten Lahat disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang akses masuk menuju Kabupaten Lahat adalah dari Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ke Kikim Barat Kabupaten Empat Lawang atau dapat juga melalui Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menuju Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat.

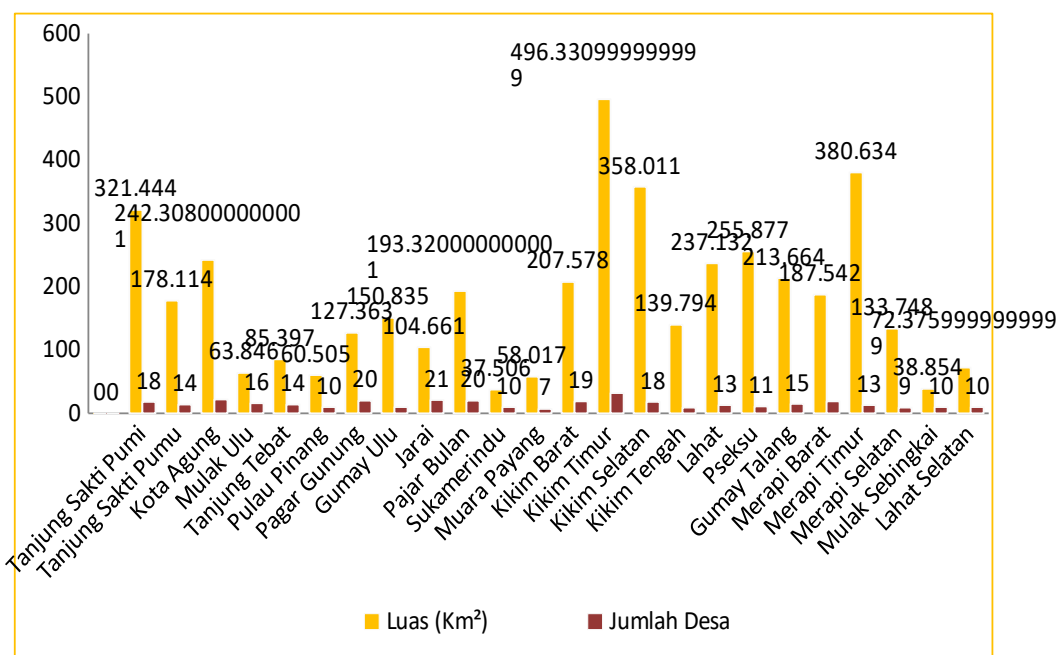
- **Sebelah Utara** : Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas

Sebelah Utara Kabupaten Lahat dominan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan akses masuk ke Kabupaten Lahat adalah melalui Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas menuju Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

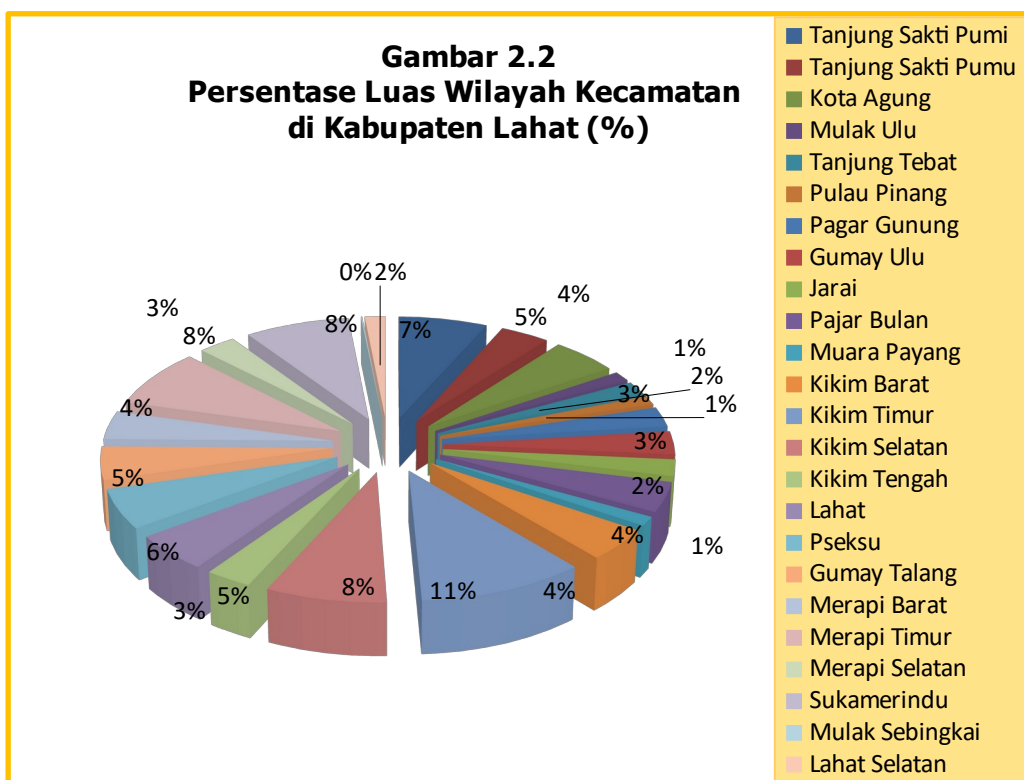
- **Sebelah Timur** : Kabupaten Muara Enim

Untuk menuju Kabupaten Lahat dari kabupaten Muara Enim akses masuk





**Grafik 2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Lahat**



Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat

	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE LUAS	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
1	Tanjung Sakti Pumu	Simpang III Pumu	178,114	4,1 %	14	
2	Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	321,444	7,4 %	18	
3	Kota Agung	Kota Agung	242,308	5,6 %	22	
4	Mulak Ulu	Muara Tiga	63,846	1,5 %	16	
5	Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	85,397	2 %	14	
6	Pulau Pinang	Jati	60,505	1,4 %	10	
7	Pagar Gunung	Karang Agung	127,363	3 %	20	
8	Gumay Ulu	Tinggi Hari	150,835	3,5 %	10	
9	Jarai	Jarai	104,661	2,5 %	21	
10	Pajar Bulan	Sumur	193,32	4,5 %	20	
11	Muara Payang	Lawang Agung Lama	58,017	1,4 %	7	
12	Sukamerindu	Sukamerindu	37,506	8,7 %	10	

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

<b>13</b>	Kikim Barat	Saung Naga	207,578	4,8 %	19	
<b>14</b>	Kikim Timur	Bungamas	496,331	11,5 %	32	
<b>15</b>	Kikim Selatan	Pagar Jati	358,011	8,3 %	18	
<b>16</b>	Kikim Tengah	Tanjung Aur	139,794	3,2 %	9	
<b>17</b>	Lahat	Lahat	237,132	5,5 %	13	16
<b>18</b>	Gumay Talang	Sukarame	213,664	5 %	15	
<b>19</b>	Pseksu	Lubuk Mabar	255,877	6 %	11	
<b>20</b>	Merapi Barat	Merapi	187,542	4,3 %	19	
<b>21</b>	Merapi Timur	Lebuay Bandung	380,634	8,8 %	13	1
<b>22</b>	Merapi Selatan	Sukamerindu	133,748	3,1 %	9	
<b>23</b>	Lahat Selatan	Tanjung Payang	72,376	1,7 %	10	
<b>24</b>	Mulak Sebingkai	Keban Agung	38,854	0,1 %	10	
<b>Kabupaten Lahat</b>			<b>4.324,86</b>		<b>360</b>	<b>17</b>

*Sumber : Data dan Informasi dari Bagian Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kab. Lahat, 2018*



**Kondisi Topografi**

Topografi Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariasi mulai dari 25 meter hingga 1.000 meter. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Lahat, Merapi Barat, dan Merapi Timur dengan ketinggian 25 meter sampai 100 meter. Sedangkan kecamatan dengan dataran tinggi dari permukaan laut meliputi Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Jarai, Pajar Bulan, dan Muara Payang.

**Tabel 2.2**

**Ibu Kota Kecamatan, Tinggi Kota Dari Permukaan Laut, dan Jarak Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibu Kota Capital	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota <i>Distance to the Capital</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	500-1000	66,35
Tanjung Sakti Pumu	Simpang III Pumu	500-1000	66,97
Kota Agung	Kota Agung	500-1000	32,59
Mulak Ulu	Muara Tiga	100-1000	27,87
Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	100-1000	22,55
Mulak Sebingkai	Keban Agung	-	18,53
Pulau Pinang	Jati	100-500	3,37
Pagar Gunung	Karang Agung	100-500	15,86
Gumay Ulu	Tinggi Hari	100-500	17,13
Jarai	Jarai	500-1000	41,53
Pajar Bulan	Sumur	500-1000	36,60
Muara Payang	Lawang Agung Lama	500-1000	44,87
Sukamerindu	Sukamerindu	500-1000	40,84
Kikim Barat	Saung Naga	100-500	46,14
Kikim Timur	Bungamas	100-500	20,57
Kikim Selatan	Pagar Jati	100-500	31,61
Kikim Tengah	Tanjung Aur	100-500	32,74
Lahat	Lahat	25-100	...

Gumay Talang	Sukamerindu	100-500	7,67
Lahat Selatan	Tanjung Tebat	-	2,11
Pseksu	Lubuk Mabar	100-500	21,69
Merapi Barat	Merapi	25-100	16,01
Merapi Timur	Lebuay Bandung	25-100	28,02
Merapi Selatan	Sukamerindu	25-100	14,50
<b>Kabupaten Lahat</b>		-	-

Sumber/Source: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat/ Representative office of National Land Authority of Lahat Regency

### ***Kondisi Geologi***

Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan tatanan tektoniknya menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Jenis struktur yang umum dijumpai di cekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Secara geologi daerah Kabupaten Lahat tersusun atas formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi jenis tanah aluvial, regosol, andosol, latosol, asosiasi litosol dan latosol serta kompleks tanah podsolik dan litosol yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman sawah, kebun campuran, tegalan, alang-alang/semak belukar. Sedangkan jenis tanah andosol dan latosol cocok

digunakan untuk tanaman padi, jagung, kopi, karet, coklat, tanaman buah-buahan dan umbi-umbian.

### ***Kondisi Hidrologi***

Sumber daya air di wilayah Kabupaten Lahat berasal dari air permukaan tanah dan air tanah. Air permukaan tanah adalah sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang memenuhi persyaratan layak untuk dikonsumsi. Adapun jenis air permukaan di Kabupaten Lahat adalah sungai, danau, dan tadah hujan.

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang dialiri banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yaitu (lima) sungai besar dengan anak sungainya berjumlah 343 sungai. Sungai – sungai besar tersebut antara lain Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Lintang dan Sungai Endikat, Sungai Selangis, Sungai Mana. Sumber air tanah dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, irigasi ataupun industri, apabila persyaratan kualitas dan debitnya memenuhi kebutuhan. Air tanah sangat jarang dijumpai sebagai sumber mata air dan walaupun ada debitnya tidak terlalu besar, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang memanfaatkan sumber-sumber air permukaan seperti sungai dan air hujan sedangkan yang memanfaatkan air bor dan sumur gali penggunaannya masih relatif sedikit.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal sepanjang pinggiran sungai sangat besar terhadap keberadaan sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih untuk dijadikan air minum. Pada saat musim kemarau, jumlah masyarakat yang memanfaatkan air sungai menjadi meningkat, untuk keperluan sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya.

### ***Kondisi Klimatologi***

Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Lahat mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara maksimum di Kabupaten Lahat rata-rata 36,80 °C dan suhu minimum yaitu rata-rata 22,00

°C. Sedangkan untuk rata-rata jumlah hari hujan dan curah hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat adalah 14 hari dan 386 mm.

Kelembaban udara rata-rata sebesar 81,93 % dengan rata-rata kecepatan angin 2,01 m/det. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan Oktober sampai April.

**Tabel 2.3**

**Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan  
Setiap Bulan Di Kabupaten Lahat**

*Sumber data : BPS, Kab. Lahat dalam Angka 2021*

<b>Bulan Month</b>	<b>Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)</b>	<b>Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)</b>	<b>Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Januari/January	386	14	***
Februari/February	284	14	***
Maret/March	237	13	***
April/April	268	14	***
Mei/May	201	8	***
Juni/June	***	***	***
Juli/July	60	8	***
Agustus/August	86	6	***
September/September	84	7	***
Oktober/October	154	12	***
November/November	141	11	***
Desember/December	63	7	***

**Penggunaan Lahan**

Dilihat dari penggunaan lahannya, sekitar 53,89% lahan di Kabupaten Lahat digunakan untuk areal perkebunan yang terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar (karet dan sawit). Kemudian sekitar 29,12% digunakan untuk areal kehutanan yang meliputi hutan lebat dan hutan tanaman industri (HTI). Sisanya digunakan untuk areal persawahan dan lain-lain.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.4**

**Luas dan Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat Tahun 2018**

No	Nama Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan (hektar)				
		Ladang	Perkebunan	Pengembalaan	Hutan Negara	
1	Tanjung Sakti Pumi	256	232	7.142	-	11.740
2	Tanjung sakti Pumu	-	-	-	-	-
3	Kota Agung	143	68	3.717	110	-
4	Mulak ulu	1.875	658	8.320	-	421
5	Tanjung Tebat	471	26	1.140	47	4.334
6	Pulau Pinang	817	66	331	3.803	-
7	Pagar Gunung	723	289	6.223	13	-
8	Gumay Ulu	717	74	2.869	239	783
9	Jarai	42	28	5.471	-	1.280
10	Pajar Bulan	31	3	11.822	-	185
11	Muara Payang	35	10	2.851	-	74
12	Sukamerindu	20	5	3.780	-	-
13	Kikim Barat	1.763	180	18.169	100	-
14	Kikim Timur	2.805	50	39.803	70	-
15	Kikim Selatan	1.307	70	1.298	85	1.090
16	Kikim Tengah	7.175	550	15.935	-	-
17	Lahat	1.999	-	2.000	50	1670
18	Gumay Talang	3.560	15	4.609	965	-
19	Pseksu	405	641	5.710	302	10.303
20	Merapi Barat	368	428	3.308	4.140	470
21	Merapi Timur	269	440	9.257	2.529	-
22	Merapi Selatan	631	100	2.389	54	1.330
23	Lahat Selatan	631	100	2.389	54	1.330
24	Mulak Sebingkai	420	368	5.635	-	372
<b>Jumlah</b>		<b>26.463</b>	<b>4.401</b>	<b>164.168</b>	<b>12.561</b>	<b>35.382</b>

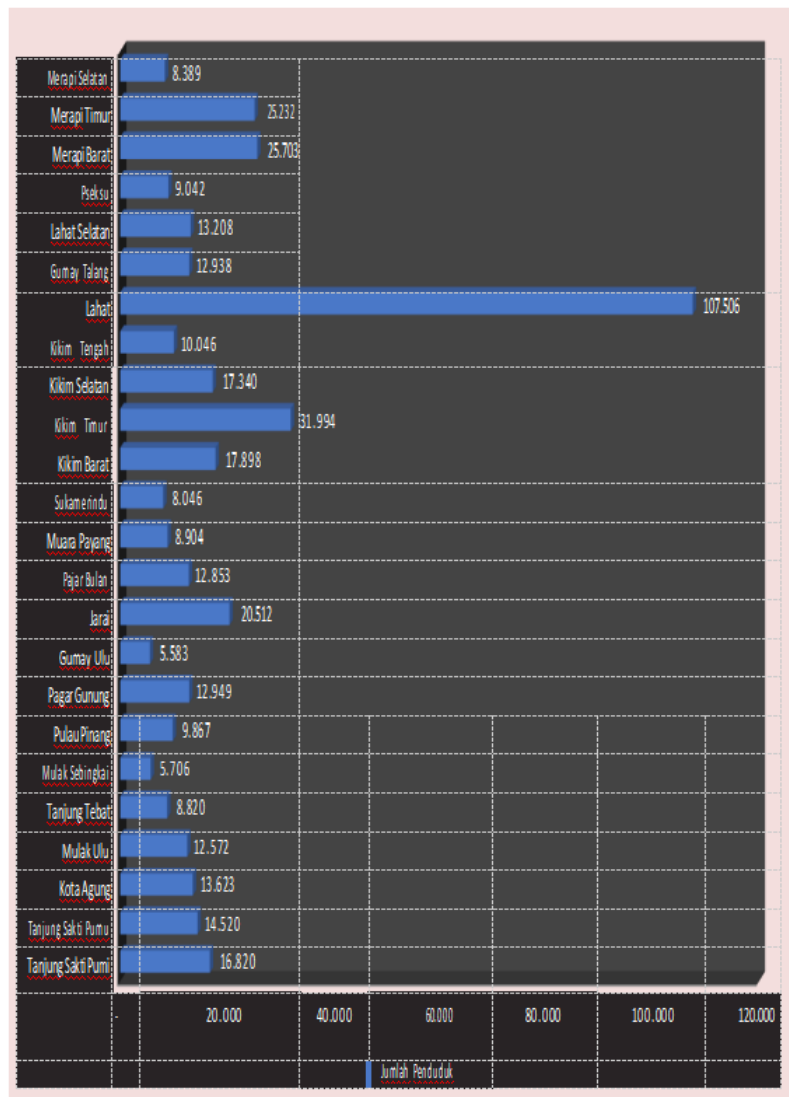
Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2019

**b. Demografi**

Komponen pendorong pertumbuhan penduduk meliputi tiga hal, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pengendalian jumlah penduduk yang disebabkan oleh ketiga komponen tersebut harus terus dilakukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat melalui distribusi penyebaran penduduk, struktur umur, pertumbuhan serta rasio jenis kelamin. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan beban pembangunan menjadi semakin berat, sementara pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah juga akan menjadi masalah tersendiri karena akan menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Penduduk memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, selain sebagai pelaku pembangunan penduduk juga menjadi sarana pembangunan sebagai penggerak perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu penduduk dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan.

Penduduk Kabupaten Lahat berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 430.071 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 220.015 jiwa dan penduduk perempuan 210.056 jiwa. Pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir sebesar 1,47 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,74.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lahat tahun 2020 mencapai 98.60 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Lahat dengan kepadatan sebesar 999.13 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Pseksu sebesar 33.58 jiwa/Km<sup>2</sup>.



Sumber : BPS, Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2021

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2020**

Komponen pendorong pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lahat meliputi kelahiran, kematian dan perpindahan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka salah satu yang harus diperhatikan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lapangan pekerjaan dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.

**c. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik Kabupaten Lahat maka dapat diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan rencana perubahannya dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032, bahwa kawasan lindung meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 44.528 (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu. Kawasan lindung terdiri dari:

- a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
  - Kawasan Hutan Lindung, meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Barat, Jarai, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung dan Mulak Ulu.
  - Kawasan Resapan Air, meliputi: kawasan resapan air yang terdapat hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah, Gumai Tebing Tinggi, Bukit Serele dan Hutan Lindung Bukit Napal.
- b) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
  - Kawasan Sempadan Sungai, meliputi sungai Lematang, sungai Kikim, sungai Endikat, dan sungai Manna dengan luas kurang lebih 7.142 hektar dan ketentuan jarak kawasan sempadan sungai selebar 100 meter kiri kanan untuk sungai besar dan 50 meter di kiri kanan untuk sungai kecil, serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman.
  - Ruang Terbuka Hijau Kota dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas



kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau privat seluas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

- c) Kawasan konservasi, meliputi:
- Taman Wisata Alam Bukit Serelo dengan luas kurang lebih 210 hektar.
  - Suaka Margasatwa Gumai Pasemah dengan luas kurang lebih 46.123 hektar.
  - Suaka Margasatwa Isau Pasemah dengan luas kurang lebih 16.998 hektar.
- d) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Muara Payung, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu, Kecamatan Gumay Talang, dan Kecamatan Merapi Selatan.
  - Kawasan rawan bencana gerakan tanah berlokasi di Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, dan Kecamatan Merapi Selatan.
    - ✓ Kawasan rawan bencana letusan gunung api berlokasi di Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
    - ✓ Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

- ✓ Kawasan rawan gempa bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
- e) Kawasan lindung geologi yaitu berada pada Kawasan Bukit Besak di Kecamatan Merapi Selatan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya Kabupaten Lahat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

- a) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :
  - Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 51.093 hektar terdiri atas Kecamatan Kikim Timur dengan luas kurang lebih 23.144 hektar, Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 2.064 hektar, dan Kecamatan Merapi Barat dengan luas kurang lebih 25.885 hektar.
  - Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 5.458 hektar, terdiri atas Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dengan luas kurang lebih 888 hektar, Kecamatan Pulau Pinang dengan luas kurang lebih 4.564 hektar, dan Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 6 hektar.
  
- b) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
  - Kawasan peruntukan tanaman pangan yang dikembangkan di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 17.512 hektar. Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas lebih kurang 15.942 hektar.
  - Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas unggulan berupa durian, duku, manggis, alpukat, kubis, sawi, cabe dan wortel yang dikembangkan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Gumay Talang,

Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Selatan dan Kecamatan PSEKSU dengan luas kurang lebih 2.968 hektar.

- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi yang dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 145.004 hektar, terdiri atas: 1) perkebunan karet meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 4.335 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 37.907 hektar; 2) kelapa sawit meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 32.589 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 5.157 hektar; 3) perkebunan lada dengan luas kurang lebih 738 hektar; 4) perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 61.997 hektar; 5) perkebunan kakau dengan luas kurang lebih 1.100 hektar; 6) perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 810 hektar; 7) kemiri dengan luas kurang lebih 89 hektar; 8) kayu manis dengan luas kurang lebih 161 hektar; 9) cengkeh dengan luas kurang lebih 60 hektar; dan 10) pinang dengan luas kurang lebih 61 hektar.
  - Kawasan peruntukan peternakan meliputi peternakan sapi, kambing dan unggas dengan skala rumah tangga yang diarahkan pada seluruh kecamatan.
- c) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
- Kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan sungai dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap di danau, tebat, cekdam, embung, dan/atau waduk.
  - Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari budidaya perikanan kolam air tenang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan,

Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Selatan.

- Budidaya perikanan kolam air deras meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
  - Budidaya perikanan sawah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- d) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan perambangan batubara, dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Pulau Pinang.
  - Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merapi, Kecamatan Pagun, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Kota Agung.

- Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Lahat.
  - Rencana kawasan peruntukan pertambangan panas bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
- e) Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil.
- Kawasan peruntukan industri sedang meliputi industri pengolahan batu kali dan krikil yang terletak di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang.
  - Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga meliputi industri pengolahan anyaman bambu, tahu, tempe, kerupuk, rotan dan ukiran kayu terletak di Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Lahat.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata budaya dan wisata alam.
- Kawasan peruntukan pariwisata budaya berlokasi :
    - 1) Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Selatan, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Pagar Gunung.
  - Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas
    - 1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata alam taman rekreasi ribang kemambang, gua sarang walet dan air terjun;
    - 2) Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit serelo, pusat pelatihan gajah, Bukit Besar, Air Terjun Hujan Panas, Air Terjun

Berdarah, Air Terjun Uhangan, Air Terjun Mata Putri, Air Sumur;

- 3) Kecamatan Kota Agung yang memiliki objek wisata alam bukit rancing, Curup Nelindang, Curup Air Kerinjing, Tebat Bukit, Curup Air Tupai, danau batu dan tebat besar;
- 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang memiliki objek wisata alam air panas, tebat besar, Curup Kabuhan, Curup Merundingan, Curup Perampangan, Curup Air Anak, dan Air Terjun Singgah Kudai;
- 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Cambai, ngarai, suaka alam, Batu Megalit dan perkebunan kopi bukit timur;
- 6) Kecamatan Kikim Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit seping tiang;
- 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata alam Taman Tinggi Hari I, II, dan III, Taman Nik Kambing, Curup Lintang, Curup Maung, Curup Buluh, dan Curup Pasemah;
- 8) Kecamatan Pseksu yang memiliki objek wisata alam Curup 9 Panggung, Goa Suruman, Curup Tinggi Suban, dan Goa Bukit Semping Tiang;
- 9) Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Curup Lawang Agung dan Lubuk Buntak;
- 10) Kecamatan Mulak Ulu yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Penengan, Air Terjun Dayang Rindu, Air Terjun Air Bais, Air Terjun Napalan, Megalith Batu Kerbau, Goa Suhuman, Tebat Besar, dan Tebat Bengkuang;
- 11) Kecamatan Pulau Pinang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Air Salak, Curup Pemandian 7 Bidadari, Curup Gunung Nyawe, Curup Kunduran, Megalitik, dan Air Panas;

- 12) Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata alam Marung Batu, Curup Bemban, Air Pans, Curup Laye dan Gua Laye, Curup Air Ugul Besak, Curup Air Ugul Kecil, Batu macan, Ribang Gayau, Gua Masanap Masaris, Tunggul Bute, dan Air Panas Kembuhak;
- 13) Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata alam Curup Cadas Pelangi, Air Terjun Tiga Tingkat, Danau Batu, Wahana Wisata Water Park.
- g) Kawasan peruntukan permukiman seluas 18.549 hektar meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di setiap pusat ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan menyebar di setiap kecamatan.
- h) Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lahat dan kawasan peruntukan untuk Polres dan Polsek yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat serta Kawasan Pemerintahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.

## **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi**

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

#### **➤ Pertumbuhan PDRB**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 2018 s.d 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun

perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional, ditambah dengan adanya kejadian luar biasa yang melanda dunia yaitu pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lahat saat ini menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia di Tahun 2020. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif di Tahun 2020 akhir. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Lahat (ADH Berlaku) selama periode tahun 2018 s.d. 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2.5**

**PDRB Kabupaten Lahat Seri 2019, Tahun 2018 - 2020**

PDRB Pengeluaran seri 2019	Tahun		
	2020	2019	2018
<b>PDRB</b>			
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2019 (Juta Rupiah)	17364771.29	17171700.59	15984334.26
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Seri 2019 (Juta Rupiah)	12427419.33	12382331.00	11723719.00



Sumber : BPS Kabupaten Lahat 2021

Berdasarkan seri 2019, nilai PDRB Kabupaten Lahat pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Lahat atas dasar harga konstan 2019 mencapai 12,38 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 11,72 juta rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dipercepat oleh sektor pertambangan yang kembali menggeliat setelah agak menurun dibandingkan tahun 2018. Selain itu adanya investasi di sektor perdagangan, dengan berdirinya mall yang cukup besar di Kabupaten Lahat dan menjamurnya berbagai objek wisata yang disertai dengan berdirinya toko-toko kecil yang dapat menarik minat konsumen dari berbagai wilayah kabupaten kota di sekitar Kabupaten Lahat, mengakibatkan pertumbuhan yang cukup signifikan bagi sektor perdagangan di Kabupaten Lahat.

**Tabel 2.6**

**Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Lahat  
Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 - 2020**

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2021

Lapangan Usaha	Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.07	1.72	-0.23
B. Pertambangan dan Penggalian	-1.82	0.67	2.65
C. Industri Pengolahan	4.16	2.24	4.45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.22	0.01	0.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.96	2.29	4.22
F. Konstruksi	0.81	0.73	2.40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.11	3.58	4.65
H. Transportasi dan Pergudangan	1.48	1.84	3.63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.94	4.86	4.62
J. Informasi dan Komunikasi	1.48	2.51	4.39
K. Jasa Keuangan	0.16	1.59	3.39
L. Real Estate	2.76	2.65	2.01
M, N. Jasa Perusahaan	2.42	2.01	1.10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.71	0.03	-3.80
P. Jasa Pendidikan	2.89	1.60	0.23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.42	1.26	0.87
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.64	5.06	4.72
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>0.76</b>	<b>1.71</b>	<b>2.15</b>

Laju indeks implisit PDRB dan Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 4,16 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, tidak seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen bahkan ada yang mengalami penurunan yang negatif. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif

sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,07 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,16 dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,42 persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,70 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 3,21 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,05 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,89 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,28 persen, lapangan usaha real estate sebesar 2,25 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1,95 persen, lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,81 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 1,77 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,57 persen, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 1,34 persen, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 1,27 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 1,14 persen.

**Tabel 2.7**

**Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Lahat Tahun 2018-2020**

<i>mbe</i> <i>BPS</i>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen)</b>			<i>Su</i> <i>r:</i>
		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.14	18.40	19.13	
	B. Pertambangan dan Pengalihan	34.39	34.86	34.14	
	C. Industri Pengolahan	5.63	5.38	5.40	
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.69	0.59	0.55	
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	
	F. Konstruksi	9.35	9.21	9.58	
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.66	14.58	13.89	
	H. Transportasi dan Pergudangan	1.14	1.21	1.25	
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.49	1.59	1.48	
	J. Informasi dan Komunikasi	0.89	0.82	0.82	
	K. Jasa Keuangan	1.62	1.62	1.70	
	L. Real Estate	2.71	2.68	2.72	
	M, N. Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.17	5.00	5.27	
	P. Jasa Pendidikan	2.65	2.65	2.69	
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.83	0.76	0.78	
	R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.58	0.55	0.53	
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

*Kabupaten Lahat Tahun 2021*

Jika dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2018-2020, PDRB Kabupaten Lahat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lahat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 19,14 persen (angka ini naik dari tahun 2019 yaitu sebesar 18,40 persen). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,39 persen (menurun dari 34,86 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,66 persen (menurun dari 14,58 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,35 persen (meningkat dari 9,21 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 5,63 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Sektor terbesar yang mendukung PDRB Kabupaten Lahat masih bersumber pada sektor pertambangan dan penggalian, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

**Tabel 2.8**  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2018 - 2020**

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3322932.00	3159679.00	3058184.00
B. Pertambangan dan Penggalan	5971530.00	5986498.00	5456488.00
C. Industri Pengolahan	977031.00	923550.00	863270.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	119842.00	102141.00	88159.00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5419.00	5071.00	4573.00
F. Konstruksi	1622880.00	1582290.00	1530726.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2372333.00	2503649.00	2220425.00
H. Transportasi dan Pergudangan	197680.00	208162.00	199351.00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	259236.00	273519.00	236981.00
J. Informasi dan Komunikasi	154622.00	140775.00	131088.00
K. Jasa Keuangan	281273.00	278739.00	271185.00
L. Real Estate	469821.00	460553.00	435004.00
M, N. Jasa Perusahaan	8313.00	8366.00	7756.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	897847.00	858179.00	842861.00
P. Jasa Pendidikan	459949.00	455698.00	430384.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143429.00	130798.00	123904.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	100634.00	94036.00	83997.00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>17364771.00</b>	<b>17171701.00</b>	<b>15984334.00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2021

**Tabel 2.9**

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)  
Kabupaten Lahat Tahun 2018 - 2020**

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2813213.00	2784007.00	2740909.00
B. Pertambangan dan Penggalian	4702858.00	4629027.00	4247575.00
C. Industri Pengolahan	540528.00	532177.00	508575.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	68963.00	59494.00	51353.00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3744.00	3537.00	3262.00
F. Konstruksi	970150.00	953528.00	929183.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1263968.00	1362137.00	1251242.00
H. Transportasi dan Pergudangan	114568.00	122430.00	119404.00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125348.00	134825.00	122491.00
J. Informasi dan Komunikasi	130317.00	120397.00	114926.00
K. Jasa Keuangan	191378.00	189955.00	187751.00
L. Real Estate	306345.00	308598.00	299203.00
M, N. Jasa Perusahaan	5078.00	5234.00	4949.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	662685.00	650546.00	639106.00
P. Jasa Pendidikan	355988.00	362892.00	348231.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105979.00	99947.00	95873.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	66309.00	63600.00	59685.00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>12427419.00</b>	<b>12382331.00</b>	<b>11723719.00</b>

➤ **Laju Inflasi**

Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai

sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor - faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Lahat.

**Tabel 2.10 Inflasi Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Inflasi	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Lahat	2,78	2,33	n/a	2,78	2,42
Provinsi Sumsel	8,48	3,10	3,58	2,96	2,74
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi. Perkembangan inflasi Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 terlihat fluktuatif, hal ini disebabkan belum stabilnya kondisi perekonomian global yang akan berimbas kepada perekonomian di Kabupaten Lahat.



➤ **PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output produksi atau tingkat pendapatan secara makro, tapi pertumbuhan ekonomi dapat juga menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan perkapita masyarakat atau dapat dikatakan bahwa dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk akan bisa dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB perkapita maupun pendapatan perkapita.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 35,89 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 42,02 juta rupiah (lihat tabel 2.14). Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.11**

**PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Lahat  
Tahun 2017 - 2020**

<b>Nilai PDRB (Milliar Rupiah)</b>
------------------------------------

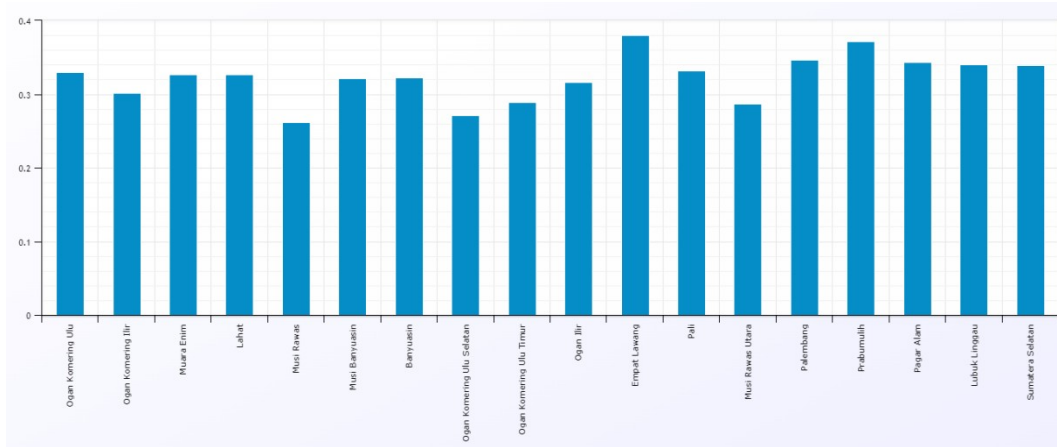
	2016	2017	2018	2019	2020*
ADHB	14.262	15.035	15.986	17.171	17.365
ADHK	10.786	11.265	11.723	12.382	12.427
ADHB	35.887	37.448	39.416	41.942	42.024
ADHK	27.139	28.058	28.910	30.246	30.075
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010	2,34	4,44	4,07	5,62	0,36
<b>Jumlah Penduduk (Ribu Orang)</b>	<b>397</b>	<b>401</b>	<b>405</b>	<b>409</b>	<b>430</b>
<b>Pertumbuhan Jml Penduduk (persen)</b>	<b>1,07</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,47</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Lahat Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

➤ **Indeks Gini**

Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Kabupaten Lahat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menekan kesenjangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi disuatu wilayah. Semakin kecil angka gini rasio berarti pemerataan ekonomi semakin baik. Perkembangan gini rasio Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2018-2020 mendorong Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang atau terisolirakan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pada tahun 2018-2020, gini rasio Kabupaten Lahat lebih baik dari gini rasio Provinsi Sumatera Selatan dan nasional, pada tahun 2020 bernilai 0,33 meningkat dari tahun 2018 yaitu 0,31, dapat dilihat pada grafik.



Grafik 2.2

### Ratio Gini Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

#### ➤ Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dari 17,11% menjadi 15,95%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan sebesar 65.750 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lahat tahun 2017 sebesar 67.330 jiwa (Tabel 2. ). Persentase penduduk miskin Kabupaten Lahat masih diatas persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat antara lain disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ditambah di akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan sekarang Kabupaten Lahat termasuk daerah terdampak Pandemi Covid-19.

Tabel.2.12

### Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lahat Tahun 2013 - 2020

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	313 687	71.8	18.61
2014	320 716	70.3	18.02
2015	332 943	70.7	18.02
2016	369 359	67.83	17.11
2017	385.525	67.33	16.81
2018	419 658	65.31	16.15
2019	428 309	65.03	15.92
2020	457 569	65.75	15.95

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2021

➤ **Angka Kriminalitas**

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya kesenjangan ekonomi menjadi pemicu meningkatnya tindak kejahatan. Dalam hal ini perlunya penyelesaian permasalahan secara komprehensif agar angka kriminalitas dapat ditekan.

**Tabel 2.13**

**Angka Kriminalitas Kabupaten Lahat Tahun 2018 - 2020  
Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	2018	2019	2020

Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	668	525	265
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	81,00	86,86	76,60

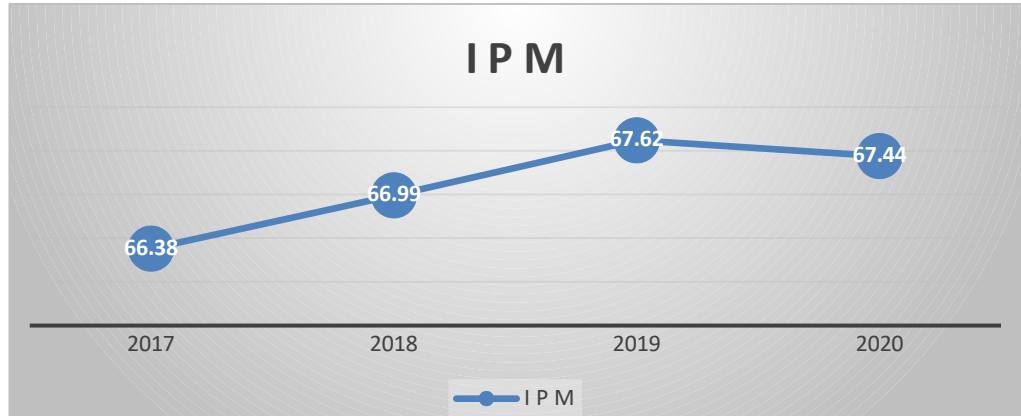
Sumber: Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2021

#### **A. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

##### ✧ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia (*Human Development Report*) adalah merupakan upaya untuk memberikan gambaran besarnya capaian pembangunan yang diraih oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. Secara umum IPM di Kabupaten Lahat mengalami tren meningkat selama periode 2016-2020 yang tentu saja merupakan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat selama periode tersebut. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Lahat sebesar 66,38 meningkat menjadi 67,44 di tahun 2020.



Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2021;

**Grafik 2.3**

**IPM Kabupaten Lahat Tahun 2017 - 2020**

Peningkatan IPM ini dipengaruhi oleh meningkatnya angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah serta indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita) di Kabupaten Lahat. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya meningkatkan IPM melalui peningkatan program kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat tergambar pada tabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 2.14**

**Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten Lahat Tahun 2018-2020**

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk/Population	Orang/Person	405,524	409,348	430,071
Laju Pertumbuhan Penduduk/ Population Growth	%	1,02	0,93	4,81
Sex Rasio/Sex Ratio	-	104	104	105
Kepadatan Penduduk/Population Density	Orang/km <sup>2</sup>	93	98,9	98,60
Angka Harapan Hidup <sup>1</sup> -e <sub>0</sub> / Life Expectancy Rate <sup>1</sup>	tahun/years	65,50	65,76	66,04
Penduduk Miskin <sup>5</sup> /Poor People <sup>4</sup>	RibuJiwa	65,31	65,03	65,75
Persentase Penduduk Miskin <sup>4</sup> Percentage of Poor People <sup>4</sup>	%	16,15	15,92	15,95

Indeks Pembangunan Manusia a-IPM <sup>5</sup> Human Development I ndex <sup>5</sup>	-	66,99	67,62	67,64
-------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------

*Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2020*

❖ **Pendidikan**

Salah satu fokus kesejahteraan sosial antara lain adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan, memperbaiki kurikulum, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan. Bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

➤ **Fasilitas Pendidikan**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah.

Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Pada tahun 2018, angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat untuk SD sederajat sebesar 148,128; SMP sederajat sebesar 249,772 dan SMA sederajat 353,339 siswa persekolah. Sedangkan rasio murid-guru untuk SD sederajat sebesar 1:09; SMP sederajat sebesar 1:12 dan SMA sederajat 1:12 siswa per guru. Jika dibandingkan dengan angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014, maka capaian rasio murid-sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014, rasio murid-sekolah untuk SD sederajat sebesar 158,06 yang artinya ketersediaan sekolah menampung murid sekolah SD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ketersediaan gedung SMP sederajat dan SMA sederajat. Dimana perkembangan rasio murid-sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun



2014. Sedangkan untuk perkembangan rasio murid-guru kurun waktu 2014-2018 pada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Rasio murid-guru pada tahun 2018 lebih besar daripada rasio murid-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya pada tahun 2018 jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Pada tahun 2014 rasio murid-guru SD sederajat sebesar 1:09 tetap sama pada tahun 2018, tetapi untuk rasio murid-guru SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan menjadi 1:12

**Tabel 2.15**

**Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru di Kabupaten Lahat  
Tahun 2014-2018**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Murid-Sekolah					
- SD/MI	151,09	149,79	148,128		
- SLTP/MTS	256,36	249,55	249,772		
- SMU/SMK/MA	347,53	333,28	353,339		
Rasio Murid-Guru					
- SD/MI	1:08	1:08	1:09		
- SLTP/MTS	1:11	1:11	1:12		
- SMU/SMK/MA	1:07	1:11	1:12		

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2021, Diolah

Dengan demikian, seiring dengan bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA

sederajat tahun 2020/2021 dapat dilihat pada tabel 2.19.

**Tabel 2.16**

**Jumlah Sekolah, Guru, Murid, pada Sekolah Dasar Kabupaten Lahat Tahun 2020/2021**

No	Kecamatan	SD Negeri			SD Swasta			MI Negeri			MI Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Tanjung Sakti Pumi	12	143	1135	3	24	488	-	-	-	-	-	-
2	Tanjung Sakti Pumu	12	152	1462	1	7	99	-	-	-	2	21	592
3	Kota Agung	13	185	1472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mulak Ulu	15	181	1955	1	5	55	-	-	-	1	12	69
5	Tanjung Tebat	11	132	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pulau Pinang	13	175	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pagar Gunung	15	260	1179	-	-	-	1	15	116	-	-	-
8	Gumay Ulu	7	83	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jarai	10	173	1670	2	25	584	-	-	-	-	-	-
10	Pajar Bulan	13	158	1229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Muara Payang	7	72	650	-	-	-	1	33	293	-	-	-
12	Sukamerindu	6	85	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

13	Kikim Barat	16	155	1713	-	-	-	1	20	333	2	11	85
14	Kikim Timur	27	309	3211	2	12	168	-	-	-	3	23	316
15	Kikim Selatan	14	154	2065	-	-	-	-	-	-	1	7	53
16	Kikim Tengah	6	62	1127	-	-	-	-	-	-	1	9	120
17	Lahat	36	730	10392	9	103	2.117	1	41	543	2	23	196
18	Gumay Talang	6	133	1308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pseksu	9	130	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Merapi Barat	12	248	2379	-	-	-	1	13	161	-	-	-
21	Merapi Timur	16	217	2458	-	-	-	-	-	-	1	13	180
22	Merapi Selatan	5	80	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lahat Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>281</b>	<b>4.017</b>	<b>40.915</b>	<b>18</b>	<b>176</b>	<b>3.511</b>	<b>5</b>	<b>122</b>	<b>1.446</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>1.611</b>

Keterangan: Data Kecamatan Lahat Selatan dan Mulak Sebingkai masih tergabung dengan data kecamatan induk sebelum pemekaran.

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

**Tabel 2.17**

**Jumlah Sekolah, Guru, Murid, pada SLTP Sederajat di Kabupaten Lahat Tahun 2020/2021**

No	Kecamatan	SLTP Negeri			SLTP Swasta			MTS Negeri			MTS Swasta		
		Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Tanjung Sakti Pumi	4	81	394	11	8	255	-	-	-	-	-	-
2	Tanjung Sakti Pumu	2	61	594	7	6	121	-	-	-	1	19	504
3	Kota Agung	4	64	527	-	-	-	1	26	204	-	-	-
4	Mulak Ulu	4	46	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tanjung Tebat	2	44	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pulau Pinang	2	33	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pagar Gunung	2	46	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gumay Ulu	2	32	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jarai	1	53	867	15	15	439	-	-	-	-	-	-
10	Pajar Bulan	1	44	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Muara Payang	1	30	193	-	-	-	-	-	-	1	22	134
12	Sukamerindu	1	28	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kikim Barat	3	39	389	17	15	66	1	29	377	-	-	-
14	Kikim Timur	6	100	1240	4		43	-	-	-	2	30	316
15	Kikim Selatan	4	63	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Kikim Tengah	2	37	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lahat	10	359	4811	69	61	898	1	49	856	3	37	223
18	Gumay Talang	1	34	479	-	-	-	-	-	-	1	3	83
19	Pseksu	3	41	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Merapi Barat	3	80	1117	-	-	-	-	-	-	1	11	192
21	Merapi Timur	2	49	576	-	-	-	-	-	-	1	9	170
22	Merapi Selatan	1	35	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lahat Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>1.399</b>	<b>16.730</b>	<b>123</b>	<b>105</b>	<b>1.822</b>	<b>3</b>	<b>104</b>	<b>1.437</b>	<b>10</b>	<b>131</b>	<b>1.722</b>

Keterangan: Data Kecamatan Lahat Selatan dan Mulak Sebingkai masih tergabung dengan data kecamatan induk sebelum pemekaran.

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2021

**Tabel 2.18**

**Jumlah Sekolah, Guru, Murid, pada SMU dan SMK Sederajat Kabupaten Lahat Tahun 2019**

No	Kecamatan	SMU Negeri			SMU Swasta			SMK Negeri			SMK Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Tanjung Sakti Pumi	1	24	553	-	-	-	1	37	244	-	-	-
2	Tanjung Sakti Pumu	1	34	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Agung	1	39	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mulak Ulu	1	33	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tanjung Tebat	1	10	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pulau Pinang	1	33	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pagar Gunung	1	34	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gumay Ulu	1	16	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jarai	1	55	806	1	12	144	1	95	671	-	-	-
10	Pajar Bulan	1	33	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Muara Payang	1	22	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukamerindu	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kikim Barat	1	27	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kikim Timur	3	69	975	-	-	-	-	-	-	1	7	219
15	Kikim Selatan	2	36	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Kikim Tengah	2	28	306	-	-	-	1	15	193	-	-	-
17	Lahat	5	263	3770	8	100	1.129	3	226	2.552	3	66	986
18	Gumay Talang	1	29	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pseksu	1	12	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Merapi Barat	1	37	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Merapi Timur	1	35	279	-	-	-	1	26	412	-	-	-
22	Merapi Selatan	1	29	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lahat Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>898</b>	<b>12.034</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>1.273</b>	<b>7</b>	<b>399</b>	<b>4.072</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>1.205</b>

Keterangan: Data Kecamatan Lahat Selatan dan Mulak Sebingkai masih tergabung dengan data kecamatan induk sebelum pemekaran.

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2021

**Tabel 2.19**



**Jumlah Sekolah, Guru, Murid, pada MA (Madrasah Aliyah) Kabupaten Lahat Tahun 2019**

No	Kecamatan	MA Negeri			MA Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Tanjung Sakti Pumi	-	-	-	-	-	-
2	Tanjung Sakti Pumu	-	-	-	-	-	-
3	Kota Agung	-	-	-	-	-	-
4	Mulak Ulu	-	-	-	-	-	-
5	Tanjung Tebat	-	-	-	-	-	-
6	Pulau Pinang	-	-	-	-	-	-
7	Pagar Gunung	-	-	-	-	-	-
8	Gumay Ulu	-	-	-	-	-	-
9	Jarai	-	-	-	-	-	-
10	Pajar Bulan	-	-	-	-	-	-
11	Muara Payang	-	-	-	-	-	-
12	Sukamerindu	-	-	-	-	-	-
13	Kikim Barat	-	-	-	-	-	-
14	Kikim Timur	-	-	-	1	11	133

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

15	Kikim Selatan	-	-	-	-	-	-
16	Kikim Tengah	-	-	-	-	-	-
17	Lahat	1	57	775	1	5	15
18	Gumay Talang	-	-	-	1	9	37
19	Pseksu	-	-	-	-	-	-
20	Merapi Barat	-	-	-	-	-	-
21	Merapi Timur	1	33	201	-	-	-
22	Merapi Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Lahat Selatan	-	-	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>90</b>	<b>976</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>437</b>

Keterangan: Data Kecamatan Lahat Selatan dan Mulak Sebingkai masih tergabung dengan data kecamatan induk sebelum pemekaran.

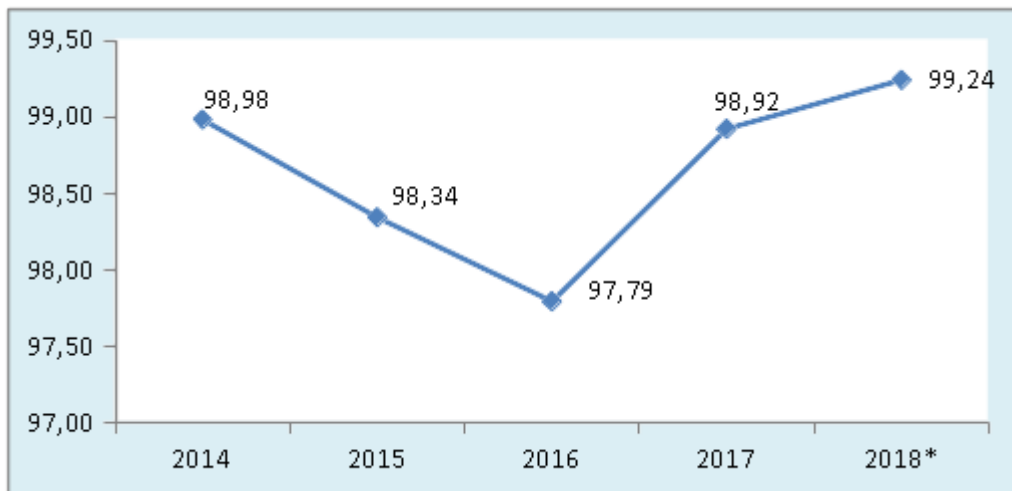
Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2019

➤ **Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 angka melek huruf Kabupaten Lahat sebesar 98,98% mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 99,24 %. Angka melek huruf tersebut kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 100 % artinya sekitar 99 persen lebih penduduk di Kabupaten Lahat yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Peningkatan angka melek huruf menggambarkan bahwa masyarakat yang buta huruf di Kabupaten Lahat semakin berkurang sebagai dampak positif pelaksanaan program buta aksara.

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014-2018**



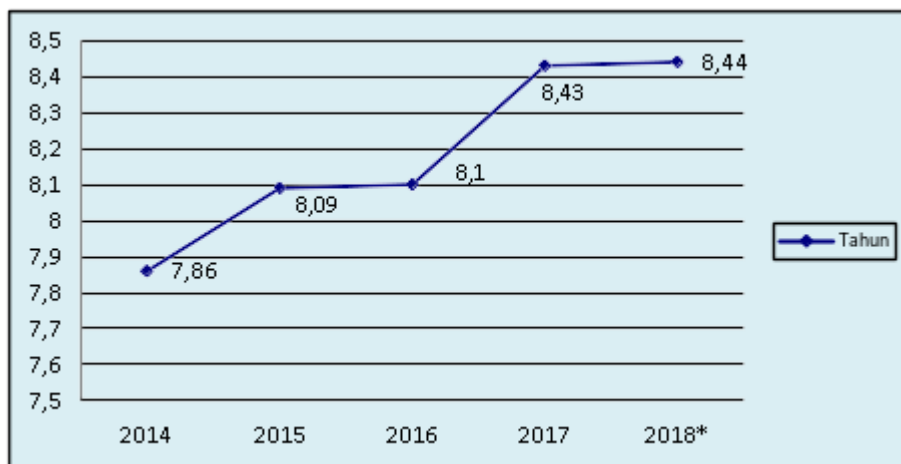
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat Tahun 2019

➤ **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata Rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

**Grafik 2.5**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014-2018**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat Tahun 2018

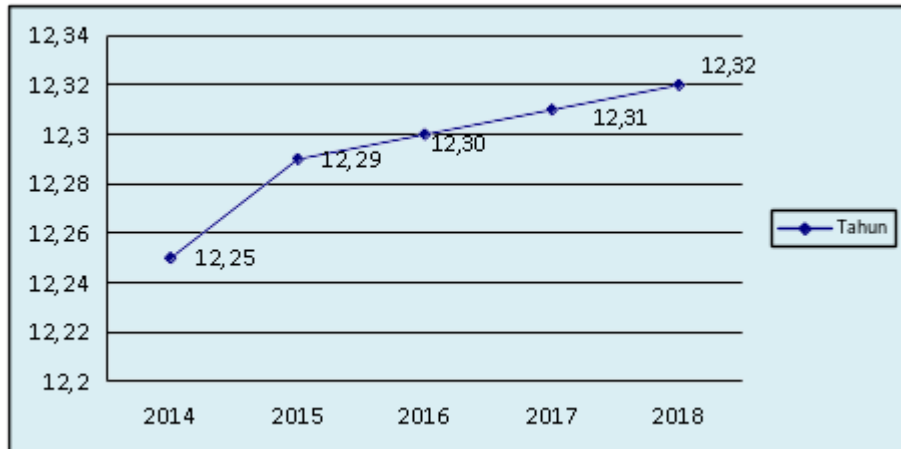
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lahat

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami tren meningkat yaitu dari 7,86 tahun menjadi 8,44 tahun. Ini maknanya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 adalah 8,74 tahun atau rata-rata menyelesaikan pendidikan kelas VIII SMP pada semester I. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah misalnya meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan lain sebagainya. Regulasi yang bisa dibuat dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah misalnya pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah.

Selain angka rata-rata lama sekolah, indikator yang diperlukan juga dalam menentukan indeks pembangunan manusia adalah Angka Harapan Lama Sekolah. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari tahun 2014 Angka Harapan Lama Sekolah 12,25 tahun meningkat menjadi 12,32 pada tahun 2018. Secara rinci capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.6**

**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lahat  
Tahun 2014-2018**



Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2019

➤ **Angka Partisipasi Sekolah**

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

**a. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2019 mencapai lebih dari 100 persen sekitar 111,71 persen, Sedangkan pada tahun 2020 untuk jenjang Sekolah Dasar terjadi penurunan sebesar 109,94 Persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun drmgam aturan

yang baru tidak dapat duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih sedikit dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2019 APK sebesar 92,07 persen. Pada Tahun 2020 terjadi Penurunan sebesar 93,36 Persen. APK SMA sederajat sebesar 79,34 persen di tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi tren peningkatan APK yaitu sebesar 80,23 persen . Secara rinci perkembangan APK menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.23.

**Tabel 2.20**

**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2020**

(APK) Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>		Angka Partisipasi Kasar <i>Gross Participation Rates</i>	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI <i>Elementary School</i>	98,81	99,44	111,71	109,94
SMP/MTs <i>Junior High School</i>	87,14	87,34	92,07	93,36
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	67,21	67,06	79,34	80,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat Tahun 2021

**b. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK).

Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk

mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni pada kurun waktu 2019-2020 secara keseluruhan dari tingkat SD, SMP dan SMA menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2019 APM Sekolah Dasar sebesar 98,81 persen terjadi peningkatan sebesar 99,44 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan APM pada tahun 2019 untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing - masing sebesar 87,41 persen dan 67,21 persen, pada tahun 2020 APM untuk jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 87,34 persen sementara untuk jenjang SMA juga terjadi penurunan sebesar 67,06 persen. Rendahnya APM juga menunjukkan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya. Secara rinci Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lahat kurun waktu 2019 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.23.

✧ **Kesehatan**

➤ **Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah  $25 < x > 85$  (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun).

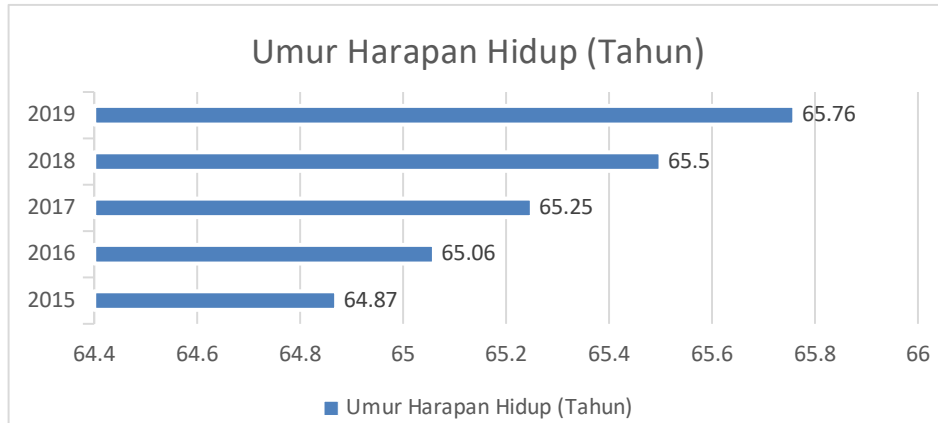
Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya. Angka usia harapan hidup Kabupaten Lahat tahun 2019 sebesar 65,76 tahun, masih di bawah rata-rata angka



harapan Provinsi Sumatera Selatan, dimana rata-rata angka usia harapan Provinsi Sumatera Selatan.

**Grafik 2.7**

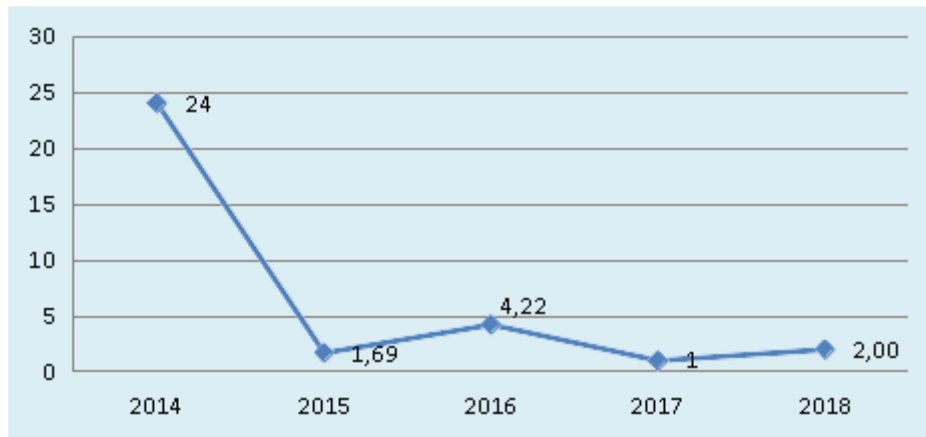
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Lahat  
Tahun 2016 - 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Lahat 2020

➤ **Angka Kematian Bayi**

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayusia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan kinerja yang baik. Pada tahun 2018 Angka Kematian Bayi sebesar 2,00 menunjukkan kinerja yang baik < 24 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 2.8

### Angka Kematian Bayi Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018

➤ **Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,001 persen (target  $\leq 1$ ).

Tabel 2.21  
Gizi Buruk Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018

Tahun	Gizi Buruk (%)
2014	0,04
2015	0,04
2016	0,04
2017	0,001
2018	0,13

Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat 2014-2018

Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk.

Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk.

#### ✧ **Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah

penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

**Tabel 2.22**

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut  
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis  
Kelamin di Kabupaten Lahat, 2019**

Jenis Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
<b>I. Angkatan Kerja</b>						
1. Bekerja	184.770	197.591	-	201.240	N/A	204.129
2. Pengangguran	10.999	8.783	-	9.100		7.704
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>						
(Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	81.304	74.749	-	289.153		297.032
<b>Jumlah</b>	<b>277.073</b>	<b>281.123</b>	-	<b>499.493</b>		<b>508.865</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,66	73,41	-	72,74	71,50	85.122
Tingkat Pengangguran	5,62	4,26	-	4,33	3.29	?
Tingkat Kesempatan Kerja	94,38	95,74	-	95,84		?

Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat pada

kurun waktu tahun 2014-2019 berdasarkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama menunjukkan peningkatan yaitu dari tahun 2014 berjumlah 184.770 orang meningkat menjadi 204.129 orang pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukan penduduk usia ekonomi aktif yang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi jauh lebih banyak.

Perkembangan TPAK Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 yaitu pada tahun 2014 mencapai 70,66% meningkat menjadi 72,74% di tahun 2017. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan. TPAK laki-laki bersifat universal, karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2017 sebesar 59,47 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang angkanya sebesar 60,26 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja wanita yang sedang mencari pekerjaan.

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 4,33 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang angkanya sebesar 5,62 persen.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk laki-laki, yaitu dari 5,98 persen tahun 2014 menjadi 4,43 persen tahun 2017. Demikian juga dengan angka pengangguran pada penduduk perempuan turun dari 5,07 persen tahun 2014 menjadi 4,16 persen tahun 2017. Penurunan ini terjadi disinyalir karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas

sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta.

Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui

penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Lahat.

#### **B. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lahat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Lahat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Kabupaten Lahat mempunyai kekayaan seni budaya yang beragam, hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Lahat dikenal dengan "Bumi Seribu Megalit" karena pada tahun 2012 dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia), yaitu Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Sebaran situs megalit berada di beberapa kecamatan seperti: Merapi Barat, Kota Lahat, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Pagar Gunung, Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Suka Merindu dan Tanjung Sakti. Peninggalan megalit di Kabupaten Lahat berupa: arca, arca menhir, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, dolmen, batu gelang, batu bergores, tetralith, bilik batu, lukisan bilik batu dan tempayan kubur. Jenis temuan megalit sebanyak 13 jenis hanya di temukan di Kabupaten Lahat.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lahat yang berbukit sehingga terdapat



banyak air terjun, sungai, danau dan sumber air panas. Saat ini telah terdata di Kabupaten Lahat terdapat lebih kurang 126 air terjun dengan ketinggian dan keindahan yang berbeda. Pesona air terjun Kabupaten Lahat tersebar di beberapa kecamatan seperti: air terjun Milang di Kecamatan Merapi Barat. Air terjun Deras, air terjun Renalap di Kecamatan Merapi Selatan. Air terjun Ganya dan Serame di Kecamatan Kota Lahat. Air terjun Ketapang, Salak, Sumbing, Bidadari, Pandak, Pegadungan, Terlantang, Ujan Panas, Panjang, Kunduran, Gunung Nyawe, Gegas di Kecamatan Pulau Pinang. Air terjun Lintang Kecil, Lintang Besar, Buluh 7 Tingkat, Maung di Kecamatan Gumay Ulu. Air terjun Kesik, Jambat Akar, Kijeng di Kecamatan Tanjung Tebat. Air terjun Bale, Kerinjing, Nelindang, Semindang Rindu di Kecamatan Kota Agung. Air terjun Jernih, Suruman, Dayang Rindu, Penenangan, Tinggi, Napalan di Kecamatan Mulak Ulu, air terjun Ughul Kecil, Ughul Besar, Bemban, Laye di Kecamatan Pagar Gunung, air terjun Lawang Agung di Kecamatan Muara Payang, air terjun 9 Panggung di Kecamatan Pseksu, air terjun Bukit Timur, Pama Salak, Gimo, Embun di Jarai, air terjun Pemandian Ratu di Kecamatan Tanjung Sakti. Sedangkan sumber air panas di Kabupaten Lahat terdapat di Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Sakti. Sumber air panas yang berada di Kecamatan Pagar Gunung terletak di Desa Padang dan Danau di hutan lindung Bukit Barisan pada ketinggian 850 mdpl. Sumber air panas di Kecamatan Tanjung Sakti berada di tengah Desa Pajar Bulan, sehingga mudah di jangkau. Sumber air panas ini terletak tepat di bawah jembatan desa Pajar Bulan. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dengan wisata arung jeram di sungai Manna.

Kabupaten Lahat memiliki arena arung jeram di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Lematang, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Ketika berarung jeram selain menyusuri sungai juga akan melihat dan singgah di air terjun. Untuk arung jeram di sungai Lematang akan singgah di air terjun Salak dan arung jeram di Sungai Selangis Kecamatan Gumay Ulu akan melihat 6 air terjun dan singgah di air terjun Buluh (7 tingkat). Sedang arung jeram di Sungai Manna Kecamatan Tanjung Sakti akan dibawa menikmati jernihnya air sungai danindahny pemandangan sepanjang sungai Manna.

Selain sebagai sarana olahraga arung jeram, saat ini juga merupakan salah satu potensi pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lahat. Masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat selain berolahraga juga dapat menikmati suasana keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki Bukit Serelo atau Gunung Jempol merupakan sebuah bukit yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Letak bukit ini di desa Padang Kecamatan Merapi Selatan atau berjarak 27 km dari pusat Kota Lahat. Bukit dengan ketinggian 900 mdpl menjadi simbol Kabupaten Lahat. Di sini juga terdapat pelatihan gajah Sumatera dan dapat dijadikan sarana untuk rock climbing. Keberhasilan berbagai seni dan budaya serta olah raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

### **2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai di antaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **A. Fokus Layanan Urusan Wajib**

Fokus layanan urusan pemerintah wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

**1) Urusan Pendidikan**

➤ **Angka Partisipasi Sekolah**

Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang pendidikan antara lain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2019 dilihat dari golongan usia 7-12 tahun sebesar 111,71 persen yang artinya terdapat 111 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 92,07 persen yang artinya penduduk usia 13-15 tahun ditemui 92 orang yang bersekolah. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 79,34 persen yang artinya pada tahun 2019, terdapat 79 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah faktor biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi pola angka partisipasi sekolah secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah dalam kurun waktu 2015-2019 memperlihatkan angka yang fluktuatif untuk setiap kategori kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi tahun 2019 pada kelompok umur 7-12 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.

**Tabel 2.23**

**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur  
Di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2019**

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
7-12	99,67	99,53	99,53	100,00	104,15	111,71
13-15	100,00	95,92	95,14	94,26	84,9	92,07
16-18	82,65	77,41	73,17	72,15	82,46	79,34

*Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat Tahun 2019*

➤ **Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**

Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di setiap daerah. Keberhasilan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD, SLTP dan SLTA yang rusak berat dan penempatan guru di sekolah yang kekurangan guru.

**Tabel 2.24**

**Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2014 – 2019**

Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

<b>Jumlah Sekolah</b>						
SD+MI (Negeri & Swasta)	313	313	316	317	318	319
SMP+MTS (Negeri & Swasta)	84	85	86	87	88	89
SMA+SMK+MA (Negeri & Swasta)	53	54	55	60	56	58
<b>Jumlah Guru</b>						
SD+MI (Negeri & Swasta)	5.399	4.854	4.473	4.434	4.420	4.474
SMP+MTS (Negeri & Swasta)	2.156	1.749	2.147	1.704	1.892	1.835
SMA+SMK+MA (Negeri & Swasta)	2.201	1.675	1.738	1.613	1.738	1.719
<b>Jumlah Murid</b>						
SD+MI (Negeri & Swasta)	49.473	48.562	47.745	47.483	47.105	46.202
SMP+MTS (Negeri & Swasta)	21.945	21.893	22.047	21.711	21.980	21.603
SMA+SMK+MA (Negeri & Swasta)	17.937	17.980	19.114	19.997	19.787	20.535

Sumber: Data dan Informasi Lahat Dalam Angka Tahun 2020

➤ **Rasio Murid - Sekolah dan Rasio Murid - Guru**

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan sekolah dalam menampung muridnya. Semakin kecil rasio antara murid dan sekolah maka semakin baik indikator pendidikan mengenai daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang semakin kecil tentunya menunjukkan bahwa sekolah lebih intensif dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas. Semakin rendah nilai rasio menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin membaik. Rasio murid terhadap sekolah lebih disebabkan oleh jumlah murid yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah.

Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2018 pada setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang relative lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat per tingkat pendidikan, tingkat SD memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 148,128. Selanjutnya adalah tingkat SLTP sebesar

249, 772 dan SLTA sebesar 353,339.

Nilai rasio murid terhadap sekolah yang menunjukkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa penyebab nilai rasio yang menurun ini terjadi karena peningkatan fasilitas jumlah sekolah di Kabupaten Lahat. Jumlah sekolah pada tahun 2018 bahkan meningkat pada berbagai tingkat pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah ini lebih disebabkan oleh jumlah murid yang bertambah diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang kemudian diikuti dengan upaya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Selanjutnya, angka rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu tahun tertentu. Semakin kecil rasio murid terhadap guru tentunya menunjukkan semakin baiknya pendidikan yang bisa diberikan guru terhadap muridnya. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2014-2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai fluktuatif. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai yang semakin besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pengajaran guru mengalami penurunan karena beban murid yang harus diajar lebih banyak pada tahun 2018 sedangkan jumlah guru berkurang sehingga menyebabkan guru menjadi kurang intens memperhatikan muridnya.

Pada jenjang SD, 1 orang guru mengawasi secara rata-rata 9 orang murid, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang murid dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 12 orang murid. Fenomena tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi perhatian

penting bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dimana indikator kesejahteraan taraf pendidikan yang baik diterima pada setiap masyarakat akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula.

## 2) **Urusan Kesehatan**

Gambaran umum kesehatan di Kabupaten Lahat menunjukkan derajat atau status kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, morbiditas, imunisasi, dan angka harapan hidup. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

### ➤ **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk dapat diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah maupun swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan lain-lain. Selain itu juga mencakup sarana pendukung kesehatan seperti tempat praktek dokter, bidan, poliklinik dan posyandu.

**Tabel 2.25**

**Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2019**

<b>Fasilitas Kesehatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
Puskesmas	32	33	33	33	33	33
Puskesmas Pembantu	64	63	65	65	56	59

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Rumah Bersalin	1	1	1	1	1	0
Apotik	11	16	15	19	22	8
Klinik/Balai Pengobatan	5	13	13	13	13	8
Optikal	3	4	4	4	4	4

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2020*

Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lahat kurun waktu tahun 2014-2019 cenderung menunjukkan peningkatan. Begitu pula halnya dengan jumlah tenaga kesehatan. Tahun 2018 di Kabupaten Lahat terdapat 2 unit rumah sakit, 33 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu, 1 unit rumah bersalin. Sementara itu jumlah apotik 19 buah, klinik/balai pengobatan sebanyak 13 buah dan optikal sebanyak 4 buah yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lahat.



**Tabel 2.26**

**Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja  
di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Tenaga Kesehatan	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dokter	65	52	31	33	28
2. Perawat	703	308	172	188	167
3. Bidan	547	332	173	236	297
4. Farmasi	30	13	9	12	11

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2018*

Tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 terdiri dari dokter sebanyak 28 orang, perawat sebanyak 167 orang, bidan sebanyak 297 orang, dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Hal tersebut dapat menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesadaran pentingnya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis serta partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan dengan tenaga medis yang semakin tinggi. Akses masyarakat terhadap bidan desa yang semakin mudah akan mengurangi angka kematian bayi sekaligus juga meningkatkan angka harapan hidup.

➤ **Morbiditas**

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dijadikan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat

kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Tingkat morbiditas Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.33

**Tabel 2.27**

**Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk  
di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Kesakitan/Morbiditas</b>
2013	40,05
2014	44,49
2015	31,75
2016	0,0005
2017	22
2018	44

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2018*

➤ **Imunisasi**

Imunisasi merupakan upaya pemeliharaan kesehatan yang cukup dapat membantu mempertahankan kekebalan tubuh dalam upaya pencegahan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak yang telah berumur satu tahun sebaiknya telah mendapat imunisasi lengkap yaitu BCG, Polio 3 kali, DPT 3 kali dan campak. Dilihat dari angka persentasenya kegiatan imunisasi di Kabupaten Lahat masih ada dibawah 90 persen anak yang mendapatkan imunisasi, hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana lebih dari 90 persen anak mendapatkan imunisasi lengkap. Cakupan imunisasi balita di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 terlihat fluktuatif. Imunisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B.

**Tabel 2.28**

**Persentase Imunisasi Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Imunisasi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
BCG	96,83	94,15	97,48	91,91
DPT	95,41	93,86	94,72	n/a
POLIO	96,14	96,07	98,31	n/a
CAMPAK/ MORBILI	83,73	83,03	85,73	65,73
HEPATITIS B	93,21	93,54	90,81	-
- B1				79,58
- B2				0,92
- B3+				19,03

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2017

➤ **Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran**

Tingkat pengetahuan penduduk di bidang kesehatan yang cukup tinggi berdampak positif terhadap keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan yang juga akan berpengaruh pada angka kematian bayi. Persentase kelahiran menurut penolong kelahiran di Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 2.35

**Tabel 2.29**

**Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran  
Di Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2017**

Tahun	Tenaga Kesehatan	Non Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan
2014	9.741	512	10.253	95
2015	8.647	212	8.886	95
2016	8.343	221	8.564	93
2017	7.376	2.083	9.459	91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2018

Selanjutnya salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah keberhasilan Program Keluarga Berencana. Hal yang dapat dipantau sebagai salah satu indikatornya adalah banyaknya peserta KB aktif.

**Tabel 2.30**

**Peserta KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi, PUS dan  
Rasio Peserta KB-PUS Di Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2017**

Alat Kontrasepsi	Peserta KB			
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
IUD	440	220	n/a	1.410
MOP	22	-	n/a	144
MOW	65	45	n/a	755
Kondom	2.059	1.363	n/a	n/a
Implan	5.475	2.192	n/a	13.452
Suntik	8.343	4.504	n/a	33.600
Pil	6.853	4.132	n/a	8.934
Total	23.257	12.456	n/a	58.295
<b>Jumlah PUS</b>	<b>90.314</b>	<b>92.667</b>	n/a	<b>78.861</b>

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2017

Cara KB yang paling banyak diminati wanita kawin usia subur di Kabupaten Lahat adalah Suntik KB. Pada tahun 2015 pengguna suntikan mencapai 64,11 persen, dan berfluktuasi dari tahun ke tahunnya menjadi 40 persen pada tahun 2016. Kondisi ini dapat menunjukkan terjadi pergeseran pilihan masyarakat pada cara/jenis alat KB yang digunakan, dari pil KB ke suntik KB. Perubahan preferensi masyarakat ini disinyalir disebabkan oleh alasan kepraktisan, kenyamanan dan efek yang ditimbulkan bagi kesehatan. Hal ini tentunya menjadi perhatian pengambil kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan terobosan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB dalam rangka mengatur jarak kelahiran.

### **3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **➤ Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkatnya mobilitas penduduk maupun arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Infrastruktur utamanya adalah jalan yang merupakan

prasarana pengangkutan darat yang penting karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah.

➤ **Pengembangan Sistem Jaringan Jalan**

Menurut UU nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Rencana pengembangan jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Lahat untuk mewujudkan struktur ruang wilayah Kabupaten yang optimal.

**Tabel 2.31**

**Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang  
di Kabupaten Lahat (km) Tahun 2014-2019**

Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
Jalan Negara	114,868	125,955	125,955	166,275	166,275	205,37
Jalan Provinsi	87,93	100,08	98,28	98,28	98,28	111,41
Jalan Kabupaten	1.297,65	1.297,65	1.339,15	1.339,15	1.339,15	1.339,15
<b>Jumlah</b>	<b>1.500,448</b>	<b>1.523,685</b>	<b>1.563,385</b>	<b>1.603,705</b>	<b>1.603,705</b>	<b>1.655,93</b>

*Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2020*

Panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di seluruh wilayah kabupaten Lahat tahun 2019, mencapai 1.655,93 Km. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang negara sepanjang 205,37 Km, jalan kewenangan Pemerintah Provinsi 111,41 Km dan selebihnya 1.339,15 Km merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2018, kondisi jalan mantap Kabupaten Lahat berdasarkan kewenangnya pada jalan negara adalah sepanjang 143,23 km atau 86,14%, jalan kewenangan Pemerintah Provinsi sepanjang 79,25 km atau 80,64% dan jalan kewenangan kabupaten sepanjang 829,07 km atau 61,91% sehingga jumlah total jalan mantap yang ada di Kabupaten Lahat sepanjang 1.051,54 Km atau 65,57%.

**Tabel 2.32**

**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan  
di Kabupaten Lahat (km) Tahun 2014-2018**

Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019

Diaspal	677,42	674,92	685,92	696,92	698,92	729,9
Kerikil	367,93	370,43	387,330	384,33	382,33	
Tanah	202,3	241,4	262,9	257,9	351,54	
Lainnya	50,00	10,90	3,00	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>1.297,65</b>	<b>1.297,65</b>	<b>1.339,15</b>	<b>1.339,15</b>		

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

**Tabel 2.33**

**Kondisi Jalan Kabupaten Lahat**

Uraian	Kondisi					
	Baik		Sedang		Rusak	
	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)
Jalan Kabupaten (Panjang Jalan 1.339,15 km)	390,98	29,20	388,79	29,03	559,39	41,77

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Lahat 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Total panjang jalan Kabupaten Lahat sepanjang 1.339,15 km terdapat 29,20% (390,98 km) berkondisi baik dan 29,03% (388,79 km) dalam kondisi sedang dan terdapat 41,77% (559,39 km) dalam kondisi rusak.

➤ **Jaringan Irigasi**

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sebagai salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, maka jaringan irigasi tersebut haruslah dalam kondisi baik sehingga kebutuhan air irigasi bagi pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi baik untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi < 10% dari total panjang saluran irigasi, demikian sebaliknya kondisi rusak untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi > 10% dari total panjang saluran irigasi. Saluran irigasi di Kabupaten Lahat seluas 13.348 ha, yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang. Pada awal tahun 2017 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,10% yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik.

**Tabel 2.34**

**Kondisi Irigasi Kabupaten Lahat**

Uraian	Kondisi					
	Baik		Sedang		Rusak	
	Luas (ha)	(%)	Luas (ha)	(%)	Luas (ha)	(%)
Luas Irigasi Kewenangan Daerah 13.348 ha	9.729	72,88	2.404,55	18,01	1.214,9	9,10

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Lahat 2019

**Tabel 2.35**

**Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Kondisi Jaringan Irigasi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Persentase luas irigasi baik	61,84	64,18	69,08	72,88

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2018



Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 terlihat meningkat dan menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 61,84 meningkat menjadi 72,88 atau seluas 9.729 hektar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lahat kedepan yaitu perlu menjaga dan mempertahankan luasan daerah irigasi agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kewenangannya, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lahat sebanyak 214 Daerah Irigasi dengan Luas 13.348 hektar, sedangkan untuk kewenangan Provinsi Sumsel sebanyak 8 Daerah Irigasi dengan luas 10.443 hektar.

**Tabel 2.36**  
**Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014 – 2017**

Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang (Meter)			
	2014	2015	2016	2017
Primer	375.100	375.100	375.100	375.100
Sekunder	339.600	339.600	339.600	339.600
Tersier	-	-	-	-
Jumlah	714.700	714.700	714.700	714.700

*Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat Tahun 2017*

➤ **Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lahat masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim PK RTRW Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lahat.

Hasil dari Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan hasil penilaian per aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek maka RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 perlu direvisi. Selain itu, penilaian terhadap perubahan RTRW berdasarkan beberapa kajian didapat hasil total perubahan sebesar 18%, yang artinya tidak perlu dilakukan pencabutan peraturan Daerah tetapi hanya perlu perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

Beberapa rekomendasi dalam revisi RTRW berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 sebagai berikut :

a. Revisi Peraturan Daerah

Perubahan peraturan daerah disebabkan antara lain adanya perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah kecamatan. Selain itu perubahan peraturan daerah dilakukan untuk mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam

RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

b. Revisi terhadap Materi Teknis

Revisi terhadap materi teknis akan disesuaikan dengan perubahan pada Peraturan Daerah serta mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

c. Revisi terhadap peta

Revisi terhadap peta-peta juga diperlukan untuk memberikan gambaran data spasial terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 yang mengalami revisi. Revisi peta meliputi perubahan batas administrasi, perubahan data-data spasial yang dipersyaratkan dalam dokumen RTRW, perubahan peta-peta rencana yang meliputi peta struktur ruang, peta pola ruang dan peta kawasan strategis.

**4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari gangguan luar dan sebagai tempat tinggal untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Untuk itu, rumah diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Saat ini rumah merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Dengan adanya data perumahan dapat menggambarkan sampai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain akses rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya. Permasalahan air minum, sanitasi dan sumber listrik perlu menjadi perhatian, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lahat.

➤ **Rumah Tangga dengan Akses Air Minum**

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk. Dalam rangka mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) diperlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai hal dimaksud. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, dimana permasalahan akses air minum, kawasan kumuh dan sanitasi yang layak sudah menjadi prioritas nasional merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Capaian rata-rata Kabupaten Lahat untuk akses air bersih tahun 2018 sebesar 43,70% masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 72,99% dan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,84%. Angka capaian akses air minum layak Kabupaten Lahat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 45,83%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan akses air minum layak di Kabupaten Lahat semakin rendah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan capaian akses

universal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik melalui hibah, CSR, APBN, APBD dan lain-lain.

**Tabel. 2.37**  
**Capaian Persentase Akses Air Minum Layak**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014 - 2018**

<b>Wilayah</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nasional	68,38	70,97	70,63	71,27	72,99
Sumatera Selatan	59,97	64,47	63,24	62,71	62,84
Lahat	38,29	42,89	54,68	45,83	43,70

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2018*

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam upaya mendorong capaian akses universal yang telah dicanangkan secara nasional (100-0-100) pada tahun kedepan untuk akses air minum antara lain: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, merencanakan proyeksi kebutuhan penyediaan sarana air minum agar dapat berkelanjutan, membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum yang berkelanjutan. Dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan

penyediaan air minum. Penyediaan air minum disalurkan ke seluruh konsumen, diantaranya sosial (umum; khusus), non niaga (rumah tangga; instansi pemerintah), niaga (kecil; besar) dan khusus (pelabuhan; lainnya). Pada tahun 2017, banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat mencapai 6.644 pelanggan yang terdiri dari jenis konsumen sosial, konsumen niaga, non niaga, industri dan khusus. Secara rinci perkembangan banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 2.44.

**Tabel 2.38**

**Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Jenis Konsumen	2014	2015	2016	2017
Sosial	78	85	90	106
▪ Umum	60	85	90	-
▪ Khusus	18	-	-	-
Non Niaga	3.596	4.104	4.130	6.353
▪ Rumah Tangga	3.493	4.007	4043	6.271
▪ Instansi Pemerintah	103	97	87	82
Niaga	295	275	194	183
▪ Kecil	262	242	194	-
▪ Besar	33	33	-	-
Industri	1	1	1	1
▪ Kecil	1	-	1	-
▪ Besar	-	-	-	1
Khusus	4	3	-	1
▪ Pelabuhan	-	3	-	-
▪ Lainnya	4	-	-	-
Jumlah	3.974	4.468	4.415	6.644

*Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018*

➤ **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**

Laju pertumbuhan penduduk menjadi

tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan akses sanitasi layak. Untuk itu, perlu juga meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi, sehingga dapat meningkatnya sanitasi yang layak bagi penduduk. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Lahat meningkat yaitu sebesar 75,89% jika dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 68,65 %, namun masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,32% dan nasional sebesar 79,45%. Usaha untuk mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) masih memerlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten Lahat serta kesadaran masyarakat Kabupaten Lahat akan pentingnya akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

**Tabel. 2.39**  
**Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Nasional	61,08	62,14	67,80	78,33	79,45
Sumatera Selatan	56,96	55,84	66,78	78,62	80,32
Lahat	43,44	47,19	53,47	68,65	75,89

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2018*

➤ **Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat

kaitannya dengan permukiman kumuh, karena pada permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Permukiman kumuh yang semakin meluas serta lahan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk yang akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai telah menjadi prioritas nasional untuk segera diselesaikan. Sampai dengan tahun 2018 cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Lahat mencapai 84,83%. Dengan demikian masih 15,17 persen rumah di Kabupaten Lahat termasuk pada cakupan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan yang serius. Dalam hal ini, Komitmen Kabupaten Lahat masih sangat diperlukan dalam mendorong capaian akses universal yaitu 0% kawasan kumuh. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat ini ditunjukkan dengan berbagai upaya, antara lain memprioritaskan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dalam upaya mengentaskan kawasan perumahan kumuh, meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni.



➤ **Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Sumber penerangan yang digunakan suatu rumah tangga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut. Dengan adanya sumber penerangan listrik rumah tangga tentunya akan semakin mudah untuk berakses ke media komunikasi, radio, televisi, dan internet, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, ketersediaan fasilitas listrik selain untuk keperluan penerangan, di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian rumah tangga, seperti untuk keperluan industri rumah tangga dan jasa. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2017 rumah tangga di Kabupaten Lahat yang sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik itu PLN (dengan meteran atau tanpa meteran) maupun listrik non PLN, secara keseluruhan mencapai 94,4 persen. Sementara sisanya masih menggunakan jenis penerangan seperti lampu petromak/aladin, pelita/senter dan lain sebagainya. PLN menyalurkan listrik kepada pelanggannya yang terdiri dari kelompok rumah tangga, usaha, industri, instansi dan lainnya. Secara keseluruhan, kecamatan di Kabupaten Lahat di tahun 2017. Tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Lahat sebanyak 125,103,529 kwh. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan jumlah tenaga listrik yang terjual pada tahun sebelumnya, yaitu 120,892,952 kwh pada tahun 2016.

Kapasitas daya listrik PLN yang tersambung pada konsumen menurut kelompok tarif di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2017 secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan

banyaknya kelompok tarif rumah tangga, usaha, industri, instansi dan lainnya telah menggunakan listrik. Seperti kelompok tarif rumah tangga pada tahun 2014 mencapai 531.529,50 kva menjadi 58.590,0 Kva pada tahun 2017. Kemudian kelompok tarif usaha dari 77.089,05 Kva ditahun 2014 menurun menjadi 13.297,3 Kva di tahun 2017.

**Tabel. 2.40**

**Kapasitas Daya Listrik Tersambung pada Konsumen  
Menurut Kelompok Tarif di Kabupaten Lahat (kVA) Tahun 2014 - 2017**

Kelompok Tarif (kVa)	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Rumah Tangga	531.529,50	568.232,3	55.163,7	58.590,0
Usaha	77.089,05	79.457,8	12.484,0	13.297,3
Industri	72.603,8	74.691,7	2.225,1	2.225,1
Instansi	24.648,03	27.347,33	3.262,13	3.440,63
Lain-Lain*)	2.224,5	1.065	2.784	3.537
<b>Jumlah</b>	<b>708.094,9</b>	<b>750.794</b>	<b>75.918</b>	<b>81.090</b>

*Keterangan \*) Termasuk Sosial dan Lampu Jalan*

*Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018*

**Tabel. 2.41**

**Jumlah Produksi Tenaga Listrik dan  
Kapasitas Panjang Jaringan Tahun 2017**

Lokasi	Uraian	Tenaga Listrik	Panjang (Kms)/Net	
				JTR
1. Lahat	Gardu Induk Lahat	31.170	289.991	325.929
2. Bunga Mas	Lahat Centry Box	2.610	79.568	32.404
3. Tanjung Aur	-	-	-	-
4. Tebing Tinggi	-	-	-	-
5. Kota Agung	-	4.049	189.694	40.232

6. Tanjung Sakti	Gardu Induk Pagar Alam	-	-	-
7. Jarai	Jarai	-	-	-
8. Pendopo	Pagar Alam Centry Box	-	-	-
9. Padang Tepong	-	-	-	-
10. Talang Padang	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>37.829,00</b>	<b>559.253</b>	<b>398.565</b>

*Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018*

### **5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat, pada tahun 2017 telah melaksanakan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti halnya juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok daerah.

Masyarakat sebagai salah satu mitra aparat keamanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib serta bebas dari penyakit masyarakat diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pesan moral dalam perwujudannya. Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan sebanyak 10 pelanggaran.

**Tabel 2.42**

**Jumlah Tindak Kejahatan yang terdaftar  
Pada Kejaksaan Negeri di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Jenis Kejahatan	2014	2015	2016	2017
Ketertiban Umum	28	23	22	23
Pencurian/Perampokan	96	99	91	87
Penganiayaan	16	16	15	29
Pembunuhan	2	11	7	3
Penipuan	14	23	18	19
Kesusilaan	7	7	11	10
Pelanggaran	-	-	4	-

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Selain itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan Peraturan Daerah yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan, penertiban penjualan minuman beralkohol, penertiban penginapan, hotel, losmen dan penertiban KTP. Disisi lain dilakukan juga kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas aparat.

#### **6) Urusan Sosial**

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat selaras dengan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya.

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial khususnya layanan dasar tersebut tentunya diperlukan pedoman yang pelaksanaannya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM Bidang Sosial diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya 1). Sumber Daya Manusia yang terbatas baik secara jumlah maupun kualitas (kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2). Penyediaan sarana dan prasarana sosial yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masih kurang jumlahnya dan 3). Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial mengakibatkan target penanganan juga belum maksimal. Tentunya beberapa permasalahan tersebut diperlukan solusi yaitu penambahan dan penguatan kapasitas SDM kesejahteraan Sosial, perbaikan maupun renovasi/pemenuhan sarana prasarana sosial yang memadai sesuai dengan SOP dalam menunjang pelayanan serta

diperlukan juga peraturan yang menyebutkan secara jelas Persentase (%) alokasi anggaran untuk bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk SPM.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar (Usia 6-18 tahun), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK) kelainan fisik/mental belum berusia 18 tahun, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila,

gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai/wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendidik) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Sedangkan yang dimaksud Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa hambatan di bidang sosial antara lain masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh masyarakat, peningkatan PMKS yang masih tinggi setiap tahunnya. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial meliputi berbagai jangkauan pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan bagi lansia terlantar, selain itu juga telah dilakukan peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial termasuk Penyempurnaan Sarana Prasarana Pusat Rehabilitas dan Panti Asuhan, Bantuan Tanggap Darurat kepada para korban bencana. Hal penting lainnya yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencakup

upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan, pemberdayaan KAT bukan hanya dilihat sebatas upaya untuk memathkan isolasi/keterasingan secara fisik dari kelompok-kelompok masyarakat lain di Lingkungannya tetapi lebih penting lagi adalah isu sosial, sehingga mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat sekitarnya.

**Tabel 2.43**  
**Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Mendapat Pelayanan/  
Bantuan Kesejahteraan Sosial sesuai BDT**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Mendapat Pelayanan/Bantuan</b>
2014	5.724 KK
2015	5.900 KK
2016	9.086 KK
2017	8.785 KK
2018	88.424 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lahat Tahun 2018

**Tabel 2.44**  
**Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi  
Keluarga di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pra Sejahtera</b>	<b>Keluarga Sejahtera I dan II</b>	<b>Keluarga Sejahtera</b>	<b>Jumlah</b>
2014	9.924	88.692	21.575	120.191
2015	9.924	88.692	21.575	120.191
2016	7.157	96.065	21.575	124.797
2017	7.014	50.900	46.645	104.559

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Saat ini, permasalahan Urusan Sosial Kabupaten Lahat adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi oleh karena

itu penanganan PMKS harus lebih di Optimalkan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lahat memerlukan target kinerja dan tambahan sumber dana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya melalui program yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan lima tahun mendatang yaitu melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Keluarga sangat Miskin (KSM) yang Memperoleh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Persentase KMS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan Indikator Kinerja Persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dengan Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Terlantar yang dilatih Keterampilannya.

## **7) Urusan Tenaga Kerja**

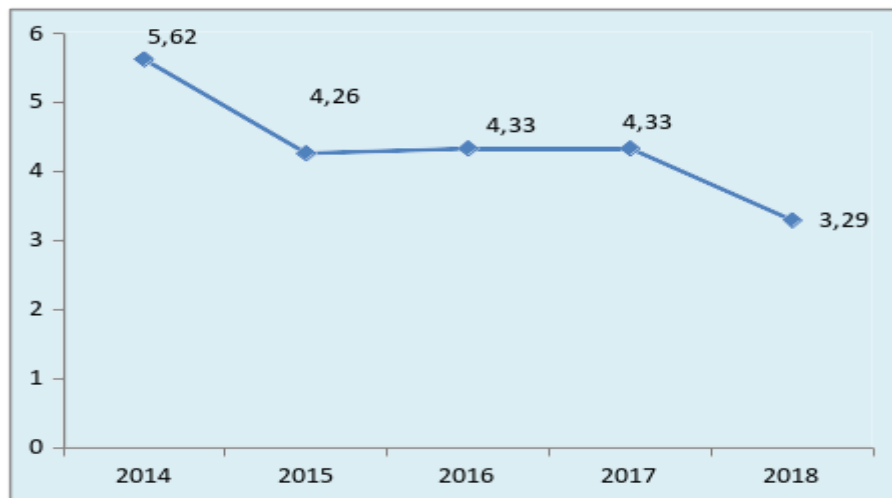


Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Realisasi kinerja urusan tenaga kerja dan transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.52

**Tabel 2.45**  
**Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Lahat 2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Perselisihan buruh dengan pengusaha yang terselesaikan	94,12	59,09	96,67	68,13	94,44
Persentase Lahan Usaha Transmigran yang Produktif	0	0	98,31	34,69	70
Persentase Transmigrans yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup	44,12	n/a	96,67	34,69	50

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat 2018



Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2018

**Grafik 2.9**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014-2018**

Tingkat pengangguran di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu pada tahun 2014 tingkat pengangguran Kabupaten Lahat sebesar 5,62% mengalami penurunan menjadi sebesar 3,29% ditahun 2018. Capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tingkat pengangguran provinsi 4,23% dan nasional 5,34%.

**Tabel 2.46**  
**Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Sektor Kegiatan Ekonomi**  
**di Kabupaten Lahat**

Sektor Kegiatan Ekonomi		Tenaga Kerja		Jumlah
		≥ 10 orang	< 10 orang	
01	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	5.189	-	5.189
02	Pertambangan dan Penggalian	2.196	-	2.196
03	Industri Pengolahan	138	-	138
04	Listrik, Gas dan Air Minum	158	-	158
05	Bangunan	146	-	146
06	Pedagang Besar dan Pedagang Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	853	-	853
07	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	464	-	464
08	Keuangan dan Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	299	-	299
09	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	38	-	38
10	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-
	Jumlah	9.481	-	9.481

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Pada tahun 2017 pencari kerja terdaftar di Kabupaten Lahat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat sebesar 4.093

pekerja dengan peningkatan 84,88 persen. Dari 4.093 Pekerja yang terdaftar meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1.015 orang dengan proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 2.306 pekerja dan yang ditempatkan sebanyak 100 pekerja di tahun 2016. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki jumlah usaha terbanyak di tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja terserap pada lapangan usaha ini sebesar 5.189 pekerja.

**Tabel 2.47**

**Pencari Kerja yang Terdaftar, telah Ditempatkan dan yang belum Ditempatkan di Kabupaten Lahat Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Jenjang Pendidikan	Terdaftar		Telah Ditempatkan		Belum Ditempatkan	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD	14	50	-	-	14	50
SLTP	50	41	-	-	50	41
SMU	1.415	891	-	-	1.415	891
Sarjana Muda	73	126	-	-	73	126
Sarjana	217	226	-	-	217	226
<b>Jumlah 2017</b>	<b>1.769</b>	<b>1.334</b>	-	-	<b>1.769</b>	<b>1.334</b>
<b>Jumlah 2016</b>	<b>619</b>	<b>396</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>549</b>	<b>366</b>

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

**Tabel 2.48**

**Tenaga Kerja Asing Dirinci Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	1	1	-
2. Pertambangan dan Penggalian	82	82	4	2
3. Industri Pengolahan	-	-	-	-
4. Listrik, Gas dan Air	10	10	74	204
5. Bangunan	-	-	-	-
6. Perdagangan Besar	-	-	-	-
7. Angkutan, Perdagangan dan Komunikasi	-	-	-	-
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	-	-	-	-

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	-	-	-	-
10. Pemerintah Kabupaten Lahat	93	93	79	206

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Selanjutnya untuk bidang ketransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi Kabupaten Lahat diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan wilayah dari pedesaan dan sebagai daya ungkit perekonomian sehingga dapat segera memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan.

Saat ini, UPT yang masih menjadi binaan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah UPT Desa Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 250 KK atau 947 jiwa. Ketersediaan sarana prasarana penunjang di UPT Keban Agung masih sangat kurang seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu transmigran perlu mendapat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan bidang ketransmigrasian antara lain Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui Penyusunan Rencana Tekhnis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Tekhnis Jalan (RTJ) di Kawasan Transmigrasi Kikim Kabupaten Lahat, Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Transmigrasi di Kabupaten Lahat, Pembinaan Desa Ex. Petugas Pengelola KTM, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Penyusunan Rencana Teknik di Kawasan Transmigrasi, Penelitian Sondir di Air Kemumu dan Air Jernih.

**Tabel 2.49**

**Data Desa Eks-UPT di Kabupaten Lahat Tahun 2018**

NO	KECAMATAN / UPT	NAMA DESA / DESA EKS TRANS	PENEMPATAN			DISERAHKAN (Tahun)	MENJADI DESA DEFINITIF	PENDUDUK SEKARANG	
			KK	Jiwa	Tahun			KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kikim Timur	1. Bunga Mas V/A	3 00	1,67 0	1980/1981	1991/1992	Linggar Jaya	194	907
		2. Bunga Mas V/A	5 00	2,21 5	1980/1981	1991/1992	Marga Mulya	393	1,582
		3. Bunga Mas V/B	4 00	1,71 9	1982/1983	1988/1989	Cempaka Sari	377	1,626
		4. Bunga Mas V/B	5 00	1,95 9	1981/1982	1988/1989	Sukaharjo	502	1,994
		5. Bunga Mas V/A	5 00	2,03 8	1982/1983	1991/1992	Suka Makmur	500	2,165
		6. Bunga Mas V/B	5 00	2,10 6	1983/1984	1991/1992	Purworejo	500	2,241
		7. Bunga Mas V/B	2 00	78 5	1984/1985	1991/1992	Kencana Sari	184	967
II	Kikim Tengah	8. Tanjung Aur V/B	3 00	80 1	1985/1986	1991/1992	Putra Mas	175	751
		9. Tanjung Aur V/D	2 00	55 8	1985/1986	1991/1992	Banyu Mas	126	548
		10. Singapura V/A	1 00	42 5	1992/19931	1993/1994	Singapura	100	433
III	Kikim Selatan	11. Keban Agung	1 00	38 3	1996/1997	1998/1999	Keban Agung	100	382
		12. Keban Agung	1 17	51 7	1998/1999	-	Keban Jaya	117	357

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

NO	KECAMATAN / UPT	NAMA DESA / DESA EKS TRANS	PENEMPATAN			DISERAHKAN (Tahun)	MENJADI DESA DEFINITIF	PENDUDUK SEKARANG	
			KK	Jiwa	Tahun			KK	Jiwa
IV	Kikim Barat	13. Tebing Tinggi III A/B	5 00 3	- 79	1982/1983	1989/1990	Wanaraya	248	1,275
		14. Tebing Tinggi III A/B	50 3	7 86	1982/1983	1989/1990	Purnamasari	96	384
		15. Tebing Tinggi III A/B	00 1	4 46	1983/1984	1990/1991	Bandar Jaya	186	661
		16. Tebing Tinggi III A/B	50	3	1982/1983	1991/1992	Mekar Jaya	105	503
		17. Tebing Tinggi III A/B	2 00 3	2,38 0 1,68	1982/1983	1989/1990	Purworejo	531	2,388
V	Lahat	18. Persus S. Berua	41	0	1983/1984	1991/1992	Darmaharja	341	1,588
		19. Pirsus Senabing	253 2	973 99	1987/19881	1991/1992	Makartitama	233	1,032
		20. Pirsus Senabing	27 2	7 99	1991/1992	1992/1993	Ulak Mas	239	1,054
		21. Pirsus Senabing	38 5	2 1,90	1987/1988	1992/1993	Girimulia	253	1,934
		22. Bunga Mas V/B	00	4	1987/1988	1992/1983	Saribunga Mas	500	1,934
VI	Merapi Barat	23. Pirsus Senabing	2 30	1,05 0	1988/1989	1992/1993	Purwasari	230	1,050
		24. Pirsus Senabing	94	41 6	1992/1993	1993/1994	Singapura	100	433
VII	Merapi Timir	25. Lematang	4 60	2,08 8	1992/1993	1996/1997	Cempaka Wangi	456	2,049
		26. Lematang	5 00	2,43 7	1992/1993	1996/1997	Lematang Jaya	600	2,437
VIII	Gumay Ului	27. Padang Muara	2 44	1,33 3	1996/1997	1998/1999	Sumber Karya	249	1,359

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

NO	KECAMATAN / UPT	NAMA DESA / DESA EKS TRANS	PENEMPATAN			DISERAHKAN (Tahun)	MENJADI DESA DEFINITIF	PENDUDUK SEKARANG	
			KK	Jiwa	Tahun			KK	Jiwa
		28. Padang Muara Dua	3 00	1,21 8	1995/1996	2001/2002	Padang Muara Dua	300	1,323
IX	Pseksu	29. UPT Lubuk Atung	2 00	80 1	2007/2008	2014	Tembiling Jaya	200	805
X	Kikim selatan	30. Keban Agung	2 50	94 7	2015/2016/2017	-	-	250	947

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018

**8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kekerasan kepada Pemerintah. Pada tahun 2014, persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 10% menurun menjadi 7,2% di tahun 2018. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung oleh Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perkembangan angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah pada kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2014 untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebesar 7,5% meningkat menjadi 10% di tahun 2018. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 3,1%, meningkat menjadi 4,98% di tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Kabupaten Lahat antara lain melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.



**Tabel 2.50**

**Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat 2014-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Persentase Penurunan Kasus Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	10	7,9	6,8	8,4	7,2
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,1	5,9	5,2	5,1	4,98
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	7,5	7,5	7,5	7,5	10

Sumber: Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat 2018

**9) Urusan Pangan**

Kebutuhan pangan di Kabupaten Lahat saat ini jauh lebih kecil dari pada produksi dan ketersediaan pangan di kabupaten Lahat. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan mencapai 152.914.570.500 ton/tahun. Ketersediaan pangan terdiri dari indikator kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia. Hasil analisa ketersediaan pangan dapat dilihat pada tabel 2.58

**Tabel 2.51**

**Konsumsi Normatif di Kabupaten Lahat**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Produksi Sereal (Gr)	Ketersediaan Sereal Perkapita/hari (d/(c*360))	Konsumsi Normatif (300/e)	Kategori
1.	Merapi Timur	21.927	6.530.968.700	827	0,36	Surplus Tinggi
2.	Merapi Barat	21.250	3.580.832.000	468	0,64	Surplus Sedang
3.	Merapi Selatan	7.871	4.777.375.000	1.686	0,18	Surplus Tinggi
4.	Lahat	109.951	9.810.791.500	248	1,21	Defisit Rendah
5.	Gumay Talang	10.532	1.122.369.000	296	1,01	Defisit Rendah
6.	Pseksu	8.538	5.859.565.000	1.906	0,16	Surplus Tinggi
7.	Pulau Pinang	11.809	8.678.667.000	2.041	0,15	Surplus Tinggi
8.	Gumay Ulu	5.365	3.734.470.000	1.934	0,16	Surplus Tinggi
9.	Pagar Gunung	12.426	11.388.977.800	2.546	0,12	Surplus Tinggi
10.	Kota Agung	12.891	15.177.643.600	3.271	0,09	Surplus Tinggi
11.	Tanjung Tebat	8.309	14.861.010.400	4.968	0,06	Surplus Tinggi
12.	Mulak Ulu	17.765	20.116.127.500	3.145	0,10	Surplus Tinggi
13.	Tj. Sakti Pumu	14.235	5.355.822.000	1.045	0,29	Surplus Tinggi
14.	Tj. Sakti Pumi	16.148	11.878.145.000	2.043	0,15	Surplus Tinggi
15.	Pajar Bulan	13.547	9.907.854.000	2.032	0,15	Surplus Tinggi
16.	Suka Merindu	6.798	10.280.760.000	4.201	0,07	Surplus Tinggi
17.	Jarai	20.657	13.707.491.000	1.843	0,16	Surplus Tinggi
18.	Muara Payang	8.958	3.267.194.000	1.013	0,30	Surplus Tinggi
19.	Kikim Barat	15.789	2.044.165.000	360	0,83	Surplus Rendah
20.	Kikim Tengah	8.801	3.846.838.000	1.214	0,25	Surplus Tinggi
21.	Kikim Selatan	15.913	23.969.188.000	4.184	0,07	Surplus Tinggi
22.	Kikim Timur	27.944	5.939.108.000	590	0,51	Surplus Sedang
	<b>Jumlah</b>	<b>397.424</b>	<b>195.835.362.500</b>	<b>1.369</b>	<b>0,22</b>	Surplus Tinggi

Sumber: Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Lahat, 2017

**Tabel 2.52**

**Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Lahat**

Kecamatan	Kalori (kkal/tahun)		
	Ketersediaan (Jumlah Produksi Pangan)	Kebutuhan (jml pdd x 365 hari x 0,0003 ton)	Selisih (Ketersediaan – Kebutuhan)
Tanjung Sakti Pumi	11.878.145.000	1.786,383	10.091,762
Tanjung Sakti Pumu	5.355.822.000	1.574,7195	3.781,1025
Kota Agung	15.177.643.600	1.426,0185	13.751,6245
Mulak Ulu	20.116.127.500	1.341,4845	18.774,6430
Tanjung Tebat	14.861.010.400	919,143	13.941,8674
Pulau Pinang	8.678.667.000	1.306,335	7.372,3320
Pagar Gunung	11.388.977.800	1.374,5535	10.014,4243
Gumay Ulu	3.734.470.000	593,3805	3.141,0895
Jarai	13.707.491.000	2.285,1555	11.422,3355
Pajar Bulan	9.907.854.000	1.498,617	8.409,2370
Muara Payang	3.267.194.000	990,975	2,276,2190
Suka Merindu	10.280.760.000	751,9365	9.528,8235
Kikim Barat	2.044.165.000	1.746,6345	297,5305
Kikim Timur	5.939.108.000	3.091,185	2.847,9230
Kikim Selatan	23.969.188.000	1.760,322	22.208,8660
Kikim Tengah	3.846.838.000	973,674	2.873,1640
Lahat	9.810.791.500	12.162,7125	(2.351,9210)
Gumay Talang	1.122.369.000	1.164,9705	(42,6015)
Pseksu	5.859.565.000	944,547	4.915,0180
Merapi Barat	3.580.832.000	2.350,6365	1.230,1955
Merapi Timur	6.530.968.700	2.425,644	4.105,3247
Merapi Selatan	4.777.375.000	670,8535	3.906,5215
<b>Total</b>	<b>195.835.362.500</b>	<b>43.339,8810</b>	<b>152.495,4815</b>

Sumber: Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Lahat, 2017

Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dapat diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat dan Kecamatan Gumay Talang memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan. Namun dengan masuknya produk tanaman pangan dari kecamatan lain di dalam Kabupaten Lahat serta dari luar Kabupaten Lahat sehingga defisit bahan pangan di dua Kecamatan tersebut dapat diabaikan. Kekurangan bahan pangan di dua Kecamatan tersebut disebabkan oleh luas lahan sawah yang dimiliki

oleh kecamatan tersebut semakin sedikit.

**10) Urusan Lingkungan Hidup**

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

➤ **Daya Dukung Air Permukaan**

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Permen LH No.17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakupi tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup (*basicneed*). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m<sup>3</sup>/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard National Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Dari perhitungan air permukaan yang tersedia di kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600 m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air yang diperhitungkan terdiri dari kebutuhan air domestik, kebutuhan

air untuk pengairan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita.

Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kebutuhan domestik, kebutuhan peternakan dan kebutuhan industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kabupaten Lahat masih mengalami surplus air sebesar 16.876.210.052,59 m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan ke konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan di tangani oleh PDAM.

Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16 % dari total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM kabupaten Lahat tahun 2017, kebutuhan air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.135,822 m<sup>3</sup>/tahun dari total kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi kebutuhan air bersih domestik yang diperoleh dari hasil model dan kebutuhan air rumah tangga yang dilayani PDAM. Terdapat perbedaan signifikan, dikarenakan tidak semua sumber air rumah tangga di Kabupaten Lahat menggunakan jasa layanan PDAM. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk kabupaten Lahat sebagai berikut:

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak 1.000 m<sup>3</sup>/kapita/tahun menurut standar WHO maka kebutuhan air sebesar 11.096.656,90 m<sup>3</sup> atau 5% dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya mencapai 0,95.
- Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, pertanian dan industri maka kebutuhan air sebesar 192.591.890 m<sup>3</sup>/tahun atau 94 % dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya hanya

mencapai 0,06.

➤ **Kualitas Air Sungai**

Lima (5) sungai yang ada di kabupaten Lahat telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampaui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestik (COD 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari), beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (COD 7.685 kg/hari dan BOD 1.750 kg/hari), beban pencemar dari limbah peternakan (COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari), beban pencemar dari limbah UMKM (COD 7.950 kg/hari dan BOD 1.755 kg/hari), dan beban pencemar dari limbah Industri. Sumber pencemar air sungai di kabupaten Lahat meliputi limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan limbah industri.

1) **Beban pencemar dari limbah domestik**

Sungai Lematang dan sungai Selangis merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah domestik COD sebesar 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari.

2) **Beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) Sungai Lim merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan COD sebesar 7.685 kg/hari dan BOD sebesar 1. 750 kg/hari.**

3) **Beban pencemar dari limbah peternakan**

Beban pencemar dari limbah peternakan terbesar berasal hewan sapi dan kerbau dengan kandungan COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari .

4) **Beban pencemar dari limbah UMKM**

Sungai Endikat paling tinggi beban pencemar dari limbah UMKM dengan jumlah COD sebesar 7.950 kg/hari dan BOD sebesar 1.755 kg/hari.

5) Beban pencemar dari limbah Industri

Sungai Lematang merupakan sungai dengan jumlah industri terbanyak yang membuang limbah sebanyak 18 industri.

Pada bidang persampahan, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 120.922,53 ton/tahun dan penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kecamatan Lahat. Pelayanan sampah di kabupaten Lahat masih terpusat di daerah perkotaan. Berbagai alternatif pengelolaan sampah dapat diarahkan kepada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah, sehingga volume sampah dapat dikurangi.

**Tabel 2.53**  
**Timbulan Sampah dan Potensi Kesesuaian Lahan Untuk TPA di Kabupaten Lahat**

<b>Kabupaten</b>	<b>Timbulan Sampah per tahun (ton/tahun)</b>	<b>Luas Lahan yang Tersedia untuk TPA (ha)</b>	<b>Kapasitas TPA berdasarkan Luas Lahan yang tersedia (liter)</b>
Lahat	120.922,53	9,80	21.827.000
<b>Total</b>	<b>120.922,53</b>	<b>9,80</b>	<b>21.827.000</b>

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat*

Timbulan sampah di Kabupaten Lahat telah melampaui dari kapasitas yang ada. Dalam pengelolaan sampah dapat melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) di berbagai sumber timbulan sampah seperti permukiman, industri, pasar, perkantoran, dan lain-lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang berada di Kabupaten Lahat tetapi masih kekurangan Fasilitas dalam pengolahan dan penampungan sampah.

**Tabel 2.54**  
**Fasilitas Pengelolaan Sampah Kab. Lahat**

No	Nama Fasilitas	Jumlah yang dimiliki	Kondisi
1	Tempat Pemrosesan Akhir	1 Unit	80%
2	Truk Sampah	15 unit	13 unit operasional
3	Arm roll	-	-
4	Mobil Penyiram jalan	-	-
5	Bentor (motor sampah)	15 Unit	13 unit operasional
6	TPS	123 Unit	60 Unit operasional
7	Bank Sampah	9 unit	3 Unit operasional
8	Rumah Kompos	2 Unit	2 Unit operasional
9	Mesin Pencacah sampah Organik	10 Unit	6 Unit operasional
10	Mesin Pencacah sampah Anorganik	4 Unit	3 Unit operasional
11	Tempat sampah Gandeng	60 Unit	60 Unit operasional

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lahat Tahun 2018*

#### **11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil**

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lahat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk Kabupaten Lahat yang belum memiliki KK meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 93%, bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 70%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang baik dan sesuai prosedur. Pada Tahun 2018, jumlah penduduk yang belum memiliki KK sebanyak 14.390 KK atau sebesar 11,07%. Sedangkan yang sudah memiliki KK sebanyak 115.579 KK atau sebesar 88,93% dari jumlah seluruh KK yang ada.

Dalam pemenuhan penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP pada tahun 2019 adalah 277.406 jiwa atau sebesar 94,09% dari jumlah seluruh penduduk wajib KTP. Pencapaian persentase penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP dipengaruhi oleh ketersediaan blanko E-KTP sehingga berdampak menurunnya minat



masyarakat untuk melakukan pencetakan E-KTP, akan tetapi pencapaian program ini sangat didukung oleh penerapan KTP berbasis NIK (E-KTP).

**12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pada tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pasar desa yang modern, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang ekonomi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat mengadakan pembinaan pengelolaan pasar desa yang difokuskan pada 25 pasar desa di Kabupaten Lahat. Dengan harapan pasar desa tersebut akan menjadi pasar yang sehat, nyaman, aman, bersih dan memiliki manajemen pengelolaan yang profesional sehingga kesejahteraan pedagang meningkat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lahat juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 58 desa di wilayah Kabupaten Lahat. Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menuju desa swasembada, masyarakat Desa Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berperan secara aktif dalam menyukseskan program Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

**13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%) kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan tren meningkat yaitu pada tahun 2014 adalah 73,04% menjadi 76,09% di tahun 2017. Realisasi cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi

peserta KB aktif telah melebihi target SPM sebesar 65%. Tercapainya indikator ini didukung oleh Program Keluarga Berencana seperti penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, dan Program Pelayanan Kontrasepsi melalui pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi. Beberapa kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%), cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB dan Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan. Sedangkan kinerja yang belum memenuhi target SPM antara lain cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need dan Rasio PLKB/PKB (petugas/desa).

**Tabel 2.55**  
**Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Indikator	Target SPM	2014	2015	2016	2017
Cakupan sasaran PUS menjadi KB aktif (%)	65	73,04	75,87	76,07	76,09
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need (%)	≤ 5	7,94	6,04	5,78	8,85
Persentase Partisipasi Pria ber KB (%)	-	34,84	36	3,77	3,09
Persentase Peserta KB aktif MKJP (%)	-	6,62	6	28,78	26,27
Rasio kelompok PIK KRR (kelompok/kecamatan)	-	2,82	2,59	3,18	3,14
Cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	≤ 3,5	5,04	5,04	1,18	1,4
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	70	83	71,04	67,28	76,8
Rasio Kelompok BKB (kelompok/kecamatan)	-	6,73	5,41	9,09	5,91
Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB (%)	87	87,87	89,82	92,35	91,9
Rasio Kelompok UPPKS (kelompok/kecamatan)	-	4,32	3,36	3,05	3
Rasio PLKB/PKB (petugas/desa)	½	0,159	0,095	0,095	0,13
Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan (petugas/desa)	1	1	1	1	1

Sumber: LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lahat 2018

#### **14) Urusan Perhubungan**

Sejalan dengan peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan beberapa program seperti Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Saat ini transportasi Darat yang ada di Kabupaten Lahat tahun 2018 berupa angkutan darat umum yang berjumlah 210 angkutan darat dengan jumlah penumpang 16.618 orang dengan menggunakan angkutan desa.

**Tabel 2.56**  
**Daftar Transportasi Darat di Kabupaten Lahat Tahun 2017**

No	Jenis Angkutan	Jumlah (unit)
1	Angkutan Pribadi	19.838
	- Kendaraan Roda Empat (4)	2.264
	- Kendaraan Roda Dua (2)	17.574
2	Angkutan Barang / Orang	817
	- Mobil Truk Barang Umum	486
	- Mobil Box	34
	- Mobil Tangki	59
	- Mobil Bus	13
	- Angkutan Pedesaan	179
	- Angkutan Kota	31
	- Becak	15
3	Perusahaan Angkutan Umum	62
	- Perusahaan Milik Pemerintah	13
	- Perusahaan Milik Swasta	48
4	Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	1
5	Terminal Type C	1
6	Stasiun Kereta Api	1
	- Stasiun Orang	1
	- Stasiun Barang	1
	- Stasiun Operasional (Depo)	1
7	Barang menggunakan angkutan Kereta Api	3
8	Penumpang Kereta Api	1.604
	Perlintasan Sindang Kereta Api	125
	- Perlintasan Sebidang Berpalang	3
	- Perlintasan Sebidang Tidak Berpalang	4
9	Badan Usaha Penunjang Perkeretaapian	1

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2018

## 15) Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo antara lain: pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi, Pembuatan Website Humas Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dilaksanakan juga Program kerja sama informasi dengan massa media, melalui kegiatan

penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat terlihat lebih baik. Hal tersebut, ditandai dengan semakin meningkatnya implementasi penggunaan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan informasi menerapkan publikasi berbasis online pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui website [www.lahatkab.go.id](http://www.lahatkab.go.id) sehingga pada tahun 2019, diharapkan data dan informasi Kabupaten Lahat dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan lengkap.

**16) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuatif. Masih kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi sangat berpengaruh pada jalannya usaha koperasi tersebut.

**Tabel 2.57**  
**Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Jenis Koperasi	2014	2015	2016	2017	2018*
KUD	51	48	48	66	66
KPN	47	45	45	49	49
KOPKAR	19	14	14	15	15
KOPPAS	1	1	1	1	1
KOP-WAN	28	29	29	29	29
Lainnya	212	29	-	8	8
Jumlah	358	166	137	168	168

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Lahat 2018

Persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2016 sangat menurun jika dibandingkan tahun 2015, yaitu dari 19,33% menjadi 1,53%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria dalam penilaian persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2016. Pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 21,25% dan target persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2018 sebesar 22,33%. Strategi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung upaya pencapaian target tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Lahat. Selain itu, penurunan juga terjadi pada capaian persentase UKM aktif pada tahun 2016 sebesar 41,05%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 99,5%. Namun untuk tahun 2017 dan tahun 2018 capaian meningkat dari tahun sebelumnya melalui strategi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dan Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

**19) Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah baik tingkat propinsi maupun lembaga pusat. Selain itu juga dilaksanakan temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lahat dengan pengusaha PMDN, dan Instransi terkait yang bertujuan untuk terwujudnya konsep kemitraan dan pengembangan dibidang investasi serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

Pada tahun 2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat telah mengadakan MoU dengan Bank Sumsel Babel Lahat dan BPJS Kesehatan sebagai sarana informasi untuk kemudahan pelayanan perizinan yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Lahat. Bagi pemohon yang akan membayar pajak dan retribusi atas izin yang dimohonkan cukup di Kantor DPM dan PTSP Kabupaten Lahat, selain itu pula bagi perusahaan - perusahaan yang akan mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Kantor Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.

**Tabel 2.58**  
**Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tingkat Standar Pelayanan Perizinan (orang)	5.517	5.949	5.964	4.962
Persentase Aparatur yang mendapatkan sertifikat di bidang perizinan dan penanaman modal (orang)	1	13	15	3
Cakupan produk hukum pelayanan perizinan (peraturan)	12	8	5	2
Tingkat penanganan pengaduan pelayanan perizinan (orang)	-	-	1	-
Kebijakan Penanaman Modal (Peraturan)	3	3	4	6
Tingkat Investasi Komoditas Unggulan (Perusahaan)	5	5	7	4
Tingkat Promosi Investasi	1	1	2	2
Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan	2	2	2	2

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Lahat 2018

**Tabel 2.59**  
**Penerbitan SIUP dan TDUP Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
SIUP	360	399	461	241
TDUP	-	339	458	292
Jumlah	360	738	919	533

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2014-2018

**18) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Pada kurun waktu 2014-2018, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga adalah meningkatnya prestasi generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga.

**Tabel 2.60**  
**Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Lahat 2014-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>
Pemuda Kabupaten Lahat yang berprestasi di tingkat					
- Provinsi	28	26	25	30	27
- Nasional	1	3	-	-	5
Cabang Olahraga yang mendapat prestasi tingkat					
- Provinsi	-	5	4	7	6
- Nasional	-	2	3	-	5

Keterangan \*) nilai target Tahun 2018

Sumber: LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat,2014-2018

Pembangunan di bidang kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Lahat. Kegiatan difokuskan pada pembekalan bagi pemuda dengan pelatihan keterampilan dan wawasan tentang kewirausahaan dengan harapan mampu mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembibitan dan pembinaan atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing dan berprestasi pada pertandingan olahraga ditingkat regional maupun nasional.



**19) Urusan Perpustakaan**

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren meningkat, seiring dengan meningkatnya persentase minat baca masyarakat Kabupaten Lahat. Capaian kinerja Jumlah pengunjung, peminjam dan koleksi buku pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.68.

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Pengunjung, Peminjam dan buku yang dipinjam pada**  
**Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat**

<b>Tahun</b>	<b>Pengunjung</b>	<b>Peminjam</b>	<b>Buku yang dipinjam</b>
2009	20.970	12.449	34.367
2010	17.951	11.185	31.158
2011	33.154	8.504	22.161
2012	23.670	5.947	15.480
2013	37.350	9.247	23.291
2014	38.923	10.415	54.781
2015	39.200	20.989	58.691
2016	40.081	26.109	60.033
2017	47.823	28.140	61.731
2018	50.000	25.306	39.669
Jumlah	349.052	158.291	401.362

*Sumber : Dinas Perpustakaan Tahun 2018*

**Tabel 2.62**  
**Jumlah Koleksi Buku Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat**  
**per Desember 2018**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Buku</b>	<b>Judul</b>	<b>Eksamplar</b>
1	000 – 099	572	1334
2	100 – 199	934	2095
3	200 – 299	3881	9073
4	300 – 399	3201	7472
5	400 – 499	714	1602
6	500 – 599	1411	3545
7	600 – 699	4698	10896
8	700 – 799	930	2325
9	800 – 899	4539	11158
10	900 – 999	1820	1824
Total		22.700	51.324

*Sumber : Dinas Perpustakaan 2018*



**Tabel 2.63**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan pertahun	38.923	39.200	40.081	47.823	50.000
2	Jumlah Perpustakaan Desa/Keluarah dan sekolah yang dibina	92	92	94	96	97
3	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daeah	40.625	43.400	51.324	-	-
4	Jumlah OPD/Lembaga Lainnya yang menerapkan sistem kearsipan secara Baku	-	-	-	20	20

*Sumber : Dinas Perpustakaan 2018*

Dalam menunjang kegiatan dan Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan khususnya meubelair dan sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka. Untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Kabupaten Lahat, perlu adanya Perpustakaan Keliling. Selain itu, untuk menunjang minat baca pada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak. Ruangan ini rencananya akan dibuat menarik dengan dihiasi gambar-gambar warna-warni sesuai dunia anak-anak. Diharapkan dengan ruangan yang demikian, anak-anak lebih suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mendapatkan informasi lewat internet disediakan sarana komputer untuk akses internet secara gratis. Begitu juga bagi mereka yang membawa sendiri komputer laptop atau PDA, disediakan juga fasilitas jaringan internet

wirreless.

Dinas Perpustakaan telah menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik untuk tertibnya administrasi. Dengan sarana ini pengunjung perpustakaan cukup menggunakan kartu elektronik ini untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis komputer akan meng-update ke data base komputer. Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan perlu menyediakan informasi-informasi bagi masyarakat luas mengenai koleksi buku-buku di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan kedepan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada masyarakat antara lain peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemenuhan erpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang lengkap dan modern, meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, meningkatkan pengembangan budaya baca dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan/pemustaka, meningkatkan pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan ke desa-desa, membangun gedung perpustakaan yang refresentatif, mewujudkan perpustakaan desa yang mandiri, mewujudkan perpustakaan berbasis digital secara nasional dan adanya ruang baca anak.

## **B. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

### **1) Urusan Kelautan dan Perikanan**

Lahan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat seluas 15.400 km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan umum, kolam, tebat dan sawah. Lahan tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Lahat sebesar 10.974 ton dengan jenis ikan yaitu nila, gurame, lele, patin, mas dan ikan lokal perairan umum. Secara rinci

produksi perikanan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.71.

**Tabel 2.64**

**Produksi Perikanan Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 (ton)**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Perikanan Budidaya	3.858	4.635	5.432	8.351	8.009
Perikanan Tangkap	1.430	1.716	2.035	2.421	2.965

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lahat

Pada umumnya pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, untuk dikonsumsi pribadi dan belum dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Lahat. Ada beberapa jenis kelompok perikanan di Kabupaten Lahat yaitu Kelompok Budidaya Perikanan sebanyak 89 kelompok, Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan sebanyak 2 kelompok. Selanjutnya, untuk pengembangan pembangunan di sektor perikanan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ditempatkan di beberapa kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lahat terdiri dari BBI Kota Agung seluas 6.202 m<sup>2</sup>, BBI Tanjung Sakti seluas 6.000 m<sup>2</sup>, KAD Tanjung Sirih sebanyak 1 unit, Pasar Benih Ikan sebanyak 1 unit, Pasar Ikan Jari sebanyak 1 unit, Laboratorium Kesehatan Ikan sebanyak 1 unit, dan Kantor UPTD PBI Kecamatan Lahat.

Berdasarkan data potensi dan permasalahan yang ada, maka dibuat rencana pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lahat, pemenuhan tingkat konsumsi ikan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan. Beberapa rencana pembangunan di bidang perikanan yaitu meningkatkan luas area lokasi 2 (dua) unit Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Kota Agung dan

Kecamatan Tanjung Sakti.

## 2) Urusan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat terus menggali potensi wisata dan melakukan promosi kepada wisatawan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja urusan pariwisata seperti meningkatkan promosi budaya dan pariwisata baik skala nasional maupun internasional, mengembangkan objek-objek wisata unggulan, pembangunan infrastruktur pada objek wisata dan sebagainya.

**Tabel 2.65**  
**Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	36.720	47.243	44.971	51.688	54.680
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	106	56	386	53	85

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat Tahun 2018

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat, diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Saat ini Kabupaten Lahat telah memiliki 5 (lima) hotel kelas bintangdan 7 (tujuh) hotel bukan kelas bintang. Sedangkan untuk rumah makan tercatatada 151 rumah makan di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018 Kabupaten Lahat memiliki 86 tempat objek wisata alam,4 objek wisata buatan dan 11 tempat objek wisata budaya yang tersebar di 16 kecamatan.

Pada tahun 2018, jumlah kamar akomodasi yang tersedia di hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lahat ada sebanyak 520 kamar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 273 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel dan tenaga kerja pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan kamar sehingga hotel harus menambah tenaga kerja dan kamar huni setiap tahunnya.

**Tabel 2.66**  
**Obyek Wisata di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Jenis Obyek Wisata	2014	2015	2016	2017	2018
Wisata Alam	67	67	67	68	90
Wisata Budaya	11	11	11	11	11
Wisata Buatan	1	1	1	3	4

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2014-2018

**Tabel 2.67**  
**Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kabupaten Lahat  
Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Hotel	10	10	10	10	13
Jumlah Kamar	290	341	388	428	520
Jumlah Tenaga Kerja	186	201	214	227	273

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2014-2018

### 3) Urusan Pertanian

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah seluas 17.158 hektar dan lahan bukan sawah seluas 342.213 hektar. Salah satu sektor unggulan dalam pertanian adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tahun 2018, produksi padi (padi sawah dan Padi ladang) sebanyak 229.776 ton, produktivitas 54,30 kuintal per hektar dengan luas panen 42.029 hektar padi sawah dan 1.384 hektar padi ladang.

**Tabel 2.68**

**Produksi Pertanian Tanaman Pangan  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016*	2017	2018
1	Padi					
	Luas Panen (ha)	31.347	32.999	4.065,04	45.574	43.413
	Produksi (ton)	139.578	169.679	202.032,39	223.312,6	229.776
2	Jagung					
	Luas Panen (ha)	232	260	937	9.940	1.457,80
	Produksi (ton)	1.509	1.652	6.324,75	66.402,89	7.7876
3	Kedelai					
	Luas Panen (ha)	1.239	1.224	1.334	1.438	354
	Produksi (ton)	2.239	2.231	2.254,46	2.166	422
4	Kacang Tanah					
	Luas Panen (ha)	166	170	170	118	142,70
	Produksi (ton)	231	230	230	162,52	198
5	Kacang Hijau					
	Luas Panen (ha)	59	15	15	63	115
	Produksi (ton)	82	20	20	85,44	160,5
6	Ubi Kayu					
	Luas Panen (ha)	196	169	169	168	78
	Produksi (ton)	3.381	2.920	2.920	2.810	2.165
7	Ubi Jalar					
	Luas Panen (ha)	117	91	91	123	85,70
	Produksi (ton)	1.557	1.860	1.860	2.330	2.068

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lahat Tahun 2018

Selanjutnya untuk jenis tanaman palawija mencakup jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun



2018, produksi palawija yang paling banyak adalah produksi jagung yaitu sebesar 7.876 ton, disusul ubi kayu sebesar 2.125 ton, ubi Jalar sebesar 2.068 ton, Kedelai sebesar 422 ton, kacang tanah sebesar 198 ton, dan yang terkecil adalah produksi kacang hijau sebesar 160,5 ton. Selain tanaman palawija di Kabupaten Lahat juga terdapat tanaman buah-buahan. Secara rinci luas panen, produktivitas dan produksi tanaman buah di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.76.

**Tabel 2.69**

**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Buah  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
1	Alpokot					
	Luas Panen (pohon)	5.614	16.751	10.581	11.592	17.348
	Produksi (kwintal)	5.519	17.039	2.045	3.422	3.144
2	Belimbing					
	Luas Panen (pohon)	970	3.098	2.944	2.280	3.466
	Produksi (kwintal)	644	2.709	531	596	633
3	Duku					
	Luas Panen (pohon)	8.250	12.396	19.034	4.122	7.910
	Produksi (kwintal)	4.253	3.467	15.740	861	2.682
4	Durian					
	Luas Panen (pohon)	51.237	104.365	80.144	30.508	130.067
	Produksi (kwintal)	22.573	310.111	8.003	15.373	97.619
5	Jambu Biji					
	Luas Panen (pohon)	3.884	8.661	10.501	7.394	6.951
	Produksi (kwintal)	1.719	1.998	1.682	1.772	922
6	Jambu Air					
	Luas Panen (pohon)	4.183	9.859	12.747	12.305	13.621
	Produksi (kwintal)	1.991	14.387	2.155	5.289	1.391
7	Jeruk Siam					
	Luas Panen (pohon)	3.830	5596	4295	3.763	2.336
	Produksi (kwintal)	3.298	3161	589	832	373
8	Jeruk Besar					
	Luas Panen (pohon)	48	112	90	145	295
	Produksi (kwintal)	74	738	13	70	238
9	Mangga					
	Luas Panen (pohon)	24.862	62.697	39.177	26.417	69.697
	Produksi (kwintal)	18.578	12.534	5.015	8.929	11.966
10	Manggis					
	Luas Panen (pohon)	9.341	18.365	11.867	2.499	34.027
	Produksi (kwintal)	3548	13759	5524	487	3.076

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
11	Nangka					
	Luas Panen (pohon)	11.262	29.038	21.816	18.127	22.876
	Produksi (kwintal)	9.581	23.674	6.540	9.714	7.031
12	Nanas					
	Luas Panen (pohon)	3.130	10.281	3.909	4.060	4.660
	Produksi (kwintal)	212	569	139	877	215
13	Pepaya					
	Luas Panen (pohon)	19.595	69.896	53.042	61.378	71.403
	Produksi (kwintal)	16.417	36.499	19.641	21.515	25.094
14	Pisang					
	Luas Panen (pohon)	22.359	998.180	90.186	78.348	66.634
	Produksi (kwintal)	11.869	39.085	19.580	15.746	9.208
15	Rambutan					
	Luas Panen (pohon)	11.227	43.962	18.938	16.892	40.166
	Produksi (kwintal)	7.308	274.036	2.713	2.082	6.329
16	Salak					
	Luas Panen (pohon)	10.109	38.203	34.583	37.254	43.848
	Produksi (kwintal)	1.975	7.102	2.477	3.855	3.262
17	Sawo					
	Luas Panen (pohon)	1.378	5.039	4.945	3.483	3.211
	Produksi (kwintal)	1.705	5.426	2.353	780	748
18	Sirsak					
	Luas Panen (pohon)	1.683	4.049	3.657	3.496	2.860
	Produksi (kwintal)	579	1,586	603	804	476
19	Sukun					
	Luas Panen (pohon)	1.354	9.387	6.068	6.649	7.614
	Produksi (kwintal)	3.358	34.319	1.428	2.380	1.839
20	Melinjo					
	Luas Panen (pohon)	2.065	6.246	6.047	6.844	3.807
	Produksi (kwintal)	828	2.179	402	720	282
21	Petai					
	Luas Panen (pohon)	11.977	30.117	22.365	38.569	29.673
	Produksi (kwintal)	4.855	96.078	48.946	8.907	25.742
22	Jengkol					
	Luas Panen (pohon)	8.275	21.965	15.302	25.728	25.036
	Produksi (kwintal)	5.506	21.603	2.369	3.610	4.917

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Selanjutnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Lahat meliputi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe, cabe rawit, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam dan sebagainya.

**Tabel 2.70**

**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bawang Merah					
	Luas Panen (hektar)	-	-	-	-	3
	Produksi (kwintal)	-	-	-	-	60
2	Bawang Putih					
	Luas Panen (hektar)	-	-	-	3	-
	Produksi (kwintal)	-	-	-	310	-
3	Bawang Daun					
	Luas Panen (hektar)	119	235	235	-	1,07
	Produksi (kwintal)	5.161	3.520	3.520	-	7.460
4	Kentang					
	Luas Panen (hektar)	6	132	132	117	-
	Produksi (kwintal)	183	21,12	21,12	7.356	-
5	Kubis					
	Luas Panen (hektar)	62	361	361	3	31
	Produksi (kwintal)	10.231	9.601	9.601	110	8.875
6	Kembang Kol					
	Luas Panen (hektar)	3	2	2	3	-
	Produksi (kwintal)	150	2	2	125	-
7	Petsai/Sawi					
	Luas Panen (hektar)	136	295	295	135	127
	Produksi (kwintal)	6.952	4.739	4.739	11.969	11.923
8	Wortel					
	Luas Panen (hektar)	67	335	335	66	58
	Produksi (kwintal)	3.116	28,84	28,84	11.067	13.662
9	Kacang Merah					
	Luas Panen (hektar)	25	34	34	14	-
	Produksi (kwintal)	976	441	441	-	-
10	Kacang Panjang					
	Luas Panen (hektar)	211	558	558	298	270
	Produksi (kwintal)	7.914	3.231	3.231	3.243	2.962
11	Cabe					
	Luas Panen (hektar)	255	1.097	1.097	983	556
	Produksi (kwintal)	11.584	5.712	5.712	8.476	7.196
12	Cabe Rawit					
	Luas Panen (hektar)	84	292	292	231	218
	Produksi (kwintal)	5.983	2.287	2.287	2.425	4.436
13	Jamur					
	Luas Panen (hektar)	76	106	106	3.683	-
	Rata-Rata Produksi (kwintal/hektar)	3,39	1,22	1,22	0,003	-
	Produksi (kwintal)	258	129	129	140	-
14	Tomat					
	Luas Panen (hektar)	191	782	782	391	488
	Produksi (kwintal)	15.997	9.408	9.408	17.480	14.574
15	Terung					
	Luas Panen (hektar)	153	815	815	361	390
	Produksi (kwintal)	16.579	15.120	15.120	11.318	10.665

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
16	Buncis					
	Luas Panen (hektar)	111	480	480	206	192
	Produksi (kwintal)	7.262	5.608	5.608	10.045	7.071
17	Ketimun					
	Luas Panen (hektar)	107	722	722	210	192
	Produksi (kwintal)	8.808	6.833	6.833	11.778	7.967
18	Labu Siam					
	Luas Panen (hektar)	8	476	476	73	54
	Produksi (kwintal)	4.730	3.959	3.959	7.631	4.982
19	Kangkung					
	Luas Panen (hektar)	88	656	656	134	116
	Produksi (kwintal)	5.566	3.946	3.946	6.453	4.032
20	Bayam					
	Luas Panen (hektar)	75	301	301	83	81
	Produksi (kwintal)	1.281	1.547	1.547	1.544	1.237

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018

Selain tanaman pangan terdapat banyak jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja yang cukup menonjol adalah kopi dan karet, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan kopi paling luas sebesar 54.441 ha jika dibandingkan dengan luas tanaman perkebunan lainnya yaitu karet sebesar 43.232 hektar, kelapa sawit sebesar 13.636 hektar, dan kakao sebesar 4.366 hektar.

**Tabel 2.71**

**Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat (hektar)  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017*	2018
1	Karet					
	Luas Tanaman (hektar)	34.205	35.726,50	34.857,6	50.583	43.232
	Produksi (ton)	49.286	50.078	49.268	39.359,5	50.593
2	Kelapa					

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017*	2018
	Luas Tanaman (hektar)	618,85	554	554	n.a	667
	Produksi (ton)	374,50	320,10	320,15	667	325
3	Kelapa Sawit					
	Luas Tanaman (hektar)	7.621,50	8.917,5	8.917,5	131.900	13.636
	Produksi (ton)	68.234	83.764	84.673	11.280	131.906
4	Kopi					
	Luas Tanaman (hektar)	51.477	51.788	50.768	21.603	54.441
	Produksi (ton)	20.016,28	21.053,55	20.551,71	53.624	21.605
5	Lada					
	Luas Tanaman (hektar)	689,25	679,75	675,75	n.a	625,20
	Produksi (ton)	145,30	162,70	162,98	559,70	135
6	Kakao					
	Luas Tanaman (hektar)	3.891	4.485	4.485	2.185	4.366
	Produksi (ton)	1.840,40	2.280,38	2.299,98	4.380,0	2.280
7	Kemiri					
	Luas Tanaman (hektar)	74,30	74,30	74,30	n.a	74,30
	Produksi (ton)	15,70	22,79	16,19	74,30	18
8	Pinang					
	Luas Tanaman (hektar)	47	32,25	32,25	n.a	32,25
	Produksi (ton)	6,50	7,33	7,33	32,25	380

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lahat Tahun 2018

Selain Urusan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lahat juga melaksanakan Urusan Peternakan di Kabupaten Lahat. Adapun hasil peternakan terdiri dari daging, telur dan susu. Produksi daging Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, produksi daging sebesar 2.353 ton meningkat menjadi 4.810 ton di tahun 2018. Demikian juga halnya dengan produksi telur, dimana pada tahun 2014 produksi telur mencapai 2.232 ton meningkat menjadi sebesar 2.443 ton di tahun 2018.

**Tabel 2.72**

**Produksi Daging dan Telur  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

No	Jenis Produksi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi Daging	2.353	1.069,95	2.382	3.491	4.810

2	Produksi Telur	2.232	2.338	1.968	2.563	2.443
---	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lahat

Hasil peternakan selain dari produksi daging dan telur, juga bisa dihitung dari populasi ternak. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lahat terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil/unggas. Adapun yang termasuk populasi ternak besar adalah sapi (termasuk sapi perah), kerbau dan kuda, sedangkan yang termasuk populasi ternak kecil/unggas adalah kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur dan itik. Pada tahun 2018, populasi ternak besar yang paling banyak adalah populasi sapi sebanyak 11.382 ekor dibandingkan populasi ternak besar lainnya seperti kerbau sebanyak 1.668 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil dan unggas yang paling banyak adalah populasi ternak kambing sebanyak 13.920 ekor dan populasi ternak ayam pedaging sebanyak 2.282.566 ekor.

#### 4) Urusan Perdagangan

Pada tahun 2018 , sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dilihat dari jenisnya berjumlah 1.833 fasilitas. Jenis sarana kios dan rumah makan merupakan jenis sarana perdagangan dengan persentase tertinggi yaitu 35,46 persen atau masing-masing sebanyak 650 kios, sedangkan fasilitas pasar umum di Kabupaten Lahat berjumlah 9 pasar. Secara rinci banyaknya sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.80.

**Tabel 2.73**  
**Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya**  
**di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pasar Umum	9	9	9	9	9
Pasar Desa	80	80	80	53	61
Toko	180	180	176	49	98

Kios	260	260	260	558	650
Warung	340	340	350	350	365
Rumah Makan	526	526	526	526	650
<b>Jumlah</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.401</b>	<b>1.545</b>	<b>1.833</b>

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Tahun 2018

**Tabel 2.74**  
**Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pasar Inpres	6	6	6	-	-
Pasar Swadaya	15	25	33	15	15
Kalangan	46	46	48	36	38

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Tahun 2018

**Tabel 2.75**  
**Banyaknya Pedagang yang Terdaftar dalam Penerbitan SIUP dan TDUP Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Jenis Pedagang	2014	2015	2016	2017	2018
Pedagang Besar	36	100	40	5	28
Pedagang Menengah	121	233	382	42	251
Pedagang Kecil	203	405	450	194	360
<b>Jumlah</b>	<b>360</b>	<b>738</b>	<b>872</b>	<b>241</b>	<b>639</b>

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Tahun 2018

### **C. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang**

#### **1) Urusan Administrasi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Lahat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun muatan laporan tersebut menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Elemen data yang dihimpun berasal dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Tim Penyusun, dan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dilanjutkan dengan *self-assessment* oleh Tim Evaluasi Daerah dan Setelah dilakukan penyempurnaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.

#### **2) Urusan Pengawasan**



Capaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,1 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menunjukkan hasil yang baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2018 adalah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap dapat mempertahankan nilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik atau predikat B

**Tabel 2.76**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK per tahun	72,22	53,19	88,10	93,18	93,18
Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	49,81	7,84	27,13	88,79	88,79
Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Per Tahun	43,75	100	66,67	100	100
Persentase SKPD yang nilai sakipnya CC ke atas	13,89	100	91,67	67,74	67,74
Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKjIP Inspektorat Kabupaten Lahat 2018

**3) Urusan Perencanaan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada periode 2014-2018, Bappeda Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD dengan tepat waktu dan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

**4) Urusan Keuangan**

Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.765.015.019.207,69 atau 90,15% dari anggaran. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp164.495.177.551,81 atau 9,32% dari total realisasi pendapatan dengan tingkat capaian hanya sebesar 47,28% dari anggaran. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.600.519.841.655,88 atau 90,68% dari total realisasi pendapatan atau 91,42% dari anggaran. Sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.408.832.916.557,94 atau 82,13% dari anggaran. Penghematan penggunaan anggaran telah dapat dilakukan baik pada belanja operasi, belanja modal maupun belanja tak terduga. Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2017, yaitu penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah dan

pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi). Penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp2.897.512.618,94 dengan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2017 sebesar (Rp2.075.341.281,06) dari anggaran. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah ditandai dengan penerimaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2017 dan tahun 2018.

#### **5) Urusan Kepegawaian**

Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 6.761 orang dengan komposisi Eselon II.B sebanyak 31 orang, Eselon III.A sebanyak 75 orang, Eselon III.B sebanyak 137 orang, Eselon IV. A sebanyak 720 orang, Eselon IV.B sebanyak 233 orang, Eselon V.A sebanyak 17 orang, Jabatan Fungsional tertentu Ahli dan Terampil sebanyak 3.548 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2000 orang.

Persentase ASN dilingkungan Pemkab Lahat berdasarkan golongan pada tahun 2018 meliputi golongan IV.C sebanyak 32 orang, golongan IV.B sebanyak 318 orang, golongan IV.A sebanyak 1.093 orang, golongan III.D sebanyak 1.219 orang, golongan III.C sebanyak 826 orang, golongan III.B sebanyak 1114 orang, golongan III.A sebanyak 936 orang, golongan II.D sebanyak 187 orang, golongan II.C sebanyak 561 orang, golongan II.B sebanyak 286 orang, golongan II.A sebanyak 139 orang, golongan I.D sebanyak 19 orang, golongan I.C sebanyak 18 orang, golongan I.B sebanyak 9 orang dan golongan I.A sebanyak 4 orang.

**Tabel 2.77**

**Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lahat Tahun 2019**

<b>Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>	<b>Jumlah ASN (org)</b>	<b>Total %</b>	<b>Jumlah ASN (org)</b>	<b>Total %</b>
<b>Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>				
Laki-laki	2.707	40,04%	2.708	
Perempuan	4.054	59,96%	4.053	
Total	6.761	100,00%	6.761	100,00%
<b>Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>				
Tingkat Sarjana	3.101	45,87%	3.542	
SMA Sederajat	2.165	32,02%	2.165	
SMP Sederajat	1.470	21,74	108	
SD Sederajat	25	0,37%	25	
Total	6.761	100,00%	6.761	100,00%

Sumber : BKP SDM Kabupaten Lahat Tahun 2018

**6) Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lahat. Badan ini merupakan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lahat karena minimnya publikasi hasil penelitian terkait bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan serta kemasayarakatan dan masih rendahnya kehadiran inovasi (produk, proses, organisasi, pasar dan perilaku) untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lahat.

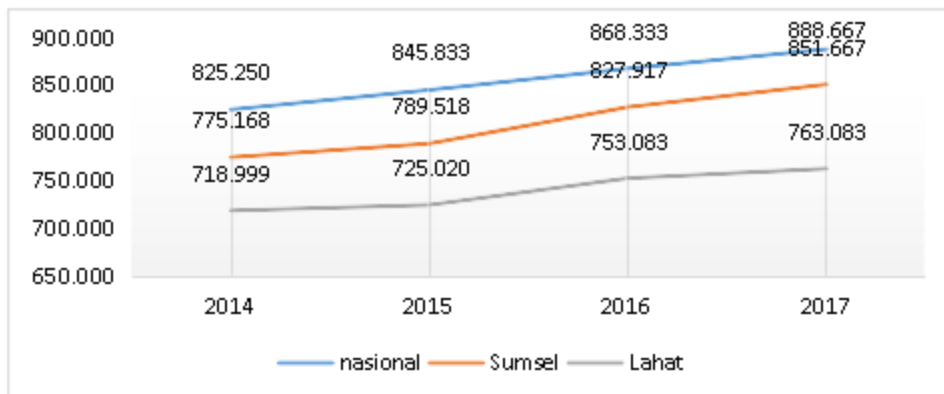
## 2.1 .4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### ➤ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Lahat tahun 2014-2017 menunjukkan tren meningkat dari semula tahun 2014 sebesar Rp34.005,180 ribu rupiah menjadi Rp37.493,090 ribu rupiah pada tahun 2017. Namun capaian tersebut masih dibawah capaian pendapatan perkapita nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lahat harus terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Lahat.

Selanjutnya, untuk perkembangan pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Lahat menunjukkan tren meningkat yaitu dari Rp 718.999 di tahun 2014 meningkat menjadi Rp763.083 tahun 2017 namun capaian pengeluaran perkapita Kabupaten Lahat masih berada dibawah capaian pengeluaran perkapita Provinsi Sumsel dan nasional.



Sumber : PDRB KabupatenLahat Tahun 2013-2017

**Grafik. 2.10**

**Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2017**

➤ **Pengeluaran Konsumsi Penduduk**

Pengeluaran dan konsumsi penduduk di Kabupaten Lahat tahun kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 pengeluaran dan konsumsi penduduk untuk pengeluaran barang makanan sebesar 11.565,36 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 15.053.25 miliar rupiah, artinya tingkat pengeluaran dan konsumsi penduduk Kabupaten Lahat mengalami kenaikan. Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan pendapatan rumah tangga. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga didekati melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terdiri atas pengeluaran makanan dan non makanan. Di Kabupaten Lahat, pengeluaran untuk makanan masih mendominasi konsumsi rumah tangga.

**Tabel 2.78**

**Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB  
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017 (Miliar Rp)**

Sumber: PDRB Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran 2013-2017

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Konsumsi Akhir (ADHB)				
a. Rumah Tangga	9.507,15	10.018,80	10.680,95	11.216,17
b. LNPRT	206,53	221,25	233,83	248,11
c. Pemerintah	1.851,68	1.970,23	1.969,08	2.344,15
Jumlah	11.565,36	12.210,29	12.883,86	13.808,43
PDRB (ADHB)	13.229,17	13.857,85	14.458,55	15.053,25
<b>Proporsi (Persen)</b>	<b>87,42</b>	<b>88,11</b>	<b>89,11</b>	<b>91,73</b>

## **B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah. Pembangunan fasilitas wilayah/infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di seluruh wilayah Kabupaten Lahat tahun 2017, mencapai 1.603,705 Km. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang negara sepanjang 166,275 Km, di bawah wewenang pemerintah provinsi 98,28 Km, dan selebihnya 1.339,15 Km di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten. Selain infrastruktur jalan, transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Lahat.

## **C. Fokus Iklim Berinvestasi**

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Kabupaten Lahat semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Perbankan di Kabupaten Lahat telah menunjukkan kinerja positif

sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi. Investasi jangka panjang di Kabupaten Lahat meliputi investasi non permanen seperti dana bergulir dan investasi permanen seperti penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Besarnya investasi dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dalam pengertian PMTB antara lain meliputi pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Secara rinci perkembangan dan struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018.

**Tabel 2.79**

**Perkembangan dan Struktur PMT Kabupaten Lahat Tahun 2014-2017**

Uraian	2014	2015	2016	2017
Total PMTB				
a. ADHB (Miliar Rp)	5.063,05	5.041,85	5.394,60	5.680,68
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.998,25	4.002,26	4.157,40	4.349,77
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	38,27	36,38	37,31	37,74
Struktur PMTB				
a. Bangunan (Miliar Rp)	3.524,94	3.407,15	3.647,95	3.903,70
(%)	69,62	67,58	67,62	68,72
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.538,11	1.634,70	1.746,64	1.776,98
(%)	30,38	32,42	32,38	31,28
c. Total PMTB (Miliar Rp)	5.063,05	5.041,85	5.394,60	5.680,68
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)				
a. Bangunan	1,68	0,18	6,17	6,85
b. Non Bangunan	3,31	-0,04	0,04	0,67
Total PMTB	2,28	0,10	3,88	4,63

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018



Termasuk di dalam PMTB ini adalah perbaikan besar barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau meningkatkan kapasitas operasi barang modal tersebut, dikurangi dengan penjualan barang modal yang sudah ada. Untuk memudahkan pemahaman, PMTB ini dapat disamakan dengan "belanja modal" pada anggaran belanja pemerintah. Barang yang dikategorikan sebagai barang modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai umur ekonomis lebih dari satutahun;
- Nilai barang modal relatif besar dibandingkan dengan output yang dihasilkan secara rutin selamaperiodetertentu;
- Dapat digunakan berulang kali dalam prosesproduksi.

Selain itu parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut atau yang disebut ICOR (Incremental Capital Ratio). ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

#### **D. Fokus Sumber Daya Manusia**

Penduduk yang berjumlah besar dan berkualitas akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan pertambahan tersebut akan meningkatkan produksi. Selain itu dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan bertambah tinggi sehingga produktivitas akan bertambah yang selanjutnya akan menimbulkan pertumbuhan produksi yang lebih cepat. Dampak lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan luas pangsa pasar perdagangan. Karena peranannya ini, maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Lahat yang besar ini apabila berhasil dikelola secara baik akan menjadikannya sebagai suatu keunggulan komparatif sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan

berbagai kegiatan seperti aktivitas perkonomian, aktivitas pendidikan, sarana kesehatan, pariwisata dan lain-lain. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak perubahan karakteristik kehidupan sosial ekonomi yang sangat cepat dan besar terutama menyangkut karakteristik penduduk, terlebih lagi Kabupaten Lahat merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kawasan Strategis Wilayah Nasional (PKSN) dan pusat-pusat lain didalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah Kabupaten Lahat.

Perkembangan penduduk yang demikian cukup pesat menuntut pemerintah Kabupaten Lahat untuk melengkapi berbagai informasi, sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana prasarana umum lainnya. Data kependudukan dapat menjadi salah satu acuan untuk merencanakan sekaligus mengevaluasi program dalam pemenuhan kebutuhan akan fasilitas penunjang kesejahteraan rakyat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah serta tempat rekreasi.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Lahat sebanyak 423.424 jiwa yang terdiri atas 216.497 jiwa penduduk laki-laki dan 206.927 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Lahat pada tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan data yang diambil untuk penduduk yang berumur diatas 17 tahun keatas diambil dari data yang sudah rekam data e\_KTP.

**Tabel 2.80**

**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Lahat  
Tahun 2014-2019**

Tahun	Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Perempuan		
2014	198.534	190.500	389.034	104,20
2015	200.689	192.546	393.235	104,23
2016	202.796	194.628	397.424	104,20
2017	204.875	196.619	401.494	104,20
2018	224.884	214.683	439,567	104,75
2019	216.497	206,927	423.424	104,62

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat Tahun 2019

**E. Fokus Badan Usaha Milik Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 304 (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Sumsel Babel. Secara rinci penyertaan modal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.89

**Tabel 2.81**

**Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2020**

<b>Penyertaan Modal</b>	<b>PDAM Tirta Lematang</b>	<b>PD Pertambangan dan Energi</b>	<b>PD Hotel Bukit Serelo</b>	<b>Bank Sumsel Babel</b>
2014	0,00	4.240.686.286,00	0,00	36.838.143.757,56
2015	0,00	3.757.496.632,00	0,00	42.838.143.757,56
2016	0,00	3.722.225.857,00	23.080.773.413,89	48.838.143.757,56
2017	1.233.593.975,40	3.127.848.786,00	23.897.235.321,73	53.838.143.757,56
2018	2.055.952.680,81	2.527.994.533,00	15.162.462.936,15	58.838.143.757,56
2019	(874.723.271,35)	1.890.561.803,00	14.715.649.855,49	53.838.143.757,56
2020	(1.586.322.192,08)	1.653.026.893,00	14.093.639.466,30	58.838.143.757,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat 2014-2021

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

**2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Lahat**

Indikator makro daerah merupakan indikator ekonomi dan sosial yang akan dicapai oleh seluruh OPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun (2014-2018). Indikator makro ini menjadi penting untuk dievaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan di Tahun 2018. Kondisi makro Ekonomi Kabupaten Lahat secara keseluruhan tahun 2017 tumbuh lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa indikator makro ekonomi masih ada yang mengalami perlambatan.

**Tabel 2.82**

**Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2017 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017 Realisasi		2018 Realisasi		2019 Realisasi		2020 Realisasi	
1.	PDRB (ADHB)	Rp. Miliar	11.086,662	15.053,25	11.799,283	15.714.254,26	16.310.636,56	17.171.701,00	16.907.018,86	17.364.771,29
2.	PDRB (ADHK)	Rp. Miliar	4.301,945	11.255,34	4.575,548	11.451.263,93	11.670.881,63	12.382.331,00	11.890.499,33	12.427.419,33
3.	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Rp. Ribu Rupiah	23.364,553	37.493,090	24.621,074	38.655.000	39.817	39.805	40.979	40.370
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,18	3,92	6,36	4,07	4,15	4,22	4,24	0,33
5.	Penduduk Miskin	Persen	14,68	16,81	14,18	16,15	14,29	15,92	13,21	15,92
6.	Tingkat Pengangguran	Persen	2,10	4,33	1,36	3,29	3,22	3,07	3,15	3,05
7.	IPM	Indeks	74,05	66,38	74,41	66,99	67,68	67,62	68,26	67,62
8.	PAD	Rp. Juta	134.434	164.495	123.613	112.549	121.165	141.161	113.070	127.992
9.	Dana Perimbangan	Rp. Juta	1.309.600	1.211.669	1.297.252	1.377.663	1.450.160	1.609.981	1.120.490	1.273.265
10.	Lain-Lain Pendapatan yg sah	Rp. Juta	297.572	388.849	321.660	426.833	82.185	62.262	76.351	80.970

Sumber : Data Bappeda diolah dan Target RPJMD Kabupaten Lahat (2014-2018) dan RPJMD Kab. Lahat (2019-2023)

Tabel 2.83

Target Ekonomi Makro Kabupaten Lahat Tahun 2022

Indikator Ekonomi Makro	Capaian Kab. Lahat Tahun 2020	Target RKP Tahun 2022	Target RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2022	Target Kab Lahat RKPD Tahun 2022	Analisis
Tingkat Kemiskinan (Persen)	15,92	6-7	9,6-9,91	11,05	<
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,62	75,54	72,42	69,42	>
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	0,33	5,7-6	5,5-6,1	4,41	>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,05	3,6-4,3	3,75	3,01	<

Target indikator makro Kabupaten Lahat yang direncanakan tahun 2022 masih jauh dibawah target pembangunan nasional dan target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya maksimal untuk mencapai target tersebut antara lain :

- Penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia;
- Meningkatkan akses pelayanan dasar, dan kesehatan
- Menjaga stabilitas harga bahan pokok;
- Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik;
- Penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Lahat ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

### **2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD**

Pelaksanaan program RKPD tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melalui pelaksanaan evaluasi realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing instansi. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Realisasi penyerapan Belanja pada APBD Kabupaten Lahat dari total anggaran sebesar Rp. 1.927.161.086.141,12 adalah sebesar Rp 1.834.893.019.295,84 atau sekitar 95,21 % (beberapa kegiatan ditunda pembayarannya ke pihak ketiga dikarenakan pendapatan tidak mencapai target) dengan realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung sebesar 95,10% dan Belanja Langsung sebesar 95,40%. Anggaran

tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang tersebar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Rincian realisasi fisik dan keuangan Belanja Langsung per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.92

**Tabel 2.84**  
**Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2020**

Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1.01	Dinas Pendidikan	159.109.797.950	147.854.762.306	92,93	92,93
1.02	Dinas Kesehatan	103.072.036.560	67.024.533.980	65,03	65,03
	Rumah Sakit Umum	71.000.554.362,50	60.047.561.449,05	84,57	84,57
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	206.575.485.000	183.976.845.793	89,06	89,06
1.04	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	71.985.660.500	65.317.532.063,00	90,74	90,74
1.05	Satuan Pol-PP dan Pemadam Kebakaran	5.547.959.900	5.345.824.040	96,36	96,36
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.139.982.000	731.414.590	8,99	8,99
1.06	Dinas Sosial	1.751.176.475	1.705.501.664	97,39	97,39
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.987.677.000	2.008.710.470	67,23	67,23
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.005.149.900	1.836.287.195	91,58	91,58
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	1.156.323.000	1.143.297.149	98,87	98,87
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	7.527.459.547	7.344.960.864	97,58	97,58
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	3.623.530.000	3.268.742.000	90,21	90,21
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.253.404.833	9.820.943.516	95,78	95,78
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.585.751.840	8.181.917.127	85,35	85,35
2.15	Dinas Perhubungan	1.728.498.000	1.649.611.000	95,44	95,44



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.477.663.000	4.535.633.279	101,29	101,29
2.17	Dinas Koperasi dan UKM	32.117.992.725	17.852.149.369	55,58	55,58
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Penanggulangan Terpadu satu Pintu	1.686.656.000	1.628.467.991	96,55	96,55
2.19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.519.136.000	3.865.310.603	85,53	85,53
2.23	Dinas Perpustakaan	4.387.592.000	3.949.297.481	90,01	90,01
3.25	Dinas Perikanan	3.375.027.000	3.350.940.864	99,29	99,29
3.26	Dinas Pariwisata	3.751.061.350	3.042.820.342	81,12	81,12
3.27	Dinas Pertanian	108.397.938.060	30.154.927.305	27,82	27,82
3.30	Dinas Perdagangan	3.092.588.090	3.037.838.428	98,23	98,23
4.01	Sekretariat Daerah	85.563.329.500	78.863.383.199	92,17	92,17
4.02	Sekretariat DPRD	78.676.602.800	77.453.339.730	98,45	98,45
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.533.246.000	6.412.892.353	98,16	98,16
5.02	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah	25.000.000.000	21.000.000.000	84,00	84,00
	Badan Pendapatan Daerah	17.434.961.225	15.402.552.081	88,34	88,34
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia	7.096.756.425	4.877.990.224	68,74	68,74
5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	970.356.800	843.962.616	86,97	86,97
6.01	Inspektorat	10.064.803.650	9.167.351.135,00	91,08	91,08
7.01	Kecamatan Lahat	3.674.564.279	3.674.064.279	99,99	99,99
	Kecamatan Pseksu	373.093.000	364.669.000	97,74	97,74
	Kecamatan Gumay Talang	372.768.000	358.323.388	96,13	96,13
	Kecamatan Merapi Timur	395.600.000	354.638.000	89,65	89,65
	Kecamatan Merapi Barat	386.890.000	175.658.388	45,40	45,40
	Kecamatan Merapi Selatan	369.797.000	367.775.000	99,45	99,45

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

	Kecamatan Kikim Timur	332.463.000	301.544.250	90,70	90,70
	Kecamatan Kikim Barat	387.830.000	375.560.000	96,84	96,84
	Kecamatan Kikim Tengah	386.500.000	368.400.000	95,32	95,32
	Kecamatan Kikim Selatan	500.000.000	344.887.987	68,98	68,98
	Kecamatan Pulau Pinang	379.734.300	374.477.500	98,62	98,62
	Kecamatan Pagar Gunung	1.050.859.950	1.050.860.950	100,00	100,00
	Kecamatan Kota Agung	371.248.000	371.042.000,00	99,94	99,94
	Kecamatan Mulak Ulu	371.147.500	370.958.550	99,95	99,95
	Kecamatan Tj. Sakti Pumi	498.000.000	310.487.490	62,35	62,35
	Kecamatan Tj. Sakti Pumu	499.999.700	358.312.100	71,66	71,66
	Kecamatan Jarai	2.028.364.257	2.028.364.257	100,00	100,00
	Kecamatan Pajar Bulan	339.182.000	337.004.000	99,36	99,36
	Kecamatan Gumay Ulu	1.000.000.000	59.900.000	5,99	5,99
	Kecamatan Tanjung Tebat	435.044.000	152.956.000	35,16	35,16
	Kecamatan Muara Payang	418.600.000	418.586.000	100,00	100,00
	Kecamatan Suka Merindu	362.996.089	367.865.000	101,34	101,34
	Kecamatan Lahat Selatan	430.400.000	430.400.000	100,00	100,00
	Kecamatan Mulak Sebingkai	430.400.000	430.400.000	100,00	100,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Poitik	4.301.747.050	4.221.333.989	98,13	98,13

Sumber : Capaian Kinerja Kabupaten Lahat 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 Kabupaten Lahat secara umum telah mencapai target, bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Lahat tahun 2014-2018. Selanjutnya untuk realisasi dan capaian RPJMD Kabupaten

Lahat Tahun 2019-2023 dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lahat “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat Yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera Serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan" melalui Misi Pembangunan Kabupaten Lahat yaitu (1) Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan inovatif; (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat ,cerdas, terampil dan berkepribadian luhur; (4) Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia; (5) Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

**2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan  
(Tahun 2020)**

Realisasi penyerapan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Lahat dari total anggaran sebesar Rp. 1.777.131.655.345,00 terealisasi sebesar Rp. 1.951.242.635.457,65 atau sekitar 109,80 %, anggaran tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang tersebar di 58 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Secara rinci berikut kami sajikan tabel 2.93 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan di Kabupaten Lahat.

**Tabel 2.85**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Lahat Tahun 2020 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1	<b>1.777.131.655.345,00</b>	<b>1.951.242.635.457,65</b>	<b>109,80</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.a.	<b>113.070.819.000,00</b>	<b>127.992.430.922,65</b>	<b>113,20</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	31.362.125.000,00	43.320.827.736,73	138,13
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	3.504.994.000,00	3.037.484.651,50	86,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.a.3)	6.500.000.000,00	7.577.508.370,48	116,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.a.4)	71.703.700.000,00	74.056.610.163,94	103,28
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.b.	<b>1.587.709.700.345,00</b>	<b>1.742.280.096.928,00</b>	<b>109,74</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.1.1.b.1)	<b>1.120.490.373.100,00</b>	<b>1.273.265.615.921,00</b>	<b>113,63</b>
Dana Bagi Hasil Pajak		68.560.838.250,00	115.680.504.010,00	168,73
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		188.736.303.000,00	303.862.675.964,00	161,00
Dana Alokasi Umum		654.813.448.000,00	649.875.559.000,00	99,25
Dana Alokasi Khusus		208.379.783.850,00	203.846.876.947,00	97,82
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	5.1.1.b.2)	<b>333.581.804.000,00</b>	<b>333.376.098.800,00</b>	<b>99,94</b>
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		333.581.804.000,00	333.376.098.800,00	99,94
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.1.1.b.3)	<b>69.505.859.245,00</b>	<b>78.641.187.563,00</b>	<b>113,14</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		69.505.859.245,00	78.641.187.563,00	113,14
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	5.1.1.b.4)	<b>64.131.664.000,00</b>	<b>56.997.194.644,00</b>	<b>88,88</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		64.131.664.000,00	56.997.194.644,00	88,88
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.c.	<b>76.351.136.000,00</b>	<b>80.970.107.607,00</b>	<b>106,05</b>
Pendapatan Hibah		76.351.136.000,00	80.970.107.607,00	106,05
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	

<b>BELANJA</b>	5.1.2	<b>1.708.712.550.910,50</b>	<b>1.555.038.415.484,25</b>	<b>91,01</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.a.	<b>1.257.977.055.130,50</b>	<b>1.146.950.836.107,25</b>	<b>91,17</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	666.792.990.320,26	645.463.118.470,00	96,80
Belanja Barang	5.1.2.a.2)	568.888.764.810,24	480.440.775.237,25	84,45
Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	21.895.300.000,00	20.649.442.400,00	94,31
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	400.000.000,00	397.500.000,00	99,38
<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.b.	<b>372.056.961.025,00</b>	<b>367.820.849.128,00</b>	<b>98,86</b>
Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	4.353.518.666,00	711.328.471,00	16,34
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	69.882.553.209,00	79.832.943.023,00	114,24
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	65.459.550.890,00	63.748.517.750,00	97,39
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.b.4)	229.948.923.260,00	221.310.287.934,00	96,24
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	1.597.415.000,00	1.510.421.950,00	94,55
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	815.000.000,00	707.350.000,00	86,79
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.c.	<b>78.678.534.755,00</b>	<b>40.266.730.249,00</b>	<b>51,18</b>
Belanja Tak Terduga		78.678.534.755,00	40.266.730.249,00	51,18

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

<b>TRANSFER</b>	5.1.3.	<b>451.814.620.526,00</b>	<b>451.476.352.706,00</b>	<b>99,93</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	5.1.3.a.	<b>3.486.711.900,00</b>	<b>3.475.567.800,00</b>	<b>99,68</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		3.136.212.500,00	3.126.368.500,00	99,69
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		350.499.400,00	349.199.300,00	99,63
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.3.b.	<b>448.327.908.626,00</b>	<b>448.000.784.906,00</b>	<b>99,93</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		446.858.256.000,00	446.531.132.280,00	99,93
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.469.652.626,00	1.469.652.626,00	100,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(383.395.516.091,50)</b>	<b>(55.272.132.732,60)</b>	<b>14,42</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.	<b>383.395.516.091,50</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>89,37</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.a.	<b>383.395.516.091,50</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>89,37</b>
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.a.1)	322.144.963.730,50	342.627.429.780,85	106,36
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.a.2)	61.250.552.361,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.b.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>383.395.516.091,50</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>89,37</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>287.355.297.048,25</b>	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lahat berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan Kabupaten Lahat yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

### 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

#### Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 :

- a. Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan  
Tren capaian kemiskinan Kabupaten Lahat kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan dari 16,81 % menjadi 15,92 % atau turun sebesar 0,89 %.. Angka kemiskinan Kabupaten Lahat tersebut masih berada diatas rata-rata provinsi dan rata-rata nasional.
- b. Belum semua masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan

- mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- c. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 masih sebesar 67,62 %.
  - d. Belum semua masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses pelayanan dasar.
  - e. Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi dari Pemanfaatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
  - f. Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi dari Pemanfaatan Hasil Industri dan Jasa Produktif.
  - g. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja.
  - h. Pengurangan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - i. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan telekomunikasi informatika dalam menunjang sektor unggulan
  - j. Rendahnya aksesibilitas di wilayah Pedesaan an daerah perbatasan terhadap pusat pertumbuhan ekonomi
  - k. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana
  - l. Konflik Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba
  - m. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
  - n. Semua faktor ini juga mendapat pengaruh besar dari kejadian pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut sampai dengan Tahun 2020.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah adalah permasalahan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah di masa lalu dan masa mendatang, serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### **a. Kemiskinan**

- Persentase kemiskinan Kabupaten Lahat pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,92 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut sudah mengalami penurunan, namun Pemerintah Kabupaten Lahat masih harus kerja keras dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lahat.

**b. Pendidikan**

- Struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk usia muda yang merupakan potensi sekaligus beban bagi pembangunan, khususnya berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta lapangan pekerjaan, di lain pihak meningkatnya jumlah penduduk usia tua juga membutuhkan penanganan khusus.
- Tingkat profesionalisme tenaga pendidik masih rendah dalam wawasan, keterbukaan dan toleransi.
- Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas.
- Fasilitas penunjang pendidikan yang masih belum merata.
- Sekalipun pembangunan IPM di Kabupaten Lahat masuk dalam kategori menengah ke atas dan menduduki peringkat ke 4 di Sumatera Selatan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya.

**c. Kesehatan**

- Angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dirumah tangga masih rendah.
- Status gizi masyarakat masih rendah
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih belum memadai
- Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas.
- Belum tuntas nya masalah Stunting.

**d. Infrastruktur**

- Masih diperlukan peningkatan untuk sarana dan prasarana jalan, terutama jalan pedesaan.
- Belum optimalnya penataan kawasan strategis terpadu dan penentuan kawasan produk-produk unggulan pada setiap wilayah pengembangan.
- Belum terintegrasinya penataan kawasan terpadu bagi setiap wilayah

pengembangan sehingga menyulitkan dalam hal pengendalian wilayah tata ruang.

- Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal
- Masih belum maksimalnya jangkauan pelayanan air bersih.
- Belum maksimalnya sistem drainase dan pembuangan limbah.

**e. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- Terjadi penurunan pertumbuhan pada subsektor tanaman pangan
- Sistem pertanian masih bersifat monokultur dan diversifikasi tanaman pangan masih rendah
- Penggunaan lahan belum optimal untuk terutama kaitannya dengan swasembada pangan, masih terdapat beberapa daerah yang termasuk dalam kategori agak rawan pangan.
- Infrastruktur penunjang pengolahan pertanian belum mendukung
- Pengolahan pasca panen hasil-hasil pertanian belum efektif
- Terjadi pergeseran dari tanaman pangan ke perkebunan rakyat
- Pengelolaan lahan pertanian masih menggunakan cara-cara yang tradisional hal ini disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat dan teknologi yang masih rendah menjadikan tingkat produktifitas hasil-hasil pertanian relatif rendah.
- Produksi hasil pertanian relatif berfluktuatif, antara lain dipengaruhi oleh faktor iklim, baik musim kemarau maupun musim hujan yang akhirnya akan berpengaruh pada masa tanam dan panen, sehingga berpengaruh pada tingkat produksi
- Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penguasaan dan pemanfaatan IPTEK serta etos kerja yang rendah
- Rendahnya aksesibilitas ke pusat-pusat pemasaran serta rendahnya kualitas kelembagaan (misalnya koperasi, komunitas petani dan sejenisnya)
- Diversifikasi tanaman perkebunan masih rendah



- Pengolahan tanaman karet belum optimal
- Belum berkembangnya sistem inti dan plasma khususnya untuk tanaman sawit
- Pengelolaan peternakan masih sangat tradisional, padang penggembalaan yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat
- Pengelolaan peternakan terutama ternak sapi, kambing masih dilakukan secara liar oleh masyarakat tidak terintegrasikan pada lokasi tertentu atau padang penggembalaan serta tidak dikendalikan
- Pengolahan budidaya kolam masih rendah

**f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi.
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- Masih lemahnya sistem perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak).

**g. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- Pelayanan publik belum optimal.
- Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalankan mekanisme pembangunan daerah.
- Belum optimalnya implementasi standar pelayanan minimum (SPM) oleh instansi dan aparatur pemerintah.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan aparatur.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

**BAB III  
KERANGKA EKONOMI  
DAERAH DAN  
KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Lahat tahun 2022 diselaraskan dengan :

- 1) Arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
  - 2) Arahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023
  - 3) Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, yang selaras dengan rencana kerja pemerintah di tahun yang sama.
- Adapun strategi makro fiskal tahun 2022 sebagai berikut :

- Melanjutkan upaya Pemantapan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial dan mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak covid-19.
- Mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
- Optimalisasi pendapatan, penguatan belanja lebih baik, dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.

- Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal.

Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022 didorong untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan, meliputi :

- SDM yang berkualitas
- Birokrasi yang efisien dan melayani
- Akselerasi Infrastruktur
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana

4) Berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19

### **3.1.1 Analisis Perekonomian Nasional**

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh 4,5 persen, kemudian diproyeksikan akan naik menjadi 5,5 sampai 6 persen pada tahun 2022. ADB menilai Indonesia mampu melewati tahun 2020 dengan baik, berkat respons terhadap krisis yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Serta proses vaksinasi yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2022 diyakini mampu menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ini.

Tahun 2022 merupakan tahun penentu untuk pemulihan ekonomi. Karena pada tahun 2022, *herd immunity* diperkirakan terjadi seiring dengan penyelesaian proses vaksinasi ke seluruh masyarakat. Dampaknya, aktivitas ekonomi bisa berjalan maksimal dan mendorong pertumbuhan secara nasional. Sumber pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 diharapkan berasal dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Ketiga sumber ini diyakini akan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83 persen (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97 persen (y-on-y) dengan peranan sebesar 2,44 persen.



Sumber : Bursa BPS RI, 2021

Gambar 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW I-2021

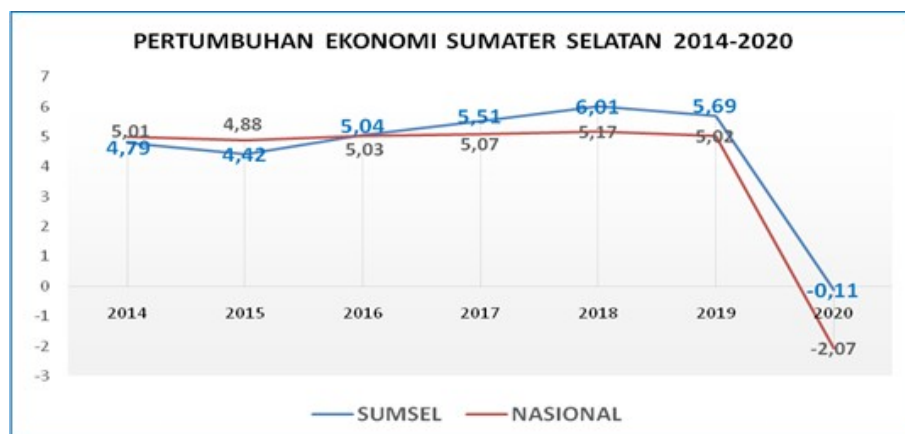
Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,54 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,05 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,52 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,44 persen.

Setahun setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dampaknya terasa dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Pada triwulan I-2021, kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan (y-on-y) terdalam sebesar 5,16 persen; diikuti Pulau Kalimantan sebesar 2,23 persen; Pulau Sumatera sebesar 0,86 persen; dan Pulau Jawa sebesar 0,83 persen. Sebaliknya, kelompok pulau yang mengalami pertumbuhan (y-on-y) positif meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 1,20 persen serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 8,97 persen.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah

#### 3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2020

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen dan terjadi pada sebagian lapangan usaha, namun masih di atas Nasional yang berkontraksi sebesar 2,07%.

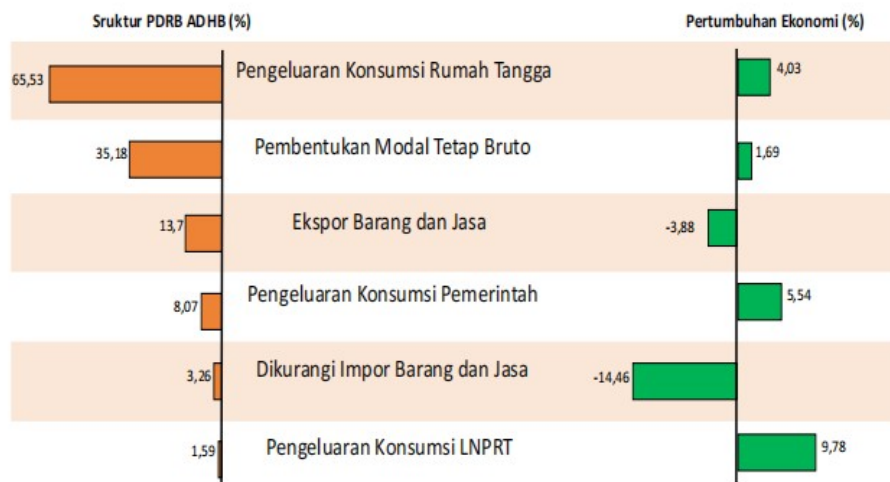


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan & Bappeda Prov. Sumsel

**Grafik 3.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2020**

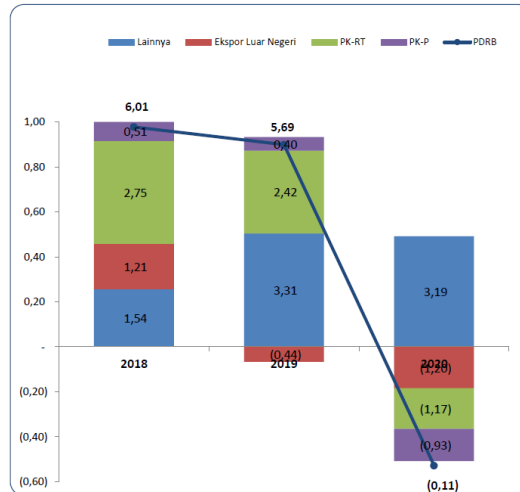
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (c-to-c) mengalami kontraksi hampir di seluruh komponen. Komponen yang mengalami kontraksi tertinggi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,86 persen; diikuti Komponen Ekspor Luar Negeri terkontraksi sebesar 6,41 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) terkontraksi sebesar 5,96 persen. Kontraksi komponen PK-P ini disebabkan karena adanya kontraksi yang cukup dalam pada konsumsi kolektif, yaitu sebesar -12,97 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Ekspor Luar Negeri; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori mempunyai peranan yang relatif kecil.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan & Bappeda Prov. Sumsel

**Grafik 3.2**  
**Struktur PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut**  
**Pengeluaran Tahun 2019**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan& Bappeda Prov. Sumsel

**Grafik 3.3**

**Sumber Kontraksi PDRB Sumatera Selatan Tahun 2018-2020  
Menurut Pengeluaran (%)**

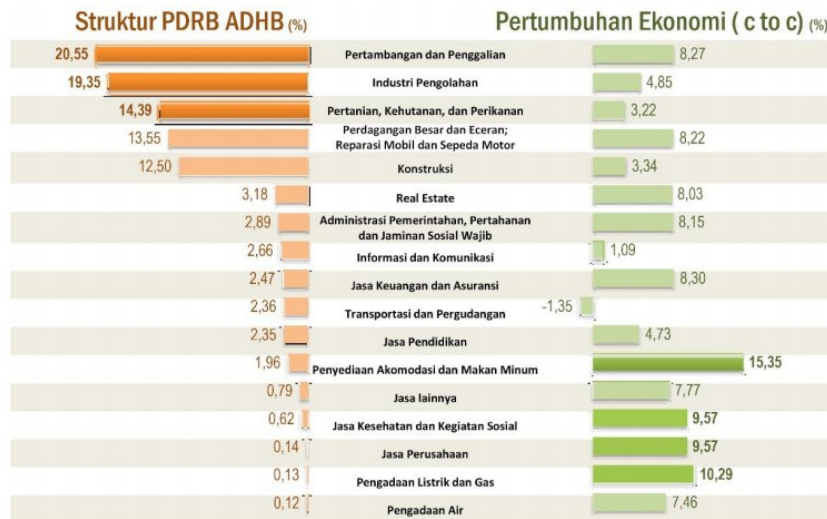
**Tabel 3.1**

**Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Sumatera Selatan**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Pertambangan dan Penggalian (24,983%)	Pertambangan dan Penggalian (23,93%)	Pertambangan dan Penggalian (21,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,71%)	Pertambangan dan Penggalian (19,24%)	Pertambangan dan Penggalian (20,24%)	Pertambangan dan Penggalian (20,55%)	Industri Pengolahan (19,72%)
II	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,60%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,76%)	Industri Pengolahan (18,36%)	Industri Pengolahan (19,94%)	Industri Pengolahan (19,56%)	Industri Pengolahan (19,52%)	Industri Pengolahan (19,35%)	Pertambangan dan Penggalian (18,49%)
III	Industri Pengolahan (17,15%)	Industri Pengolahan (17,35%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,13%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,70%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,80%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,80%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,39%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,2%)
IV	Konstruksi (12,68%)	Konstruksi (13,40%)	Konstruksi (12,58%)	Konstruksi (13,10%)	Konstruksi (13,24%)	Konstruksi (12,98%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,55%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,72%)
V	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,99%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,07%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,58%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,68%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,43%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,94%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,45%)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan& Bappeda Prov. Sumsel



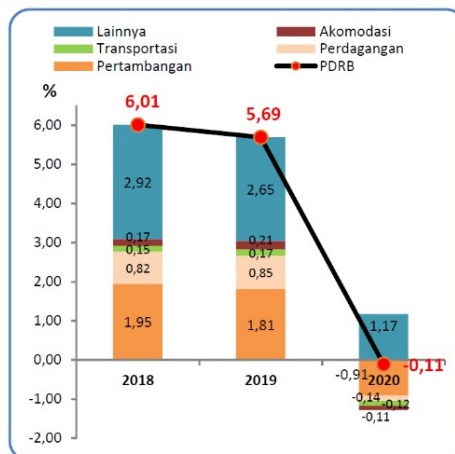


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan & Bappeda Prov. Sumsel

**Grafik 3.4**

### Struktur PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Sumatera Selatan Tahun 2019

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2019, Pertambangan dan Penggalian merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan & Bappeda Prov. Sumsel

**Grafik 3.5**

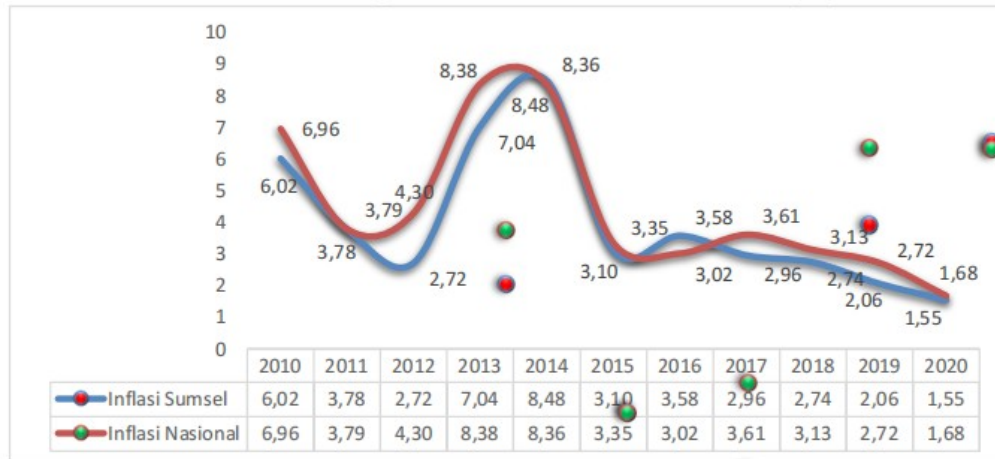
### Sumber Kontraksi Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 Menurut Lapangan Usaha (%)

Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,21 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,91 persen. Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi sebesar 4,04 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Pengadaan Listrik, Gas sebesar 14,67 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 12,79 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,14 persen. Adapun Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga tumbuh sebesar 1,74 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2020, sumber kontraksi tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 0,14 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari lapangan usaha lainnya tumbuh positif sebesar 1,06 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 19,72 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,49 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,20 persen.

Inflasi di Sumatera Selatan pada tahun 2020 tercatat rendah sebesar 1,55% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran inflasi  $3,0 \pm 1\%$ . Realisasi ini lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68% (yoy) dan inflasi tahun 2019 sebesar 2,06% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemic COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mitigasi risiko penyebaran COVID-19 di beberapa daerah juga menurunkan permintaan sektor penyedia jasa makan minum. Selain itu, inflasi yang rendah ini juga merupakan dampak koreksi tarif angkutan udara akibat adanya pemberlakuan persyaratan perjalanan udara untuk memitigasi risiko penyebaran pandemic COVID-19 yang menurunkan permintaan, serta promosi harga yang diberlakukan oleh maskapai dan travel agent untuk menarik minat masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 3.6**

**Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (%)**

**Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan** mengalami peningkatan dari 4,23% pada Agustus 2018 menjadi 4,48% pada Agustus 2019 atau meningkat sebesar 5,91% (yoy). Sejalan dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan sebesar 6,17% (yoy). Di sisi lain, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pada Agustus 2018 total jumlah angkatan kerja sebesar 4,14 juta jiwa, menjadi 4,17 juta jiwa atau meningkat sebesar 0,37 % (yoy). Tingkat partisipasi angkatan kerja Agustus 2019 mencapai 67,86% atau menurun dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 68,69%. Hal ini sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja yang sebesar 0,12 % (yoy).

**Angka Kemiskinan** di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan laporan mengalami peningkatan searah dengan kondisi nasional. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2020 mencapai 1,12 juta orang atau 12,98% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah kemiskinan pada September 2020 sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 12,66% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan dan pada September 2019 yang sebesar 12,56% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Secara Umum, tren pertumbuhan penduduk miskin di

Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang diikuti oleh kenaikan nominal garis kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada periode laporan merupakan dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemic COVID-19 yang belum mereda. Pemerintah melalui Dinas Sosial telah meningkatkan efektivitas penyaluran beberapa program bantuan social Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti jangkauan penyaluran bantuan sosial yang belum merata.

**Gini Ratio Sumatera Selatan** pada kurun waktu 2015-2020 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2019-September 2020 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dari 0,339 keadaan September 2019 menjadi 0,338 keadaan September 2020 atau turun 0,001 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan. Ditinjau dari wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Gini ratio perkotaan pada September 2020 sebesar 0,352 sedangkan di perdesaan sebesar 0,310. Gini ratio di daerah perkotaan mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada periode maret 2020 yang tercatat sebesar 0,358 sedangkan gini ratio di pedesaan mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2020 yang tercatat sebesar 0.308. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan searah dengan kondisi nasional, yang diperkirakan juga terkait dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di daerah perkotaan.

#### **3.1.2.2. Proyeksi perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2021**

Tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diharapkan upaya pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi : industry, pariwisata dan investasi melalui perbaikan berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan harga komoditas

internasional pasca pemulihan perdagangan global. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan menguat terutama setelah pemilu dan pilkada serta membaiknya sentiment bisnis karena usulan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI). Beberapa Proyek Strategis Nasional dan Mayor Project di Sumatera Selatan diharapkan juga akan meningkatkan belanja pemerintah.

Dari sisi ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor. Impor barang dan jasa juga diperkirakan akan naik seiring mulai bergeraknya ekonomi dan mulainya setting Kawasan ekonomi khusus tanjung api-api.

### **3.1.2.3. Proyeksi perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2022**

Kondisi perekonomian daerah diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 5,8-6,5 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global. Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke Green Recovery.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian

pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha terutama sektor informasi dan akomodasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dimana di tahun 2020 masyarakat banyak melakukan kegiatan melalui media daring sehingga meningkatnya penggunaan jasa internet, serta jasa kesehatan ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang terkonfirmasi positif di Sumatera Selatan. Dengan berbagai strategi dan arah kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan di targetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2022 pada kisaran 5,8-6,5 %.

**Inflasi** pada tahun 2022 diharapkan tetap terjaga pada kisaran 2-4% dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Dengan masih terdampaknya pandemi Covid-19 di Indonesia kondisi tingkat

pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 5,41- 4,68% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 11,43-12,77%. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Strategi menurunkan beban pengeluaran melalui kebijakan optimalisasi bantuan sosial baik tunai maupun non tunai dan penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan social serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, Pendidikan dan ekonomi.

Strategi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses administrasi kependudukan, akses permodalan usaha, keberantaraan usaha, kemitraan, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.

**Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,352** melalui stretegi penguatan ekonomi pada kelompok menengah bawah dan kelompok 40 persen terbawah. Kebijakan yang dilakukan adalah melalui peningkatan jumlah pekerja pada sektor formal dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan Pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi.

#### **3.1.2.4. Perekonomian Kabupaten Lahat Tahun 2020**

##### **3.1.2.4.1. Produk Domestik Regional Bruto ADHB-ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Lahat**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 s.d 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan atau perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur

perdagangan global. Khususnya pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi di berbagai belahan dunia.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Lahat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lahat menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 3. 2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2016–2020**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10 672,85	11 193,48	11 964,21	12 828,66	13 010,62
2. Konsumsi LNPRT	242,76	253,23	278,87	314,98	305,34
3. Konsumsi Pemerintah	1 969,08	2 359,60	2 668,47	3 011,36	2 944,87
4. PMTB	5 322,64	5 543,47	5 811,27	5 961,26	6 112,31
5. Perubahan Inventori	-497,71	-327,70	-615,84	-329,47	-207,93
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3 446,93	-3 986,73	-4 122,65	-4 615,09	-4 800,45
<b>Total PDRB</b>	<b>14 262,70</b>	<b>15 035,35</b>	<b>15 984,33</b>	<b>17 171,70</b>	<b>17 364,77</b>

\* Angka sementara ;

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lahat 2021



Nilai PDRB Kabupaten Lahat (ADH Berlaku) selama periode tahun 2016 s.d. 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan pada tahun 2020 nilai PDRB ADH Berlaku mengalami perlambatan dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 3. 3**

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,  
Kabupaten Lahat Tahun 2016–2020**

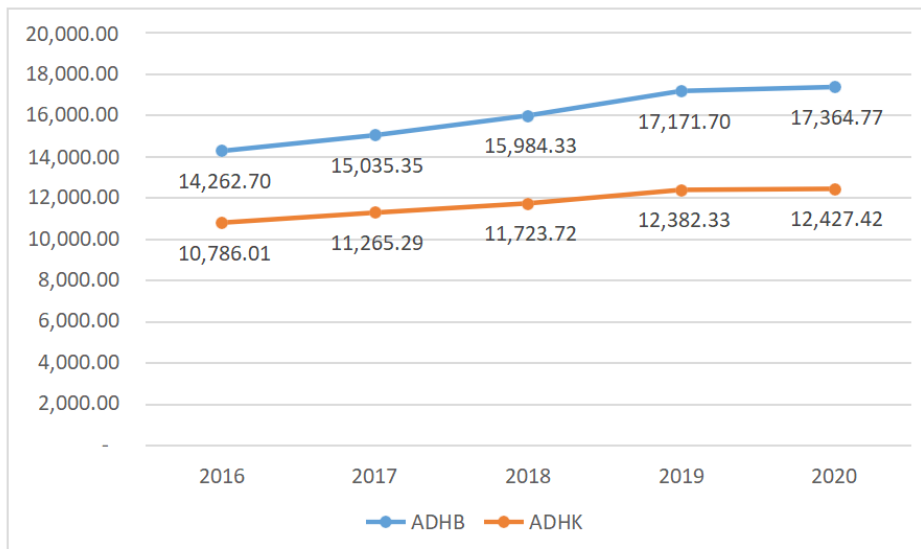
<b>Komponen Pengeluaran (1)</b>	<b>2016 (2)</b>	<b>2017 (3)</b>	<b>2018 (4)</b>	<b>2019* (5)</b>	<b>2020** (6)</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	7351,42	7576,47	7919,37	8256,58	8 237,67
2. Konsumsi LN PRT	176,90	183,84	198,46	218,65	213,25
3. Konsumsi Pemerintah	1399,34	1545,23	1686,28	1753,38	1688,33
4. PMTB	4157,95	4313,24	4417,50	4498,43	4 571,53
5. Perubahan Inventori	-171,80	-178,99	-241,44	-180,47	-177,26
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-2127,82	-2174,49	-2256,46	-2164,24	-2106,11
<b>Total PDRB</b>	<b>10786,01</b>	<b>11265,29</b>	<b>11723,72</b>	<b>12382,33</b>	<b>12427,42</b>
*Angka sementara					
**Angka Sangat Sementara					

Sumber : BPS Kabupaten Lahat, 2021

Selain dinilai atas dasar harga (ADH) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH Konstan 2010 atau berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun

waktu 2016–2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Lahat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Samahalnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020.



\* Angka sementara  
\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lahat, 2021

**Grafik 3.7**

**Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat, Tahun 2016 – 2020 (Miliar Rupiah)**

Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam penghitungan PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-

LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto(E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan grafik tersebut, PDRB ADH Berlaku dan Konstan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 s.d. 2019. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 menyebabkan perlambatan pertumbuhan PDRB, baik ADH Berlaku maupun Konstan. Hal ini menunjukkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Lahat di beberapa komponen pengeluaran mengalami pengurangan.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, ditengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita (Tabel 3. 4).

**Tabel. 3.4**

**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lahat,  
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Nilai PDRB (Miliar Rp)</u>					
- ADHB	14 262,70	15 035,35	15 984,33	17 171,70	17 364,77
- ADHK 2010	10 786,01	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42
<u>PDRB perkapita (Ribu Rp)</u>					
- ADHB	35 887,86	37 448,50	39 416,49	41 945,42	42 024,49
- ADHK 2010	27 139,81	28 058,44	28 910,05	30 246,40	30 075,60
<u>Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010</u>	1,26	3,38	3,04	4,62	-0,56
<u>Jumlah penduduk ( org)</u>	397 424	401 494	405 524	409 382	413 206
<u>Pertumbuhan</u>	1,07	1,02	1,00	0,95	0,93

\* Angka sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lahat, 2021

**3.1.2.4.2. Produk Domestik Regional Bruto ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lahat**

Nilai PDRB Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 17,36 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 193 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 17,17 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 12,38 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,43 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Lahat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni

disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2016–2020) struktur perekonomian Kabupaten Lahat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi, dan Industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lahat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 34,39 persen (angka ini meningkat dari 34,24 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,14 persen (turun dari 20,44 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,66 persen (naik dari 12,44 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,35 persen (turun dari 9,62 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,63 persen (naik dari 4,84 persen di tahun 2016).

Tabel 3. 5

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	20,44	19,91	19,13	18,40	19,14
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	34,24	33,70	34,13	34,86	34,39
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,84	5,21	5,40	5,38	5,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,42	0,49	0,55	0,59	0,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,62	9,72	9,58	9,21	9,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	12,44	13,28	13,89	14,58	13,66
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,21	1,26	1,25	1,21	1,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,34	1,39	1,48	1,59	1,49
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,83	0,82	0,82	0,82	0,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,69	1,72	1,70	1,64	1,62
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,76	2,74	2,72	2,68	2,71
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,05	5,62	5,27	5,00	5,17
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,84	2,75	2,70	2,66	2,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,75	0,80	0,78	0,76	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara/ *Preliminary Figures*

\*\* Angka sangat sementara/ *Very Preliminary Figures*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lahat, 2021

Di antara kelima lapangan usaha tersebut selama 5 tahun ini, Konstruksi dan Industri pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Sementara itu, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019, akan tetapi menurun cukup drastis pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat sebagian besar masyarakat takut untuk keluar rumah sehingga pasar tradisional maupun modern kehilangankonsumennya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktusetahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Lahat pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Lahat atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mencapai 12,43 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 12,38 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,36 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,62 persen.

Perekonomian yang melambat disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia. Akan tetapi, Kabupaten Lahat masih

bertahan pada pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini disebabkan oleh sektor pertambangan sebagai *share* terbesar dalam perekonomian Kabupaten Lahat. Selain itu adanya investasi besar di sektor pengadaan listrik dan peningkatan beberapa sektor lain dikarenakan pandemi Covid-19. Dari seluruh lapangan usaha ekonomi yang ada, 11 diantaranya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, sedangkan 6 lainnya negatif (mengalamikontraksi).

Sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,92 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,24 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,04 persen; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,85 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,26 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,87 persen; Konstruksi sebesar 1,74; persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,59 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,57 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,05 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi 0,75 persen.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi dikarenakan adanya dua perusahaan besar pembangkit listrik yang terus menambah kapasitas produksi listrik guna menjangkau daerah yang lebih jauh. Sektor Informasi dan Komunikas juga tumbuh cukup tinggi, dikarenakan Covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah, sehingga pemakaian internet meningkat signifikan. Selain itu, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mendapatkan dampak positif dari Covid-19 secara ekonomi, karena tenaga kesehatan mendapatkan insentif yang lebih tinggi dalam penanganan Covid-19 serta bantuan yang cukup intens di bidang kesehatan.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi adalah: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -7,21 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -7,03 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -6,42 persen; Jasa Perusahaan



sebesar -2,98 persen; Jasa Pendidikan sebesar -1,90 persen; dan Real Estate sebesar -0,73 persen. Penyebab kontraksi ke-6 lapangan usaha tersebut adalah pandemi Covid- 19 yang terjadi selama tahun 2020 di Kabupaten Lahat.

**Tabel 3.6**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen)**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat (ADHK) menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2019	2018	2017	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.05	1.57	2.37	4.32	2.31
B. Pertambangan dan Pengalihan	1.59	8.98	4.89	5.45	0.68
C. Industri Pengolahan	1.57	4.64	5.46	7.45	6.79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.92	15.85	18.57	18.19	25.60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.85	8.41	7.38	1.20	3.32
F. Konstruksi	1.74	2.62	2.24	3.21	2.45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.21	8.86	6.27	3.70	2.21
H. Transportasi dan Pergudangan	-6.42	2.53	1.72	1.77	9.17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.03	10.07	8.70	1.81	12.05
J. Informasi dan Komunikasi	8.24	4.76	2.05	1.95	7.18
K. Jasa Keuangan	0.75	1.17	1.31	1.57	3.05
L. Real Estate	-0.73	3.14	3.36	2.25	7.20
M, N. Jasa Perusahaan	-2.98	5.74	5.61	1.27	2.35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.87	1.79	3.68	3.89	0.27
P. Jasa Pendidikan	-1.90	4.21	3.67	1.34	6.20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.04	4.25	2.65	5.47	6.54
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4.26	6.56	7.44	1.14	2.93
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>0.36</b>	<b>5.62</b>	<b>4.07</b>	<b>4.44</b>	<b>2.34</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lahat, 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,89 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 42,02 juta rupiah (lihat tabel 11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 3.7**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat ADHB Menurut Lapangan Usaha Juta Rupiah 2016-2020**

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2019	2018	2017	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3322932.00	3159679.00	3058184.00	2994195.00	2914811.00
B. Pertambangan dan Penggalan	5971530.00	5986498.00	5456488.00	5067548.00	4883053.00
C. Industri Pengolahan	977031.00	923550.00	863270.00	783751.00	690887.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	119842.00	102141.00	88159.00	74176.00	59406.00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5419.00	5071.00	4573.00	4087.00	3866.00
F. Konstruksi	1622880.00	1582290.00	1530726.00	1462114.00	1372763.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2372333.00	2503649.00	2220425.00	1996641.00	1773777.00
H. Transportasi dan Pergudangan	197680.00	208162.00	199351.00	189119.00	172037.00
I. Penyediaan Akomodasi dan	259236.00	273519.00	236981.00	208394.00	190451.00

Makan Minum					
J. Informasi dan Komunikasi	154622.00	140775.00	131088.00	123052.00	118110.00
K. Jasa Keuangan	281273.00	278739.00	271185.00	258899.00	241235.00
L. Real Estate	469821.00	460553.00	435004.00	412598.00	393560.00
M, N. Jasa Perusahaan	8313.00	8366.00	7756.00	7264.00	6834.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	897847.00	858179.00	842861.00	845035.00	862623.00
P. Jasa Pendidikan	459949.00	455698.00	430384.00	414162.00	404480.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143429.00	130798.00	123904.00	119661.00	106852.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	100634.00	94036.00	83997.00	74653.00	67951.00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>17364771.00</b>	<b>17171701.00</b>	<b>15984334.00</b>	<b>15035348.00</b>	<b>14262695.00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lahat, 2021

#### **3.1.2.4. Perekonomian Kabupaten Lahat Tahun 2022**

Adanya pandemi covid-19 membuat pembangunan tidak tercapai maksimal, semua aspek terutama perekonomian berjalan lambat dan tidak stabil, perekonomian tetap tumbuh namun tidak signifikan yaitu 0,33 di Tahun 2020. Untuk itu menjadi fokus saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, hingga pemerataan infrastruktur. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi dan daya saing masyarakat meningkat, yang didukung pemerataan infrastruktur.

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Lahat Tahun 2017-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)		(12)					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,18	3,92	6,36	4,07	4,15	4,22	4,24	0,33	4,33	4,41
2	PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	11.086.662	15.117.871,96	11.799.283	15.714.254,26	16.310.636,56	17.171.701,00	16.907.018,86	17.364.771,29	17.076.089,00	17.246.850,00
3	PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	4.301.945	11.158.170,40	4.575.548	11.451.263,93	11.670.881,63	12.382.331,00	11.890.499,33	12.427.419,33	12.009.404,32	12.129.498,37
4	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	23.364	32.017	24.621	38.655	39.817	39.805	40.979	40.370	42.141	43.303
5	Inflasi	%	5,00	2,78	5,00	2,78	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Penduduk Miskin	%	14,68	16,81	14,18	16,15	14,29	15,92	13,21	15,92	12,13	11,05
7	Tingkat Pengangguran	%	2,10	4,33	1,36	3,29	3,22	3,07	3,15	3,05	3,08	3,01
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,05	65,75	74,41	66,99	67,68	67,62	68,26	67,62	68,84	69,42

Sumber : RPJMD Kab Lahat 2014-2018, BPS Kabupaten Lahat Tahun 2021

Berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025, kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2020 adalah tetap komitmen meningkatkan peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan melalui :

- Pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif daerah dan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan kesetaraan gender.
- Pembangunan di bidang industri, pertanian, dan sumber daya alam serta sektor jasa.
- Menjunjung nilai-nilai supremasi hukum yang kuat, demokratis, tanggap terhadap hak-hak azasi manusia, penyelenggaraan tata pemerintahan baik, serta daerah yang semakin otonom dengan tidak mengabaikan keselarasan antara kepentingan daerah dan pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Tabel 3.9**  
**Target dan Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Lahat**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
			Realisasi *		Prediksi *	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,24	0,33	4,33	4,33	4,41
PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	16.907.018,86	17.364.771,29	17.076.089,00	17.076.089,00	17.246.850,00
PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	11.890.499,33	12.427.419,33	12.009.404,32	12.009.404,32	12.129.498,37
Pendapatan Per Kapita	Rupiah	40.979	40.370	42.141	42.141	43.303
Persentase Penduduk Miskin	%	13,21	15,92	12,13	12,13	11,05
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,15	4,18	3,08	3,08	3,01

Sumber : Data diolah Bappeda Tahun 2021

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

#### a. Tantangan Global dan Nasional

Sejumlah lembaga internasional memberikan prediksi yang menggembirakan mengenai *outlook* perekonomian global di 2021 ini. Lantas, berakhirnya *lockdown* di sejumlah negara Eropa disertai pemulihan ekonomi lebih lanjut pada 2021 ini bisa membuat perekonomian global "kembali normal" seperti sebelum masa pandemi. Meski ada risiko utang besar yang terakumulasi selama 2020, kebijakan preventif pengelolaan utang yang hati-hati tentu sudah disiapkan di setiap negara.

*Outlook* pemulihan ekonomi global ini akan memberikan efek positif ke perbaikan harga komoditas, minyak khususnya. Permintaan komoditas dan minyak akan meningkat yang berdampak pada kenaikan harga. Perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang akan memperkuat mata uang mereka.

Maka setelah pemulihan ekonomi yang sangat kuat pada paruh pertama 2021, pertumbuhan ekonomi secara bertahap akan kembali turun ke pertumbuhan tren global berkisar 3%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terus berada di Tiongkok mewakili kawasan Asia yang bertumbuh serentak. Oxford Economics bersama *the Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW), memperkirakan pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara (ASEAN) kontraksi 4,1% di 2020. Namun kemudian pada 2021 angka pertumbuhan ekonomi ASEAN akan melonjak menjadi 6,2%.

Pemulihan ekonomi di ASEAN pada 2021 sebagian disebabkan *low base effect* dari 2020 sebagai *baseline*. Tetapi kebijakan makroekonomi dinilai akan tetap berperan akomodatif, dengan dukungan fiskal yang ekstensif dan suku bunga rendah.

Tahun 2021 ini, Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkisar minus 1,7% hingga minus 2,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah tersebut tak jauh beda dengan lembaga internasional.

Asian Development Bank (ADB), misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar minus 2,2%. Bank Dunia memproyeksikan minus

2,2%. Kemudian Organisasi dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mematok minus 2,4%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 masih akan dibayangkan oleh dampak pandemi Covid-19. Namun sebagian orang yakin turbulensi akan berakhir karena harapan besar adanya vaksin Covid-19 sebagai *game changer* yang utama. Beberapa lembaga keuangan dunia dan domestik telah mengeluarkan prediksi ekonomi di 2021.

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami *rebound* pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada tahun 2022. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global.

Kendati demikian, proyeksi IMF ini jauh lebih rendah dari perkiraan pada Oktober 2020 yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,1 persen tahun ini. Ketidakpastian seputar prospek pertumbuhan ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Untuk mengamankan momentum pemulihan yang sedang terjadi, dukungan kebijakan yang memadai sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif diharapkan tetap jalan di 2021.

Terkait dengan Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, IMF menegaskan undang-undang ini sangat membantu mengurangi hambatan bagi investasi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu standar tata kelola yang berkualitas tinggi di pengaturan regulasi saat mengimplementasikan UU ini harus dipertahankan.

Lembaga internasional lainnya, Bank Dunia, memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% di 2021. Proyeksi Bank Dunia ini tercatat dalam *Global Economic Prospect* edisi Januari 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di level 7,4% di sepanjang 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal I-2021 di negara-negara besar, negara-negara berkembang, dan negara-negara kecil.

Kurang lebih *tone*-nya sama dengan IMF maupun Bank Dunia. Menteri keuangan meyakini pertumbuhan ekonomi tahun ini mulai menunjukkan angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan. Ekonomi Indonesia pada Maret-April 2021 diproyeksikan tumbuh dalam rentang antara 4,5%-5,5%. Begitu pula pada Mei-Juni 2021, ekonomi diprediksi bertahan di level 4,5%-5,5%.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menembus 5% pada September-Oktober 2021. Lalu, ekonomi diprediksi bertahan di level 5% pada Desember 2020, sebagaimana tertuang di asumsi APBN 2021.

Hanya saja, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan Covid-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi.

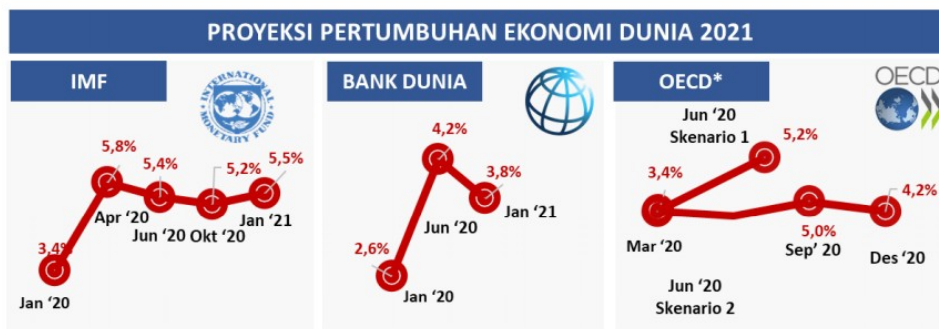
Akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berpotensi terjadi. Apalagi pada 2021 ini pemerintah juga telah merencanakan anggaran sebesar Rp 403,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dari total dana ini, sebesar Rp 25,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Bahkan anggaran kesehatan ini masih akan ditambah dengan belanja yang tidak terserap 2020. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 110,2 triliun. Pemerintah pun masih akan memberikan insentif usaha sebesar Rp 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi senilai Rp 63,84 triliun. Disain kebijakan fiskal yang ekspansif memberikan jaminan bahwa *outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 akan jauh lebih baik dibanding 2020 yang kontraksi.



Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian Indonesia di 2021 akan kembali ke zona positif, bahkan melesat hingga berada di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Ketahanan perekonomian di tahun ini ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan *social distancing* dan vaksinasi masal. Komponen itu bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat program perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Grafik 3.8

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global / Dunia 2021



\*Ket:

- Skenario 1: *Single-hit* (Pandemi COVID-19 terjadi hanya sekali)
- Skenario 2: *Double-hit* (Terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19)

Sumber : IMF (Januari 2021), World Bank (Januari 2021), OECD (Desember 2020) dan WTO (Oktober 2020)

Pada April 2021 terjadi inflasi sebesar 0,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,29. Dari 90 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 18 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu sebesar 1,31 persen dengan IHK sebesar 107,89 dan terendah terjadi di Yogyakarta sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 106,92. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,26 persen dengan IHK sebesar 104,20

dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 107,83. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2021 sebesar 0,58 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,42 persen. Komponen inti pada April 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–April) 2021 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,18 persen.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)**

Uraian	2020 <sup>a)</sup>	Outlook 2021 <sup>b)</sup>
<b>Target Pembangunan</b>		
Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)(%)	7,07	5,9–6,5
Tingkat Kemiskinan(%)	10,19	9,2–9,7
Rasio Gini(nilai)	0,385	0,377–0,382
IPM(nilai)	71,94	72,70
Penurunan Emisi GRK	25,93	24,05
<b>Indikator Pembangunan</b>		
Nilai Tukar Petani(NTP)	101,65	102–104
Nilai Tukar Nelayan(NTN)	100,22	102–104

Sumber: Ranwal RKP 2022,a)BPS,2020;b)SasaranRKP2021

#### **b. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah**

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 59,03 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen, Pulau Kalimantan 8,26 persen; dan Pulau Sulawesi 6,14 persen; serta sisanya 5,21 persen disumbangkan pulau-pulau lainnya yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua masing-masing sebesar 3,02 persen dan 2,19 persen.

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2019 mencapai Rp 108,08 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 75,66 triliun. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2019 tumbuh 5,68 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 16,81 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR) yang tumbuh sebesar 13,93 persen. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2019 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 0,63 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 10,89 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen PK-LNPR yang tumbuh sebesar 2,36 persen.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu wilayah prioritas intervensi berdasarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan share PDRB Sumatera Selatan. Perekonomian Kabupaten Lahat yang diperkirakan semakin solid tetap perlu terus dikelola dengan baik karena beberapa tantangan masih mengemuka dan dapat menurunkan prospek ekonomi ke depan. Tantangan bersumber dari risiko global dan domestik yang bila tidak segera dimitigasi, berisiko tidak hanya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sesuai perkiraan, namun juga bisa memberikan tekanan pada stabilitas perekonomian. Stabilitas yang terganggu bila terus berlanjut akan memberikan tekanan balik kepada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Lahat pada tahun 2019 hingga

tahun 2020 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi lebih baik. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, mesin dan peralatan.

#### **3.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi**

Secara keseluruhan proses pembangunan di Kabupaten Lahat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diarahkan:

- a) Mendorong peningkatan investasi pemerintah secara selektif untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
- b) Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi swasta, menjaga daya beli masyarakat, dan reformasi struktural;
  - Pembenahan iklim investasi (Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan standarisasi layanan dan perijinan investasi)
  - Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi)
    - Bantuan/kegiatan yang tepat sasaran.
    - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting
    - Transformasi struktural (peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kinerja industri pengolahan)
      - Peningkatan akses terhadap jasa keuangan
      - Perbaikan Kualitas SDM
- c) Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi khususnya dalam akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- d) Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;

- e) Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor;
- f) Peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif :
- g) Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik;
- h) Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja. Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas – melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian. Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian - pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian.
- i) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Lahat.

Dalam usaha pencapaian kondisi pembangunan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2022, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**

**Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Lahat Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Perluasan jaringan kerjasama investasi melalui promosi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah
2.	Berkembangnya pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata
3.	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Melaksanakan pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan
4.	Menumbuhkan koperasi dan UKM, pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UKM, pembinaan, pelatihan dan	Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui pembinaan, pelatihan,

	pengawasan	pengawasan
5.	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan	Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya
6.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan secara organik guna meningkatkan nilai produksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan produksi perikanan</li> <li>➤ Peningkatan produksi ternak</li> <li>➤ Peningkatan produksi tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura</li> <li>➤ Peningkatan koordinasi penyuluhan</li> </ul>
7.	Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sumber : RPJMD KAB. LAHAT TAHUN 2019-2023

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Ketergantungan APBD Kabupaten Lahat terhadap dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada postur masih cukup besar yaitu 91,5% dengan porsi belanja pegawai terhadap belanja sebesar 37,5% dan porsi belanja modal terhadap belanja sebesar 17,3%. Sedangkan untuk kontribusi PAD terhadap pendapatan sebesar 7,0%. Pada APBD se-Sumatera Selatan ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 77,2% dengan porsi belanja pegawai terhadap belanja

sebesar 34,8% dan porsi belanja modal terhadap belanja sebesar 22,5% serta kontribusi PAD terhadap pendapatan sebesar 18,1%.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Lahat yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lahat Tahun 2020 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam tahapan ke IV pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lahat. Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan daerah adalah kemandirian keuangan daerah, dimana daerah harus mampu mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Transfer yang meliputi: dana alokasi umum / pendapatan transfer pemerintah pusat dan dana alokasi khusus / pendapatan transfer antar daerah, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: pendapatan hibah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Kabupaten Lahat; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Kabupaten Lahat selalu mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok dana perimbangan juga menunjukkan peningkatan hal ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya.

Adapun urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Dengan tetap



mengandalkan PKB sebagai sumber utama penerimaan daerah, maka daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lahat tahun 2022 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Berdasarkan kondisi di atas, secara umum kerangka pendanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**

**Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2021 dan  
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	APBD 2021	RAPBD 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.818.964.876.555,00</b>	<b>1.911.327.773.088,00</b>	
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>105.122.921.117,00</b>	<b>137.368.506.117,00</b>	<b>32.245.585.000,00</b>
4,1,01	Pajak Daerah	31.362.125.000,00	47.793.000.000,00	16.430.875.000,00
4,1,02	Retribusi Daerah	3.504.994.000,00	3.575.399.500,00	70.405.500,00
4,1,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	8.415.000.000,00	1.915.000.000,00
4,1,04	Lain-lain PAD yang Sah	63.755.802.117,00	77.585.106.617,00	13.829.304.500,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.617.468.392.824,00</b>	<b>1.714.218.085.445,00</b>	<b>96.749.692.621,00</b>
4,2,01	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.547.962.533.579,00	1.636.467.435.977,00	88.504.902.398,00
4,2,02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.505.859.245,00	77.750.649.468,00	8.244.790.223,00
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>96.373.562.614,00</b>	<b>59.741.181.526,00</b>	<b>(36.632.381.088,00)</b>
4,3,01	Pendapatan Hibah	39.878.362.614,00	59.741.181.526,00	19.862.818.912,00
4,3,03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.495.200.000,00	-	56.495.200.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.818.964.876.555,00</b>	<b>1.911.327.773.088,00</b>	<b>92.362.896.533</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.979.922.135.817,00</b>	<b>2.000.456.999.590,00</b>	<b>20.534.863.773,00</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.207.704.724.154,00</b>	<b>1.201.063.453.423,00</b>	<b>(6.641.270.731,00)</b>
5,1,01	Belanja Pegawai	652.037.029.123,00	695.759.934.705,00	43.722.905.582,00
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	521.604.879.877,00	452.127.956.271,00	(69.476.923.606,00)
5,1,05	Belanja Hibah	33.874.642.834,00	51.274.962.447,00	17.400.319.613,00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	188.172.320,00	1.900.600.000,00	1.712.427.680,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>342.871.962.163,00</b>	<b>285.981.473.527,00</b>	<b>(56.890.488.636,00)</b>
5,2,01	Belanja Modal Tanah	-	12.527.900.000,00	12.527.900.000,00
5,2,02	Belanja Modal Peralatan dan	46.915.487.189,00	52.314.740.316,00	5.399.253.127,00
5,2,03	Belanja Modal Gedung dan	74.955.552.273,00	59.844.067.641,00	(15.111.484.632,00)
5,2,04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.763.137.701,00	141.517.093.170,00	(57.246.044.531,00)
5,2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.037.785.000,00	19.577.672.400,00	(2.460.112.600,00)
5,2,06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>54.494.256.640,00</b>	<b>39.494.256.640,00</b>
5,3,01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	54.494.256.640,00	39.494.256.640,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>414.345.449.500,00</b>	<b>458.917.816.000,00</b>	<b>44.572.366.500,00</b>
5,4,01	Belanja Bagi Hasil	3.487.225.900,00	4.779.486.000,00	1.292.260.100,00
5,4,02	Belanja Bantuan Keuangan	410.858.223.600,00	454.138.330.000,00	43.280.106.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.979.922.135.817,00</b>	<b>2.000.456.999.590,00</b>	<b>20.534.863.773,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(160.957.259.262,00)</b>	<b>(89.129.226.502,00)</b>	<b>71.828.032.760,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>89.129.226.502,00</b>	<b>(71.828.032.760,00)</b>
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.957.259.262,00	89.129.226.502,00	(71.828.032.760,00)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>89.129.226.502,00</b>	<b>(71.828.032.760,00)</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>89.129.226.502,00</b>	<b>(71.828.032.760,00)</b>
<b>6,3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2021

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kementerian Keuangan telah merancang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang kemudian akan menjadi pelengkap Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dalam proses penyusunan APBN 2022. Mengusung tema "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi*", kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan mampu mendorong reformasi struktural sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi pada jalurnya. Dari sisi pendapatan negara, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN. Sedangkan di bidang PNBPN, Pemerintah akan terus optimalkan aset negara untuk bisa menghasilkan dividen maupun pendapatan sehingga pelayanan publik dapat meningkat.

Selain belanja yang dilakukan Kementerian/Lembaga, belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari TKDD juga ditingkatkan kualitasnya. DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik. Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat. Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

Terkait defisit yang masih di kisaran 4,5% hingga 4,8%, pembiayaan tahun 2022 akan terus dijaga secara pruden di dalam kondisi global yang terus dinamis. Termasuk tren dari suku bunga Global serta ekonomi global. Pembiayaan negara ini termasuk untuk mendukung UMKM dan juga untuk mendorong reformasi di sektor keuangan.

Optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan pokok-pokok kebijakan pada: 1) optimalisasi penerimaan pajak, cukai, dan PNBPN dan menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi; 2) insentif perpajakan untuk peningkatan daya saing dan investasi; 3) Transparansi informasi di bidang perpajakan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lahat untuk tahun anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan

pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pendapatan daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
- 3) Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 5) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- 7) Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- 8) Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

- 1) Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
  - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
  - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - e. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
  - f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
  - g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
  
- 2) Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :
  - a. Melakukan sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
- 3) Strategi Lain-Lain Pendapatan yang sah, dilakukan melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.
  - b. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat**  
**Tahun Anggaran 2018 - 2022**

Kode	Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Berjalan (per Mei 2021) Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
<b>5.1.1</b>	<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.916.874.000.902,32</b>	<b>2.276.673.593.299,90</b>	<b>1.951.242.635.457,65</b>	<b>460.150.054.144,51</b>	
<b>5.1.1.a</b>	<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>112.571.296.475,37</b>	<b>141.161.144.249,35</b>	<b>127.992.430.922,65</b>	10.913.795.146,51	<b>107.037.921.117,00</b>
<b>5.1.1.a.1)</b>	4.1.01	Pajak Daerah	39.707.051.390,44	47.330.979.176,51	43.320.827.736,73	7.586.441.040,00	31.362.125.000,00
<b>5.1.1.a.2)</b>	4.1.01	Retribusi Daerah	4.859.751.111,60	4.261.293.263,00	3.037.484.651,50	814.728.600,00	3.504.994.000,00
<b>5.1.1.a.3)</b>	4.1.01	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.499.575.260,49	7.073.245.657,03	7.577.508.370,48	0,00	8.415.000.000,00
<b>5.1.1.a.4)</b>	4.1.01	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.504.918.712,84	82.495.626.152,81	74.056.610.163,94	2.512.625.506,51	63.755.802.117,00
<b>5.1.1.b.1)</b>		<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.377.663.737.906,00</b>	<b>1.609.981.025.056,00</b>	<b>1.273.265.615.921,00</b>	-	-
		Bagi Hasil Pajak	92.448.266.434,00	89.094.026.910,00	115.680.504.010,00	-	-
		Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	367.439.418.945,00	518.622.670.705,00	303.862.675.964,00	-	-
		Dana Alokasi Umum	696.379.856.000,00	723.556.689.000,00	649.875.559.000,00	-	-
		Dana Alokasi Khusus	221.396.196.527,00	278.707.638.441,00	203.846.876.947,00	-	-
	<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	<b>449.236.258.998,00</b>	<b>1.714.218.085.445,00</b>
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	433.561.615.459,00	1.636.467.435.977,00
	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	15.674.643.539,00	77.750.649.468,00
<b>5.1.1.c</b>	<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>50.093.183.506,00</b>	<b>62.262.951.873,00</b>	<b>80.970.107.607,00</b>	<b>0</b>	<b>59.741.181.526,00</b>
	4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	50.093.183.506,00	59.137.951.873,00	80.970.107.607,00	0	59.741.181.526,00
		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.249.703.936,27	147.492.932.121,55	78.641.187.563,00	-	-
		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	294.408.284.000,00	0,00	0,00	-	-
		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.887.795.078,68	14.595.890.000,00	56.997.194.644,00	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2021

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah mempunyai peranan strategis untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu desain belanja negara tetap terus didorong agar lebih berkualitas. Esensi belanja yang berkualitas adalah apabila belanja negara tersebut mampu menghasilkan *output/outcome* yang berkualitas (*quality*), memberi manfaat yang nyata dan optimal bagi perekonomian maupun kesejahteraan (*benefit*), serta mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik (*value added*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka belanja negara harus memenuhi aspek efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengupayakan belanja negara yang efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, menjaga stabilitas fundamental perekonomian, dan antisipasi ketidakpastian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Selain itu, berpedoman pada pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2020 yaitu penguatan *value for money* efisiensi dan efektivitas untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan, melalui: 1) Fokus pada infrastruktur, 2) Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi dan TKDD, 3) Meningkatkan kualitas SDM, 4) Mendorong birokrasi yang efektif dan efisien, 5) Dukungan fiskal untuk sektor unggulan, 6) Mengantisipasi ketidakpastian (menjaga stabilitas keamanan dan politik). Prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok



dan fungsinya melalui *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Pengalokasian dan pengaturan TKDD yang mendorong penggunaan belanja daerah secara efektif dan efisien berlandaskan *good governance* dan prinsip *value for money*, serta sinergi antara belanja pusat dan daerah.

Beberapa arah kebijakan TKDD tahun 2022 sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum (DTU)

- Alokasi DAU sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- Komitmen penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH.
- DTU untuk infrastruktur daerah (25%) dan pemenuhan anggaran *mandatory* di daerah.

2) Dana Transfer Khusus (DTK)

- Peningkatan kualitas SDM dan daya saing (pendidikan, pengentasan stunting, infrastruktur daerah, dan lain-lain).
- Sinkronisasi perencanaan DAK dan belanja K/L.
- Peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Non Fisik.
- Penyaluran DTK berbasis kinerja *output/outcome*.

3) DID (Dana Insentif Daerah)

Penajaman kriteria penilaian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, serta mendukung kemudahan investasi di daerah.

4) Dana Desa

- Dana Desa dalam APBN menuju pemenuhan 10% dari TKD.
- Pengentasan kemiskinan desa dan perluasan kesempatan kerja.
- Pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi desa.
- Sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti PKH, Rastra, dan Kredit Usaha Rakyat.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi TKDD pada tahun 2018-2020 dan pada tahun berjalan, dimana perkembangan alokasi TKDD meningkat sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 8,3%, TKDD relatif terhadap PDB mengalami penurunan tipis yaitu dari 5,4% pada tahun 2018 turun menjadi 5,2% pada tahun 2019, TKDD mendanai 70,5% total belanja APBD sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan pemerataan layanan dasar dan kesejahteraan

masyarakat. Kebijakan negara tentang TKDD Tahun 2022 yang perlu disinkronkan dengan program dan kegiatan K/L sebagai berikut :

- 1) Memastikan Pemda melaksanakan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah;
- 2) Penguatan kebijakan DAK Fisik Afirmasi kepada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik utamanya, terutama untuk infrastruktur konektivitas;
- 3) Memperkuat pengalokasian DAK Non Fisik berbasis kinerja, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 4) Peningkatan DID untuk memacu kinerja Pemda.
- 5) Penguatan Dana Desa dan pengawasannya.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan, dan urusan serta penunjang pemerintahan;
- 2) Dukungan RPJMN 2020–2024 dan RKP 2022;
- 3) Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
- 4) Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%;
- 5) Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, bansos dan subsidi;
- 6) Penggunaan Dana DAK, DBH CHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
- 7) Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
- 8) Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial;

- 9) Kebijakan Penanganan Pandemi covid-19 terkait ketercapaian vaksinasi dan pemulihan ekonomi.

Perkembangan belanja daerah dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Berdasarkan realisasi serta proyeksi belanja daerah beberapa tahun terakhir dituangkan dalam tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lahat**  
**Tahun Anggaran 2018 - 2022**

No	URAIAN	Realisasi TAHUN 2018	Realisasi TAHUN 2019	Realisasi TAHUN 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.415.652.399.337,73</b>	<b>1.582.930.249.124,33</b>	<b>1.555.038.415.484,25</b>	<b>1.979.922.135.817,00</b>	<b>1.795.570.550.658,00</b>
<b>5.1.2.a</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.106.075.070.078,35</b>	<b>1.184.576.639.890,45</b>	<b>1.146.950.836.107,25</b>	<b>1.207.704.724.154,00</b>	<b>1.201.063.453.423,00</b>
5.1.2.a.1)	Belanja Pegawai	639.682.725.075,00	644.638.351.665,00	645.463.118.470,00	652.037.029.123,00	695.759.934.705,00
5.1.2.a.2)	Belanja barang	370.174.139.680,35	496.142.742.463,45	480.440.775.237,25	521.604.879.877,00	452.127.956.271,00
5.1.2.a.3)	Belanja Hibah	95.697.705.323,00	43.543.395.762,00	20.649.442.400,00	33.874.642.834,00	51.274.962.447,00
5.1.2.a.4)	Belanja Bantuan Sosial	520.500.000,00	252.150.000,00	397.500.000,00	188.172.320,00	1.900.600.000,00
<b>5.1.2.b</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>309.562.329.259,38</b>	<b>396.808.861.445,88</b>	<b>367.820.849.128,00</b>	<b>342.871.962.163,00</b>	<b>285.981.473.527,00</b>
5.1.2.b.1)	Belanja Tanah	0,00	5.145.250.000,00	711.328.471,00	-	12.527.900.000,00
5.1.2.b.2)	Belanja Peralatan dan Mesin	32.219.469.653,00	41.769.280.442,00	79.832.943.023,00	46.915.487.189,00	52.314.740.316,00
5.1.2.b.3)	Belanja Gedung dan Bangunan	84.542.394.196,38	93.425.528.650,00	63.748.517.750,00	74.955.552.273,00	59.844.067.641,00
5.1.2.b.4)	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	188.290.731.410,00	235.807.353.772,00	221.310.287.934,00	198.763.137.701,00	141.517.093.170,00
5.1.2.b.5)	Belanja Aset tetap lainnya	4.509.734.000,00	20.661.448.581,88	1.510.421.950,00	22.037.785.000,00	19.577.672.400,00
<b>5.1.2.c</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.544.747.788,00</b>	<b>40.266.730.249,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>54.494.256.640,00</b>
	Belanja Tak Terduga	15.000.000,00	1.544.747.788,00	40.266.730.249,00	15.000.000.000,00	54.494.256.640,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2021

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan negara tahun 2022 menggunakan kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur, dengan pokok-pokok kebijakan pembiayaan yaitu :

- 1) Menjaga defisit lebih rendah dari tahun sebelumnya,
- 2) Menjaga Rasio dan komposisi utang dalam batas aman dan terkendali,
- 3) Meningkatkan efisiensi biaya utang dan produktivitas pemanfaatan utang.

Begitu pula halnya dengan kebijakan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 belum merencanakan SiLPA tetapi telah memperhitungkan penerimaan piutang daerah. Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pembayaran hutang pemerintah daerah Kabupaten Lahat pada tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

**Tabel 3.15**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2015 - 2019**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun Berjalan Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.942.278.544,69</b>	<b>84.114.066.648,28</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>37.963.028.100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.942.278.544,69</b>	<b>84.114.066.648,28</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>37.963.028.100,00</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.942.278.544,69	84.114.016.648,28	342.627.429.780,85	160.957.259.262,00	37.963.028.100,00
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Kembali Investasi non Permanen lainnya	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.942.278.544,69</b>	<b>84.114.066.648,28</b>	<b>342.627.429.780,85</b>	<b>160.957.259.262,00</b>	<b>37.963.028.100,00</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2021

### 3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pendanaan diluar APBD, antara lain dengan memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat (APBN), pinjaman hibah luar negeri (PHLN), obligasi daerah, atau melalui kerjasama dengan badan usaha, serta menggalang dana dengan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

#### 3.3.1 APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Tugas Pembantuan yang dikelola oleh OPD di kabupaten/kota. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Kabupaten Lahat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dengan keterbatasan dana APBD maka arah kebijakan pembangunan daerah jugadiarahkan untuk mengoptimalkan ketersediaan APBN melalui sinkronisasi program prioritas Kabupaten Lahat dengan program prioritas Nasional sehingga dapat didanai dari APBN juga. Distribusi alokasi dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang masuk ke Kabupaten Lahat melalui OPD dapat dilihat pada tabel 3.16

**Tabel 3.16**  
**Alokasi Dana APBN Tugas Pembantuan Kabupaten Lahat**  
**Tahun 2014 – 2018**

No	Perangkat Daerah		Tahun 2015	Pagu Anggaran 2016 (Rp)	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.951.131.000	23.206.542.000	25.230.994.000	11.478.601.000	5.455.706.000
2.	Dinas Kesehatan	3.708.030.000	7.474.411.000	-	-	-
3.	Dinas Pertanian	3.879.950.000	7.849.400.000	4.598.492.000	3.485.876.000	-
4.	Dinas PU dan Penataan Ruang	1.806.000.000	-	-	-	-
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	922.840.000	1.478.918.000	874.566.000	-	-
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.334.049.000	-	-	-	-
7.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	2.410.000.000	-	-	4.900.000.000
8.	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	950.000.000
	Jumlah	38.602.000.000	42.419.271.000	30.704.052.000	14.964.477.000	11.305.706.000

### **3.3.2. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR**

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, huruf b menjelaskan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka dilaksanakanlah Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/*Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pembangunan Kabupaten Lahat sebagai bagian integral pembangunan nasional, pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan di Kabupaten Lahat tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah (melalui APBD), melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Lahat di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah peran serta aktif dari kalangan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Lahat yang lebih baik. Program CSR dengan kemitraan bersama Pemerintah Kabupaten Lahat tersebut diatur dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2015



tentang Corporate Social Responsibility Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL). Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan Kabupaten Lahat dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat. Program dan kegiatan yang akan diusulkan menggunakan dana CSR adalah program dan kegiatan RKPD yang tidak dapat terakomodir oleh dana APBD Kabupaten Lahat.

### **3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)**

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011, yaitu Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh kementerian negara (departemen dan non-departemen), lembaga pemerintahan non-departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi

pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

Selain itu, pada tahun 2017 berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Penetapan Alokasi Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah 14 Provinsi dan 74 Kabupaten melalui dana pinjaman *Asian Development Bank* (ADB), AIF (diadministrasikan ADB) dan *the International Fund for Agricultural Development* (IFAD) untuk pembiayaan kegiatan *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP) dengan indikasi nilai sebesar USD17,04 juta (ADB), USD34,41 juta (AIF) dan EUR39,36 juta (IFAD) dengan pertimbangan mayoritas Pemerintah Daerah penerima penerusan pinjaman sebagai hibah memiliki *fiscal capacity* yang rendah maupun sedang, Pemerintah Daerah penerima penerusan pinjaman sebagai hibah menunjukkan komitmen tinggi, dan kegiatan yang dibiayai melalui penerusan pinjaman sebagai hibah tersebut merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan penerimaan yang bersifat komersial, dalam hal ini dana hibah diterima dalam APBD sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dengan peruntukkan mendanai kegiatan sejenis sehingga sangat bermanfaat untuk menunjang ketahanan pangan nasional.

**Tabel 3.17**  
**Rekapitulasi Estimasi Nilai on Granting - IPDMIP**  
**Tahun 2018-2022**

Daerah	Satuan	ADB	AIF	IFAD
Provinsi	Nilai Hibah (ribuan USD)	53,798	10,760	7,799
	Setara Nilai Hibah (miliar Rp)	726	145	107
Kabupaten	Nilai Hibah (ribuan USD)	118,247	23,649	31,559
	Setara Nilai Hibah (miliar Rp)	1,596	319	432
Total	Nilai Hibah (ribuan USD)	172,044	34,409	39,358
	Setara Nilai Hibah (miliar Rp)	2,323	465	539

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2017

Berdasarkan pembagian kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka pemerintah daerah

diwajibkan untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum sub-bidang sumber daya air dan urusan pertanian dengan sub-bidang perasarana pertanian. Program IPDMIP sejalan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan *money follow program* yang sesuai dengan dimensi pada pembangunan kedaulatan pangan dengan program prioritas untuk peningkatan produksi padi dan pangan lainnya dengan sasaran pada rehabilitasi jaringan irigasi pembangunan waduk, embung, dan pengendalian konvensi lahan. Dasar pelaksanaan program IPDMIP penting dijalankan yaitu 1) peningkatan produksi pertanian dalam mencapai ketahanan pangan; 2) penguatan kelembagaan pengelola pertanian beririgasi; serta 3) peningkatan infrastruktur irigasi yang lebih produktif dan manajemen yang berkelanjutan.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2022, Pemerintah Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten penerima dana pinjaman hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan irigasi terpadu *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation project (IPDMIP)* yang pelaksanaan kegiatannya melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat.

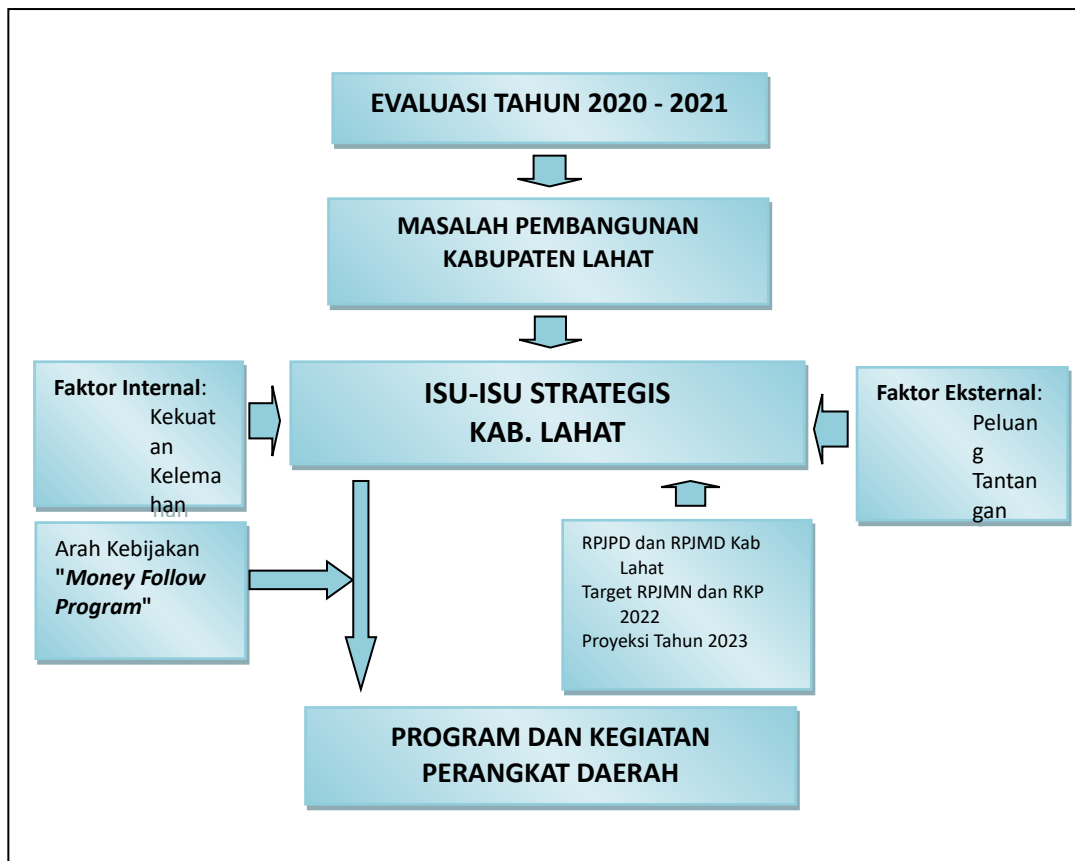
**Tabel 3.18**  
**Estimasi Nilai on Granting - IPDMIP**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2018-2022**

Uraian	ADB	AIF	IFAD
Nilai Hibah (ribu USD)	1.409	282	307
Setara Nilai Hibah (miliar Rp)	19,02	3,80	4,20

Sumber : Kementerian Keuangan RI

**BAB IV  
SASARAN DAN  
PRIORITAS  
PEMBANGUNAN  
DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lahat disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Konsep perencanaan pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar. 4.1.



Gambar. 4.1.  
Konsep Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lahat

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pembangunan Kabupaten Lahat berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 diarahkan untuk mewujudkan "**LAHAT EMAS (Ekonomi, Mandiri, Agribisnis, dan Sejahtera)**". RPJPD Kabupaten Lahat 2005-2025 menyebutkan bahwa tahap ke-empat pembangunan Kabupaten Lahat (2019-2023) mengutamakan **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan**" yaitu :

- Pembangunan diarahkan pada penekanan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif daerah dan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisiennya dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan iptek, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan terwujudnya kesetaraan gender, bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, sikap mental, dan perilaku kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, dan sumber daya alam serta sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah disusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan

IPTEK yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktifitas yang lebih tinggi, serta berkembangnya usaha-usaha baru yang inovatif dan terjadinya peningkatan investasi. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 meningkat dan mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan komunikasi yang handal bagi masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah pedesaan, tercapainya elektrifikasi pedesaan dan elektrifikasi rumah tangga, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang disukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, akuntabel, sehingga terwujud kota tanpa pemukiman kumuh.

- Dalam rangka pemantapan pembangunan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatnya modal pembangunan daerah di masa yang akan datang.
- Terciptanya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai supremasi hukum yang kuat, demokratis, tanggap terhadap hak-hak azasi manusia, penyelenggaraan tata pemerintahan baik, serta daerah yang semakin otonom dengan tidak mengabaikan keselarasan antara kepentingan daerah dan pusat dalam kerangka Negara Kesatuan RI.



**Gambar 4.2**  
**Tahapan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025**

Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat 2012-2032 tujuan penataan ruang Kabupaten Lahat adalah mewujudkan ruang wilayah yang produktif sesuai dengan potensinya terutama di sektor pertambangan serta pertanian dengan tetap memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
- b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pemantapan kawasan lindung di wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan kabupaten;



- d. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri;
- e. Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 yaitu :

**" Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan "**

Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Lahat. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Lahat dapat di jelaskan bahwa Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu "***Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur, dan Sejahtera***" yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan.

***Berakhlak***, Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial dalam konteks iman dan takwa karena kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman dan takwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial.

***Mandiri***, Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Lahat sebagai wilayah yang mandiri. Sebagai kabupaten yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Lahat yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Kabupaten Lahat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

***Berkeadilan***, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Lahat bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotis dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.

***Makmur dan Sejahtera***, adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai sentosa dan makmur. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan rasa aman dalam hidupnya.

Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui misi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023, sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
4. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumberdaya alam yang tersedia;
5. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 terdapat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagai berikut :

- Misi 1** : **Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;**
- Tujuan : Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good goverment*) dan Pemerintahan yang Bersih (*good governance*).
- Sasaran :  
1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.  
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan yang transparan dan akuntabel.
- 
- Misi 2** : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;**
- Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana.
- Sasaran :  
1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah.  
2. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah.  
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya.

4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;**

Tujuan : Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya.

- Sasaran :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
  3. Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga
  4. Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan

**Misi 4 : Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumberdaya alam yang tersedia;**

Tujuan : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial

- Sasaran :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
  2. Meningkatnya kesejahteraan sosial
  3. Meningkatnya kesempatan kerja

**Misi 5 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari:**

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia

- Sasaran :
1. Meningkatnya nilai keagamaan masyarakat
  2. Terwujudnya budaya sebagai identitas spesifik daerah

Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023, rencana pembangunan Kabupaten Lahat juga disusun dengan berpedoman pada arahan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2022. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 yaitu "**Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural**" dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yaitu "**Pembangunan Ekonomi Inklusif**", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2022, yaitu :

- 1) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting;
- 2) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;
- 3) Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
- 4) Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian;
- 5) Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.



Gambar 4.3. Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Berdasarkan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan, maka Tema RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 yaitu: "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing Daerah yang didukung Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas berbasis Pemerataan Berkelanjutan**" dengan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2022, adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;
- 2) Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- 4) Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.

## **4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

### **4.2.1 Isu Strategis dan Prioritas Daerah**

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Kabupaten Lahat dalam rangka mencapai visi misi RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 dan mendukung pencapaian target nasional pada RKP tahun 2022. Prioritas pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2022 dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan isu-isu strategis yang sedang berkembang. Penetapan prioritas pembangunan daerah dilakukan supaya sumber daya terbatas khususnya keuangan daerah dan sumber daya manusia dapat difokuskan untuk merespon isu strategis dan semua permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lahat pada tahun 2022.

Konsistensi isu strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**ISU STRATEGIS DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN  
PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
1.	Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 69,42</li> <li>➤ Menurunnya Angka Kemiskinan menjadi 11,5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan akses kesehatan melalui penguatan sumberdaya kesehatan, penguatan kelembagaan kesehatan, penguatan upaya promosi dan prevensi serta penguatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>➤ Peningkatan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan prestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan</li> </ul>



NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
				<p>Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya</p> <p>➤ Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia</p>	<p>Prestasi Pemuda dan Olahraga</p> <p>4. Pembangunan Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan</p>
				<p>➤ Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan.</p> <p>➤ Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman</p>	<p>5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial</p> <p>6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman</p>
2.	<p>Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengurangan Pengangguran</p> <p>Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas</p>	2. Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang	➤ Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi 4,41 %	➤ Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	1. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
		produktif, mandiri dan berkelanjutan	➤ Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	➤ Pembangunan, peningkatan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan	2. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke Seluruh Wilayah
				➤ Perluasan jaringan kerjasama investasi melalui promosi.	1. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan
				➤ Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	
				➤ Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Koperasi UKM	
3.	Peningkatan Pelayanan Prima bagi masyarakat  Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang transparan dan Akuntabel.	3. Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	➤ Indeks Aksesibilitas menjadi 0,30	➤ Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik  ➤ Penataan dan penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur secara Paralel dengan Penerapan Koordinasi Harmonisasi	1. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik  2. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
				<p>dan Pencegahan Korupsi dalam Kerangka Perwujudan Kepemerintahan yang baik.</p>	<p>3. Peningkatan Kualitas proses penyusunan Dokumen dengan meningkatkan ketersediaan Dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi</p> <p>4. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelayanan adm kepegawaian</p> <p>5. Optimalisasi fungsi pengawasan,</p>

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
					<p>penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitas terhadap alat kelengkapan dewan</p> <p>6. Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p>
4.	Peningkatan Ketersediaan Pangan, Air, Energi dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pelestarian Budaya	4. Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.	➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,29	<p>➤ Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan</p> <p>➤ Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi</p> <p>➤ Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan disertai pemantapan</p>	<p>1. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan</p> <p>2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa, serta Jaringan Irigasi Lainnya</p> <p>3. Peningkatan Nilai Keagamaan Masyarakat</p>

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI / REKOMENDASI	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2022
				kelembagaan agama di desa/kelurahan.	
				➤ Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah.	4. Membangun Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah
				➤ Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	5. Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
				➤ Pemeliharaan kelestarian dan daya dukung lingkungan secara proporsional .	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

#### **4.2.2 Keterkaitan Program Prioritas RKPD dan RPJPD**

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022, program prioritas ditentukan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan tetap berpedoman pada upaya pencapaian Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Lahat 2005-2025 dan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Lahat 2019-2023. Keterkaitan program prioritas RKPD dan RPJPD tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Keterkaitan Prioritas RKPD Tahun 2022 dengan RPJPD  
Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025

VISI RPJPD "LAHAT EMAS" (Ekonomi, Mandiri, Agribisnis, dan Sejahtera)			
Tahap Ke-1	Tahap Ke-2 (2009-2013)	Tahap Ke-3 (2014-2018)	Tahap Ke-4 (2019-2023)
Peletakan pondasi untuk membangun kemandirian ekonomi	Penguatan Pelayanan dan Pengembangan	Optimalisasi Sumber Daya	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan
<b>Sasaran RPJPD Tahap ke-1</b>	<b>Sasaran RPJPD Tahap ke-2</b>	<b>Sasaran RPJPD Tahap Ke-3</b>	<b>Sasaran RPJPD Tahap ke-4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan infrastruktur dasar</li> <li>➤ Penurunan Angka Pengangguran dan Penduduk Miskin</li> <li>➤ Peningkatan Kualitas SDM</li> <li>➤ Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> <li>➤ Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan</li> <li>➤ Peningkatan Keamanan, Politik dan Demokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar</li> <li>➤ Penguatan Pelayanan dengan Pengembangan Teknologi</li> <li>➤ Peningkatan Pendapatan Perkapita, Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran</li> <li>➤ Penguatan Kelembagaan</li> <li>➤ Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian LH</li> <li>➤ Penguatan Supremasi Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemb. disegala bidang</li> <li>➤ Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>➤ Pembangunan berkelanjutan</li> <li>➤ Pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang kemandirian ekonomi</li> <li>➤ Infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang</li> <li>➤ Konservasi sumber daya air</li> <li>➤ Penguatan Supremasi Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan struktur perekonomian yg kokoh</li> <li>➤ Peningkatan pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yg merata</li> <li>➤ Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, perlindungan anak dan kesetaraan gender</li> <li>➤ Pengembangan Perekonomian, industri, pertanian dan sumber daya alam serta sektor jasa.</li> <li>➤ Penguatan Supremasi Hukum, ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik</li> </ul>
			<b>Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022</b>
			1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung

			<p>percepatan penurunan kemiskinan;</p> <p>2) Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;</p> <p>3) Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;</p> <p>4) Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Tabel 4.3**  
**Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas RKPD Tahun 2022**  
**dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023**

Isu Strategis 2022		Prioritas Daerah 2022		Sasaran RPJMD Kabupaten Lahat 2019-2023
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</li> <li>b. Penurunan Angka Kemiskinan.</li> <li>c. Penurunan Angka Stunting.</li> </ul>	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan</li> <li>3. Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga</li> <li>4. Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengurangan Pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.</li> <li>b. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.</li> </ul>	2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Meningkatnya Kesempatan Kerja</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pelayanan Prima bagi masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang transparan dan Akuntabel.</li> </ul>	3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pelayanan Prima bagi masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan</li> </ul>
4	Peningkatan Ketahanan dan kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi bencana.	4	Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas Infrastruktur wilayah</li> <li>2. Tersedianya sarana dan pra sarana dasar permukiman</li> <li>3. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</li> <li>4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li> </ul>

#### 4.2.3 Sinkronisasi RKPD Kabupaten Lahat dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP Tahun 2022

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Lahat dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP Tahun 2022 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Pada RPJPN 2005-2025 mempunyai visi "**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**" tercantum bahwa pembangunan RPJMN ke-4 periode 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, RKP Tahun 2022 mengambil tema "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*".

## VISI PRESIDEN

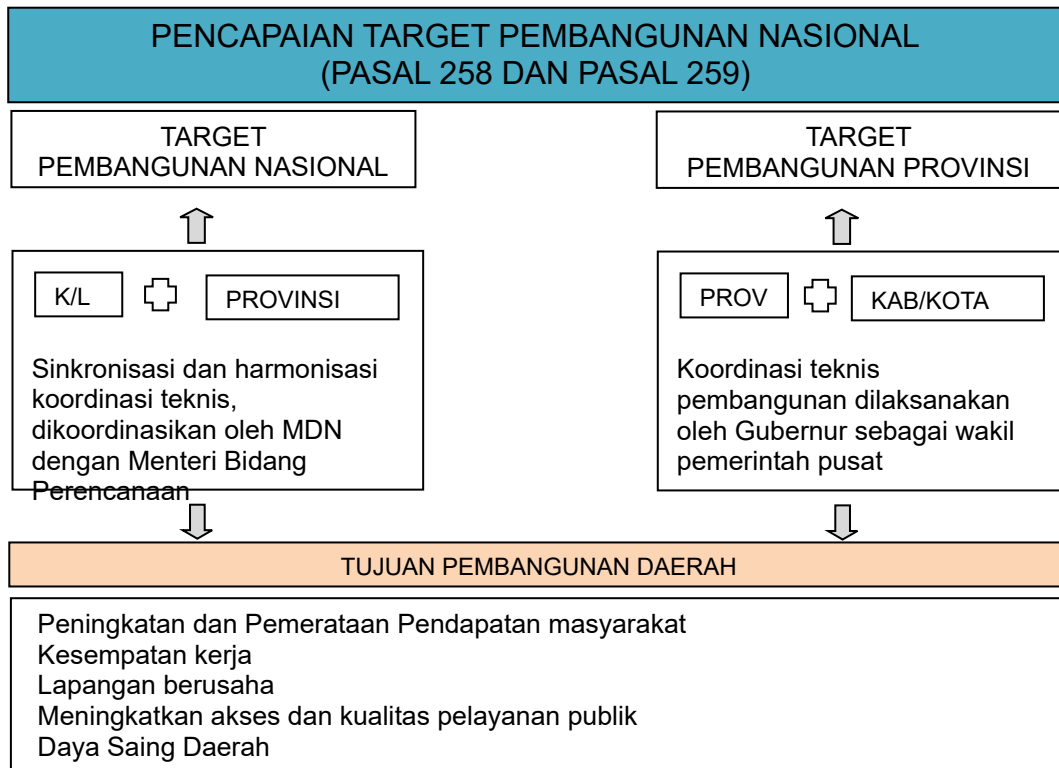
*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,  
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong*



**Gambar 4.4.**  
**Gambaran Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Dalam penyusunan RKP 2022 pendekatan yang dilakukan dengan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) melalui kebijakan *Money Follow Program*, yaitu : menajamkan Prioritas Nasional (5 PN dan 25 PP), memastikan pelaksanaan program (pengendalian dilakukan sampai level proyek),

menajamkan integrasi sumber pendanaan (belanja K/L, belanja Non K/L, belanja transfer ke daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta).



**Gambar 4.5. Pencapaian Target Pembangunan Nasional**

Pada prinsip *money follow program*, Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan yang ditetapkan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kerjanya.

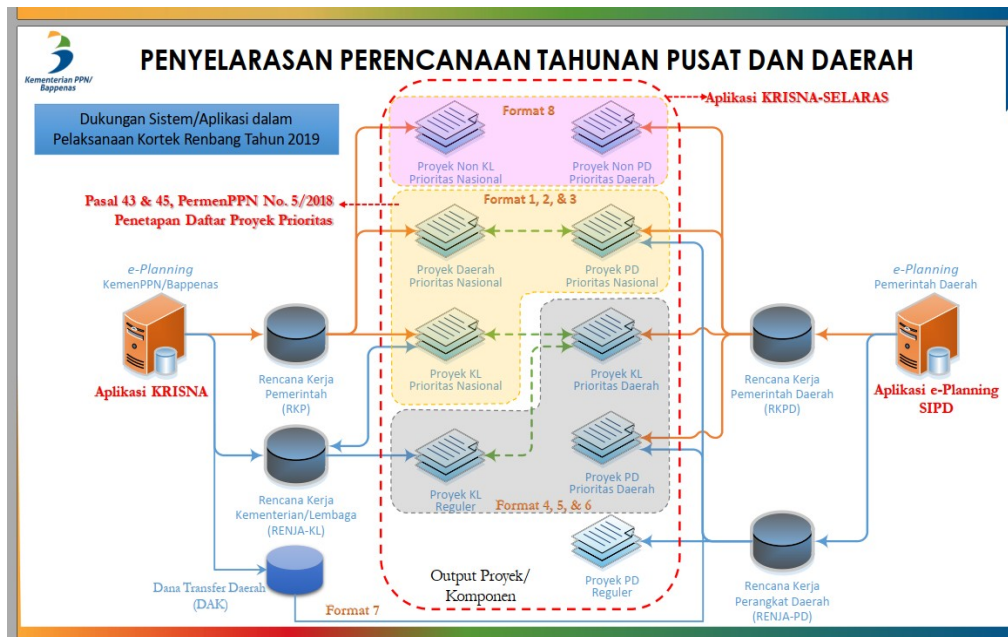


Gambar 4.6 Prinsip Money Follow Program

Pemerintah Daerah dalam menetapkan target pembangunan daerah harus selaras dengan target pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022. Penyelarasan target pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada gambar 4. .



Gambar 4.7  
Penyelarasan Target Pembangunan Nasional dan Daerah



**Gambar 4.8**  
**Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah**

Tahun 2022 merupakan tahun transisi antara berakhirnya pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan dimulainya RPJMN Tahun 2020-2024. RKP Tahun 2022 fokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Sinkronisasi RKP Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Sinkronisasi Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP Tahun 2022**

PRIORITAS NASIONAL RKP 2022	Tema RKP 2022	PRIORITAS RKPD PROVINSI SUMSEL 2022	Tema RKPD Prov Sumsel 2022	PRIORITAS RKPD KAB LAHAT 2022	Tema RKPD Kab. Lahat 2022	Sasaran RKPD Kab Lahat 2022
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	<b>Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural</b>	1 Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting;	<b>Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing Daerah yang didukung Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas berbasis Pemerataan Berkelanjutan</b>	( <i>RKPD</i> ) <b>TAHUN 2022</b> Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;		2 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;		2 Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing;		3 Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi ;		3 Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;		Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;		4 Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian;		4 Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
<b>RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022</b>				<b>RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022</b>		
5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;		5 Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.				

LAHAT  
2022



<b>PD.1</b>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;		<b>PD.1</b>	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting;
<b>PD.2</b>	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;		<b>PD.2</b>	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;
<b>PD.3</b>	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;		<b>PD.3</b>	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi ;
<b>PD.4</b>	Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.		<b>PD.4</b>	Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian;
			<b>PD.5</b>	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.

**Gambar**

**Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022  
Dengan Prioritas dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022**

**Tabel 4.5**

**Keterkaitan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dengan Prioritas, Strategi, dan Arah kebijakan RKP Tahun 2022**

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022				RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi		Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
<b>PD.1</b> Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	1.1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	1.1.1 Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik  Peningkatan kesiapsiagaan, 1.1.2 penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha	PN.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri	1. Diversifikasi ekonomi
	1.2	Penataan dan Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur Secara Paralel Dengan Penerapan Koordinasi, Harmonisasi dan Pencegahan Korupsi dalam Kerangka Perwujudan Kepemerintahan yang Baik	1.2.1 Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan			

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
	1.3	Peningkatan akses kesehatan melalui penguatan sumberdaya kesehatan, penguatan kelembagaan kesehatan, penguatan upaya promosi dan prevensi serta penguatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	1.3.1 1.3.2 1.3.3		3. Reformasi Iklim Investasi
	1.4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan	1.4.1		
	1.5	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	1.5.1	2	1. Diversifikasi ekonomi
	1.6	Meningkatkan peran,	1.6.1		2. Reformasi Iklim Investasi
				2	Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
	pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	anak dan lansia			
				3 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Pemulihan Daya Beli dan Usaha
				4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional	1. Diversifikasi ekonomi
					2. Pemulihan Daya Beli dan Usaha
			PN.2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	1 Meningkatkan pemerataan infrastruktur	1. Reformasi iklim investasi
				2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital	1. Reformasi iklim investasi 2. Reformasi Kelembagaan
<b>PD.2</b> Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan	2.1 Perluasan Jaringan Kerja Sama investasi melalui promosi	2.1.1 Menjalin kerjasama investasi pemerintah daerah dan non pemerintah	PN.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing;	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Inovasi	1. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM

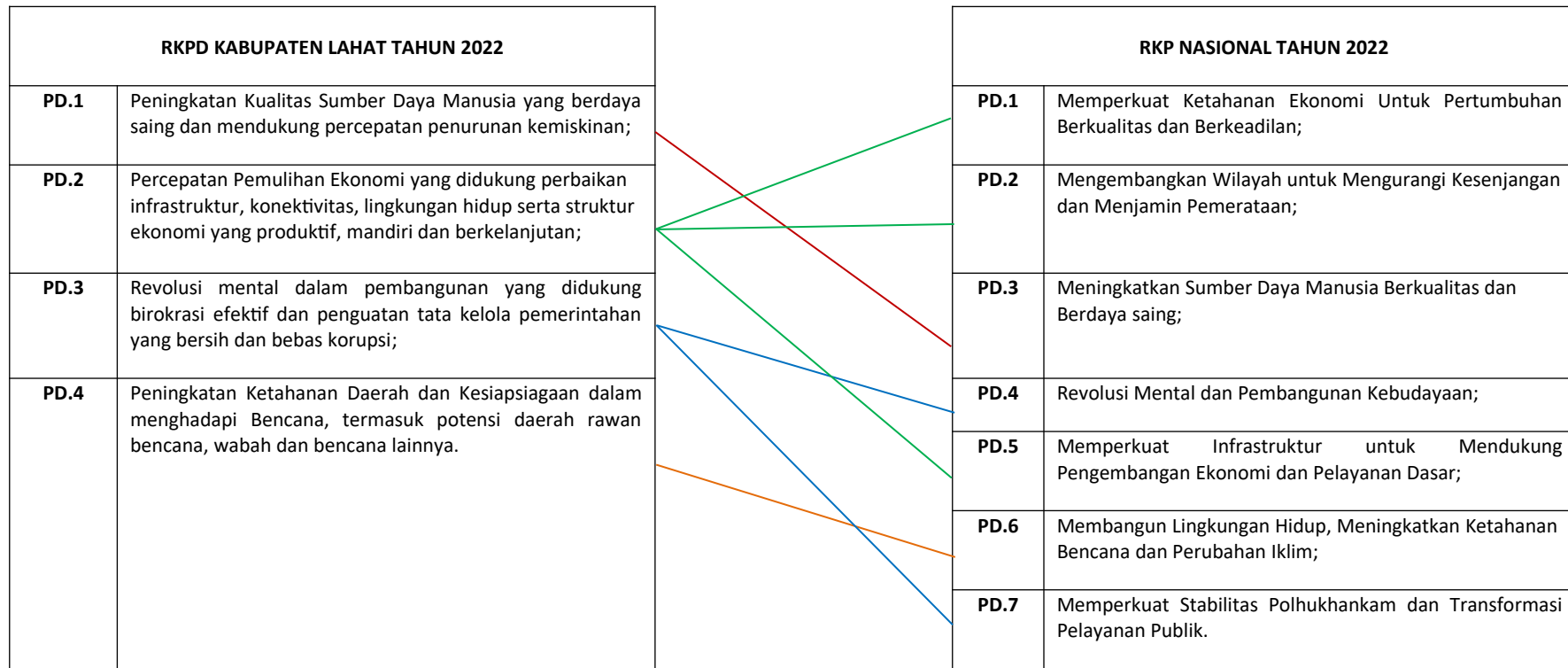
RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	2.2 Berkembangnya pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	2.2.1 Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata			
	2.2 Meningkatkan Daya Saing industri kecil dan menengah	2.2.1 Melaksanakan pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan			2. Reformasi Kelembagaan
	2.3 Menumbuhkan Koperasi dan UKM, pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UKM	2.3.1 Melaksanakan Penumbuhan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan			
	2.4 Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	2.4.1 Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat		2. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	1. Reformasi perlindungan sosial
	2.5 Pembangunan, peningkatan dan pengendalian sarana dan prasarana	2.5.1 Mewujudkan ketersediaan sistem-sistem jaringan angkutan umum dan sarana transportasi yang berkualitas			2. Reformasi peningkatan kualitas SDM

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
	perhubungan				
	2.6 Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi dan drainase.	2.6.1 Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dan drainase dengan pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan drainase.			
	2.7 Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman	2.7.1 Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat	PN.4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata	1. Diversifikasi Ekonomi
					2. Pemulihan Daya Beli dan Usaha
					3. Reformasi iklim investasi
				2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Inovasi	1. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM
					2. Reformasi Kelembagaan
<b>PD.3</b>	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik	PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur
					1. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
bebas korupsi;					
					2. Reformasi Iklim Investasi
					3. Reformasi Kelembagaan
				2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital	1. Reformasi Iklim Investasi
					2. Reformasi Kelembagaan
			PN.6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;	1. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
					1.
<b>PD.4</b> Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.					

RKPD KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022			RKP TAHUN 2022		
Prioritas RKPD	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKP	Strategi	Arah Kebijakan
			PN.7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital	1. Reformasi Iklim Investasi
					2. Reformasi Kelembagaan
				2. Mempercepat reformasi perlindungan sosial	1. Reformasi Perlindungan Sosial
				3. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi	1. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM





**Gambar.**

**Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022  
Dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022**

#### **4.2.4 Program Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022**

Penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dilakukan dengan penguatan kebijakan *Money Follow Program melalui* pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan memperhatikan pada :

- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk APBD tahun 2022
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Pembangunan berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 :

- Tematik : bahwa RKPD disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga didapat isu strategis yang kemudian juga ditentukan tema-tema pembangunan dalam bentuk konstelasi cascading: 1) Prioritas Daerah, 2) Program Prioritas, 3) Kegiatan Prioritas, 4) Proyek Prioritas Daerah, dan 5) Proyek Perangkat Daerah. Penetapan sasaran dan target pembangunan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Lahat 2005-2025, Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional dalam RKP 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Holistik (Komprehensif) : bahwa seluruh sektor yang terkait merupakan komponen pembentuk suatu tema, dengan tahapan holistik suatu tema dari hulu ke hilir.
- Integratif : sebagai konsekuensi dari pendekatan tematik, seluruh sektor dalam tema tersebut harus diidentifikasi dan direncanakan secara sinergi satu sama lain (terintegrasi dalam suatu perencanaan) sesuai dengan pembagian urusan atau kewenangan, termasuk juga aspek pendanaannya.
- Spasial : merupakan unit terkecil dari konstelasi tema pembangunan, yaitu Proyek Perangkat Daerah dari berbagai sektor yang berbeda namun harus terkait satu sama lain secara spasial dalam temanya masing-masing.

**Tabel 4.7.**

**Program Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022**

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINASKERTRANS
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINASKERTRANS
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINASKERTRANS
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINASKERTRANS
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINASKERTRANS
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINASKERTRANS
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas PP & PA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas PP & PA
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas PP & PA
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas PP & PA
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas PP & PA
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas PP & PA
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DALDUK

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DALDUK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	DALDUK
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DISPORA
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Dinas PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE	Dinas PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Dinas PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Dinas PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPR
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas PRKPP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas PRKPP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas PRKPP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas PRKPP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS ( PSU )	Dinas PRKPP
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas PRKPP

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENEYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH/KOTA	Dinas PRKPP
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKP
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKP
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 ) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( LIMBAH B3 )	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ( PPLH )	DLH
		PROGRAM PENGAKUAN	DLH

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFO



Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFO
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi & UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Dinas Koperasi & UKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Dinas Koperasi & UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi & UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi & UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi & UKM
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	DINAS PARIWISATA

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	DINAS PERKEBUNAN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SELURUH OPD
		PROGRAM PENINGKATAN KETEN-TERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pol PP & Damkar
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Pol PP & Damkar

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		KEBAKARAN	
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
		PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESBANGPOL
		PROGRAM Pemberdayaan DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESBANGPOL
		PROGRAM Peningkatan KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DUKCAPIL

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DPMD
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	KECAMATAN

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KECAMATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BALITBANG
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
	kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
PD.4	Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS
		PROGRAM PENANGGULANAGAN BENCANA	BPBD
		PROGRAM PENANGANAN DAN KERAWANAN PANGAN	DKP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU	DLH



Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)		(2)		(3)	
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		

**Tabel 4.8**  
**Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022**

Tujuan Prioritas Daerah RKPD 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Prioritas Daerah Ke-1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi</b>				
1. Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	➤ Umur Harapan Hidup	➤ Peningkatan akses kesehatan melalui penguatan sumberdaya kesehatan, penguatan kelembagaan kesehatan, penguatan upaya promosi dan prevensi serta penguatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan ➤ Peningkatan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana	➤ Peningkatan Prasarana Kesehatan ➤ Peningkatan SDM dan Kelembagaan Kesehatan dan Promosi Kesehatan ➤ Peningkatan pelayanan KIE keluarga Berencana dan Peningkatan Keterampilan Keperawatan
	1.2 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	➤ Angka Harapan Lama Sekolah ➤ Rata-Rata Lama Sekolah	➤ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan	➤ Peningkatan prasarana Pendidikan
	1.3 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	➤ Jumlah Atlet Berprestasi	➤ Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	➤ Peningkatan pembinaan kepelatihan olahraga
	1.4 Terbangunnya Perempuan, Pemuda dan Anak	➤ Indeks Pembangunan Perempuan, Pemuda dan Anak	➤ Meningkatkan	➤ Peningkatan keterampilan dan kepelatihan

Tujuan Prioritas Daerah RKPD 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Ara
	Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gender (IPG)</li> <li>➤ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ul>	peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	➤ anak Perli pere lansi
2. Menurunnya Angka Kemiskinan	2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	➤ Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	➤ Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan.	➤ Pem Pend Pelat Kete peny kese
	2.2 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	➤ Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	➤ Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman	➤ Men men peru perm bagi
<b>Prioritas Daerah Ke-2 : Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;</b>				
1. Berkurangnya Ketimpangan Wilayah	1.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	➤ Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	➤ Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	➤ Mew kete pras jemb berk men sosa masy
	1.2 Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	➤ Jumlah terminal yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	➤ Pembangunan, peningkatan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan	➤ Mew kete siste angk sara yang

Tujuan Prioritas Daerah RKPD 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Ara
<b>Prioritas Daerah ke-3 : Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan ta bebas korupsi;</b>				
1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesempatan Kerja	1.1 Meningkatnya Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	➤ Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perluasan jaringan kerjasama investasi melalui promosi.</li> <li>➤ Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Men</li> <li>➤ Mel</li> </ul>
	1.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> <li>➤ Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Koperasi UKM</li> <li>➤ pelayanan bagi pencari kerja</li> <li>➤ pengembangan dan perlindungan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mel</li> <li>➤ peni</li> <li>➤ serta</li> <li>➤ kese</li> <li>➤ kual</li> <li>➤ tripa</li> <li>➤ men</li> <li>➤ kual</li> <li>➤ pene</li> <li>➤ perli</li> <li>➤ kerja</li> </ul>
<b>Prioritas Daerah Ke-4 : Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk dan bencana lainnya.</b>				

Tujuan Prioritas Daerah RKPD 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Ara
1. Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan, Air, Energi dan Lestarinya Lingkungan Hidup serta Budaya	1.1 Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Produksi tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura</li> <li>➤ Jumlah Produksi Perikanan</li> <li>➤ Jumlah Produksi Peternakan</li> </ul>	➤ Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peni</li> <li>➤ tanan</li> <li>➤ perke</li> <li>➤ dan k</li> <li>➤ Peni</li> <li>➤ perik</li> <li>➤ Peni</li> <li>➤ terna</li> <li>➤ Peni</li> <li>➤ koor</li> <li>➤ peny</li> </ul>
	1.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa, serta Jaringan Irigasi Lainnya	➤ Rasio Jaringan Irigasi	➤ Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi	➤ Peni
	1.3 Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	➤ Persentase Masyarakat Bebas Buta Aksara Al Quran	➤ Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan disertai pemantapan kelembagaan agama di desa/kelurahan.	➤ Mem
		➤ Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	➤ Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah.	➤ Pele
		➤ Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	➤ Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	➤ Men
		➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	➤ Pemeliharaan kelestarian dan daya dukung lingkungan secara proporsional	➤ Men

#### **4.2.5 Prioritas Pembangunan Wilayah**

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat tahun 2022 disusun mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD dan RKP Tahun 2022, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah diarahkan pada :

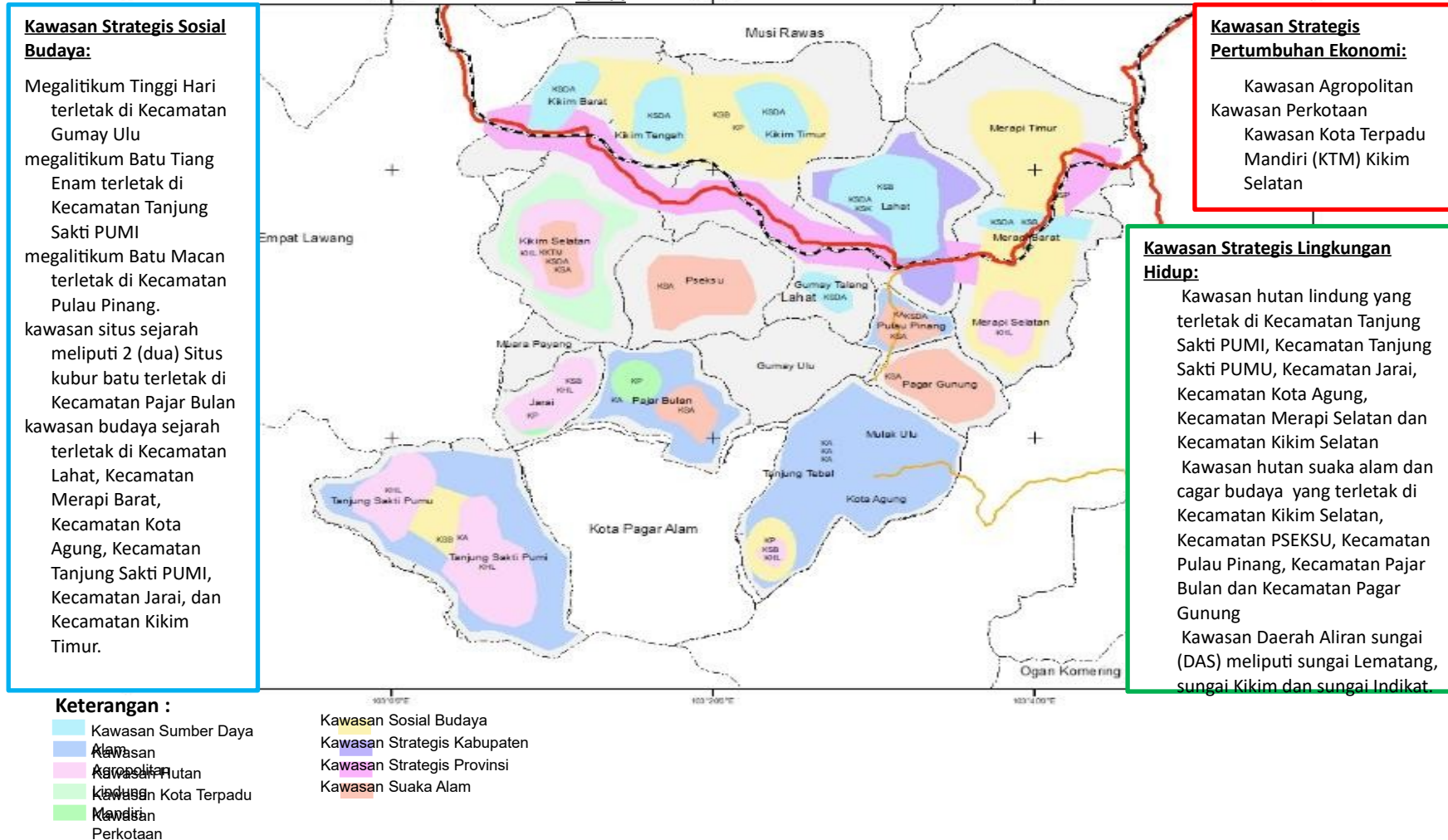
- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten;
- d. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri;
- e. Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya berdasarkan RTRW Kabupaten Lahat 2012-2032, pusat kegiatan di wilayah Kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat. Sistem pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Lahat yaitu :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan Lahat di Kecamatan Lahat.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKLp), terdiri atas:

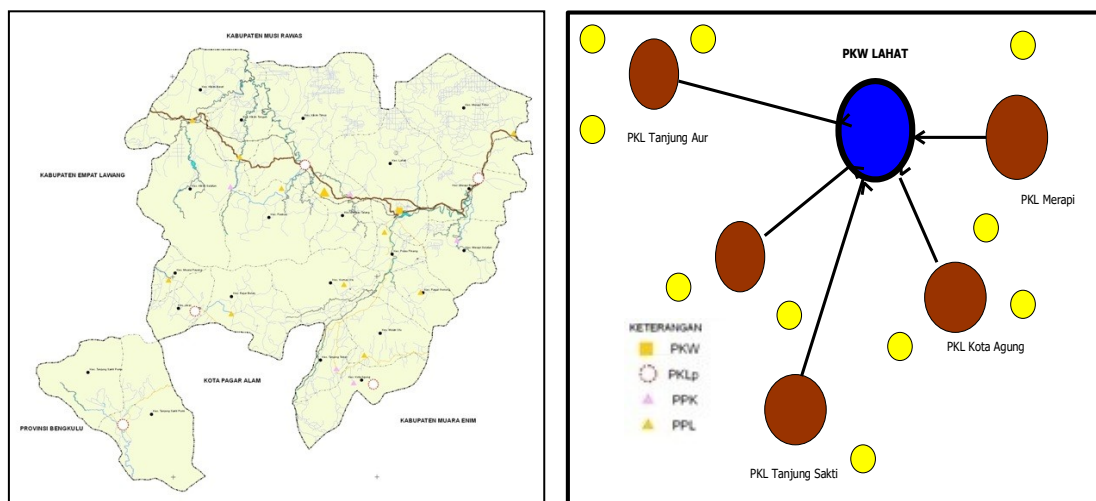
- a. Kawasan Perkotaan Bunga Mas di Kecamatan Kikim Timur.
  - b. Kawasan Perkotaan Jarai di Kecamatan Jarai.
  - c. Kawasan Perkotaan Merapi di Kecamatan Merapi Barat.
  - d. Kawasan Perkotaan Kota Agung di Kecamatan Kota Agung.
  - e. Kawasan Perkotaan Pajar Bulan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan.
  - b. Kawasan Perkotaan Simpang Tiga Pumu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
  - c. Kawasan Perkotaan Perangai Kecamatan Merapi Selatan.
  - d. Kawasan Perkotaan Tanjung Tebat Kecamatan Tanjung Tebat.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
- a. Kecamatan GumayTalang.
  - b. Kecamatan Kikim Barat.
  - c. Kecamatan Kikim Tengah.
  - d. Kecamatan Pajar Bulan.
  - e. Kecamatan Pseksu.
  - f. Kecamatan Pagar Gunung.
  - g. Kecamatan Mulak Ulu.
  - h. Kecamatan Merapi Timur.
  - i. Kecamatan Pulau Pinang.
  - j. Kecamatan Gumay Ulu.
  - k. Kecamatan Muara Payang.
  - l. Kecamatan Sukamerindu.

**Kawasan Strategis Kabupaten  
Lahat**



**Gambar 4.9**  
**Tata Ruang Kabupaten Lahat 2012-2032**



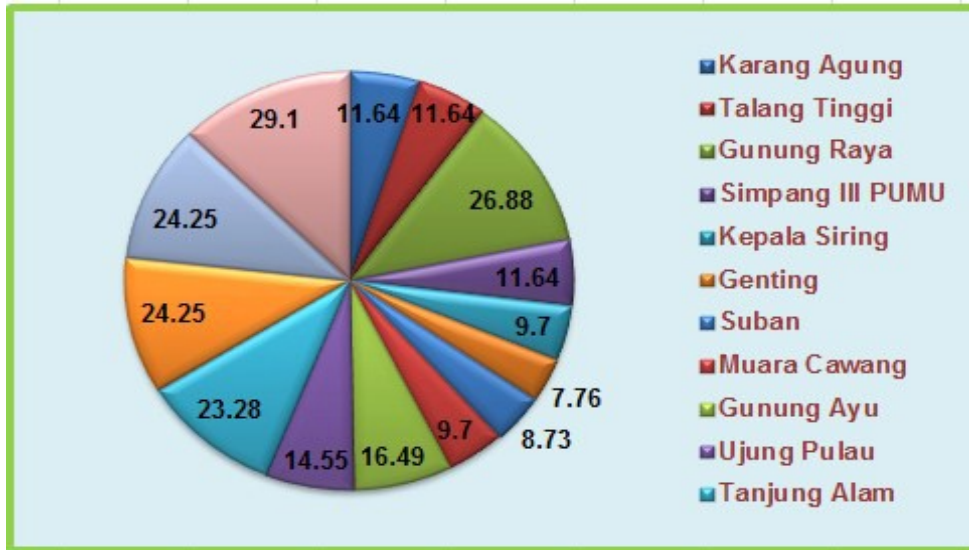


**Gambar 4.10**  
**Struktur Konektifitas antar kecamatan di Kabupaten Lahat**

Dengan berlandaskan strategi dan arah kebijakan serta pengembangan pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Lahat maka ditetapkan arahan prioritas pembangunan masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat. Pengawasan dan pengendalian untuk implementasi arahan prioritas pembangunan Kecamatan dilakukan pada tahap evaluasi RKPD dan APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai amanat Undang-Undang.

#### 1) Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu merupakan satu dari 24 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu beribukota di Desa Simpang III Pumu sebagai pusat pemerintahan tingkat kecamatan. Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu berada pada ketinggian antara 660 sampai dengan 840 meter diatas permukaan laut (dpl). Luas wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah 229,61 Km<sup>2</sup>. Desa Kembang Ayun merupakan desa yang terluas di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dengan luas wilayah 29,10 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu terdiri dari 14 desa yang semua statusnya definitif. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang sebagian besar desa terletak di perbukitan dan terkenal dengan daerah dinginnya dan sejuk.

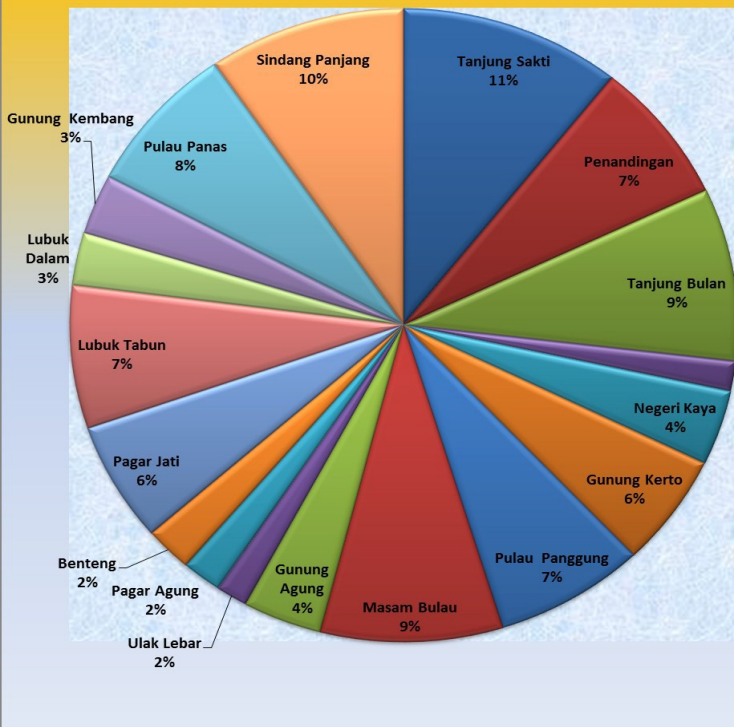


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu merupakan daerah yang sebagian besar lahannya adalah lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan daerah perkebunan. Hal inilah yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat dengan mengandalkan sektor pertanian. Sektor Perkebunan khususnya tanaman kopi menjadi sektor mata pencarian sebagian besar penduduk Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu diarahkan pada sektor pertanian (padi sawah), perkebunan (kopi), peternakan dan perikanan, difokuskan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, dan akses produksi menuju ke perkebunan serta pengembangan pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan khususnya tanaman kopi
- Peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi dengan fokus pemantapan jaringan irigasi perdesaan





Tanjung Sakti PUMI 271 km<sup>2</sup> dengan kepadatan 11 kilometer persegi. Desa terluas yaitu Tanjung Sakti atau sekitar 11 persen dari total wilayah Kecamatan. Desa dengan luas wilayah terkecil atau 2 persen adalah Desa Pajar Bulan. Desa Pajar Bulan Sakti PUMI sebesar 4,15 km<sup>2</sup> yaitu Desa Pajar Bulan.

**Grafik 4.2**  
**Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi (%)**

Sungai Manna merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Kecamatan Tanjung Sakti PUMI. Penduduk Kecamatan Tanjung Sakti PUMI memanfaatkan sungai manna untuk pengairan lahan sawah, keperluan sehari-hari (minum, mandi, mencuci), dan sumber pendapatan rumah tangga (penggalan golongan c dan nelayan sungai). Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diarahkan pada sektor pertanian (padi sawah), perkebunan (kopi), peternakan dan perikanan dan difokuskan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, akses produksi pertanian dan perkebunan serta pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan khususnya tanaman kopi
- Peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi dengan fokus pemantapan jaringan irigasi

### **3) Kecamatan Kota Agung**

Wilayah Kecamatan Kota Agung berada pada ketinggian antara 700 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut (dpl). Batas wilayah Kecamatan Kota Agung adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Tebat, Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Muara Enim, Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pagar Alam, sedangkan Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Muara Enim.

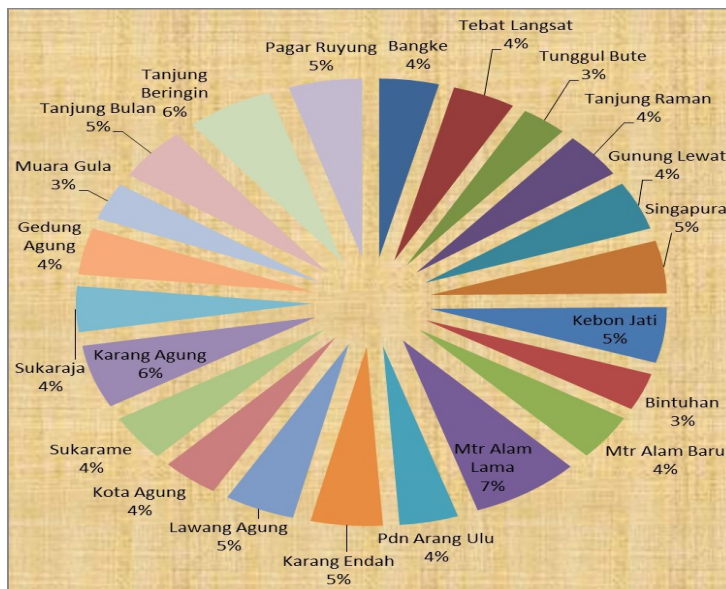
Luas wilayah Kecamatan Kota Agung adalah 151,98 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 83,02 penduduk per kilometer persegi. Desa terluas yaitu Desa Mutar Alam Lama dengan luas 11,29 km<sup>2</sup> atau sekitar 7 (tujuh) persen dari total luas wilayah Kecamatan Kota Agung, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Tunggul Bute dengan luas sekitar 3 (tiga) persen total Kecamatan Kota Agung yaitu sebesar 4,74 Km<sup>2</sup>.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Gambar 4.13 Peta Kecamatan Kota Agung

Desa Kota Agung sebagai ibukota Kecamatan Kota Agung menjadi desa terpadat dengan kepadatan penduduk 337,59 penduduk per kilometer persegi sedangkan desa yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Desa Gunung Lewat dengan kepadatan penduduk 17,41 per kilometer persegi .



Grafik 4.3

Luas Wilayah Kecamatan Kota Agung

Prioritas pembangunan di Kecamatan Kota Agung diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan difokuskan pada:

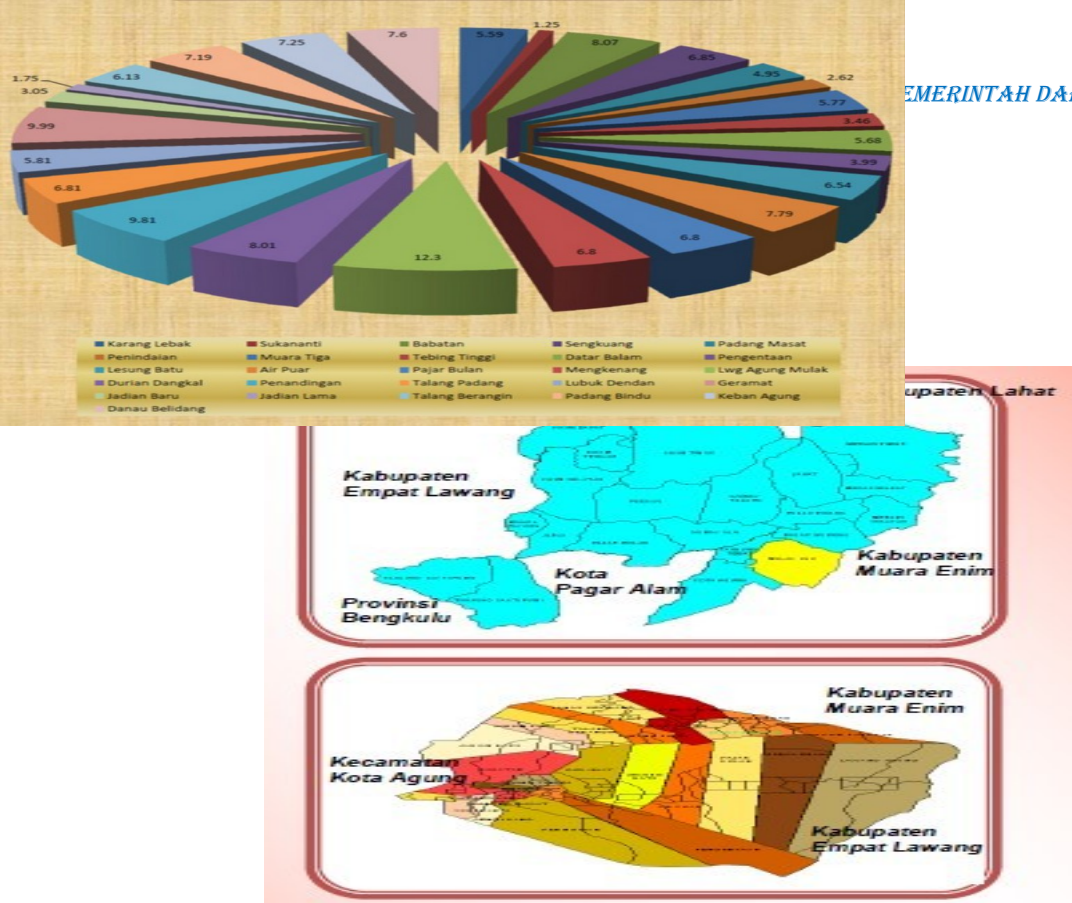
- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman kopi.

#### **4) Kecamatan Mulak Ulu**

Secara Geografis Kecamatan Mulak Ulu berada di wilayah paling tenggara Kabupaten Lahat yang berbatasan langsung dengan daerah kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kecamatan Mulak Ulu berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan Mulak Ulu dengan batas wilayah adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Gunung, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Kota Agung, sebelah timur berbatasan dengan Timur : Kabupaten Muara Enim, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Tebat. Luas wilayah Kecamatan Mulak Ulu 161,86 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 108,61 orang per km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kecamatan Mulak Ulu dibagi dalam 26 wilayah desa. Desa Sukananti memiliki luas desa terkecil atau kurang dari 2 (persen) persen dari total luas Kecamatan Mulak Ulu sebesar 1,25 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,77 persen, sedangkan desa terluas yaitu Desa Lawang Agung Mulak dengan luas wilayah 12,30 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,6 persen dari total wilayah Kecamatan Mulak Ulu.

Sarana Transportasi merupakan sarana yang sangat penting guna mendukung perkembangan suatu wilayah. Jika sarana transportasi berupa jalan telah dibangun maka akses masyarakat daerah tersebut dengan pusat kota menjadi lancar, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin maju. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Di Kecamatan Mulak Ulu semua akses jalan ke setiap desa telah lengkap walaupun tidak semuanya telah diaspal. Hanya Jalan utama Desa Babatan, Sengkuang dan Penindaian yang jenis permukaan jalannya masih diperkeras.





**Gambar 4.14**  
Peta Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat

**Grafik 4.4**  
Luas Wilayah Kecamatan Mulak Ulu

Pembangunan bidang perekonomian Kecamatan Mulak Ulu yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh



sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Mulak Ulu. Tercatat pada tahun 2014 produksi padi sawah di Kecamatan Mulak Ulu adalah sebanyak 15.861,37 ton. Selanjutnya produksi tanaman pertanian yang terdapat di masyarakat adalah kedelai dengan hasil produksi sebesar 45,28 ton pada tahun 2015.

Pada sub sektor tanaman perkebunan kopi merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi kopi mencapai 1.989,00 ton pada tahun 2015. Selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah karet dengan hasil produksi sebesar 419 ton pada tahun 2015. Sedangkan tanaman perkebunan yang terkecil adalah kemiri sebesar 7,5 ton. Prioritas pembangunan di Kecamatan Mulak Ulu diarahkan pada sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, fokus pembangunan di Kecamatan Kota Agung diarahkan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas pertanian (padi sawah), perkebunan (tanaman kopi) dan peternakan melalui peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit benih unggul, peningkatan distribusi pupuk.

#### **5) Kecamatan Tanjung Tebat**

Wilayah Kecamatan Tanjung Tebat berada pada ketinggian antara 350 - 600 meter di atas permukaan laut (dpl) dan terletak diantara empat Kecamatan dan satu Kota dengan batas wilayah sebagai berikut :

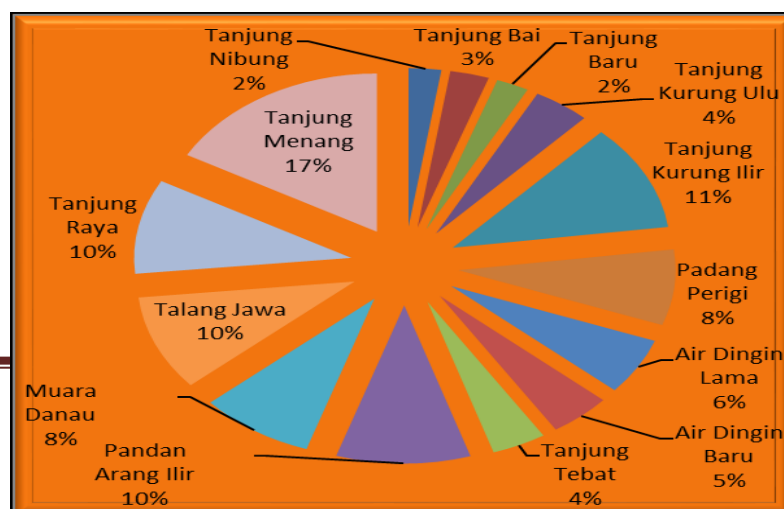
- Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Gumay Ulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Pagar Gunung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gumay Ulu dan Kota Pagaralam.



**Gambar 4.15**  
**Peta Kecamatan Tanjung Tebat**

Luas wilayah Kecamatan Tanjung Tebat 82,72 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 99,37 per km<sup>2</sup>. Desa terluas yaitu Desa Tanjung Menang dengan luas wilayah 14,01 km<sup>2</sup> atau sekitar 17 persen dari total wilayah Kecamatan Tanjung Tebat sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Tanjung Nibung dan Desa Tanjung Baru dengan luas wilayah sebesar 2,0 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjung Tebat terdiri dari 14 desa, dengan desa terjauh jaraknya dari ibukota Kecamatan Tanjung Tebat dengan jarak tempuh 8 (delapan) km yaitu Tanjung Kurung Ilir sedangkan desa yang terdekat dengan ibukota kecamatan dengan jarak hanya 0,2 km yaitu Desa Air Dingin Lama.

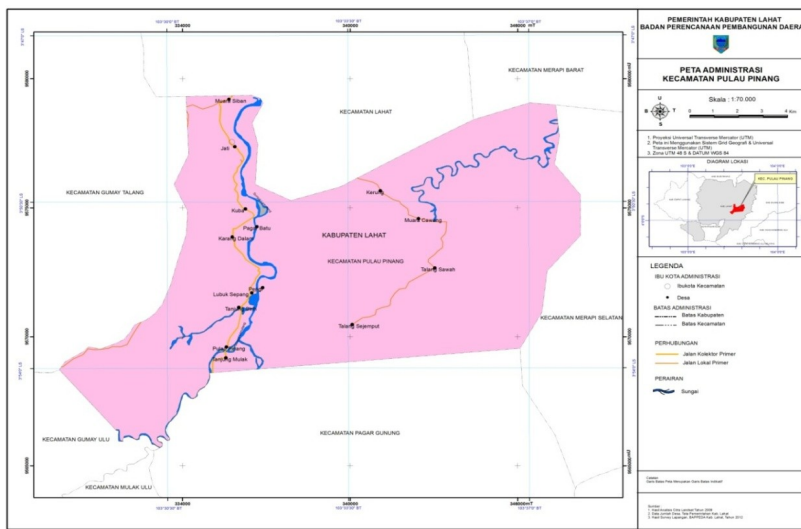


#### **Grafik 4.5** **Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Tebat**

Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Tanjung Tebat diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Tanjung Tebat. Tercatat produktivitas padi sawah di Kecamatan Tanjung Tebat adalah sebanyak 46,63 (kw/ha). Selanjutnya produktivitas tanaman pertanian lainnya yang terdapat di masyarakat adalah Jagung sebesar 71,70(kw/ha), Kacang Tanah sebesar 13,41(kw/ha) dan Ubi Kayu sebesar 173,40(kw/ha). Sedangkan pada sub sektor tanaman perkebunan Karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi Karet mencapai 819 ton, selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah kopi dengan hasil produksi sebesar 587,5 ton.

Di Kecamatan Tanjung Tebat umlah produksi perikanan di kolam lebih besar yaitu 417,05 ton sedangkan di sawah sebesar 163,57 ton. Untuk jumlah Rumah Tangga (RT) pemelihara perikanan dikolam sebanyak 28 RT dan untuk pemelihara perikanan disawah sebanyak 12 Rumah Tangga. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjung Tebat diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjung Tebat diarahkan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan



**RAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

sudah ada baik jalan,

kopi

Secara geografis Kecamatan Pulau Pinang berbatasan langsung dengan Kota Administrasi lain. Di sebelah utara Kecamatan Pulau Pinang berbatasan dengan Kecamatan Lahat dan Kecamatan Merapi Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagar Gunung, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Merapi Selatan, dan di sebelah barat dengan Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Gumay Ulu. Topografi permukaan daratan kecamatan ini rata-rata berupa dataran/hamparan Sebagian besar wilayahnya berada di pinggiran sungai lematang dan merupakan daerah yang berbukit-bukit. Sungai terbesar di Kabupaten Lahat adalah Sungai Lematang. Sungai ini melintasi sebagian wilayah di Kabupaten Lahat termasuk melintasi sebagian wilayah Kecamatan Pulau Pinang. Sungai Lematang yang mengalir di daerah ini memiliki arus deras, sedangkan di berbagai tempat terdapat batu-batu besar.

**Gambar 4.16**

**Peta Kecamatan Pulau Pinang**

Luas wilayah Kecamatan Pulau Pinang 164,67 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 70,96 orang per km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kecamatan Pulau Pinang

dibagi dalam 14 wilayah desa dan Desa Jati merupakan ibukota kecamatan. Desa Jati memiliki luas desa sebesar 17,27 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,49 persen dari total luas Kecamatan Pulau Pinang, sedangkan desa terluas yaitu Desa Tanjung Sirih dengan luas wilayah 24,11 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,64 persen dari total wilayah Kecamatan Pulau Pinang. Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Pulau Pinang. Tercatat pada tahun 2014 produksi padi sawah di Kecamatan Pulau Pinang adalah sebanyak 6.504,84 ton.

Di Kecamatan Pulau Pinang sub sektor tanaman perkebunan karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi karet mencapai 2.260 ton pada tahun 2015. Selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah kopi dengan hasil produksi sebesar 750,3 ton pada tahun 2015.

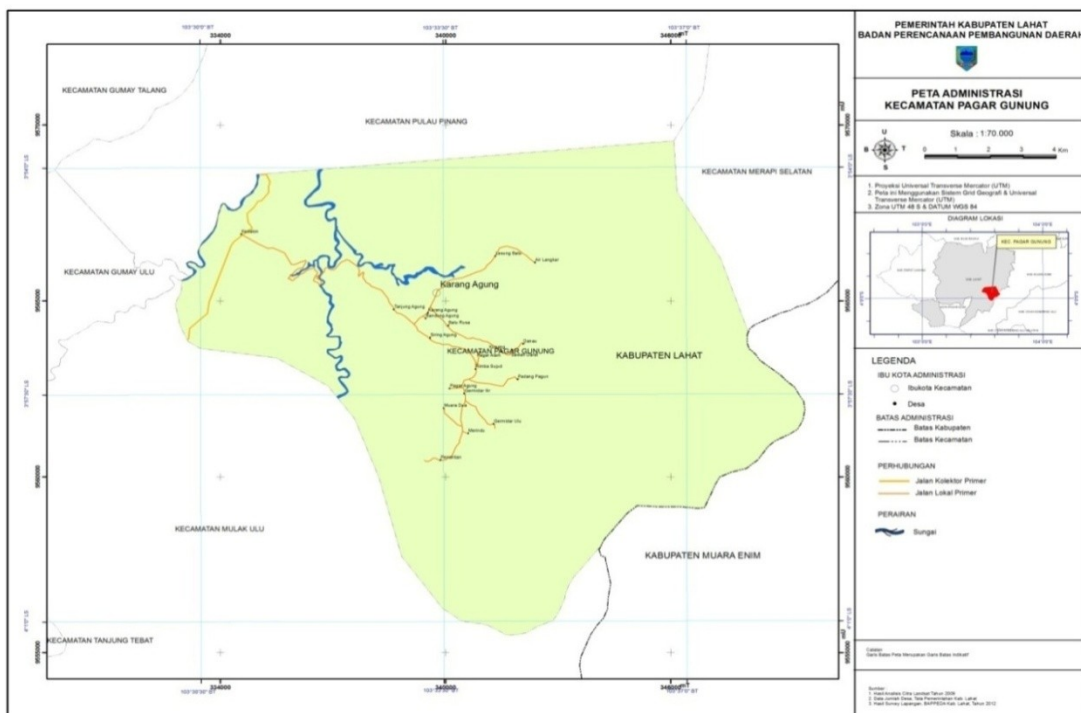
Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Pulau Pinang diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan infrastruktur penunjang dan pengembangan pariwisata.

## **7) Kecamatan Pagar Gunung**

Secara geografis Kecamatan Pagar Gunung berada di wilayah barat Kabupaten Lahat; sebelah barat kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang; di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang; di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mulak Ulu; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Merapi Selatan dan Kabupaten Muara Enim. Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar dengan sedikit perbukitan. Tinggi

Kecamatan Pagar Gunung diukur dari permukaan laut berkisar 100-500 m dari permukaan laut. Salah satu tempat yang cukup dikenal di Kecamatan Pagar Gunung adalah Desa Pagar Alam. Desa ini terkenal dengan batu prasastinya yang memiliki kisah yang unik, yaitu Batu Macan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2008, luas wilayah Kecamatan Pagar Gunung adalah 105,52 km<sup>2</sup>. Luasnya 2,42 persen dari luas Kabupaten Lahat.



**Gambar 4.17**  
**Peta Kecamatan Pagar Gunung**

Kecamatan Pagar Gunung terdiri dari 20 desa definitif. Lokasi sebagian besar desa merupakan hamparan. Dengan kemiringan lahan berkisar 15 sampai dengan 25 derajat. Ibu kota kecamatan adalah Desa Tanjung Agung yang merupakan desa terluas yakni 14,91 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,13 persen dari luas wilayah Kecamatan Pagar Gunung. Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Pagar Agung dengan luas 1,59 km<sup>2</sup> sekitar 1,5 persen dari luas wilayah Kecamatan Pagar Gunung.

Kecamatan Pagar Gunung tergolong sebagai daerah pertanian, hal ini ditunjukkan dari sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah pertanian. Pertanian merupakan sektor primer yang kegiatannya berbasis pada sumber daya

alam dimana sebagian besar produk digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Ada tiga komoditi utama disektor pertanian yang menyumbang produktivitas terbanyak di Kecamatan Pagar Gunung, yaitu perkebunan dan sawah, seperti kopi, padi dan karet. Luas lahan di Kecamatan Pagar Gunung terdiri dari luas lahan sawah sebesar 10 persen dan luas lahan bukan sawah sebesar 90 persen (pekarangan, tegal, ladang, hutan). Dilihat dari penggunaan lahan khususnya lahan bukan sawah. Lahan yang penggunaannya terluas adalah lahan perkebunan, sekitar 55 persen dari luas kecamatan. Hal inilah yang menyebabkan sub sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan dalam sektor pertanian.

Di Kecamatan Pagar Gunung luas lahan sawah menurut jenis pengairan pada periode 2016 seluas 1.138 hektar atau sekitar 8 persen dari luas lahan sawah di Kabupaten Lahat. Pada sektor pertanian selama periode tahun 2016 realisasi tanam padi baik padi lading maupun padi sawah seluas 1.133 hektar, dengan realisasi panen seluas 2.226 hektar. Pada sektor perikanan selama periode tahun 2016 hasil produksi perikanan sebanyak 216,95 ton. Dengan penyumbang hasil terbanyak berasal dari areal persawahan, yakni sebesar 71,39 ton, baik itu dipelihara ataupun ditangkap. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Pagar Gunung diarahkan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan, serta pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas pertanian (padi sawah, kedelai dan padi ladang) dengan fokus pemantapan jaringan irigasi Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman kopi dan karet.

#### **8) Kecamatan Gumay Ulu**

Secara geografis Kecamatan Gumay Ulu berbatasan langsung dengan Kota Administrasi lain. Di sebelah utara Kecamatan Gumay Ulu berbatasan dengan Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan PSEKSU, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Tebat, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung, dan di sebelah barat dengan Kecamatan

Pajar Bulan. Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif perbukitan. Sungai terbesar di Kecamatan Gumay Ulu adalah Sungai Selangis. Sungai ini melintasi sebagian wilayah di Kecamatan Gumay Ulu. Sungai Selangis yang mengalir di daerah ini memiliki arus deras, sedangkan di berbagai tempat terdapat batu-batu besar. Masih banyak masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari di sungai, seperti mandi , mencuci baju dan lain-lain.

Secara administrasi, Luas wilayah Kecamatan Gumay Ulu adalah 87,01 km<sup>2</sup> dan dibagi dalam 10 wilayah desa dengan ibu kota kecamatan berada di Desa Tinggi Hari. Desa Simpur merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 15,02 km<sup>2</sup> atau sekitar 17,26 persen dari luas wilayah Kecamatan Gumay Ulu. Desa ini bahkan lebih luas dari penjumlahan luas wilayah tiga desa lain di Kecamatan Gumay Ulu yaitu Desa Padang Gumay, Rindu Hati dan Sinjar Bulan. Sedangkan untuk desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Padang Gumay, dengan luas 0,5 Km<sup>2</sup>.

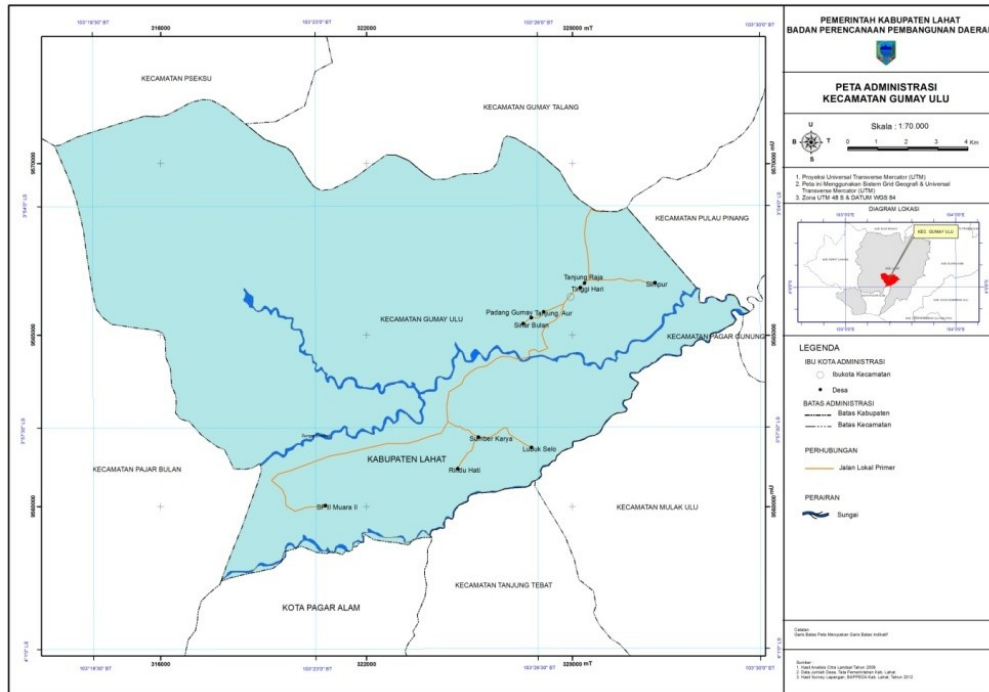
Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Gumay Ulu. Tercatat pada tahun 2015 produksi padi sawah di Kecamatan Gumay Ulu adalah sebanyak 1.597 ton. Selanjutnya produksi tanaman pertanian yang terdapat di masyarakat adalah padi ladang dengan hasil produksi sebesar 404 ton pada tahun 2015. Di Kecamatan Gumay Ulu sub sektor tanaman perkebunan kelapa Karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi karet mencapai 1.058 ton pada tahun 2015. Selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah kopi dengan hasil produksi sebesar 654,50 ton pada tahun 2015.

Pada sub sektor peternakan, jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jenis ayam pedaging mendominasi populasi unggas dengan jumlah 37.996 ekor. populasi kambing, kerbau dan sapi potong memiliki jumlah yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan populasi ternak lainnya. Jumlah ternak yang dipotong paling banyak yakni kambing sebanyak 565 ekor. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Gumay Ulu diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan



- Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan
- Perluasan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi



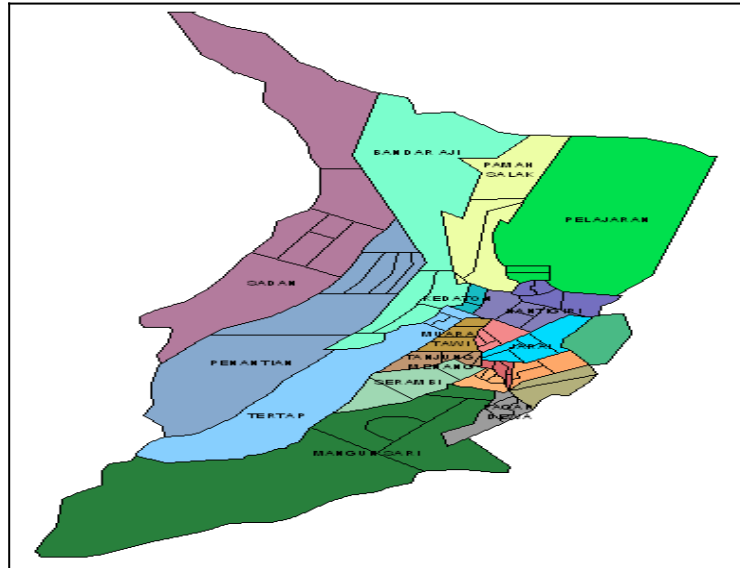
**Gambar 4.18**  
**Peta Kecamatan Gumay Ulu**

## 9) Kecamatan Jarai

Kecamatan Jarai dengan ibu kota kecamatannya adalah Desa Jarai yang berjarak 76 kilometer dari ibukota Kabupaten Lahat. Kecamatan Jarai memiliki batasan wilayahnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kikim Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kota Pagar Alam, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jarai, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Payang. Topografi Kecamatan Jarai adalah dataran yang berada pada ketinggian antara 700 - 1000 meter diatas permukaan laut. Permukaan daratan kecamatan ini relatif datar dengan sedikit perbukitan. Desa Mangun Sari merupakan desa yang paling tinggi dari permukaan air laut dibandingkan dengan seluruh desa di Kecamatan Jarai dengan ketinggian 972 Dpl (m).

Kecamatan Jarai terdiri dari 21 Desa Definitif. Luas wilayah Kecamatan Jarai adalah 137,22 kilometer persegi dengan desa terluas yaitu Desa Mangun Sari dengan

luas wilayah 10,80 kilometer persegi atau sekitar 7,87 persen sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Gunung Megang dengan luas wilayah 3 (tiga) kilometer persegi.



**Gambar 4.19**  
**Peta Kecamatan Jarai**

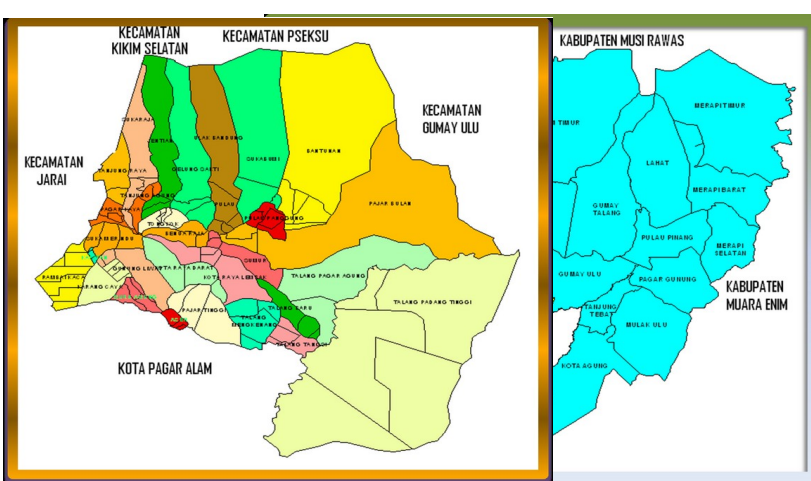
Kecamatan Jarai adalah daerah pertanian dimana mata pencarian penduduk mayoritas dari sektor pertanian. Kopi merupakan komoditi unggulan perkebunan di Kecamatan Jarai. Perkebunan kopi dan kakao mendominasi dari luas panen dan produksi panen dibandingkan dengan komoditi tanaman perkebunan lainnya. Pada tahun 2016 luas panen tanaman kopi 2.063 ha dan produksi tanaman kopi 2317 ton serta luas panen dan produksi kakao masing-masing mencapai 1300 ha dan 480 ton. Pada sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Jarai. Tercatat pada tahun 2016 luas panen komoditi padi sawah adalah 2.168 hektar yang kemudian luas panen terbesar kedua adalah kacang tanah.

Pada tahun 2016 di Kecamatan Jarai populasi ternak hanya ada kerbau 9 ekor, sapi potong 493 ekor, kambing 1.543 ekor dan domba 131 ekor. Sedangkan jumlah pemotongan ternak yaitu kerbau 1 ekor, sapi potong 49 ekor, kambing 771 ekor dan domba 65 ekor. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Jarai diarahkan pada: sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Jarai diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas pertanian (padi sawah), perkebunan (tanaman kopi, kakao) dan peternakan melalui peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit benih unggul, peningkatan distribusi pupuk.
- Peningkatan produktivitas peternakan dan perikanan

#### 10) Kecamatan Pajar Bulan

Luas wilayah Kecamatan Pajar Bulan adalah 146,11 kilometer persegi dengan desa terluas yaitu Desa Talang Padang Tinggi dengan luas wilayah 56,12 kilometer persegi atau sekitar 38,41 persen dari total wilayah Kecamatan Pajar Bulan sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Kota Raya Lembak dengan luas 0,56 kilometer persegi atau sekitar 0,38 persen dari total Kecamatan Pajar Bulan. Wilayah Kecamatan Pajar Bulan berada pada ketinggian antara 714 -780 meter diatas permukaan laut.



Gambar 4.20  
Peta Kecamatan Pajar Bulan

Jarak tempuh dari Kecamatan Pajar Bulan ke ibukota Kabupaten Lahat adalah 69 kilometer dengan melalui wilayah Kota Pagar Alam. Desa yang terjauh jaraknya dari

ibukota Kecamatan Pajar Bulan dengan jarak tempuh 30 kilometer (dari kantor kecamatan) yaitu Desa Talang Padang Tinggi, sedangkan desa terdekat adalah Desa Benua Raja dengan jarak tempuh 0,10 kilometer. Kecamatan Pajar Bulan mempunyai batasan wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pseksu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gumay Ulu, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Merindu. Jenis tanah di daerah ini adalah gugusan kesatuan tanah litosol, latosol dan regosol yang bahan baku induknya dari batuan beku dan sedimen dimana cocok ditanami tanaman padi, palawija, sayur mayur dan tanaman perkebunan.

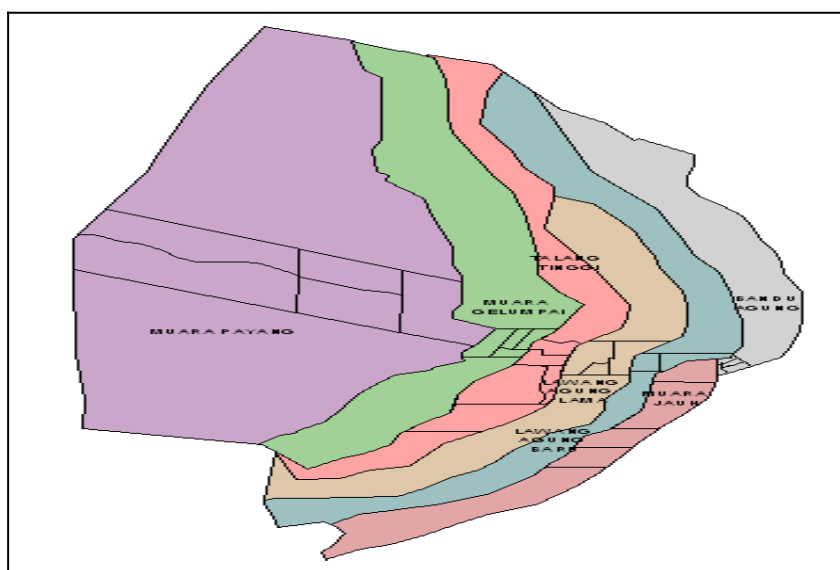
Pertanian merupakan sektor primer yang kegiatannya berbasis pada sumber daya alam dimana sebagian besar produk akhirnya digunakan sebagai bahan baku produk utama sektor industri pengolahan, dan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun 2015 hampir komoditi tanaman pangan di Kecamatan Pajar Bulan mengalami penurunan luas panen dari tahun ke tahun. Ada 3 (tiga) komoditi yang mengalami peningkatan pada produksi tanaman pangan di tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada padi sawah meningkat sebesar 15,9 persen, ubi Jalar meningkat sebesar 31,5 persen dan jagung meningkat 1,9 persen, Sedangkan yang mengalami penurunan di tahun 2015 ada 2 (dua) komoditi yaitu kacang tanah sebesar 40,9 persen dan ubi kayu sebesar 3,9 persen. Di Kecamatan Pajar Bulan memiliki lahan sawah dan bukan sawah. Lahan bukan sawah mendominasi sebesar 93 persen dibandingkan dengan lahan sawah hanya sebesar 7 ( tujuh ) persen. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Pajar Bulan diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, fokus pembangunan di Kecamatan Pajar Bulan diarahkan pada :

- Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Pendidikan, Kesehatan, Akses Produksi menuju areal Pertanian dan Perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis kopi

- Bantuan bibit unggul tanaman pertanian.

#### 11) Kecamatan Muara Payang

Secara geografis Kecamatan Muara Payang berada di wilayah barat Kabupaten Lahat. Di sebelah utara Kecamatan Muara Payang berbatasan dengan Kecamatan Kikim Selatan dan Kabupaten Empat Lawang, di sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Dempo, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jarai, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Empat Lawang. Topografi Kecamatan Muara Payang adalah dataran dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut berkisar 410 sampai dengan 515 meter. Permukaan daratan kecamatan ini relatif datar dengan sedikit perbukitan. Desa Bandu Agung merupakan desa yang ketinggiannya paling rendah dari permukaan air laut, yaitu 410 DPL (m), sedangkan Desa Muara Gelumpai merupakan desa yang paling tinggi dari permukaan air laut dengan ketinggian 515 DPL (m).



**Gambar 4.21**  
**Peta Kecamatan Muara Payang**

Kecamatan Muara Payang terdiri dari 7 (tujuh) Desa Definitif. Dengan kemiringan lahan berkisar 15 sampai dengan 25 derajat. Luas wilayah Kecamatan Muara Payang adalah 37,50 km<sup>2</sup> dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Lawang Agung Lama. Desa Talang Tinggi adalah desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 9,59 km<sup>2</sup> atau sekitar 25,56 persen dari luas wilayah Kecamatan Muara

Payang, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Lawang Agung Baru yaitu 2,51 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,71 persen dari luas wilayah kecamatan. Salah satu objek wisata yang terdapat di Kecamatan Muara Payang adalah Air Tejun (Curup) Lawang Agung yang berada di Desa Lawang Agung Lama. Selain sebagai objek wisata, air terjun ini juga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Muara Payang. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Muara Payang diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, fokus pembangunan di Kecamatan Muara Payang diarahkan pada:

- Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Pendidikan, Kesehatan, Akses Produksi menuju areal Pertanian dan Perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Perluasan produktivitas pertanian dengan fokus pemantapan jaringan irigasi Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman kakao, kopi dan lada.
- Peningkatan produktivitas peternakan dan perikanan (ikan, kambing dan sapi)

## **12) Kecamatan Sukamerindu**

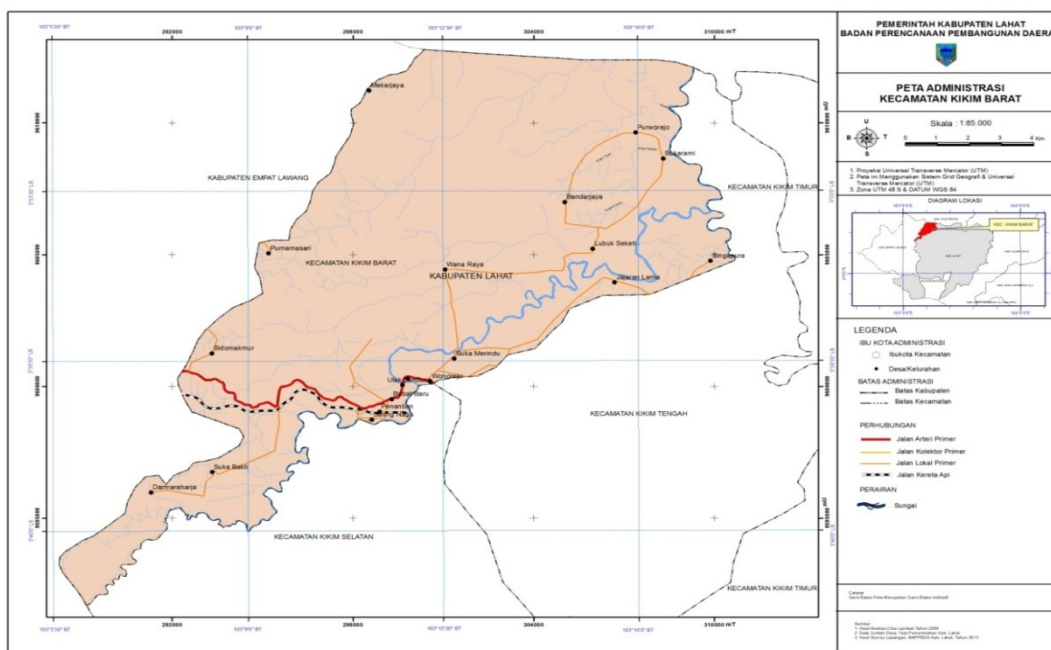
Secara geografis tinggi wilayah Kecamatan Sukamerindu 734-817 meter dari permukaan laut (DPL) yang berbatasan langsung dengan kota administrasi lain. Di sebelah utara Kecamatan Sukamerindu berbatasan dengan Kecamatan Pseksu, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kota Pagar Alam, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jarai, dan di sebelah barat dengan Kecamatan Pajar Bulan. Luas wilayah Kecamatan Sukamerindu 55,23 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 6.725 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 121,76 per km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kecamatan Sukamerindu dibagi dalam 10 wilayah desa yang mencakup



- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis kopi dan kakao.

### 13) Kecamatan Kikim Barat

Kecamatan Kikim Barat dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Saung Naga dengan batasan wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kikim Selatan dan Kikim Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang. Secara administratif, Kecamatan Kikim Barat dibagi dalam 19 wilayah desa yang mencakup 59 dusun. Wilayah Kecamatan Kikim Barat berada pada ketinggian antara 100 - 500 meter diatas permukaan laut, dimana sebagian besar Kecamatan Kikim Barat merupakan dataran. Luas wilayah Kecamatan Kikim Barat adalah 272,00 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 57,44 penduduk per km<sup>2</sup>. Desa terluas yaitu Desa Purnamasari dengan luas wilayah 44,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 13 persen dari total wilayah Kecamatan Kikim Barat, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Penantian dan Desa Babat Baru yang luasnya sama yaitu sekitar 0,45 persen dari total luas Kecamatan Kikim Barat.





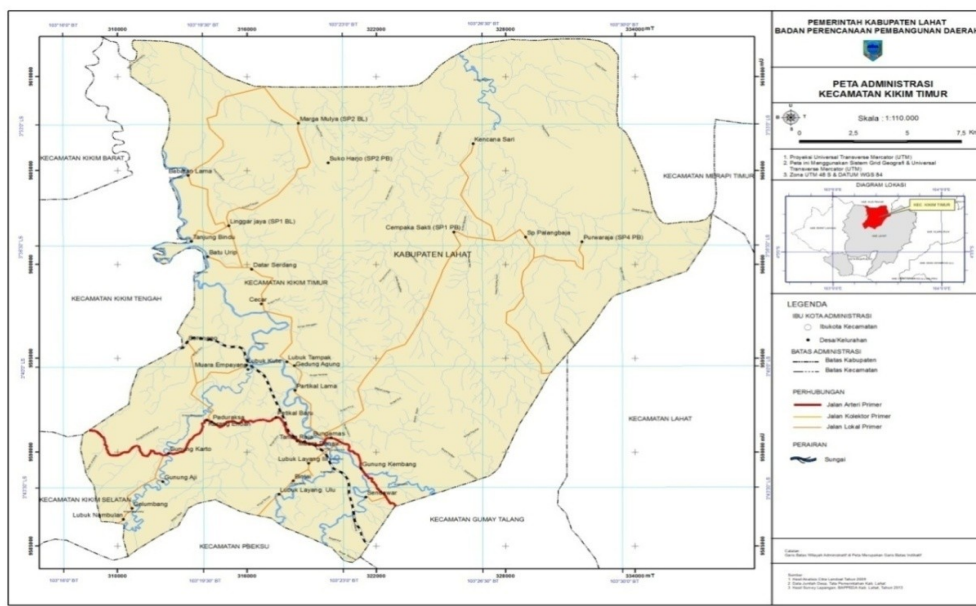
**Gambar 4.23**

**Peta Kecamatan Kikim Barat**

Perkebunan merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemui di daerah pedesaan termasuk di Kecamatan Kikim Barat. Area perkebunan membutuhkan tempat yang luas, serta daerah yang cocok untuk bertanam. Di Kecamatan Kikim Barat sub sektor tanaman perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan dalam sektor pertanian, dimana memiliki komoditi unggulan yaitu komoditi kelapa sawit dan karet. Dari segi luas lahan bukan sawah di kecamatan ini sebagian besar merupakan hutan rakyat yakni seluas 32.284 ha dan diikuti lahan yang digunakan untuk penggembalaan / padang rumput.

Pada sub sektor peternakan, jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jenis ayam pedaging mendominasi populasi unggas dengan jumlah 19.618 ekor. Grafik populasi ternak disamping menunjukkan bahwa populasi kambing, kerbau dan sapi potong memiliki jumlah yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan populasi ternak lainnya. Jumlah ternak yang dipotong paling banyak yakni kambing sebanyak 839 ekor. Di Kecamatan Kikim Barat juga memiliki populasi ternak dan unggas. Hewan ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat diantaranya kambing mencapai 1.677 ekor, ternak sapi sebanyak 1.560 ekor, ternak domba sebanyak 136 ekor dan ternak kerbau sebanyak 99 ekor. Sedangkan untuk populasi unggas didominasi oleh ayam pedaging sebanyak 19.618 ekor. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Kikim Barat diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan akses produksi menuju areal pertanian serta perkebunan
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman karet, dan kelapa sawit.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pedesaan lainnya



**DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022**

ternak sapi dan kambing  
pedesaan

m Timur berbatasan dengan  
Kecamatan Psekus, di  
alag, dan di sebelah barat  
Kikim Selatan.

Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar dengan sedikit perbukitan. Sungai terbesar di Kabupaten Lahat adalah Sungai Lematang. Sungai ini melintasi sebagian wilayah di Kabupaten Lahat termasuk melintasi hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kikim Timur. Luas wilayah Kecamatan Kikim Timur adalah 564,45 Km<sup>2</sup> dimana Desa Bungamas merupakan desa yang terluas di Kecamatan Kikim Timur dengan luas wilayah 65,65 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kikim Timur terdiri dari 32 desa yang semua statusnya defenitif. Kecamatan Kikim Timur sedikit bukit dan bergantung ± 20% yang luas daerah ber-gelombang ± 80%. Ketinggian dari permukaan laut ± 86 m. Daerah ini tidak terdapat gunung yang tinggi atau tebing / bukit barisan yang terjal.

**Gambar 4.24**  
**Peta Kecamatan Kikim Timur**

Di Kecamatan Kikim Timur subsektor tanaman perkebunan karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi karet mencapai 10.831,20 ton dan

selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah kelapa sawit dengan hasil produksi sebesar 495,00 ton. Pada sub sektor tanaman pangan, Kecamatan Kikim Timur masih didominasi tanaman padi sawah karena sebagian penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar.

Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, itik, dan lain-lain. Jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik.

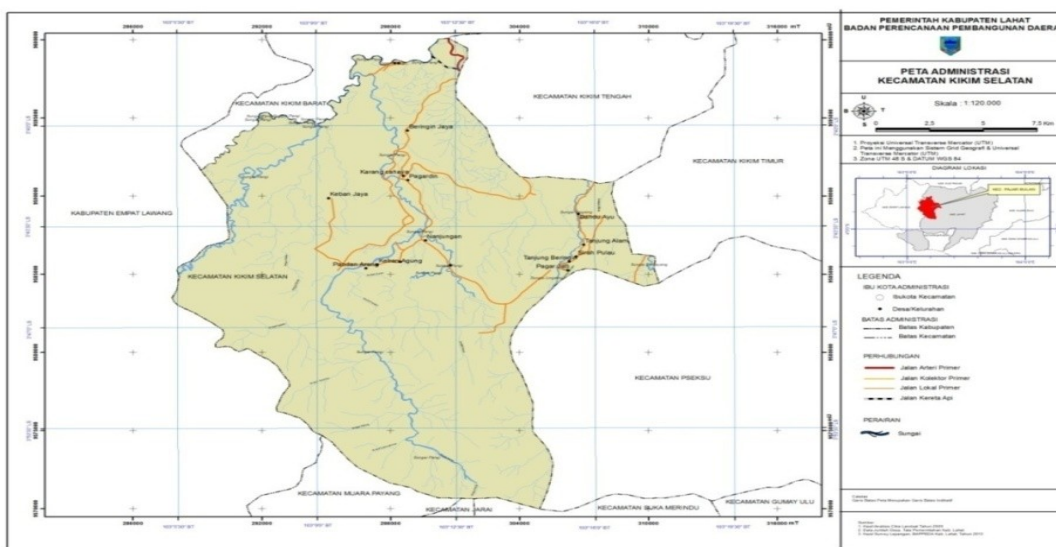
Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan dan pertambangan migas. Prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, dan kesehatan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kelapa sawit.
- Pengembangan produktivitas pertanian, melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, suplai pupuk.
- Pengembangan produktivitas bidang peternakan seperti sapi dan kambing.

#### **15) Kecamatan Kikim Selatan**

Luas wilayah Kecamatan Kikim Selatan sebesar 126,04 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kecamatan Kota Agung dibagi dalam 17 wilayah desa. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Pulau Beringin seluas 19,50km<sup>2</sup>, sedangkan desa yang wilayahnya paling kecil adalah Desa Jagabaya dengan luas wilayah 1,6 km<sup>2</sup>. Batas administrasi Kecamatan Kikim Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kikim Barat, Sebelah Selatan berbatasan dengan

Kecamatan Jarai, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pseksu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang. Ibu Kota Kecamatan Kikim Selatan berada di Desa Pagar Jati dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Lahat 63 km, adapun desa yang terjauh di Kecamatan Kikim Selatan adalah desa Keban Agung SP I dengan jarak yang harus ditempuh melalui jalan darat sejauh 25 Km. Pada Kecamatan Kikim Selatan, perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Kikim Selatan.



**Gambar 4.25**  
**Peta Kecamatan Kikim Selatan**

Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Kikim Selatan diarahkan pada:

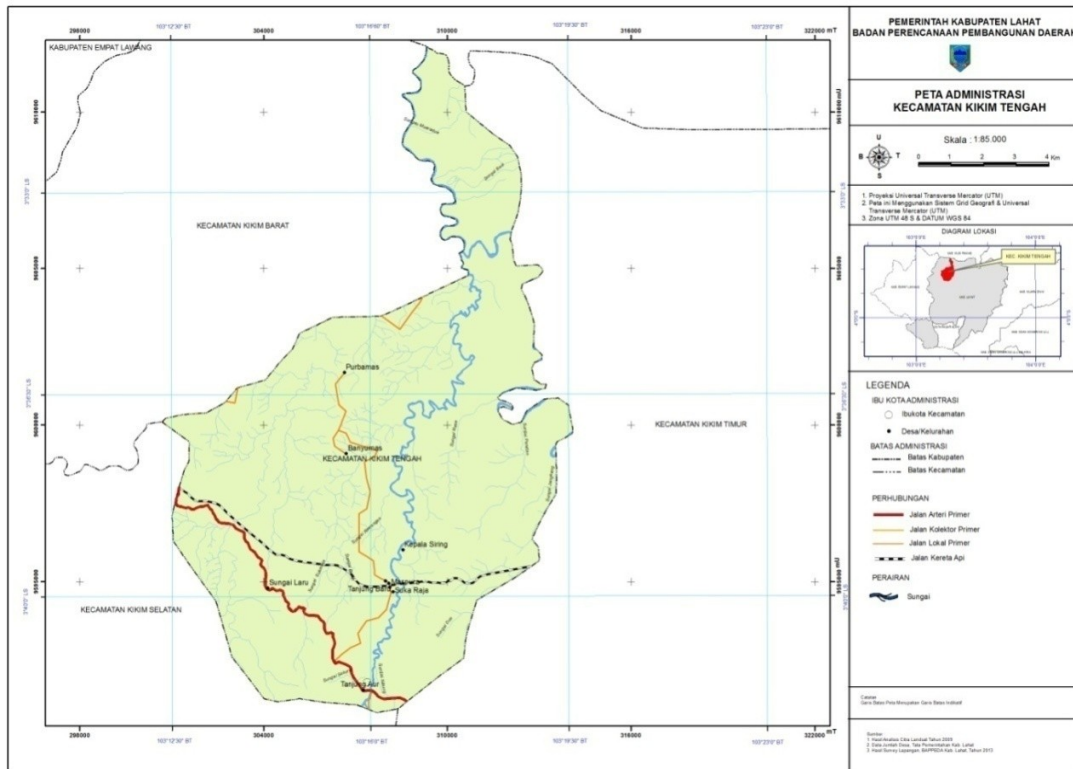
- Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pedesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

- Peningkatan dan pengembangan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kelapa sawit.
- Pengembangan produktivitas pertanian, melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, suplai pupuk dan alsintan
- Pengembangan tanaman pertanian padi sawah dan kedelai

#### **16) Kecamatan Kikim Tengah**

Wilayah Kecamatan Kikim Tengah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kikim Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kikim Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim Timur dan Kikim Barat, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kikim Timur. Secara administrasi, Kecamatan Kikim Tengah dibagi menjadi 9 (sembilan) wilayah desa. Desa Tanjung Aur yang merupakan ibukota kecamatan merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 93,64 km<sup>2</sup> atau sekitar 35,26 persen dari luas wilayah Kecamatan Kikim Tengah yaitu sebesar 265,57 km<sup>2</sup>. Desa yang memiliki luas yang hampir sama dengan Desa Tanjung Aur adalah Desa Sungai Laru, dimana desa ini memiliki luas wilayah sebesar 93,32 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Kikim Tengah merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya ditujukan untuk penggunaan lahan pertanian, dimana di kecamatan ini subsektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit yang paling menonjol. Kecamatan ini berada di aliran Sungai Lingsing bagian hilir yang melintasi hampir semua desa di Kecamatan Kikim Tengah. Di Kecamatan Kikim Tengah sub sektor tanaman perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan dalam sektor pertanian. Adapun komoditi unggulan yang dimaksud adalah komoditi kelapa sawit. Tercatat produksi kelapa sawit mencapai 18.414 ton, hasil produksi kelapa sawit di Kecamatan Kikim Tengah didominasi oleh hasil perusahaan yang bergerak diperkebunan sawit. Selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah karet dengan hasil produksi sebesar 2.967 ton pada tahun 2015.



**Gambar 4.26**  
**Peta Kecamatan Kikim Tengah**

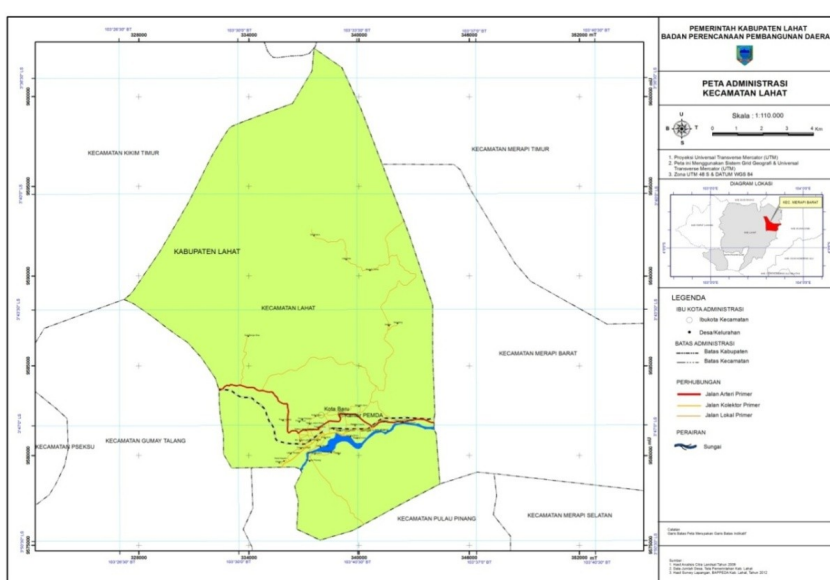
Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Kikim Tengah. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Kikim Tengah diarahkan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kelapa sawit.

## 17) Kecamatan Lahat

Luas wilayah Kecamatan Lahat sebesar 238,47 km<sup>2</sup> dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Lahat. Di samping itu juga kecamatan Lahat menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di sebabkan karena Ibukota kabupaten Lahat adalah Kecamatan Lahat sendiri. Kecamatan Lahat memiliki wilayah yang cukup luas, dimana Kecamatan Lahat sendiri terbagi oleh 35 desa/ kelurahan yang mana ada beberapa desa yang memliki jarak ke kantor camat cukup jauh dan terpencil yaitu desa Ulak Mas dan desa Girimulya dengan jarak 26 km.



**Gambar 4.27**  
**Peta Kecamatan Lahat**

Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sector pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang be-rusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pan-gan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Lahat.



Luas lahan padi sawah 744 ha dimana sawah tadah hujan memiliki luas 426 ha sedangkan luas sawah yang sudah memiliki aliran irigasi sebesar 318 ha. Di Kecamatan Lahat sub sektor tanaman perkebunan karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat luas Perkebunan Karet mencapai 2.546 Ha dengan produksi sebanyak 3.685 ton, kemudian di ikuti perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 536 ha dengan produksi sebanyak 3.360 ton, kemudian di ikuti tanaman Kopi seluas 399 ha dengan produksi per tahunnya adalah 113,6 ton, kemiri dengan luas 26 ha, kakao dengan luas 135 ha, perkebunan kelapa dengan luas 8 ha, pinang 10 ha.

Di Kecamatan Lahat untuk populasi hewan ternak sebanyak 735.867 ekor, dengan rincian untuk ternak ayam kampung sebanyak 11.631 ekor, sedangkan jumlah ternak ayam daging 720.663 ekor, sedangkan jumlah ternak itik sebanyak 3.573 ekor. Di samping peternakan, perikanan di Kecamatan Lahat juga merupakan salah satu pendapatan masyarakat yang menjanjikan, dimana luas area perikanan di Kecamatan Lahat seluas 4,15 ha dengan petani ikan yang membudidayakan perikanan di daerah kolam sebanyak 154,7 ha dengan produksi 119,7 ton, sedangkan perikanan yang berada di area persawahan 90 ha dengan produksi sebanyak 46.95 ton.

Sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting guna mendukung perkembangan suatu wilayah. Jika sarana transportasi berupa jalan telah dibangun maka akses masyarakat daerah tersebut dengan pusat kota menjadi lancar, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin maju. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Di Kecamatan Lahat sebagian besar akses jalan utama menuju desa/kelurahan telah diaspal hanya ada beberapa desa/kelurahan yang belum di karenakan sebagian wilayahnya yang di lalui perusahaan perkebunan serta jauhnya wilayah desa/kelurahan tersebut yaitu Desa Girimulya.

Fasilitas lain yang tidak kalah penting keberadaanya adalah fasilitas rekreasi. Kecamatan Lahat terdapat banyak objek wisata, Kecamatan Lahat juga memiliki objek wisata alam yaitu objek wisata Sungai Lematang yang menjadi salah satu tempat rekreasi yang biasa digunakan masyarakat daerah untuk mengadakan lomba rakit pada peringatan hari-hari bersejarah. Selain sungai Lematang terdapat juga taman rekreasi buatan yaitu Ribang Kemambang yang terletak 1 (satu) km dari pusat kota, taman rekreasi Ribang Kemambang ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang serta terdapat berbagai jenis binatang yang dilindungi.



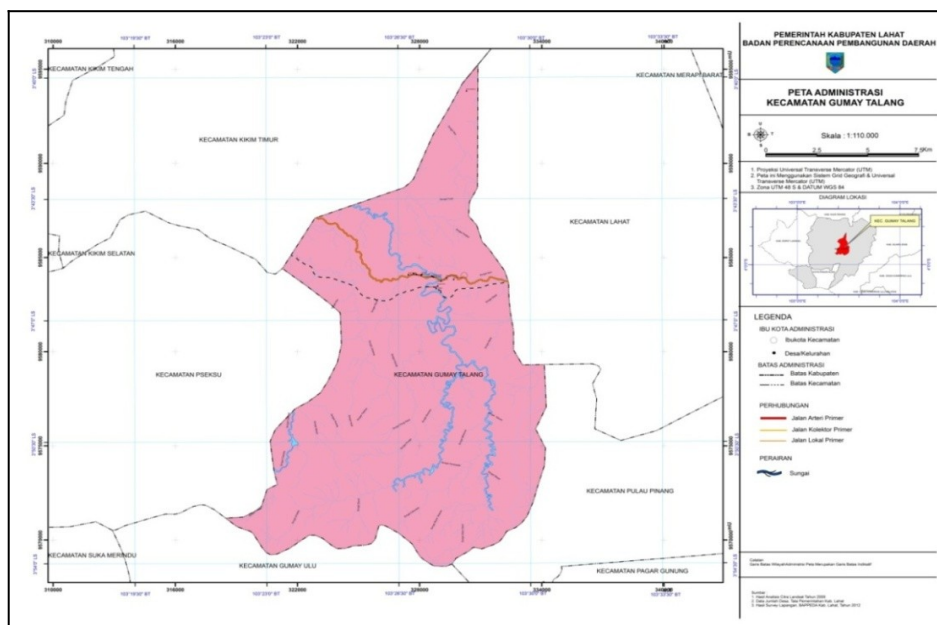
Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perkebunan, pertambangan migas dan batu bara serta industri. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kecamatan Lahat diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Pengendalian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten Lahat
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan.

#### **18) Kecamatan Gumay Talang**

Secara geografis Kecamatan Gumay Talang memiliki wilayah dengan luas sebesar 249,61 km<sup>2</sup>. Jumlah desa di kecamatan ini sebanyak 15 desa. Topografi wilayah sebagian besar berupa hamparan/dataran. Tahun 2015 desa yang memiliki wilayah terluas yaitu Desa Sukamakmur sebesar 35,29 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,14 persen dari luas wilayah Kecamatan Gumay Talang. Desa Tanjung Dalam merupakan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu sebesar 0,03 km<sup>2</sup> atau 0,01 persen dari luas wilayah keseluruhan Kecamatan Gumay Talang.

Kecamatan Gumay Talang berbatasan langsung dengan 5 (lima) kecamatan lain. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kikim Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Gumay Ulu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lahat, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pseksu. Kecamatan Gumay Talang merupakan salah satu kecamatan dengan jarak terdekat ke pusat pemerintahan Kabupaten Lahat yang berada di Kecamatan Lahat.



EN LAHAT  
HUN 2022

**Gambar 4.28**  
**Peta Kecamatan Gumay Talang**

Luas lahan Kecamatan Gumay Talang dibagi menjadi luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah. Luas lahan sawah di Kecamatan Gumay Talang semuanya lahan sawah tadah hujan seluas 75 ha. Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Gumay Talang sebagian besar merupakan padang penggembalaan/ padang rumput sebesar 22 persen. Lahan untuk perkebunan sebagai mata pencaharian utama sebagian besar penduduk berkontribusi sebesar 18 persen. Sisanya terdiri dari tegal/ kebun 13 persen, ladang/huma 0 persen, hutan rakyat 14 persen, sementara tidak diusahakan 21 persen, hutan negara 12 persen dan sisanya digunakan untuk lainnya.

Padi ladang merupakan sektor tanaman pangan dengan rata-rata luas panen terbesar di Kecamatan Gumay Talang yaitu 450 ha dengan produksi sebesar 1.409,40 ton. Luas panen lahan padi sawah sangat yaitu 146 ha dengan produksi 680,58 ton. Sisanya jagung seluas 7 (tujuh) ha dengan produksi 44,69 ton, ubi kayu 20 ha dengan produksi 339 ton, dan ubi jalar 4 (empat) ha dengan produksi 25,34 ton. Sektor perkebunan mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi

di wilayah Kecamatan Gumay Talang. Komoditas perkebunan utama yaitu karet dengan luas tanam pada tahun 2016 seluas 1.679 ha (hektar) dengan produksi 1.605 ton. Komoditi karet merupakan komoditi perkebunan dengan luas tanam terbesar, hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kecamatan ini berusaha perkebunan karet. Menyusul di urutan kedua komoditi kopi dengan luas tanam dan produksi masing-masing sebesar 873 ha dan 246,90 ton. Sisanya mengusahakan kelapa sawit, kelapa, kakao, kemiri dan pinang. Topografi wilayah kecamatan ini yang ber-bukit-bukit mendukung masyarakat untuk berusaha di sektor perkebunan.

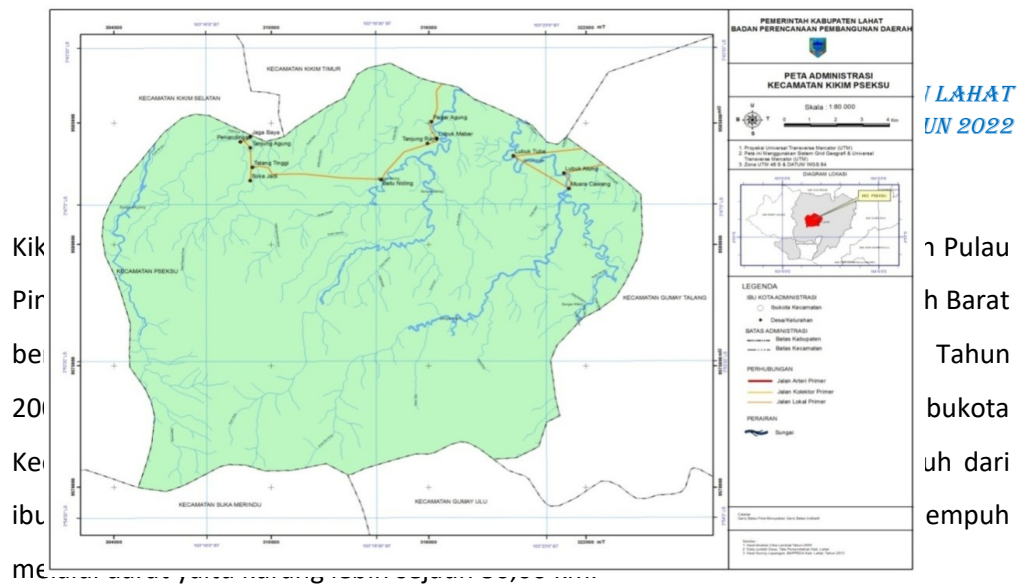
Di Kecamatan Gumay Talang tahun 2016, populasi ternak didominasi oleh ternak sapi sebanyak 42 persen atau berjumlah 801 ekor dari total ternak besar dan kecil. Populasi sapi terbanyak berada di Desa Sukamakmur. Ternak kambing juga jumlahnya relatif banyak yaitu 627 ekor. Selain ternak besar dan kecil, juga terdapat unggas berupa ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Di Kecamatan Gumay Talang tahun 2016, ternak unggas didominasi oleh ayam pedaging yaitu sebanyak 35.207 ekor. Ayam kampung berjumlah 2.825 ekor dan itik berjumlah 1.611 ekor.

Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gumay Talang, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Gumay Talang diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kelapa sawit.

#### **19) Kecamatan Pseksu**

Kecamatan Pseksu dengan wilayah seluas 267,53 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan



Kik  
Pir  
be  
20  
Ke  
ibu  
me

LAHAT  
UN 2022

an Pulau  
h Barat  
Tahun  
bukota  
uh dari  
empuh

Secara topografi permukaan daratan Kecamatan Pseksu adalah dataran dan berbukit, dimana rata-rata ketinggian tempat diatas permukaan laut adalah 103 sampai dengan 187 meter.

**Gambar 4.29**  
**Peta Kecamatan Pseksu**

Wilayah Kecamatan Pseksu juga rawan dengan bencana tanah longsor, hal ini disebabkan karena sebagian wilayahnya adalah berbukit. Kecamatan Pseksu sendiri merupakan daerah beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena memiliki iklim tropis sehingga di wilayah Kecamatan Pseksu sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet. Mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Pseksu bergerak disektor perkebunan khususnya tanaman karet, ada juga komoditi

perkebunan lain yang diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Pseksu diantaranya tanaman sawit, kopi dan kakao. Untuk kegiatan usaha pertanian, sebagian masyarakat ada juga yang menanam lebih dari satu komoditi pertanian (tumpang sari) dalam satu areal lahan.

Produksi tanaman perkebunan karet pada tahun 2016 mencapai 7.524 ton dengan luas tanam 4.076 ha. Kemudian disusul dengan tanaman perkebunan kopi dengan produksi 626,70 ton dengan luas panen 3.610 ha. Pada sektor peternakan di Kecamatan Pseksu didominasi oleh ternak kambing dan domba. Dari populasi ternak kecil yang ada, lebih didominasi oleh ternak kambing sebanyak 611 ekor sedangkan ternak domba sebanyak 70 ekor. Pada populasi unggas yang ada di Kecamatan Pseksu terdiri dari ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Adapun jumlah populasi ternak unggas terdiri dari ayam kampung sebanyak 3.606 ekor, ayam pedaging sebanyak 34.158 ekor dan populasi ternak itik sebanyak 1.617 ekor.

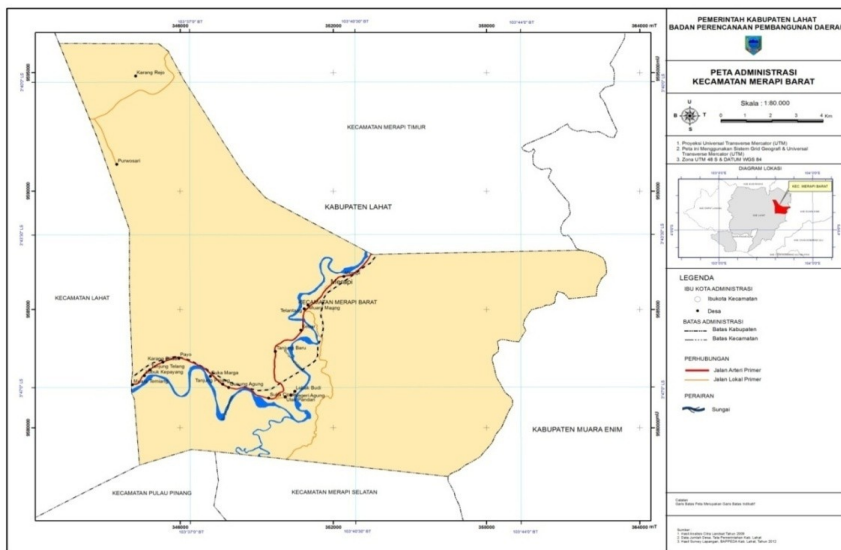
Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Pseksu diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, dan akses produksi menuju areal pertanian serta perkebunan.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kopi.

## **20) Kecamatan Merapi Barat**

Secara geografis Kecamatan Merapi Barat berada di wilayah timur Kabupaten Lahat. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lahat, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merapi Timur dan di sebelah sela-tan berbatasan dengan Kecamatan Merapi Selatan dan Pulau Pinang. Topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar

dengan bergelombang sampai ketinggian rata-rata sekitar 89,84 meter dari permukaan laut.



**Gambar 4.30**  
**Peta Kecamatan Merapi Barat**

Luas wilayah Kecamatan Merapi Barat 232,74 km<sup>2</sup>, secara administrasi, Kecamatan Merapi Barat dibagi dalam 19 wilayah desa dengan ibukota kecamatan berada di Desa Merapi. Desa Suka Marga memiliki luas desa terkecil atau kurang dari 1 (satu) persen dari total luas Kecamatan Merapi Barat se-besar 1,77 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,76 persen, sedangkan desa terluas yaitu Desa Merapi dengan luas wilayah 26,4 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,34 persen dari total wilayah Kecamatan Merapi Barat.

Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Merapi Barat. Tercatat pada tahun 2015 produksi padi sawah di Kecamatan Merapi Barat adalah sebanyak 1.369,57 ton. Selanjutnya produksi tanaman pertanian yang terdapat di masyarakat adalah padi ladang dengan hasil produksi sebesar 1.049,22 ton pada tahun 2015. Di Kecamatan Merapi Barat sub sektor tanaman perkebunan karet merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi karet mencapai 960 ton pada

tahun 2015. Selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah kopi dengan hasil produksi sebesar 71,20 ton pada tahun 2015.

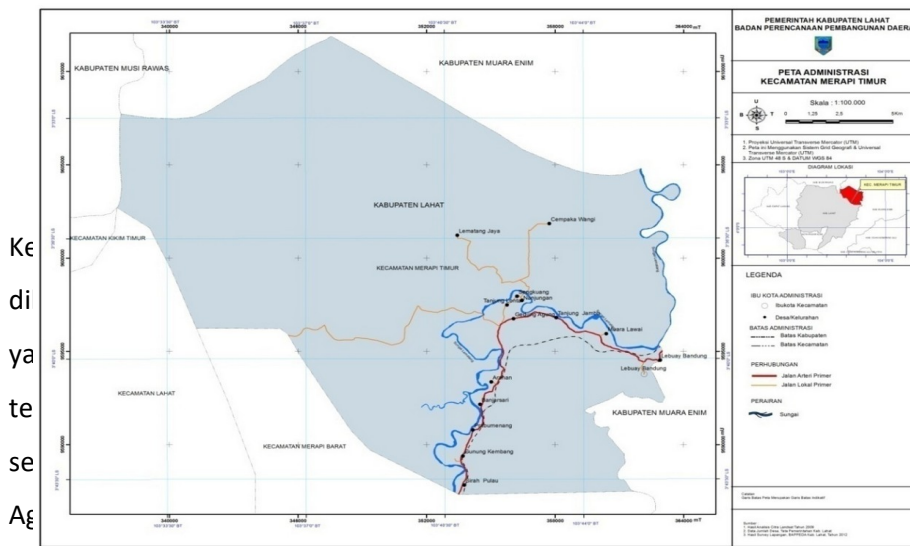
Pada sektor peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, itik, dan lain-lain. Jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jenis ayam pedaging mendominasi populasi unggas dengan jumlah 17.343 ekor. Grafik populasi ternak disamping menunjukkan bahwa populasi kambing, kerbau dan sapi potong memiliki jumlah yang cukup tinggi bila di-bandingkan dengan populasi ternak lain-nya. Jumlah ternak yang dipotong paling banyak yakni kambing sebanyak 1.239 ekor. Dari segi luas lahan bukan sawah di kecamatan ini sebagian besar merupakan lahan yang sementara tidak diusahakan yakni seluas 7.243 Ha dan diikuti lahan yang digunakan untuk penggembalaan/padang rumput.

Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Merapi Barat diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, dan kesehatan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kopi.

## **21) Kecamatan Merapi Timur**

Secara geografis Kecamatan Merapi Timur berbatasan langsung dengan Kota Administrasi lain. Di sebelah utara Kecamatan Merapi Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Merapi Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan di sebelah barat dengan Kecamatan Lahat. Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar dengan sedikit perbukitan. Luas wilayah



EN LAHAT  
HUN 2022

ipi Timur  
Bandung  
uas desa  
ipi Timur  
Gedung  
wilayah

Kecamatan Merapi Timur.

**Gambar 4.31**  
**Peta Kecamatan Merapi Timur**

Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Pada sub sektor tanaman pangan padi sawah merupakan sub sektor pertanian terbesar di Kecamatan Merapi Timur. Tercatat produksi padi sawah di Kecamatan Merapi Timur adalah sebanyak 2.553,18 ton. Selanjutnya produksi tanaman pertanian yang terdapat di masyarakat adalah padi ladang dengan hasil produksi sebesar 983,45 ton. Di Kecamatan Merapi Timur sub sektor tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan terbanyak. Tercatat produksi kelapa sawit mencapai 7.204 ton



selanjutnya produksi tanaman perkebunan yang cukup tinggi adalah karet dengan hasil produksi sebesar 3.595,28 ton.

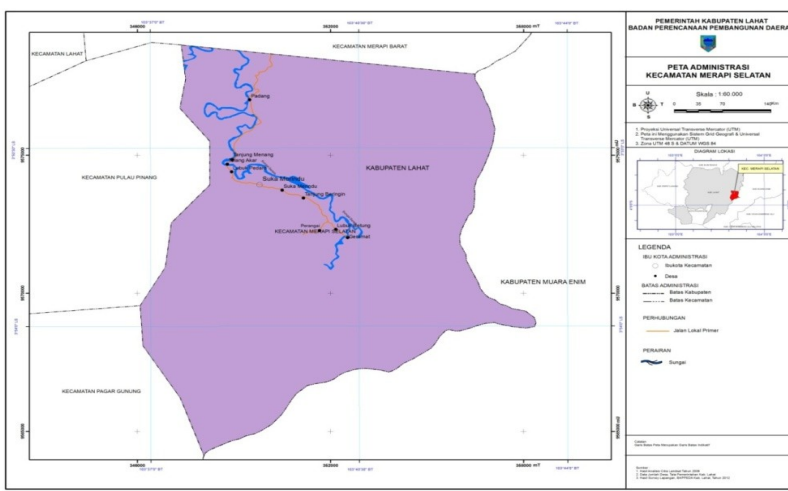
Pada sektor peternakan, jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jenis ayam pedaging mendominasi populasi unggas dengan jumlah 170.555 ekor. Grafik populasi ternak disamping menunjukkan bahwa populasi kambing, kerbau dan sapi potong memiliki jumlah yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan populasi ternak lainnya. Jumlah ternak yang dipotong paling banyak yakni kambing sebanyak 565 ekor.

Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Merapi Timur diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis tanaman karet, kakao dan kelapa sawit
- Pengembangan produktivitas pertanian terutama tanaman padi dan kedelai

## **22) Kecamatan Merapi Selatan**

Kecamatan Merapi Selatan merupakan kecamatan pecahan dari Kecamatan Merapi Barat yang mulai resmi berdiri pada tahun 2008 dan mempunyai wilayah seluas 200,04 km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Merapi Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Merapi Barat. Secara administratif, Kecamatan Merapi Selatan dibagi dalam 9 (Sembilan) desa yaitu Desa Padang, Desa Tanjung Menang, Desa Lubuk Pedaro, Desa Suka Merindu, Desa Tanjung Beringin, Desa Talang Akar, Desa Lubuk Betung, Desa Perangai dan Desa Geramat. Desa Padang merupakan desa



ersen dari luas wilayah Kecamatan segi.

**Gambar 4.32**  
**Peta Kecamatan Merapi Selatan**

Di bidang infrastruktur jalan, kondisi jalan di Kecamatan Merapi Selatan saat ini sudah cukup baik hampir semua jalan yang menuju ke desa – desa di kecamatan ini sudah diaspal. Di sektor komunikasi, seluruh desa di Kecamatan Merapi Selatan telah terjangkau oleh sinyal telepon seluler karena terdapat beberapa menara BTS/ Menara telepon seluler di Kecamatan Merapi Selatan. Sedangkan sektor pariwisata, Kecamatan Merapi Selatan memiliki banyak potensi wisata alam yang wajib untuk di kembangkan antara lain sekolah Gajah, Bukit Jempol/ Bukit Serele, Bukit Besak, dan tempat wisata –wisata lainnya yang memiliki panorama yang indah, dimana jika tempat – tempat ini serius untuk di kembangkan selain dapat menunjang pembangunan, juga akan dapat mengenalkan Kabupaten Lahat kepada daerah – daerah lain yang ada di Indonesia bahkan manca negara.

Pada bidang pertambangan dan energi. Di sektor pertambangan, seperti halnya di Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Selatan juga memiliki banyak terdapat kandungan batu – bara. Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara yang telah beroperasi di kecamatan ini. Di sektor kelistrikan, sebanyak 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Merapi Selatan sudah dialiri listrik PLN, dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.028 pelanggan. Di sektor industri terdapat 16 (enam belas) industri

makanan dan minuman yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Merapi Selatan. Sebagian besar penduduk Kecamatan Merapi Selatan bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Pada sub sektor pertanian tanaman pangan, jenis tanaman pangan yang ada di kecamatan ini adalah tanaman padi, baik berupa padi sawah maupun padi ladang serta kacang hijau. Luas panen padi sawah di kecamatan ini seluas 871 ha dengan produksi 43,8 ton. Sedangkan padi seluas 45 ha dengan produksi 31,3 ton. Pada sektor perkebunan, terdapat beberapa jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Merapi Selatan, antara lain karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi. Namun jenis tanaman yang dominan adalah tanaman karet seluas 991,20 ha.

Di sektor peternakan populasi hewan ternak terbanyak adalah ternak kambing dengan populasi 1.093 ekor, kerbau dengan populasi 780 ekor, sapi dengan populasi 364 ekor dan domba dengan populasi 109 ekor. Sedangkan ternak unggas yang ada adalah ayam pedaging sebanyak 64.712 ekor, ayam kampung 1.449 ekor dan itik 2.873 ekor. Di sektor perikanan sistem pemeliharaan ikan yang di kembangkan di kecamatan ini adalah dengan media perairan umum dengan media kolam dan sawah dengan luas areal kolam 3,6 ha. dan sawah 1,9 ha. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, itik, dan lain-lain. Jenis unggas yang ada di kecamatan ini ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Jenis ayam pedaging mendominasi populasi unggas dengan jumlah 68.653 ekor.

Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Merapi Selatan diarahkan pada:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman jenis karet dan kopi

- Pengembangan produktivitas pertanian terutama tanaman padi

### **23) Kecamatan Mulak Sebingkai**

Secara Geografis luas Kecamatan Mulak Sebingkai 38,854 (Km<sup>2</sup>) dengan jumlah Penduduk 5.797, Secara administrasi, Kecamatan Mulak Ulu dibagi dalam 10 wilayah desa.

Pembangunan bidang perekonomian Kecamatan Mulak Sebingkai yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Mulak Sebingkai diarahkan pada sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, fokus pembangunan di Kecamatan Mulak Sebingkai diarahkan pada :

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Perluasan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas pertanian (padi sawah), perkebunan (tanaman kopi) dan peternakan melalui peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit benih unggul, peningkatan distribusi pupuk.

### **24) Kecamatan Lahat Selatan**

Luas wilayah Kecamatan Lahat Selatan 183,87 Km<sup>2</sup>, ketinggian dari permukaan laut 25 – 500 m dengan jumlah penduduk 11.820 jiwa. Secara administrasi, Kecamatan Lahat Selatan dibagi dalam 10 wilayah desa dan Desa Tanjung Payang merupakan

ibukota kecamatan. Pembangunan di bidang perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan pada sektor industri dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Prioritas pembangunan di Kecamatan Lahat Selatan antara lain:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, akses produksi menuju areal pertanian dan perkebunan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah ada baik jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perdesaan lainnya
- Penanggulangan kemiskinan terutama pada desa tertinggal serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pemantapan jaringan irigasi Peningkatan produktivitas perkebunan terutama tanaman karet, kelapa, kopi dan lada.
- Peningkatan infrastruktur penunjang dan pengembangan pariwisata.

**BAB V  
RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, asumsi capaian pembangunan tahun berjalan dan rencana kerja pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Lahat tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Prioritas Daerah, 18 (delapan belas) Program Prioritas, dan 58 (Lima puluh delapan) Kegiatan Prioritas yang akan diturunkan dalam program nomenklatur dan kegiatan Perangkat Daerah.

**Tabel 5.1  
Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas  
RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022**

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
	mendukung percepatan penurunan kemiskinan;		Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota  Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota  Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Daerah Kabupaten/Kota
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				Kompetensi  Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota  Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  Penyediaan Layanan



*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				<p>Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota</p>
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		<p>Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/Kota</p>
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		<p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		<p>Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		<p>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan Dan</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				Pengembangan Lembaga Layanan Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENDUDUK	PENGENDALIAN	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/ Petugas Lapangan Kb (Pkb/Plkb)</p> <p>Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat &amp; Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan &amp; Pembinaan Kesertaan Ber-Kb</p>
		PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	PEMBINAAN	<p>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<p>Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p>
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
PD.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<p>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembudayaan gemar Membaca tingkat Daerah Kab/Kota</p>
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<p>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelamatan Arsip</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung dan/atau Pemekaran Daerah dan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
		PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		<p>Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Dengan Sungai Dalam Di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN		Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kab/Kota  Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaat Ruang Daerah Kabupaten/Kota
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota  Pendistribusian Dan Serah Terimah Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan  Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Geding ( Skgb)
			PROGRAM KAWASAN		Penerbitan Izin

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
		PERMUKIMAN	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman  Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10(Sepuluh) Ha  Peningkatan Kawasan Pemukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepulu) Ha
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten /Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS ( PSU )	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabuapten/Kota
		PROGRAM PENEYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH/KOTA	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Rpllh ) Kabupaten / Kota  Penyelengara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU	Pencegahan Dan Pencemaran Dan / Atau

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</p> <p>Penanggulangan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</p> <p>Pemulihan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</p>
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<p>Pengelolaan Sampah</p> <p>Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta</p> <p>Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta</p>
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<p>Penetapan Rencana Induk Jaringan Llj Kabupaten / Kota</p> <p>Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu-Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota</p> <p>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten/ kota	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam	



*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				daerah kabupaten/ kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota
		POGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Lahat/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		<p>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p>
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		<p>Penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</p> <p>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p>
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		<p>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</p>
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		<p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten / Kota</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
	berkelanjutan;				
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif / Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten / Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar  Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/ kota

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<p>Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<p>Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Pembangunan Prasarana Pertanian</p>
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<p>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten / kota

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
				Penerbitan izin usaha Produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pelaksanaan penyuluhan pertanian
PD.2	Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan Dalam Kabupaten / Kota
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pengembangan Prasarana Pertanian  Pembangunan Prasarana Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
			<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<p>Penanganan Gangguan Keten- Teraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kabupaten/Kota</p>
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<p>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>Inspeksi Peralatan Dan Proteksi Kebakaran</p> <p>Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</p>
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
		PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan  Penyelenggaraan Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Menyusun	Profil Kependudukan
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;		PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan	Penataan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama	Antar Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan  Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah  Fasilitasi Kerjasama Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  Administrasi Pembangunan  <del>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</del>  Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	



*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
			<p>Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</p> <p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik</p> <p>Pembahasan Kerja Sama Daerah</p> <p>Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD</p>
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMLUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<p>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi</p> <p>Mutasi dan Promosi ASN</p>

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)		
	korupsi;			Pengembangan Kompetensi ASN  Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Pengembangan Kompetensi Teknis  Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  Pengembangan Inovasi dan Teknologi
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  <del>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi</del> dan Pelaporan Keuangan Daerah  Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Pengelolaan Barang Milik Daerah
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
	didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal  Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan  Pendampingan dan Asistensi
PD.3	Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PD.4	Peningkatan Ketahanan	PROGRAM PENANGANAN	Perlindungan Sosial

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022
(1)		(2)	
	Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.	BENCANA	Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGGULANAGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana  Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana  Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Derah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan  Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka kecukupan Gizi
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN DAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan  Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan

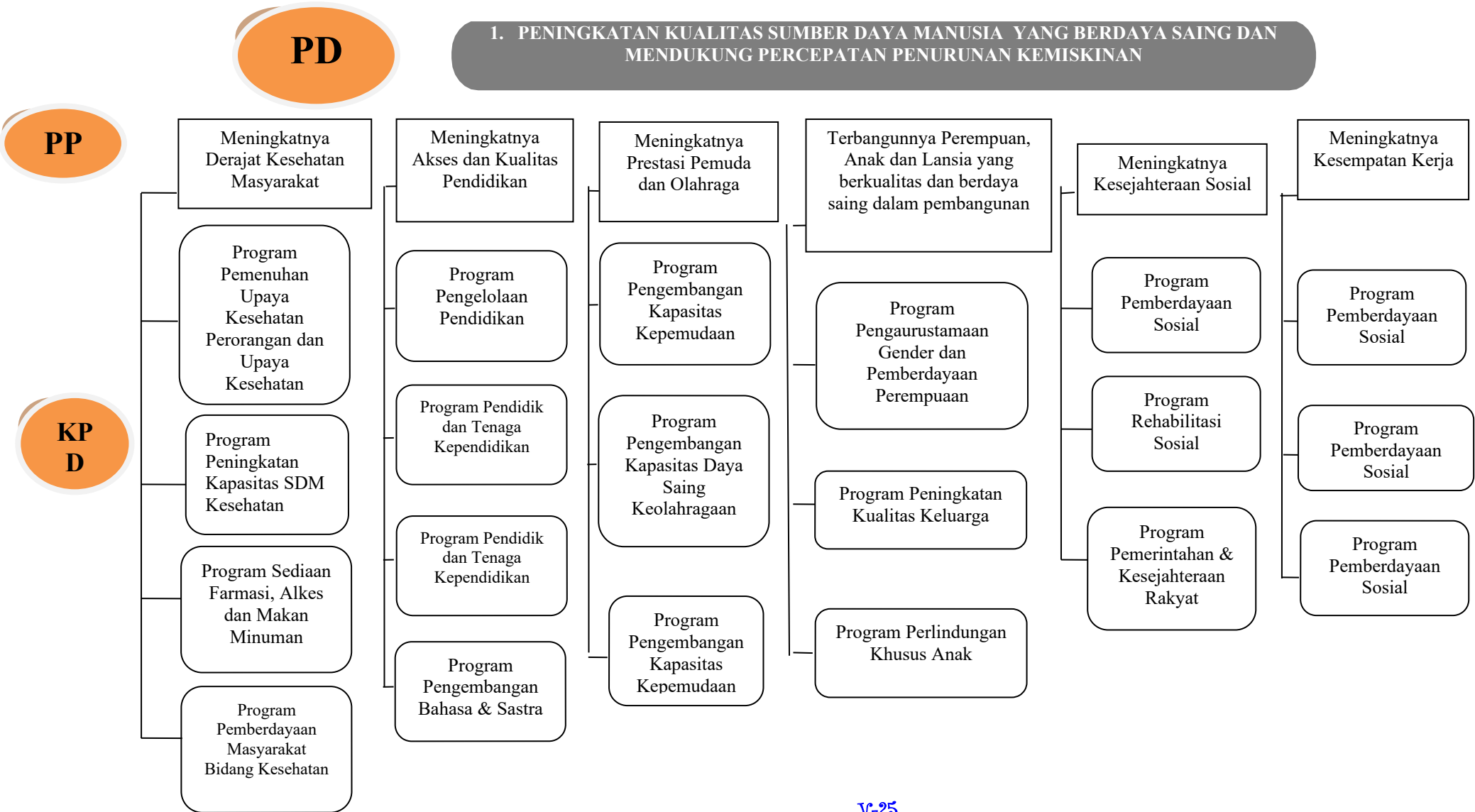
*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022		Program Prioritas RKPD Tahun 2022		Kegiatan Prioritas Rkpd Tahun 2022	
(1)		(2)			
					Kabupaten/Kota

---

PRIORITAS DAERAH 1

1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN



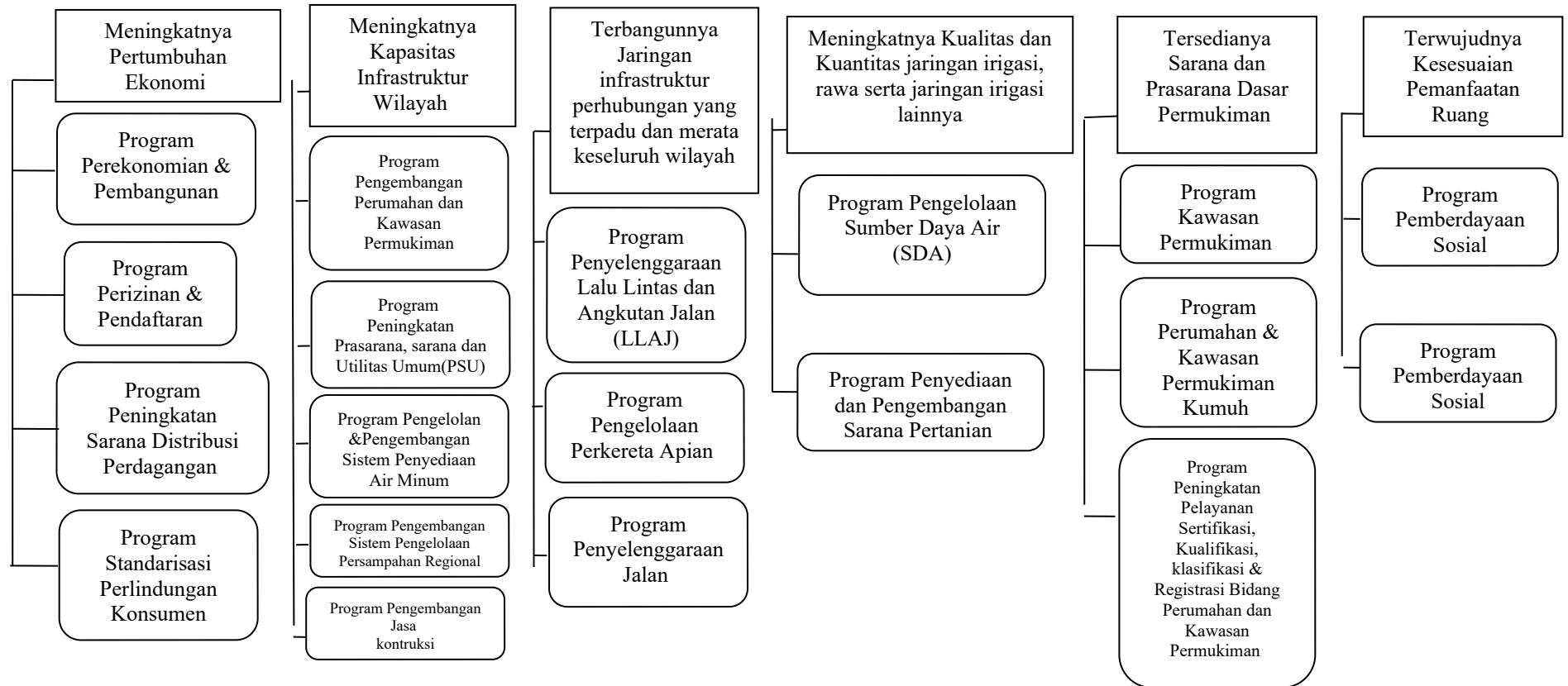
PRIORITAS DAERAH 2

2. PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG PERBAIKAN INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, LINGKUNGAN HIDUP SERTA STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

PD

PP  
D

KP  
D



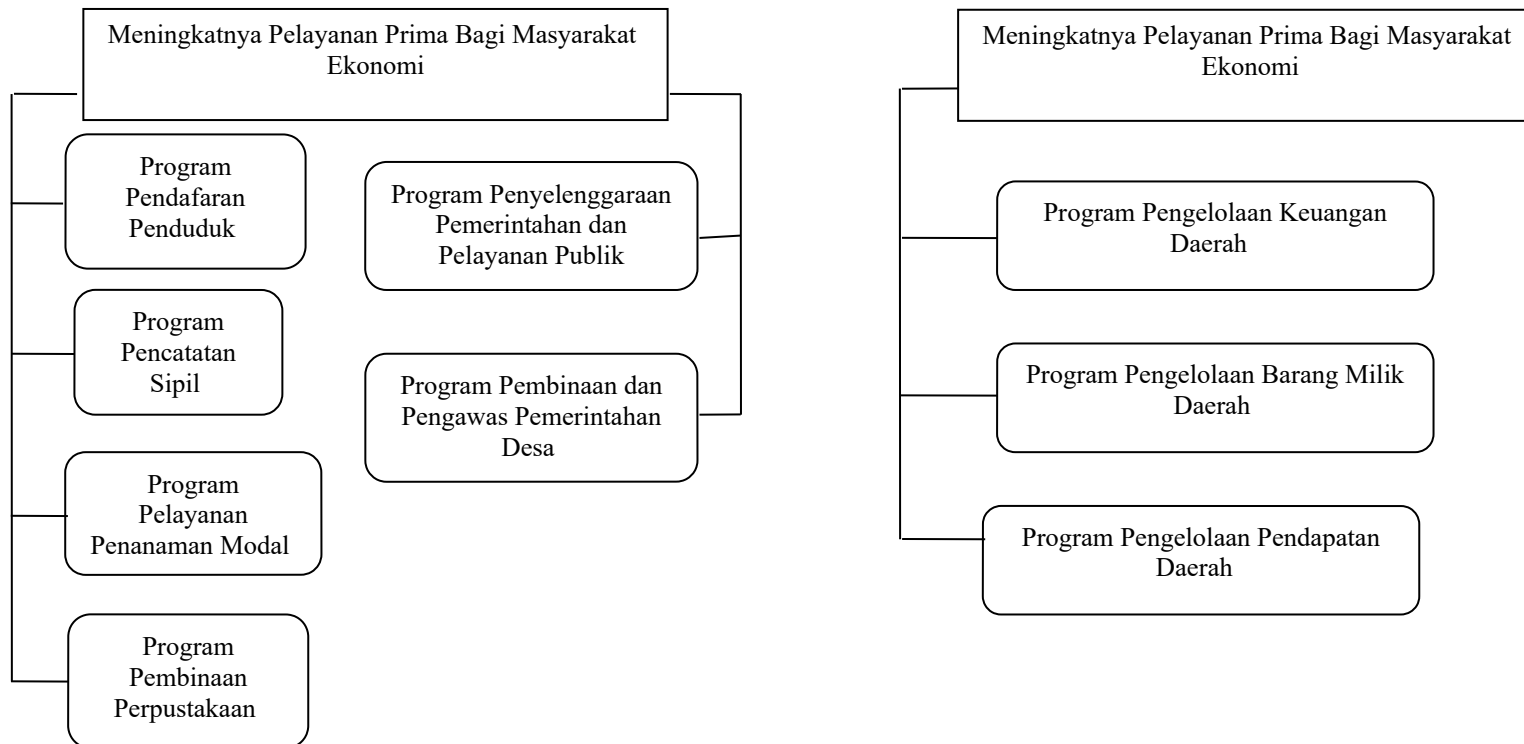
PRIORITAS DAERAH 3

3. REVOLUSI MENTAL DALAM PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG BIROKRASI EFEKTIF DAN Penguatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI

PD

PP  
D

KP  
D





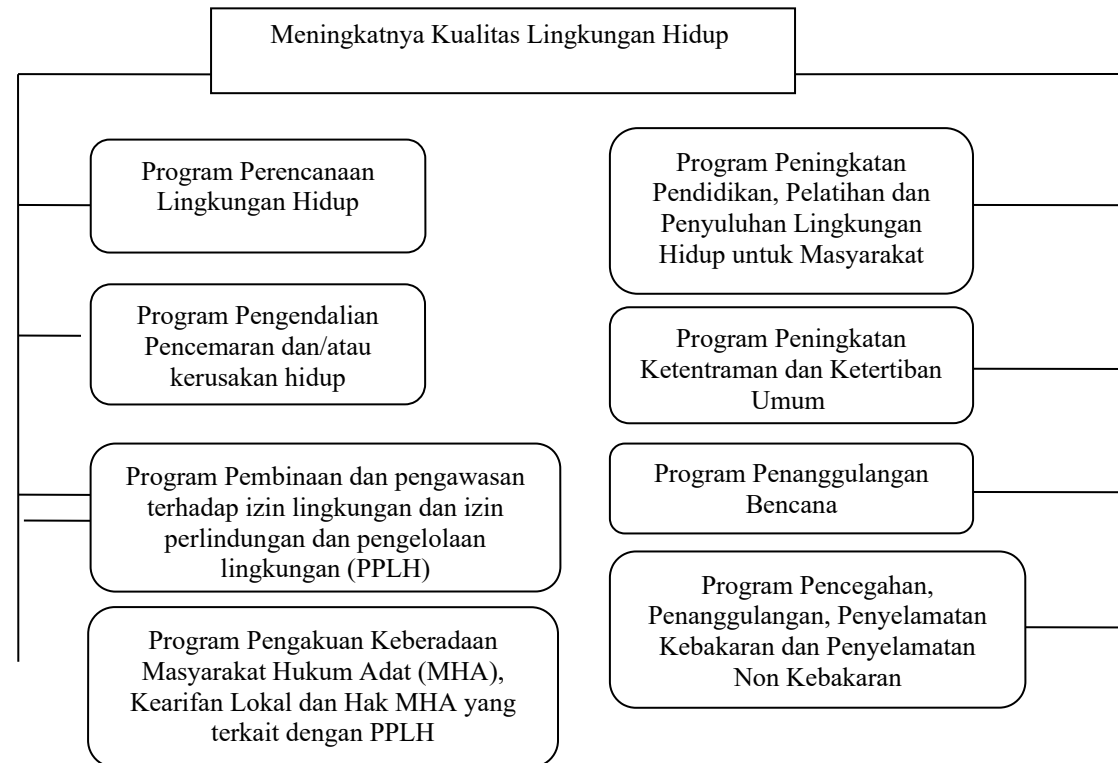
PRIORITAS DAERAH 4

PD

PP  
D

KP  
D

4. PENINGKATAN KETAHANAN DAERAH DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA, TERMASUK POTENSI DAERAH RAWAN BENCANA, WABAH DAN BENCANA LAINNYA



## **5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif, sumber dana, catatan penting serta perkiraan maju dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.

TABEL. 5.3

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2022 (RP)	PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 (RP)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	01				PENDIDIKAN			
1	01	01			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Rp 502.448.573.812	Rp 552.693.431.193
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Belanja Pegawai			
					- Gaji dan Tunjangan		Rp 365.069.673.242	Rp 394.994.083.211
					- Tambahan Penghasilan PNS			
5	2				BELANJA LANGSUNG		Rp 137.378.900.570	Rp 157.699.347.982
1	02				KESEHATAN			
1	02	01			DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rp 318.993.597.141	Rp 341.286.441.623
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG			
					Belanja Pegawai			
					Gaji dan Tunjangan		Rp 88.082.571.044	Rp 95.129.176.728
					Tambahan Penghasilan PNS :			
5	2				BELANJA LANGSUNG		Rp 230.911.026.097	Rp 246.157.264.895
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01			DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	Dinas PU & Penataan Ruang	Rp 141.959.686.216	Rp 156.155.654.383
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG			
					Belanja Pegawai			
					- Gaji dan Tunjangan		Rp 5.877.830.542	Rp 7.271.817.035
					- Tambahan Penghasilan PNS			
5	2				BELANJA LANGSUNG		Rp 136.081.855.674	Rp 148.883.837.348

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

1	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
1	04	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dinas PRKP & Pertanahan	Rp	43.658.892.190	Rp 50.638.821.879
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				
				Belanja Pegawai				
				- Gaji dan Tunjangan		Rp	3.613.752.594	Rp 4.154.618.323
				- Tambahan Penghasilan PNS				
5	2			BELANJA LANGSUNG		Rp	40.045.139.596	Rp 46.484.203.556
1	05			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	05	01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sat. Pol. PP dan Damkar	Rp	8.932.566.964	Rp 10.203.947.635
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				
				Belanja Pegawai				
				- Gaji dan Tunjangan		Rp	4.607.957.944	Rp 5.299.151.635
				- Tambahan Penghasilan PNS				
5	2			BELANJA LANGSUNG		Rp	4.324.609.020	Rp 4.904.796.000
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	19	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbang & Pol		6.576.305.682	Rp 7.154.762.947
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				
				Belanja Pegawai				
				- Gaji dan Tunjangan			2.589.253.056	Rp 2.486.421.321
				- Tambahan Penghasilan PNS				
5	2			BELANJA LANGSUNG		Rp	3.987.052.626	Rp 4.668.341.626
1	06			SOSIAL				
1	06	1		DINAS SOSIAL	Dinas Sosial	Rp	6.654.230.172	Rp 5.673.671.531
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				
				Belanja Pegawai				
				- Gaji dan Tunjangan		Rp	3.189.804.429	3.189.804.429
				- Tambahan Penghasilan PNS				
5	2			BELANJA LANGSUNG		Rp	3.464.425.743	Rp 2.483.867.102















**BAB VI  
KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Indikator Pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2020**

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	B Indeks (60,25)	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Baik Indeks (86,50)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Seluruh OPD
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	WTP Opini	Opini BPK atas laporan keuangan	WDP/WTP	Badan Keuangan Daerah; Inspektorat
		B Skor (68,5)	Nilai SAKIP	AA (Memuaskan), dengan Skor 85 – 100, sedangkan A (Sangat Baik) Skornya 75 -85, B (Baik) dengan Skor 75-65, CC (Cukup Baik) dengan Skor 50 – 65, C (Agak Kurang) dengan Skor 30 – 50, dan Nilai D (Kurang) dengan Skor 0 – 30	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab																	
4	Mengurangi ketimpangan antarwilayah	0,30	Indeks	Indeks Aksesibilitas	$Q_i = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^n A_j \cdot F(i,j)}$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Keterangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F (ij)</td> <td>: Faktor gesekan waktu perjalanan dari zona i ke zona j</td> </tr> <tr> <td>T (ij)</td> <td>: Distribusi dari zona i ke j</td> </tr> <tr> <td>Pi</td> <td>: Total produksi dari zona i</td> </tr> <tr> <td>Aj</td> <td>: Total Tarikan ke zona j</td> </tr> <tr> <td>Qi</td> <td>: Indeks aksesibilitas zona i ke semua zona lainnya (dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi)</td> </tr> <tr> <td>Aj</td> <td>: Tarikan ke zona j (Tujuan) dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>: Total jumlah zona</td> </tr> </table>	Keterangan		F (ij)	: Faktor gesekan waktu perjalanan dari zona i ke zona j	T (ij)	: Distribusi dari zona i ke j	Pi	: Total produksi dari zona i	Aj	: Total Tarikan ke zona j	Qi	: Indeks aksesibilitas zona i ke semua zona lainnya (dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi)	Aj	: Tarikan ke zona j (Tujuan) dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi	n	: Total jumlah zona	Dinas Perhubungan
Keterangan																						
F (ij)	: Faktor gesekan waktu perjalanan dari zona i ke zona j																					
T (ij)	: Distribusi dari zona i ke j																					
Pi	: Total produksi dari zona i																					
Aj	: Total Tarikan ke zona j																					
Qi	: Indeks aksesibilitas zona i ke semua zona lainnya (dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi)																					
Aj	: Tarikan ke zona j (Tujuan) dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi																					
n	: Total jumlah zona																					
5	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	65,90	Persen	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{(\text{Panjang Jalan Kondisi Baik} + \text{Panjang Jalan Kondisi Sedang})}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100 \%$	Dinas PU dan Penataan Ruang																
6	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	2	terminal	Jumlah terminal yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	Banyaknya Terminal yang Memiliki Sarana dan Fasilitas yang Memadai	Dinas Perhubungan																
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	61	Rasio	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Kondisi Daerah Irigasi Baik}}{\text{Total Luas Daerah Irigasi}} \times 100 \%$	Dinas PU dan Penataan Ruang																

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab																					
8	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	85,01	Persen	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kerja}}{\text{Jumlah Rumah di Suatu Wilayah Kerja}} \times 100 \%$	Dinas PRKPP																				
9	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	92	Persen	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan Izin yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan}}{\text{Total Izin yang Diajukan}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	62,22	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p style="text-align: center;"><i>IKLH Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Keterangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKLH Kabupaten</td> <td>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten</td> </tr> <tr> <td>IKA</td> <td>: Indeks Kualitas Air</td> </tr> <tr> <td>IKU</td> <td>: Indeks Kualitas Udara</td> </tr> <tr> <td>IKTL</td> <td>: Indeks Kualitas Tutupan Lahan</td> </tr> </table>	Keterangan		IKLH Kabupaten	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	IKA	: Indeks Kualitas Air	IKU	: Indeks Kualitas Udara	IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup										
Keterangan																										
IKLH Kabupaten	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten																									
IKA	: Indeks Kualitas Air																									
IKU	: Indeks Kualitas Udara																									
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan																									
11	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya	68,26	Indeks	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p><math>IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]</math> Dimana:</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(I))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 <sup>a)</sup></td> <td>300.000 <sup>b)</sup></td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	Dinas P dan K, Dinas Kesehatan
Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																							
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																							
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																							
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																							
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																							

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	66,20 Tahun	Umur Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.	Dinas Kesehatan
13	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	12,49 Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK_x \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:  <math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yg bersekolah pd tahun t  <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia I pada tahun t  <i>i</i> = Usia (a, a+1,.....,n)  <i>FK</i> = Faktor koreksi</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9,18 Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara angka partisipasi sekolah , jenjang	Dinas

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab
				<p>pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P15+} Lama \ Sekolah \ Penduduk \ ke-i$ <p>Dimana:                      P15+ = Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas                      Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1</li> <li>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir.</li> <li>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1</li> </ol>	Pendidikan dan Kebudayaan
14	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	100 Orang	Jumlah Atlet Berprestasi	Banyaknya Atlet yang Berprestasi (Orang)	Dinas Pemuda dan Olahraga



No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab													
15	Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan	95,50	Indeks	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 (Xede (1) + Xede (2) + linc-dis)$ <table border="1"> <tr> <td>Keterangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Xede(1)</td> <td>: Xede untuk Harapan Hidup</td> </tr> <tr> <td>Xede(2)</td> <td>: Xede untuk Harapan Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>linc-dis</td> <td>: Indeks Distribusi Pendapatan Variabel</td> </tr> </table>	Keterangan		Xede(1)	: Xede untuk Harapan Hidup	Xede(2)	: Xede untuk Harapan Pendidikan	linc-dis	: Indeks Distribusi Pendapatan Variabel	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Keterangan																
Xede(1)	: Xede untuk Harapan Hidup																	
Xede(2)	: Xede untuk Harapan Pendidikan																	
linc-dis	: Indeks Distribusi Pendapatan Variabel																	
67,06	Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$ <p>                     IDG : Indeks Pemberdayaan Gender                      I<sub>(par)</sub> : Indeks keterwakilan di parlemen                      I<sub>(DM)</sub> : Indeks Pengambilan Keputusan                      I<sub>(inc-dis)</sub> : Indeks Distribusi Pendapatan                 </p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
16	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	13,21	Persen	Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <table border="1"> <tr> <td>Keterangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>α</td> <td>= 0</td> </tr> <tr> <td>z</td> <td>: garis kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>y<sub>i</sub></td> <td>: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y<sub>i</sub> &lt; z</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>: Banyaknya Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan.</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>: Jumlah Penduduk.</td> </tr> </table>	Keterangan		α	= 0	z	: garis kemiskinan	y <sub>i</sub>	: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y <sub>i</sub> < z	q	: Banyaknya Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan.	n	: Jumlah Penduduk.	Dinas Sosial
Keterangan																		
α	= 0																	
z	: garis kemiskinan																	
y <sub>i</sub>	: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y <sub>i</sub> < z																	
q	: Banyaknya Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan.																	
n	: Jumlah Penduduk.																	

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	4,24 Persen	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1,t) = \frac{(PDBt - PDBt-1)}{PDBt-1} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>R : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)</p> <p>PDBt : Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t</p> <p>PDBt-1 : Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya</p>	Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
18	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	51,74 Persen	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Ditangani} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh PMKS}}$	Dinas Sosial
19	Meningkatnya Kesempatan Kerja	73,50 Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 Tahun)}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3,15 Persen	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia	2.200,00 Rp. Miliar	Jumlah Zakat Berkumpul di BAZ	<b>Banyaknya Zakat yang telah Berkumpul di BAZ</b>	<b>Data BAZ; Laporan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
21	Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	80,00 Persen	Persentase Masyarakat Bebas Buta aksara Alqura'an	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bisa Baca Alqur'an}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Skenario 2020	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Rumusan)	Penanggung Jawab
22	Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah	5,78 Persen	Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ada}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Tabel 6.2**  
**Sasaran dan Indikator Program Prioritas RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022**

<b>Prioritas Daerah Ke-1 :</b> <b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mendukung percepatan penurunan kemiskinan;</b>
<b>Indikator PD-1 :</b> Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 69,42 Menurunnya Angka Kemiskinan menjadi 11,05%

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
1.1	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	66,90 tahun	1.1.1	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	- Persentase penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui program JKN KIS	50%	Dinas Kesehatan, RSUD
				1,1.2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Persentase penduduk yang memanfaatkan PUSKESMAS	80,05%	Dinas Kesehatan
						- Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan bagi	48,76%	Dinas Kesehatan

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT  
(RKPD) TAHUN 2022*

Program Prioritas RKPD 2022	Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab	
					penduduk miskin		
					- Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan lansia	82,75%	Dinas Kesehatan
			1.1.3	Peningkatan Kesehatan ibu dan anak	- Penurunan AKI	59,50	Dinas Kesehatan
					- Penurunan AKB	14	Dinas Kesehatan
					Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan anak balita	82,01%	Dinas Kesehatan
			1.1.4	Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase Rumah Tangga ber PHBS	75 %	Dinas Kesehatan
					Persentase keluarga yang mengakses sanitasi dasar	80%	Dinas Kesehatan
			1.1.5	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	- Persentase Jumlah PKM yang melaksanakan	85%	Dinas Kesehatan

Program Prioritas RKPD 2022	Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
			Penyakit	program PTM		
				- Angka Kesakitan DBD per 100 penduduk	85	Dinas Kesehatan
			1.1.6 Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	- Persentase ketersediaan obat dan perbekalan sesuai kebutuhan	75%	Dinas Kesehatan
				- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina	82,75%	Dinas Kesehatan
			1.1.7 Peningkatan kualitas Pelayanan,advoka si dan Kie keluarga berencana	- Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun	73,68%	Dinas Dalduk KB
				- Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5,01%	Dinas Dalduk KB
				- Cakupan anggota BKB yg ber-KB (%)	81,04%	Dinas Dalduk KB

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
1.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,60 tahun	1.2.1	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						- Rasio Murid dan Guru SD Rasio Murid dan Guru SMP	01:12 01:13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.2.2	Peningkatan akses pemerataan layanan pendidikan	- APK PAUD - APM PAUD	78,59% 68,04%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						- APK SD - APM SD - APK SMP APM SMP	100% 99,06% 100% 84,42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,35 tahun	1.2.3	Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Angka Melek Huruf	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	108 orang	1.3.1	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	47%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.3.2	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat	Kabupaten 36, Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
						Kabupaten, provinsi dan Nasional	23, Nasional 3	
1.4	Pembangunan Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,43	1.4.1	Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan dan anak	- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68			- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						- Kabupaten Lahat menuju Kota Layak Anak (KLA)	Utama	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						- Persentase Penurunan Kasus Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	7,20%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.5	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang	56,81%	1.5.1	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan	- Persentase KSM skala yang memperoleh	56,81%	Dinas Sosial



Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
		Masalah Kesejahteraan Sosial			Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
						- Persentase jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	56,81%	Dinas Sosial
						- Persentase eks. Penyandang Penyakit sosial yang tertangani	83%	Dinas Sosial
						- Jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial	9 Lembaga	Dinas Sosial
						- Persentase anak terlantar yang dilatih keterampilan	40%	Dinas Sosial
						- Persentase Lembaga	89%	Dinas Sosial

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
						Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial		

Prioritas Daerah Ke-2 :

**Percepatan Pemulihan Ekonomi yang didukung perbaikan infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berkelanjutan;**

**Indikator PD-2 :**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi 4,41%**  
**Indeks Aksesibilitas menjadi 0,32**

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
2.1	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,49%	2.1.1	Pembangunan Infrastruktur Jalan	-	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-	Persentase Jalan dalam Kondisi sedang	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2.1.2	Pembangunan sistem informasi /date base jalan dan jembatan	-	Persentase Dokumen Database jalan, jembatan dan Irigasi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2.1.3	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	-	% Sarana dan Prasarana kebinamargaan kondisi baik	57%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2	Penyediaan Sarana dan	Cakupan Ketersediaan	85,46%	2.2.1	Pengembangan Kinerja	-	Persentase rumah tinggal	84,09%	Dinas PRKPP

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
	Prasarana Dasar Permukiman	Rumah Layak Huni			Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		dan berakses air minum		
						-	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	14,20%	Dinas PRKPP
						-	Persentase SPAL dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	42,78%	Dinas PRKPP
2.3	Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	92%	2.3.1	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase ketaatan terhadap RTRW	97%	Dinas PU dan PR
2.4	Pembangunan Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke seluruh wilayah	Jumlah Terminal yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	2 terminal	2.4.1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan	0,58	Dinas Perhubungan
						-	Persentase jumlah rambu yang di	0%	Dinas Perhubungan

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
						pelihara		
						- Persentase Layanan Angkutan Darat	4,73%	Dinas Perhubungan
						- Persentase Kepemilikan Angkutan Umum	70,47%	Dinas Perhubungan
2.5	Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	195 milyar	2.5.1	Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	18 Investor	Dinas Perizinan dan PTSP
				2.5.2	Pengelolaan Industri Kecil Melalui Pendataan, Pembinaan dan Pelatihan	- Jumlah izin yang diberikan	6.200 izin	Dinas Perizinan dan PTSP
				2.5.3	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- Persentase Usaha Koperasi dan UKM yang tumbuh, berkembang dan berdaya	1,60%	Dinas Koperasi dan UKM

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
							saing		
						-	Persentase Koperasi dan UKM yang Unggul memiliki kompetensi	1,55%	Dinas Koperasi dan UKM
				2.5.4	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	66,45%	Dinas Koperasi dan UKM
				2.5.5	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	Persentase Penguatan Permodalan bagi Koperasi bagi Koperasi dan UKM	1,87%	Dinas Koperasi dan UKM
						-	Persentase Pengembangan jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan UKM	1,87%	Dinas Koperasi dan UKM
						-	Persentase UMK yang	8.68%	Dinas Koperasi dan UKM

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
							memiliki Izin IUMK		
				2.5.6	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	Persentase Koperasi Aktif	33,05%	Dinas Koperasi dan UKM
						-	Persentase Koperasi berkembang	26,14%	Dinas Koperasi dan UKM
						-	Persentase Koperasi Sehat dan Berprestasi	25,8%	Dinas Koperasi dan UKM
				2.5.7	peningkatan kemampuan teknologi industri	-	Cakupan bina kelompok pedagang/usa ha informal	51,60%	Dinas Perdagangan
				2.5.8	peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Jumlah pasar yang selesai dikembangkan	107 Unit	Dinas Perdagangan
		Jumlah Kunjungan Para Wisatawan	61.000 org	2.5.9	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	Wisnus	60.850	Dinas Pariwisata

Program Prioritas RKPD 2022	Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
				- Wisman	150	Dinas Pariwisata

**Prioritas Daerah Ke-3 :**  
**Revolusi mental dalam pembangunan yang didukung birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;**



<b>Indikator PD-3 :</b>							
<b>Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi B (69,25)</b>							

Program Prioritas RKPD 2020		Indikator Program Prioritas RKPD 2020	Target PP RKPD 2020	Kegiatan Prioritas RKPD 2020		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2020	Target KP Tahun 2020	PD Penanggung Jawab
3.1	Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,70)	3.1.1	Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,70)	Seluruh OPD
				3.1.2	pelayanan administrasi kependudukan	Prosentase penerbitan kartu tanda penduduk (KTP/e-KTP)	89%	Dinas Dukcapil
						Prosentase penerbitan kartu keluarga (KK)	58%	
						Prosentase penerbitan akta kelahiran	50%	
						Prosentase penerbitan akta kematian	68%	
				3.1.3	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	48000 orang	Dinas Perpustakaan
				3.1.4	Penguatan kapasitas penanganan	Berkurangnya Jumlah Konflik sosial di masyarakat	2 kasus	Badan Kesbangpol

Program Prioritas RKPD 2020		Indikator Program Prioritas RKPD 2020	Target PP RKPD 2020	Kegiatan Prioritas RKPD 2020		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2020	Target KP Tahun 2020	PD Penanggung Jawab
					gangguan K3 dan konflik sosial			
						Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan	38%	Satpol PP dan Damkar
				3.1.5	infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) serta kompetensi SDM bidang TIK	Penerima informasi pembangunan daerah	24 kecamatan	Dinas Kominfo

**Prioritas Daerah Ke-4 :**

**Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana, termasuk potensi daerah rawan bencana, wabah dan bencana lainnya.**

**Indikator PD-4 :  
Tanggap darurat penanggulangan bencana (1 jam)**

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
4.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,29	4.1.1	pengendalian kualitas lingkungan hidup	-	Indeks Kualitas Air		Dinas Lingkungan Hidup
						-	Indeks Kualitas Udara		
						-	Indeks Tutupan Lahan		
				4.1.2	Tanggap darurat penanggulangan bencana		Rata - rata waktu tanggap darurat setelah laporan kejadian bencana	1 Jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				4.1.3	Pencegahan dini dan		Jumlah Korban Bencana yang	60 KK	Dinas Sosial

Program Prioritas RKPD 2022		Indikator Program Prioritas RKPD 2022	Target PP RKPD 2022	Kegiatan Prioritas RKPD 2022		Indikator Kegiatan Prioritas RKPD 2022	Target KP Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
					penanggulangan bencana	menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, RKPD Kabupaten Lahat juga berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakannya langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat, APBD Provinsi Sumatera Selatan maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Lahat.

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lahat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2022 sangat ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Kabupaten Lahat harus terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Dengan langkah bersama, kita yakin bahwa semua tantangan akan dapat diatasi dan semua peluang dapat kita manfaatkan secara optimal sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat (RKPD) Tahun 2022 ini dapat mendukung terwujudnya pencapaian visi RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 yaitu "*Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan*".

**BUPATI LAHAT,**

  
**CIK UJANG, SH**